



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemertaan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan saya saing Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangka Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renja-Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SITUBONDO

ttd
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

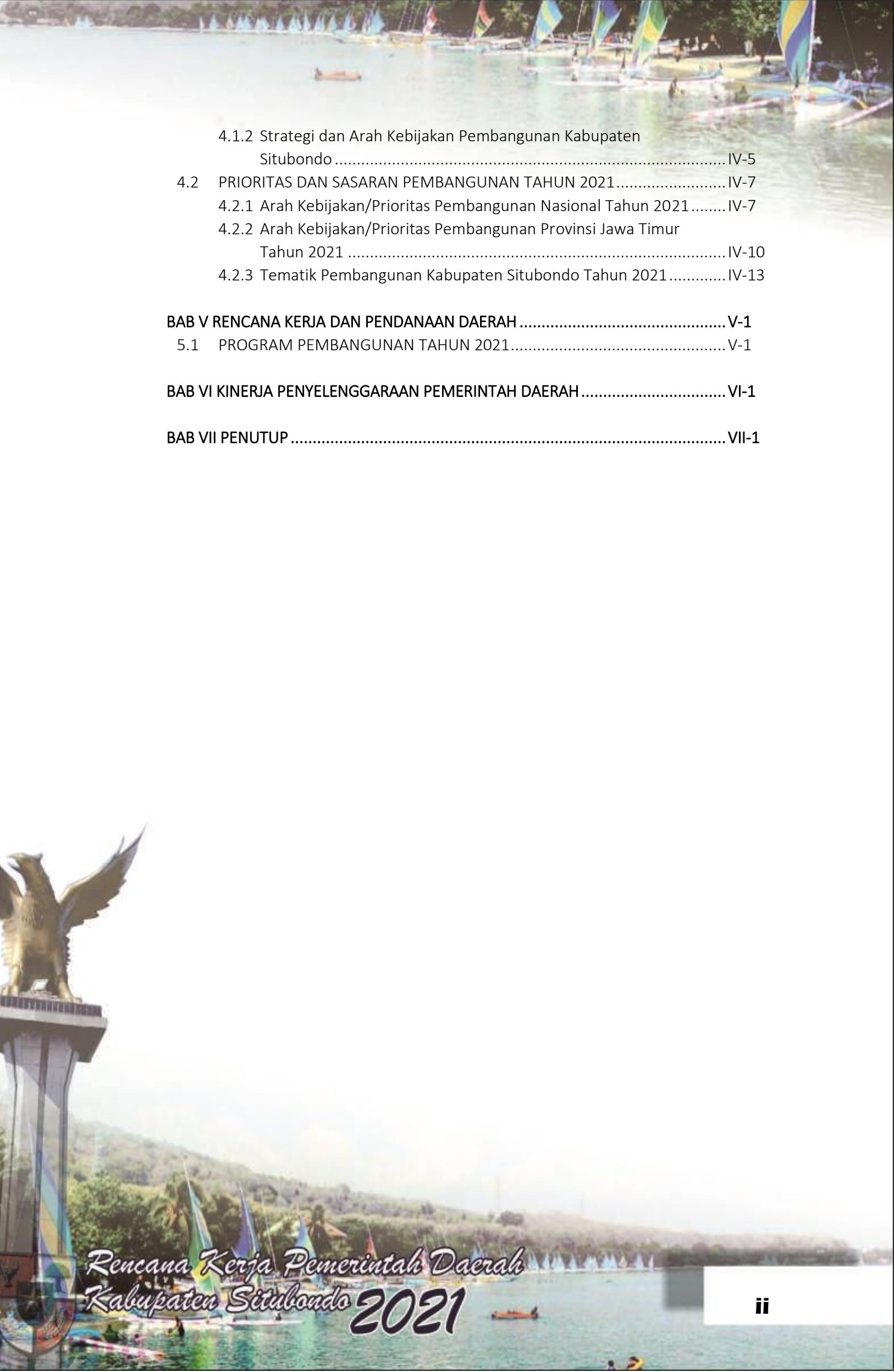
SYAIFULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 37

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-29
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-76
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD.....	II-80
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-80
2.2.2 Gap Expectations Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-84
2.2.3 Evaluasi Indikator Kerja Daerah (IKD)	II-85
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-90
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-90
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-95
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Struktur Ekonomi Makro	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro	III-9
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-10
3.2.1 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-27
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-30
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SEITUBONDO	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1



4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo	IV-5
4.2 PRIORITY DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	IV-7
4.2.1 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-7
4.2.2 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	IV-10
4.2.3 Tematik Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021	IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2021.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo.....</i>	II-2
<i>Tabel 2.2 : Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata - Rata Hujan dan Hujan Maksimum Bulanan, 2019</i>	II-4
<i>Tabel 2.3 : Produksi dan Produktivitas Tanaman PanganTahun 2015-2019.....</i>	II-5
<i>Tabel 2.4 : Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2019</i>	II-6
<i>Tabel 2.5 : Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2019.....</i>	II-8
<i>Tabel 2.6 : Produksi Hasil PeternakanTahun 2015-2019</i>	II-8
<i>Tabel 2.7 : Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten SitubondoTahun 2019</i>	II-9
<i>Tabel 2.8 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-10
<i>Tabel 2.9 : Perkembangan Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Situbondo berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2019.....</i>	II-12
<i>Tabel 2.10 : Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Kabupaten Situbondo berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019.....</i>	II-13
<i>Tabel 2.11 : Hasil Perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2019.....</i>	II-16
<i>Tabel 2.12 : Klasifikasi Kelulusan Akreditasi</i>	II-41
<i>Tabel 2.13 : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-47

<i>Tabel 2.14 : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-47
<i>Tabel 2.15 : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-47
<i>Tabel 2.16 : Data PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-48
<i>Tabel 2.17 : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-52
<i>Tabel 2.18 : Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-58
<i>Tabel 2.19 : Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan</i>	II-60
<i>Tabel 2.20 : Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika .</i>	II-61
<i>Tabel 2.21 : Jumlah UMKM Kabupaten Situbondo Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</i>	II-61
<i>Tabel 2.22 : Realisasi Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019.....</i>	II-64
<i>Tabel 2.23 : Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo.....</i>	II-65
<i>Tabel 2.24 : Realisasi Indikator Program Urusan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019</i>	II-65
<i>Tabel 2.25 : Realisasi Capaian Program Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019</i>	II-66
<i>Tabel 2.26 : Realisasi Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-66
<i>Tabel 2.27 : Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-67
<i>Tabel 2.28 : Realisasi Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.....</i>	II-72

<i>Tabel 2.29 : Realisasi Indikator Program Urusan Perencanaan</i>	
<i>Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019.....</i>	II-73
<i>Tabel 2.30 : Realisasi Indikator Program Urusan Kepegawaian</i>	
<i>Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019.....</i>	II-74
<i>Tabel 2.31 : Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2016-2019</i>	II-74
<i>Tabel 2.32 : Realisasi Indikator Program Urusan Pengawasan</i>	
<i>Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-75
<i>Tabel 2.33 : Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2019 ...</i>	II-75
<i>Tabel 2.34 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut</i>	
<i>Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Situbondo.....</i>	II-76
<i>Tabel 2.35 : Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2016-2019</i>	II-77
<i>Tabel 2.36 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan</i>	II-78
<i>Tabel 2.37 : Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo</i>	II-79
<i>Tabel 2.38 : Gap Expectations Indikator Kinerja Utama (IKU).....</i>	II-84
<i>Tabel 2.39 : Indikator Kinerja Misi 1</i>	II-86
<i>Tabel 2.40 : Indikator Kinerja Daerah Misi 2</i>	II-87
<i>Tabel 2.41 : Indikator Kinerja Daerah Misi 3</i>	II-88
<i>Tabel 2.42 : Indikator Kinerja Daerah Misi 4</i>	II-89
<i>Tabel 3.1 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah</i>	
<i>Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020.....</i>	III-12
<i>Tabel 3.2 : Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.....</i>	III-14
<i>Tabel 3.3 : Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo</i>	III-16
<i>Tabel 3.4 : Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>	III-17
<i>Tabel 3.5 : Proyeksi / Target Penerimaan Daerah</i>	III-18
<i>Tabel 3.6 : Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung</i>	
<i>Daerah Kabupaten Situbondo</i>	III-21
<i>Tabel 3.7 : Proporsi Belanja Daerah.....</i>	III-22
<i>Tabel 3.8 : Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....</i>	III-24

<i>Tabel 3.9 : Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2019, dan Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo</i>	III-26
<i>Tahun 2021-2022.....</i>	
<i>Tabel 3.10 : Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2019, dan Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2022.....</i>	III-29
<i>Tabel 3.11 : Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2019 dan Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2021 – 2022.....</i>	III-32
<i>Tabel 4.1 : Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo.....</i>	IV-5
<i>Tabel 4.2 : linieritas isu strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021.....</i>	IV-16
<i>Tabel 4.3 : Linieritas prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo</i>	IV-17
<i>Tabel 4.4 : Linieritas antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas RKPD Tahun 2021.....</i>	IV-18
<i>Tabel 4.5 : linieritas prioritas pembangunan kabupaten Situbondo Tahun 2021 dengan program perangkat daerah beserta anggaran tahun 2021.....</i>	IV-28
<i>Tabel 6.1 : Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Situbondo</i>	VI-2
<i>Tabel 6.2 : Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo hingga Tahun 2021.....</i>	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya I-5

Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Situbondo II-1

Gambar 2.2 : Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo II-5

Gambar 2.3 : Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019 II-10

Gambar 2.4 : Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Situbondo

Tahun 2015-2019 II-11

Gambar 2.5 : Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019 II-17

Gambar 2.6 : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2015 – 2019 II-18

Gambar 2.7 : Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten Tahun 2019 II-19

Gambar 2.8 : Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo dan Jawa
Timur Tahun 2015-2019 II-20

Gambar 2.9 : Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo dan
Jawa Timur Tahun 2015-2019 II-20

Gambar 2.10: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 II-21

Gambar 2.11: IPM Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 II-22

Gambar 2.12: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 – 2019 II-23

Gambar 2.13: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2019 II-24

Gambar 2.14: Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019 II-24

Gambar 2.15: Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 ... II-25

Gambar 2.16: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019 II-26

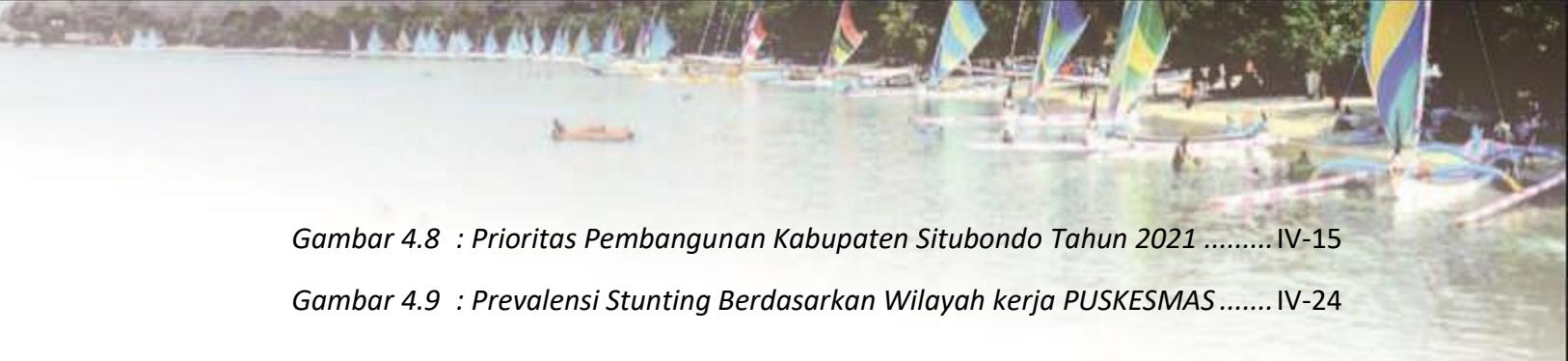
Gambar 2.17: Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 II-26

<i>Gambar 2.18: Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo, Jawa Timur</i>	II-27
<i>Gambar 2.19: Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019</i>	II-27
<i>Gambar 2.20: Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019</i>	II-28
<i>Gambar 2.21: Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-29
<i>Gambar 2.22: Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-29
<i>Gambar 2.23: Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-30
<i>Gambar 2.24: Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-31
<i>Gambar 2.25: Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-31
<i>Gambar 2.26: Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-32
<i>Gambar 2.27: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-32
<i>Gambar 2.28: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....</i>	II-33
<i>Gambar 2.29: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-33
<i>Gambar 2.30: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-34
<i>Gambar 2.31: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-35
<i>Gambar 2.32: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 55 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019</i>	II-35

<i>Gambar 2.33: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019</i>	II-36
<i>Gambar 2.34: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019</i>	II-37
<i>Gambar 2.35: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019</i>	II-37
<i>Gambar 2.36: Angka Kematian Ibu Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-38
<i>Gambar 2.37: Angka Kematian Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019....</i>	II-39
<i>Gambar 2.38: Angka Kasus HIV-AIDs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019 ..</i>	II-39
<i>Gambar 2.39: Angka KasusPenyakit TB KabupatenSitubondoTahun 2016-2019.</i>	II-40
<i>Gambar 2.40: Akreditasi Puskesmas Kabupaten Situbondo 2019.....</i>	II-41
<i>Gambar 2.41: Persentase Masyarakat Miskin terlayani JKN Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019.....</i>	II-42
<i>Gambar 2.42: Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik Tahun 2016-2019</i>	II-42
<i>Gambar 2.43: Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-43
<i>Gambar 2.44: Ketersediaan Sarana Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-43
<i>Gambar 2.45: Presentase Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-44
<i>Gambar 2.46: Presentase Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-45
<i>Gambar 2.47: Ketersediaan Sarana MCK Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-46
<i>Gambar 2.48: Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019</i>	II-48
<i>Gambar 2.49: Persentase Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018.....</i>	II-50
<i>Gambar 2.50: Realiasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2019.....</i>	II-51

<i>Gambar 2.51: indeks kualitas air, udara, dan tutupan vegetasi</i>	II-53
<i>Gambar 2.52: Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016-2019.....</i>	II-53
<i>Gambar 2.53: Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten</i>	
<i>Situbondo tahun 2019.....</i>	II-54
<i>Gambar 2.54: Rasio Jenis Kelamin tahun 2016-2018</i>	II-54
<i>Gambar 2.55: Kepadatan Penduduk tahun 2016-2019.....</i>	II-55
<i>Gambar 2.56: Kepadatan Penduduk.....</i>	II-56
<i>Gambar 2.57: Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo</i>	II-56
<i>Gambar 2.58: Angka Beban Ketergantungan tahun 2016-2019.....</i>	II-57
<i>Gambar 2.59: Jumlah Pasangan Usia Subur tahun 2016-2019.....</i>	II-58
<i>Gambar 2.60: Jumlah Peserta KB aktif tahun 2016-2019.....</i>	II-59
<i>Gambar 2.61: Perkembangan Total Investasi Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2016- 2019</i>	II-63
<i>Gambar 2.62: Grafik Produksi Perikanan 2016-2019 (Ton).....</i>	II-67
<i>Gambar 2.63: Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara</i>	
<i>2016-2019</i>	II-68
<i>Gambar 2.64: Grafik Produksi Pertanian 2016-2019 (Ton)</i>	II-69
<i>Gambar 2.65: Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2017-2019</i>	II-70
<i>Gambar 2.66: Data perdagangan luar dan dalam negeri kabupaten</i>	
<i>Situbondo</i>	II-70
<i>Gambar 2.67: Pertumbuhan Indsutri Pengolahan Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2017-2019</i>	II-71
<i>Gambar 2.68: Peningkatan Produksi Industri Pengolahan Kabupaten</i>	
<i>Situbondo Tahun 2017-2019</i>	II-72
<i>Gambar 2.69: IPM Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-80
<i>Gambar 2.70: Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2015-2019</i>	II-81
<i>Gambar 2.71: Presentase Kemiskinan Kabupaten Situbondo</i>	
<i>Tahun 2015-2019</i>	II-83
<i>Gambar 2.72: PresentaseKemiskinanKabupaten/Kota Jawa Timur 2018</i>	II-83

<i>Gambar 2.73: Indeks Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019</i>	II-84
<i>Gambar 2.74: Gap Expectation Capaian 2019 terhadap Target 2021</i>	II-85
<i>Gambar 2.75: Gap Expectation realisasi 2017 dengan target 2021.....</i>	II-86
<i>Gambar 2.76: Gap Expectation realisasi 2018 dengan target 2021.....</i>	II-87
<i>Gambar 2.77: Gap Expectation realisasi 2019 dengan target 2021.....</i>	II-88
<i>Gambar 2.78: Gap Expectation realisasi 2019 dengan target 2021.....</i>	II-89
<i>Gambar 3.1 : Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Situbondo</i>	
<i>Tahun 2015-2019</i>	III-1
<i>Gambar 3.2 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo (Dalam Juta).....</i>	III-3
<i>Gambar 3.3 : Inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur</i>	III-5
<i>Gambar 3.4 : Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Situbondo</i>	
<i>Tahun 2014-2019</i>	III-6
<i>Gambar 3.5 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan</i>	
<i>Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2019</i>	III-7
<i>Gambar 3.6 : Tingkat Pengangguran Nasional, Jawa Timur dan Situbondo</i>	
<i>Tahun 2015-2019</i>	III-8
<i>Gambar 3.7 : Indeks Gini Nasional, Jawa Timur dan Situbondo</i>	
<i>Tahun 2015-2019</i>	III-9
<i>Gambar 4.1 : Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan</i>	IV-3
<i>Gambar 4.2 : Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kualitas</i>	
<i>Sumberdaya Manusia</i>	IV-3
<i>Gambar 4.3 : Sasaran pada tujuan meningkatkan kesejahteraan</i>	
<i>Masyarakat</i>	IV-4
<i>Gambar 4.4 : Sasaran pada tujuan mewujudkan perekonomian daerah dan</i>	
<i>pemerataan hasil pembangunan.....</i>	IV-4
<i>Gambar 4.5 : Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel,</i>	
<i>efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik</i>	IV-5
<i>Gambar 4.6 : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo.....</i>	IV-7
<i>Gambar 4.7 : Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2021</i>	
<i>dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur</i>	IV-14



Gambar 4.8 : Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 IV-15

Gambar 4.9 : Prevalensi Stunting Berdasarkan Wilayah kerja PUSKESMAS IV-24



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Hal-hal yang menjadikan perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta inisiatif sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemukakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari kecamatan hingga kota.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun perencanaan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD, sehingga masing-masing PD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Situbondo 2016 - 2021. Proses penyusunan RKPD melalui beberapa tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam proses penyusunan RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Penetapan terakhir RKPD paling lambat akhir bulan Juni. Maka keharusan, kepatuhan dan ketaatan Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD tepat waktu, tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RKPD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.

RKPD dalam menentukan prioritas memperhatikan telaah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2016-2021, selain itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus sinkron dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2021.

SubstansipentingdalamRKPDinimerupakangambaraninvestasipemerintahyangndalampenjabarnyadiinteraksikandengankomponensumberdayayanglainseperti iPAD,DanaAlokasiUmum,DanaAlokasiKhusus,TugasPembantuan,sertadana-danabagihasilainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumenpublik dimana sesuai amanat undang-undangnomor14tahun2008TentangKeterbukaanInformasiPublikyangberlakuefektif padatanggal01Mei2010makadiharapkanDokumeniniharusdapatdiaksesolehsemua pemangkukepentinganbaikdalamkapasitasuntukmelaksanakan,pengawasan,penge ndaliandanevaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhirkali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK Kabupaten Situbondo
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10

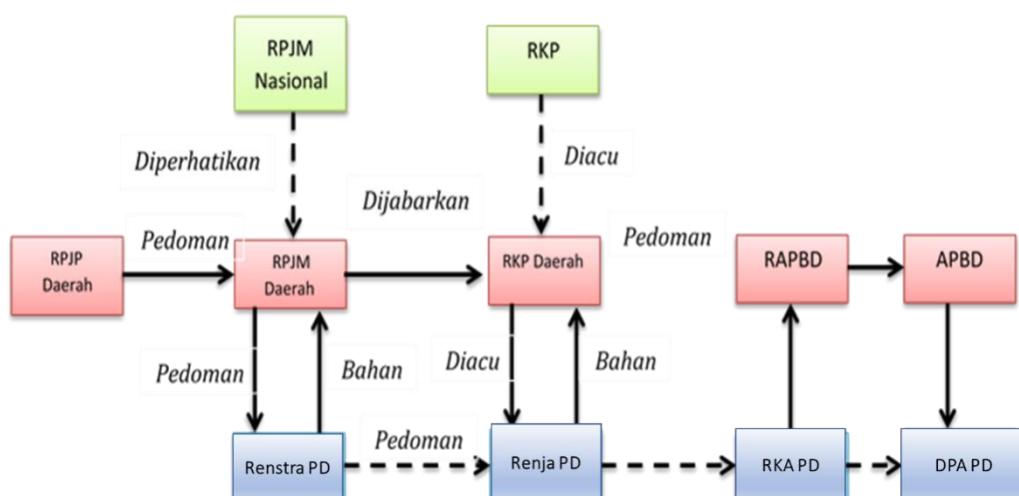
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagai manajemen yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJPD Daerah Kabupaten Situbondo. Keberadaan RKPD Tahun 2021 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2021. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dibarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKPD dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keserasi antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rincian dengan menekankan pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pulama mencakup indikator dan target kinerja serta pertimbangan kebutuhan dan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2021. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

Tujuan disusunnya RKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Situbondo, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2016-2021 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD dalam rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatannya dan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dan dokumen RKPD terkait dengan pengarutan babserta garis besar isisetiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu

gamen perhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi spek geografid dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan kantela ah terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya yang mengkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasildiidentifikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan per ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan dan tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta rangkapendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 padadasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII: PENUTUP

BAB II

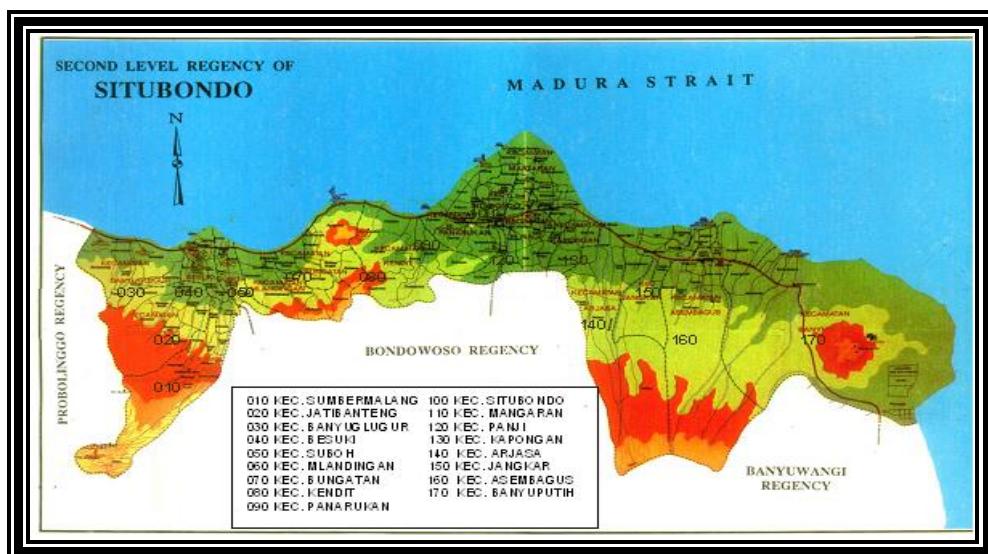
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' - 7° 44' Lintang selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur.



Gambar 2. 1:Peta Kabupaten Situbondo

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Batas – batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Selat Bali
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan

Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km². Pembagian administrasi dan luasnya sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

Tabel 2. 1:Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah			Luas (Ha)
				Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	55	162	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	87	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	107	7.266
4	Besuki	10	-	45	116	308	2.641
5	Suboh	8	-	29	60	170	3.084
6	Mlandingan	7	-	28	58	128	3.961
7	Bungatan	7	-	34	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	36	94	192	11.414
9	Panarukan	8	-	51	81	235	5.438
10	Situbondo	4	2	17	66	237	2.781
11	Panji	10	2	40	90	270	3.570
12	Mangaran	6	-	44	78	170	4.699
13	Kapongan	10	-	55	98	253	4.455
14	Arjasa	8	-	48	90	215	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	35	68	195	11.874
17	Banyuputih	5	-	26	56	174	48.167
Jumlah		132	4	683	1.265	3.328	163.850

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Kabupaten Situbondo secara administrative terbagi menjadi 17 kecamatan dan 132 desa dan 4 kelurahan. Dari 17 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Situbondo dengan 2 kelurahan dan Kecamatan Panji dengan 2 Kelurahan. Empat kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Besuki terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Panji terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Kapongan terdiri dari 10 Desa, dan Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 Desa.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75 % dan tergolong kasar 0,99 %. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang



tergenang 0,05 % dan selalu tergenang 0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara alain alluvial. Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07).

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km² (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi



Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m diatas permukaan air laut. Tekstur tanah pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42% kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Struktur Geologi Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium luasnya 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda luasnya 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua luasnya 72.752 Ha, dan Leusita luasnya 22.328 Ha.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi



Kabupaten Situbondo yang di lewati hulu sungai sampean berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang sungai 72 kilometer dan DAS sampean seluas 1.347 kilometer persegi mencakup wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung Kabupaten Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

2.1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi curah hujan, rata-rata per tahun 994 – 1.503 mm. Pada tahun 2019 di Kabupaten Situbondo curah hujan maksimum mencapai 12.345 mm yang terjadi di bulan Januari. Adapun Kondisi klimatologi per bulan secara rinci, sebagaimana tabel berikut:

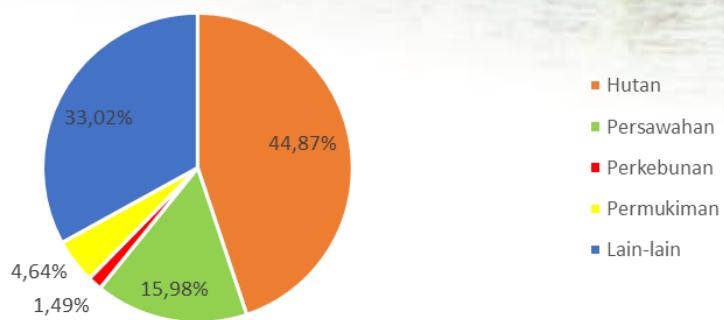
Tabel 2. 2: Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata - Rata Hujan dan Hujan Maksimum Bulanan, 2019

Bulan Month	Curah Hujan/ Rainfall	Hari Hujan / Rainy Days	Rata-Rata Hujan / Rain Average	Maksimum / Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	
Januari / January	12.345	16	401	108
Februari / February	3.962	9	151	64
Maret / March	10.098	15	333	115
April / April	10.901	8	415	190
Mei / May	290	1	21	24
Juni / June	1	1	-	1
Juli / July	-	-	-	-
Agustus / August	5	-	-	5
September / September	1	-	-	1
Oktober / October	7	-	-	5
November / November	191	1	5	30
Desember / December	3.549	6	106	89

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2019

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Situbondo sekitar 163.850 ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Situbondo merupakan daerah kawasan hutan. Area hutan ini mencapai 73.994,90 ha atau sekitar 44,87%, persawahan seluas 26.183,23 ha atau sekitar 15,98%, kawasan terbangun (pemukiman) memiliki luas keseluruhan mencapai 4,64 % dari luas Kabupaten Situbondo, adapun luas perkebunan sebesar 1,49% sedangkan sisanya/ lain lain sebesar 33,02 %. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi bagi pengembangan lahan yang tersedia untuk berbagai kegiatan investasi.



Gambar 2. 2: Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

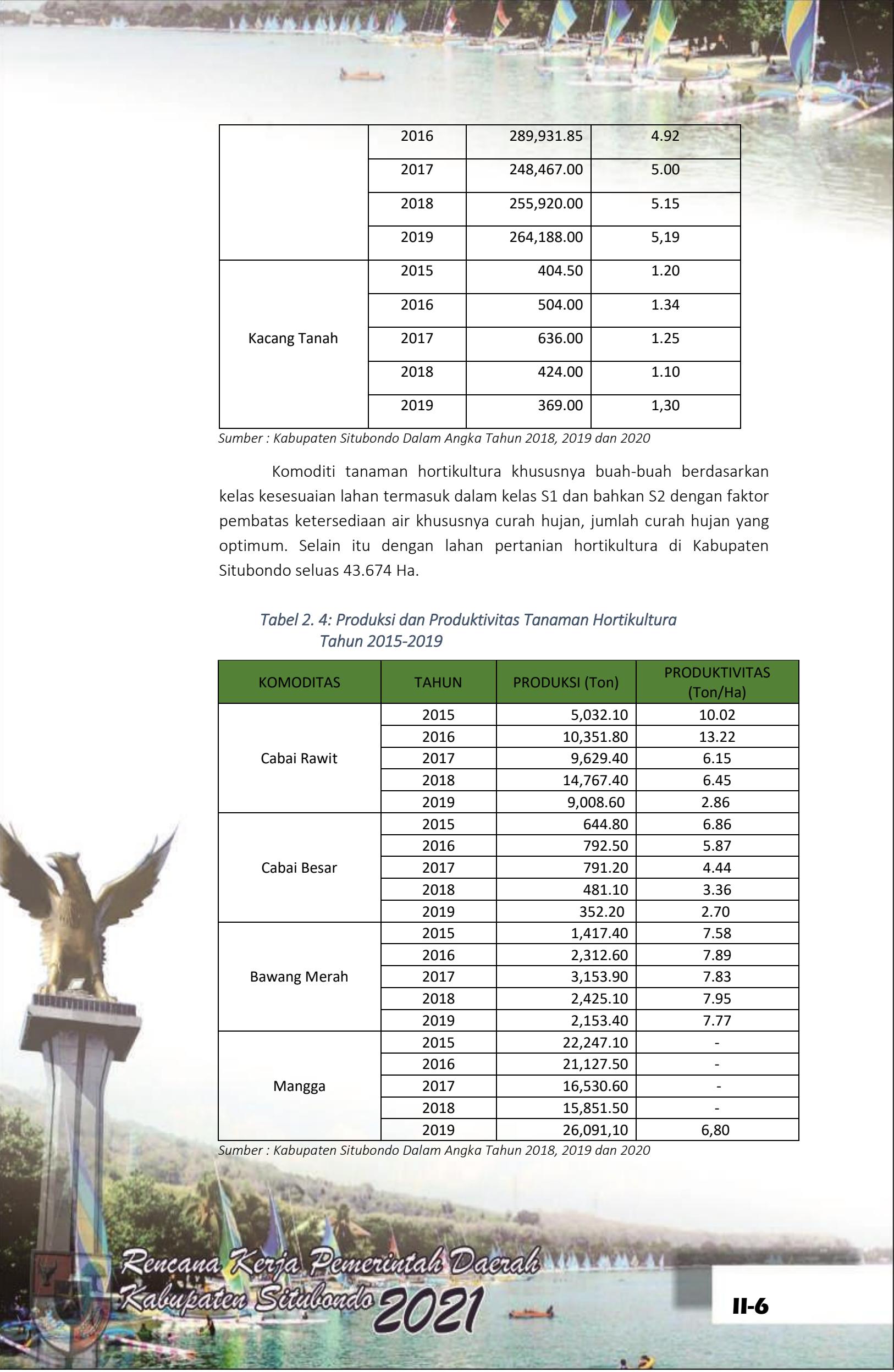
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.7.1 Potensi Pertanian

Kawasan pertanian untuk tanaman pangan merupakan kawasan yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari sektor pertanian. Tanaman pangan yang mendominasi seluruh Kabupaten Situbondo, antara lain padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan di Kabupaten Situbondo tersebar secara merata di seluruh wilayah. Berdasarkan analisa produktifitas tanaman pangan yang paling menonjol adalah produksi komoditas jagung dimana dari tahun 2015 sebesar 4,97 ton per hektar hingga 2019 tercatat sebesar 5,19, sedangkan komoditas yang mengalami penurunan pertumbuhannya adalah tanaman padi. Tercatat mulai tahun 2018 dan 2019 (5,74) terus menurun dari tahun 2017 akan tetapi jika dibandingkan dengan produktifitas pada tahun 2015 (5,53) masih lebih baik. Menurunnya produktifitas pada tahun 2019 lebih dikarenakan kemarau yang agak panjang sehingga petani lebih banyak menanam jagung dan ini berdampak pada peningkatan produktifitas tanaman jagung.

Tabel 2. 3: Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Padi	2015	324,891.10	5.53
	2016	346,735.63	5.64
	2017	313,826.00	5.10
	2018	334,647.00	5.68
	2019	305,041.00	5,74
Jagung	2015	241,068.40	4.97



	2016	289,931.85	4.92
	2017	248,467.00	5.00
	2018	255,920.00	5.15
	2019	264,188.00	5,19
Kacang Tanah	2015	404.50	1.20
	2016	504.00	1.34
	2017	636.00	1.25
	2018	424.00	1.10
	2019	369.00	1,30

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2020

Komoditi tanaman hortikultura khususnya buah-buah berdasarkan kelas kesesuaian lahan termasuk dalam kelas S1 dan bahkan S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air khususnya curah hujan, jumlah curah hujan yang optimum. Selain itu dengan lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Situbondo seluas 43.674 Ha.

Tabel 2. 4: Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2019



KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Cabai Rawit	2015	5,032.10	10.02
	2016	10,351.80	13.22
	2017	9,629.40	6.15
	2018	14,767.40	6.45
	2019	9,008.60	2.86
Cabai Besar	2015	644.80	6.86
	2016	792.50	5.87
	2017	791.20	4.44
	2018	481.10	3.36
	2019	352.20	2.70
Bawang Merah	2015	1,417.40	7.58
	2016	2,312.60	7.89
	2017	3,153.90	7.83
	2018	2,425.10	7.95
	2019	2,153.40	7.77
Mangga	2015	22,247.10	-
	2016	21,127.50	-
	2017	16,530.60	-
	2018	15,851.50	-
	2019	26,091,10	6,80

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2020

2.1.1.7.2 Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah komoditi kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapok, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jembu mete, pinang. Tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (*season plant*) dan tanaman tahunan (*annual plant*). Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo seluas 1.780,26 hektar atau sekitar 1,09 % dari luas Kabupaten Situbondo. Komoditi perkebunan di Kabupaten Situbondo meliputi :

- a) Komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- b) Komoditi kapuk randu berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- c) Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- d) Komoditi tembakau berada di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih.

Tabel 2. 5: Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2019

KOMODITAS	TAHUN	PRODUK (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Tembakau	2015	3,314,00	1.01
	2016	23,89.34	0.60
	2017	3,379.31	1.14
	2018	9,028.35	-
	2019	9.552,85	1.03
Kopi	2015	1,722.00	1.20
	2016	675.90	0.36
	2017	332.10	0.18
	2018	542.9	-
	2019	587.92	0.45
Tebu	2015	-	-
	2016	-	-
	2017	865,113.57	91,58
	2018	867,464.00	94,24
	2019	872,629.16	94,80

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018, 2019 dan 2020

Peluang pembangunan sektor perkebunan di wilayah Pengelolaan Kabupaten Situbondo pada masa mendatang cukup cerah, seperti diketahui bahwa permintaan pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga komoditi, selera, mutu dan citra produk pertanian yang dipasarkan.

2.1.1.7.3 Potensi Peternakan

Kebutuhan akan ternak di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat ini masih dipasok dari Palau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangum, sedangkan ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya. Peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sehingga sampai saat ini belum ada kawasan yang dijadikan sebagai area pengelolaan peternakan.

Tabel 2. 6: Produksi Hasil Peternakan Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Populasi Ternak							
	Sapi Potong	(Ekor)	175.115	176.398	165.539	176.311	178.162	
	Sapi Perah	(Ekor)	235	218	216	201	110	
	Kerbau	(Ekor)	199	280	225	246	229	
	Kuda	(Ekor)	227	186	163	140	159	
	Kambing	(Ekor)	50.614	73.780	40.601	40.083	33.856	
	Domba	(Ekor)	63.461	88.324	55.243	52.683	49.153	
	Ayam Buras	(Ekor)	626.177	995.554	420.486	369.160	614.353	
	Ayam Ras Petelur	(Ekor)	42.250	42.073	25.110	25.500	34.375	
	Ayam Ras Pedaging	(Ekor)	102.142	316.500	617.742	1.132.706	1.126.457	
	Itik	(Ekor)	55.082	68.820	54.222	60.109	46.492	
	Entok	(Ekor)	8.714	15.260	19.229	18.791	15.224	
2	Jumlah Produksi Ternak							
	Daging Sapi	(Ton)	1.416	1.458	1501	1.458	1942	
	Daging Kambing/Domba	(Ton)	83,42	85	85	81,50	48,21	
	Daging Ayam	(Ton)	2.584	2.584	5679	5756	5671	
	Telur	(Ton)	4.320	2.952	10.596	960	948	
	Susu	(Liter)	305.280	308.250	279.936	426.817	270.545	

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2020, data diolah

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo dikarenakan perubahan iklim global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2019 terjadi beberapa bencana alam pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. 7: Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kejadian		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1.	Sumbermalang	1	9	-
2.	Jatibanteng	7	-	3
3.	Banyuglugur	1	-	-
4.	Besuki	-	-	-
5.	Suboh	1	-	1
6.	Mlandingan	2	-	1
7.	Bungatan	1	4	-
8.	Kendit	2	3	-
9.	Panarukan	-	-	-
10.	Situbondo	-	-	-
11.	Mangaran	1	-	-
12.	Panji	-	-	-
13.	Kapongan	-	-	-
14.	Arjasa	-	-	-
15.	Jangkar	-	1	1
16.	Asembagus	-	8	-
17.	Banyuputih	-	-	-
Jumlah		16	25	6

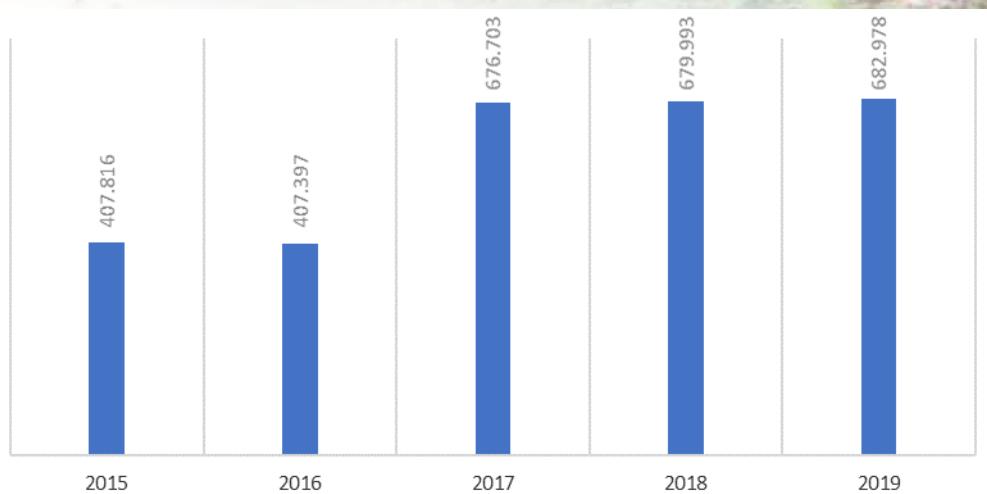
Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020

Jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Situbondo tahun 2019 adalah gempa bumi sebanyak 24 kejadian terbanyak pada Kecamatan Sumbermalang yaitu 9 kali kejadian. Banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo sebanyak 16 kejadian terbanyak berada di Kecamatan Jatibanteng sebanyak 7 kali kejadian. Sedangkan bencana tanah longsor pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6 kejadian terbanyak di Kecamatan Jatibanteng sebanyak 3 kali kejadian.

2.1.1.9 Aspek Demografi

2.1.1.9.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebanyak 682.978 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 meningkat sebanyak 2.985 jiwa atau 0,44% dari tahun 2018 sebesar 679.993 jiwa. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemerataan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata. Berikut merupakan Gambar jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dalam 3 tahun terakhir:



Gambar 2.3: Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020

Secara terperinci komposisi penduduk Kabupaten Situbondo dilihat dari kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	24.800	23.726	48.526
5-9	25.171	24.206	49.377
10-14	25.314	24.281	49.595
15-19	26.686	27.864	54.550
20-24	26.361	26.290	52.651
25-29	24.029	25.698	49.727
30-34	24.901	27.443	52.344
35-39	26.881	27.339	54.220
40-44	26.363	27.110	53.473
45-49	25.321	26.489	51.810
50-54	22.632	24.160	46.792
55-59	19.309	19.449	38.758
60-64	15.435	16.155	31.590
65+	19.995	29.570	49.565
Jumlah	333.198	349.780	682.978

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020

Dilihat dari jumlah penduduk diatas maka struktur umur penduduk Kabupaten Situbondo adalah terdiri dari usia remaja dan usia produktif yang dominan, sedangkan untuk usia tua masih relative sedikit. Penduduk usia 0-14 tahun dan usia 50 tahun keatas cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 15-49 tahun. Jumlah usia 0-14 Tahun sebanyak 69.620 jiwa sedangkan penduduk usia 50 tahun keatas sebanyak 89.436 jiwa. Jumlah kedua kelompok umur tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan



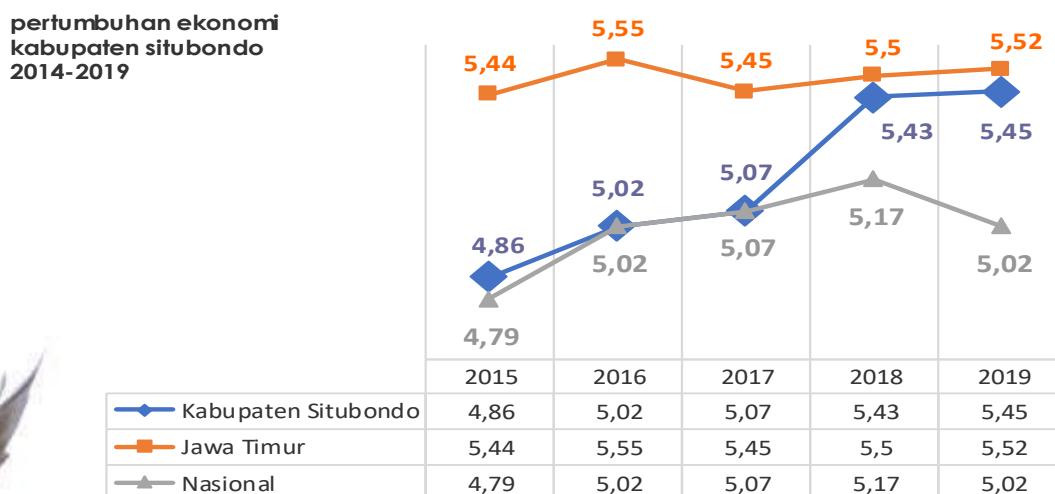
jumlah penduduk kelompok umur 15-49 tahunnya itu sebanyak 174.142 jiwa. Hal ini bias digunakan sebagai indicator bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Situbondo adalah pada usia produktif yaitu 15-49 tahun. Kondisi ini memiliki kelebihan dimana penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga potensi usia produktif dapat di manfaatkan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Situbondo.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama periode 2015-2019 menunjukkan tren yang positif. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 menyentuh angka sebesar 5,07% pada tahun 2017 dan 5,43% pada tahun 2018. Namun angka pertumbuhan pada tahun 2019 melambat menjadi 5,45%.



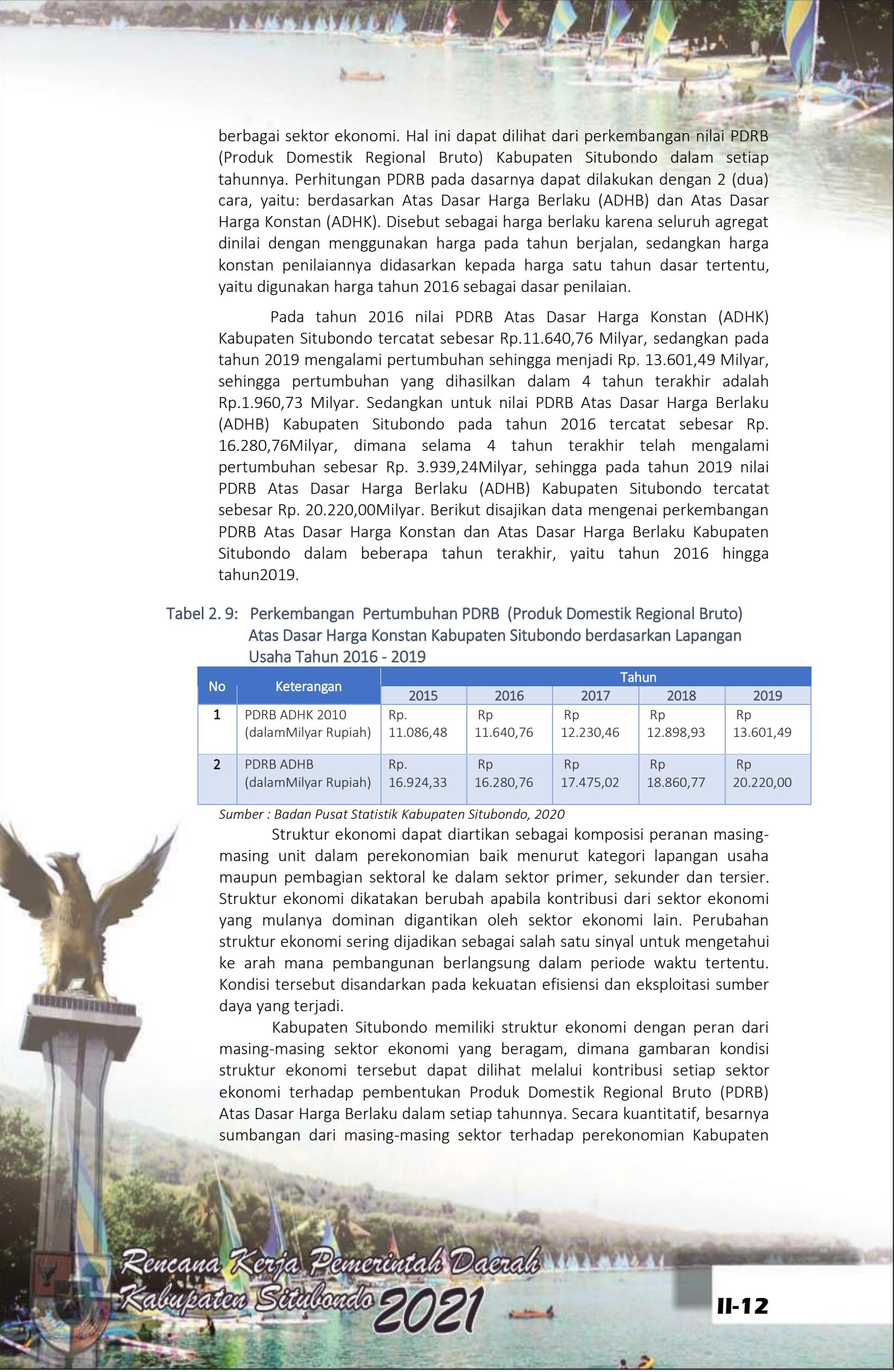
Gambar 2.4: Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: LKPJ 2014-2019 Kabupaten Situbondo, Laporan Nusantara BI 2015-2019, Laporan Regional BI 2015-2019



Pertumbuhan ekonomi Nasional tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi ekspor yang secara total belum kuat sejalan dengan dampak ekonomi dunia yang belum pulih. Perkembangan ini kemudian mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan investasi, khususnya investasi non bangunan. Konsumsi lembaga Non-profit rumah tangga menurun seiring berakhirnya dampak pemilu 2019.

Melihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa dalam setiap tahun telah terjadi peningkatan aktivitas di



berbagai sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya. Perhitungan PDRB pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, yaitu digunakan harga tahun 2016 sebagai dasar penilaian.

Pada tahun 2016 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Situbondo tercatat sebesar Rp.11.640,76 Miliar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sehingga menjadi Rp. 13.601,49 Miliar, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan dalam 4 tahun terakhir adalah Rp.1.960,73 Miliar. Sedangkan untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 16.280,76Miliar, dimana selama 4 tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 3.939,24Miliar, sehingga pada tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo tercatat sebesar Rp. 20.220,00Miliar. Berikut disajikan data mengenai perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 2. 9: Perkembangan Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Situbondo berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019

No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB ADHK 2010 (dalamMiliar Rupiah)	Rp. 11.086,48	Rp 11.640,76	Rp 12.230,46	Rp 12.898,93	Rp 13.601,49
2	PDRB ADHB (dalamMiliar Rupiah)	Rp. 16.924,33	Rp 16.280,76	Rp 17.475,02	Rp 18.860,77	Rp 20.220,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2020



Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing unit dalam perekonomian baik menurut kategori lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Struktur ekonomi dikatakan berubah apabila kontribusi dari sektor ekonomi yang mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain. Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksplorasi sumber daya yang terjadi.

Kabupaten Situbondo memiliki struktur ekonomi dengan peran dari masing-masing sektor ekonomi yang beragam, dimana gambaran kondisi struktur ekonomi tersebut dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dalam setiap tahunnya. Secara kuantitatif, besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap perekonomian Kabupaten

Situbondo berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi bila dilihat dari kualitatifnya (persentase besarnya) peran yang diberikan masing-masing sektor terhadap perekonomian (PDRB ADHB) dari tahun ke tahun relatif tetap. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 17 sektor ekonomi/ lapangan usaha yang dijalankan di Kabupaten Situbondo, terdapat 3 sektor yang secara konsisten mempunyai andil/ kontribusi dalam pembentukan total PDRB/ perekonomian di Kabupaten Situbondo. Adapun ketiga sektor/ lapangan usaha tersebut meliputi: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2. 10: Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Kabupaten Situbondo berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019

No	Lapangan Usaha	Tahun/Persetase									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.361,70	36,24	5.784,98	35,53	5.996,43	34,31	6.169,03	32,71	6.390,96	31,61
B	Pertambangan dan Penggalian	287,48	1,94	303,09	1,86	333,66	1,91	363,44	1,93	380,66	1,88
C	Industri Pengolahan	2.380,78	16,09	2.665,54	16,37	2.908,64	16,64	3.280,03	17,39	3.649,18	18,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,39	0,06	9,00	0,06	10,42	0,06	11,15	0,06	11,71	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,59	0,13	20,02	0,12%	21,58	0,12	22,85	0,12	23,44	0,12
F	Konstruksi	1.094,49	7,40	1.206,74	7,41	1.333,57	7,63	1.422,48	7,54	1.474,27	7,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.139,03	14,46	2.418,85	14,86	2.652,70	15,18	2.975,10	15,77	3.277,00	16,21
H	Transportasi dan Pergudangan	355,48	2,40	400,00	2,46	447,53	2,56	499,45	2,65	548,94	2,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	254,96	1,72	291,49	1,79	331,43	1,90	367,25	1,95	403,80	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	696,96	4,71	771,29	4,74	838,65	4,80	902,06	4,78	980,31	4,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	439,08	2,97	499,15	3,07	554,28	3,17	610,86	3,24	638,93	3,16
L	Real Estat	207,74	1,40	231,99	1,42	253,04	1,45	280,53	1,49	305,91	1,51
M, N	Jasa Perusahaan	59,35	0,40	65,83	0,40	73,14	0,42	82,62	0,44	90,27	0,45



No	Lapangan Usaha	Tahun/Persetase									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Miliar Rp.	%								
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	487,54	3,30	523,66	3,22	560,79	3,21	618,28	3,28	679,08	3,36
P	Jasa Pendidikan	582,71	3,94	630,83	3,87	664,40	3,80	715,87	3,80	779,52	3,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,57	0,84	132,06	0,81	143,98	0,82	153,27	0,81	163,98	0,81
R, S, T, U	Jasa lainnya	297,80	2,01	326,23	2,00	350,78	2,01	386,50	2,05	422,05	2,09
PDRB		14.795,65	100,0	16.280,76	100,0	17.475,02	100,0	18.860,77	100,0	20.220,00	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2020

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2019 memberikan kontribusi nilai PDRB terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Situbondo (total PDRB) yaitu sebesar 31,61% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 6.390,96 Miliar. Bila dilihat tren nilai PDRB setiap sektor dari tahun 2016 hingga tahun 2019 diketahui bahwa PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar pada setiap tahunnya meskipun adanya kecenderungan penurunan kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan setiap tahunnya tetapi bila dilihat dari nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan kontribusi pada sektor lainnya terutama pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang besar dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kabupaten Situbondo yang terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa yang dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan serta mempunyai pelabuhan sehingga sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani lading maupun perkebunan dan nelayan serta bermata pencaharian dalam bidang usaha pertanian dan usaha perikanan.

Selain Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontribusi terbesar di kabupaten Situbondo adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada sektor Industri Pengolahan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 bila dilihat dari nilai PDRB nya mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya sehingga pada kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 mempunyai kontribusi PDRB sebesar 16,09% dan pada tahun 2019



mempunyai kontribusi PDRB sebesar 18,05%. Pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2016 hingga tahun 2019 bila dilihat dari nilai PDRB nya mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya sehingga pada kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 mempunyai kontribusi PDRB sebesar 14,46% dan pada tahun 2019 mempunyai kontribusi PDRB sebesar 16,21%. Kenaikan pada kedua sektor tersebut memberikan pengaruh besar terhadap sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar karena dapat di asumsikan bahwa hasil dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah saja tapi juga dapat diolah menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kenaikan nilai PDRB maupun kontribusi PDRB pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dapat memberikan peningkatan penjualan pada hasil Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan maupun pada produk hasil olahan pada sektor industry pengolahan. Dari hal tersebut maka perlunya pengembangan pada ketiga sektor tersebut agar saling terintegrasi sehingga mampu mendorong peningkatan PDRB di kabupaten Situbondo.

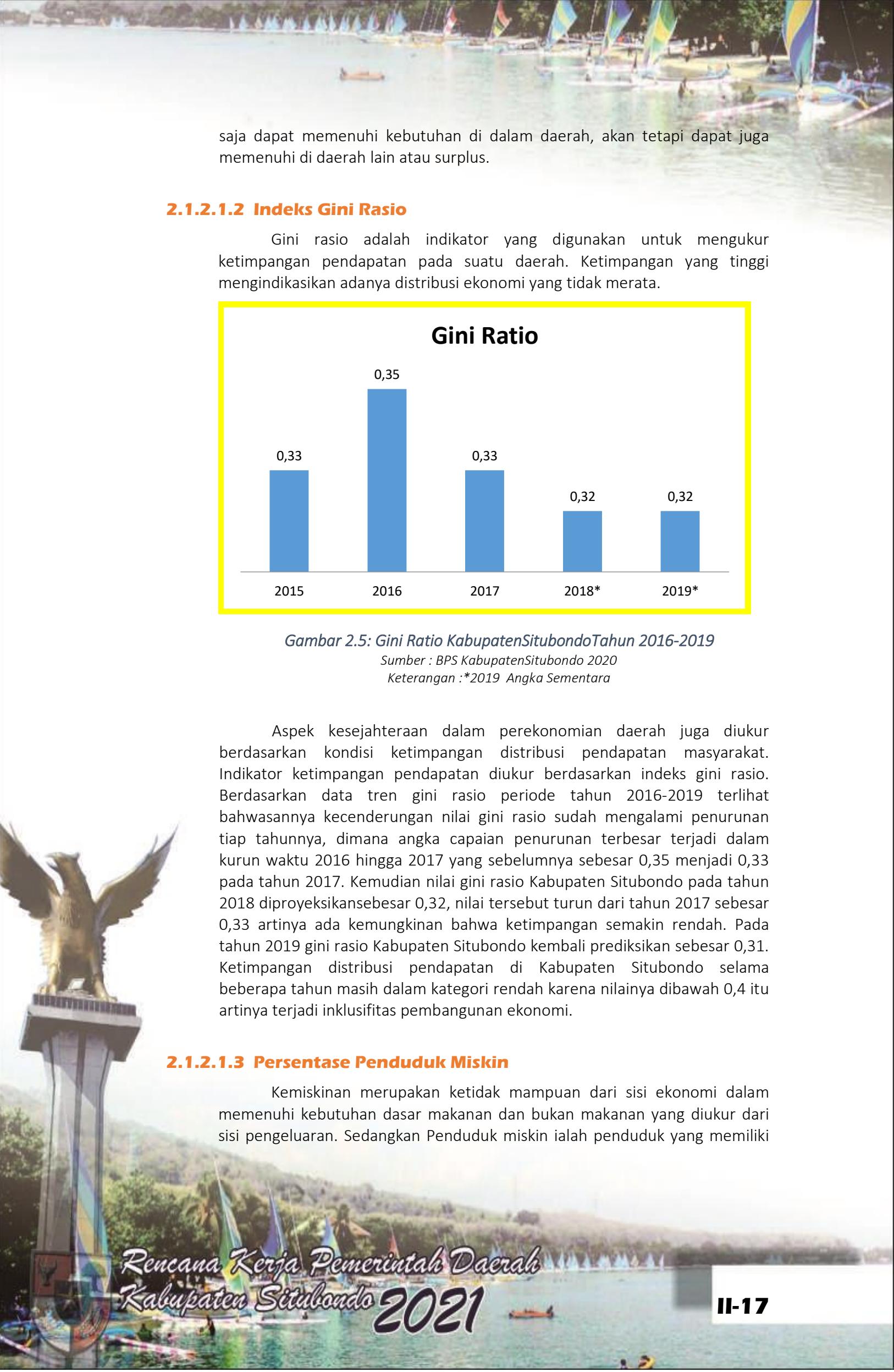
Diantara sektor ekonomi/ lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil perhitungan analisis LQ (*Location Quotient*) terdapat 8 sektor ekonomi yang merupakan sektor basis atau *leading sektor*. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus. Sektor basis (unggulan) adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar domestik maupun pasar luar daerah. Sektor basis dapat menghasilkan produk dan jasa yang nantinya mendatangkan keuntungan. Hal ini menyebabkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor produk yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sektor tersebut memiliki aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri maupun daerah lain yang dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non basis (sektor non unggulan) merupakan kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar daerahnya sendiri. Penentuan sektor basis dan non basis didasarkan pada besar kecilnya nilai LQ, dimana sektor basis memiliki nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$), sedangkan untuk non basis berada dibawah 1 ($LQ < 1$). Adapun 8 sektor ekonomi/ lapangan usaha yang termasuk dalam sektor basis adalah: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa lainnya. Untuk mengetahui nilai LQ dan status dari masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11: Hasil Perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2019

No	Sektor PDRB	LQ					Total	LQ	Keterangan
		2016	2017	2018	2019				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,64	2,67	2,75	2,77	10,83	2,71	Unggulan	
2	Pertambangan&Penggalian	0,49	0,48	0,45	0,47	1,89	0,47	Bukan unggulan	
3	Industri Pengolahan	0,57	0,57	0,58	0,60	2,32	0,58	Bukan unggulan	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,20	0,74	0,18	Bukan unggulan	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,34	1,34	1,36	1,35	5,39	1,35	Unggulan	
6	Konstruksi	0,76	0,78	0,78	0,78	3,09	0,77	Bukan unggulan	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83	0,85	0,87	0,88	3,42	0,86	Bukan unggulan	
8	Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,75	0,77	0,79	3,03	0,76	Bukan unggulan	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,33	0,34	0,34	1,32	0,33	Bukan unggulan	
10	Informasi dan Komunikasi	1,03	1,04	1,06	1,06	4,19	1,05	Unggulan	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	1,16	1,19	1,19	4,65	1,16	Unggulan	
12	Real Estate	0,88	0,91	0,92	0,92	3,62	0,91	Bukan unggulan	
13	Jasa Perusahaan	0,50	0,52	0,53	0,53	2,08	0,52	Bukan unggulan	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	1,41	1,42	1,41	5,62	1,41	Unggulan	
15	Jasa Pendidikan	1,45	1,44	1,46	1,46	5,82	1,45	Unggulan	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,32	1,31	1,28	5,21	1,30	Unggulan	
17	Jasa lainnya	1,44	1,47	1,51	1,53	5,95	1,49	Unggulan	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2020 (diolah)

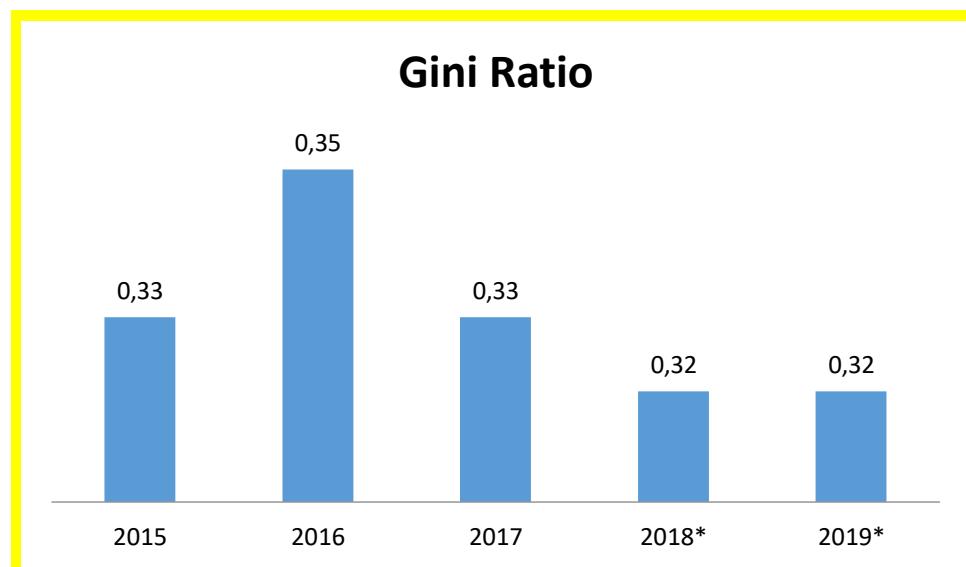
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada nilai LQ diatas 1 ($LQ > 1$) atau disebut sebagai sektor basis dengan nilai tertinggi adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,70 sehingga pada hasil dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak



saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi di daerah lain atau surplus.

2.1.2.1.2 Indeks Gini Rasio

Gini rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata.



Gambar 2.5: Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo 2020

Keterangan : *2019 Angka Sementara

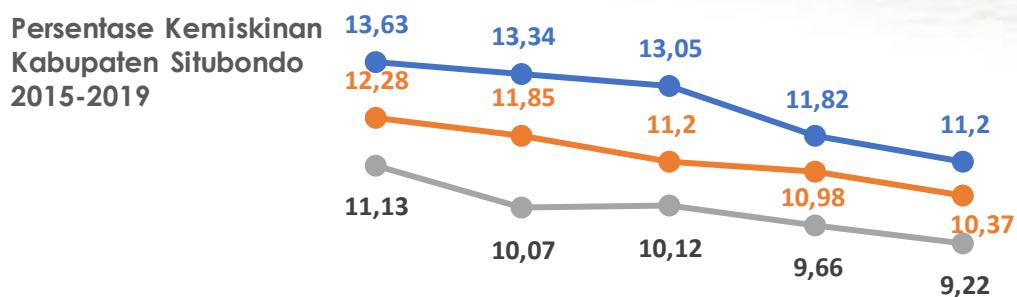


Aspek kesejahteraan dalam perekonomian daerah juga diukur berdasarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indikator ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan indeks gini rasio. Berdasarkan data tren gini rasio periode tahun 2016-2019 terlihat bahwasannya kecenderungan nilai gini rasio sudah mengalami penurunan tiap tahunnya, dimana angka capaian penurunan terbesar terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 yang sebelumnya sebesar 0,35 menjadi 0,33 pada tahun 2017. Kemudian nilai gini rasio Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,32, nilai tersebut turun dari tahun 2017 sebesar 0,33 artinya ada kemungkinan bahwa ketimpangan semakin rendah. Pada tahun 2019 gini rasio Kabupaten Situbondo kembali prediksikan sebesar 0,31. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 itu artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi.

2.1.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki

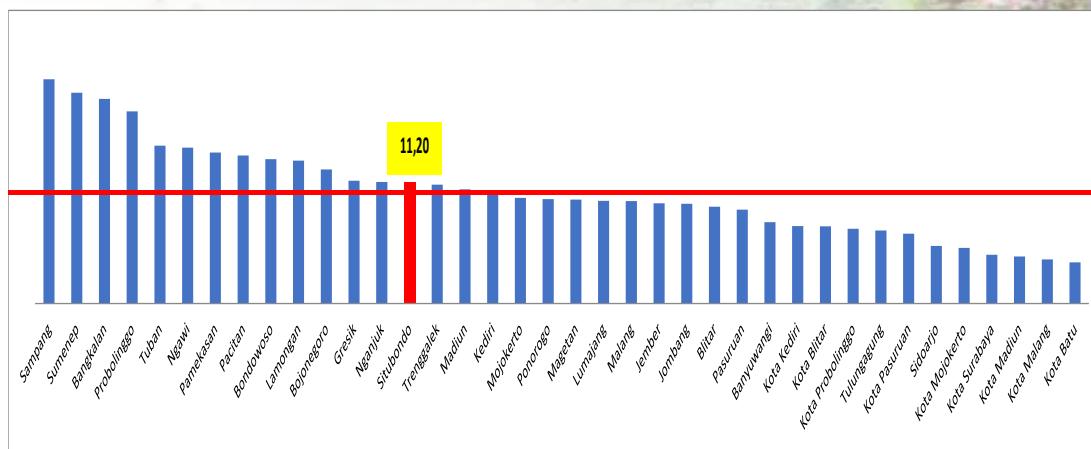
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2018 yakni sebagai berikut:



Gambar 2.6 :Percentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2019

Grafik diatas merupakan Perbandingan Persentase antara Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari tahun 2015-2019. Pada grafik tersebut diketahui bahwa angka persentase keduanya menurun di setiap tahunnya. Tahun 2019 angka rata-rata persentase penduduk miskin untuk Provinsi Jawa Timur yakni 10,37 dari sebelumnya sebesar 10,98. Sedangkan untuk Kabupaten Situbondo berada masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dengan angka 11,2 dari sebelumnya sebesar 11,82. Begitu pula data kemiskinan untuk Nasional juga turun dari 9,66 di tahun 2018 menjadi 9,22 di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif karena dengan menurunnya jumlah persentase penduduk miskin menandakan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mampu dan berkecukupan di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Namun untuk Kabupaten Situbondo masih perlu adanya tindak lanjut terkait Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten karena masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.



Angka Kemiskinan Prov
Jawa Timur Tahun 2019 :
10,37

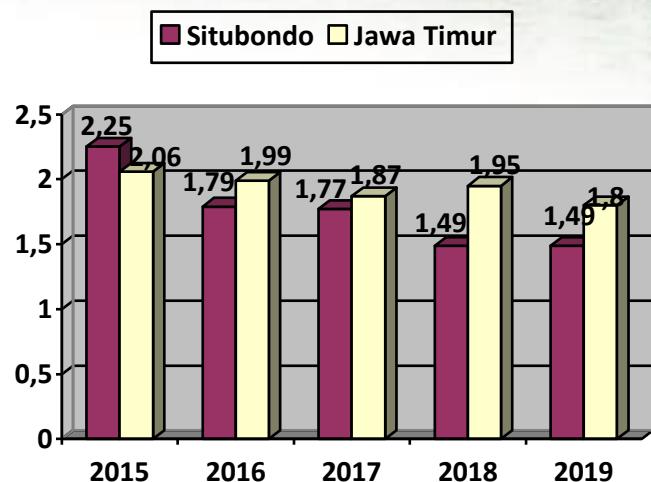
Gambar 2. 7 :Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2019

Sesuai grafik di atas yang menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo masih memiliki angka persentase diatas rata-rata Jawa Timur di Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas lagi dari grafik diatas. Dibandingkan Kabupaten lain masih ada beberapa Kabupaten yang memiliki angka persentase Kemiskinan Penduduk di atas rata-rata Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut diantaranya: Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

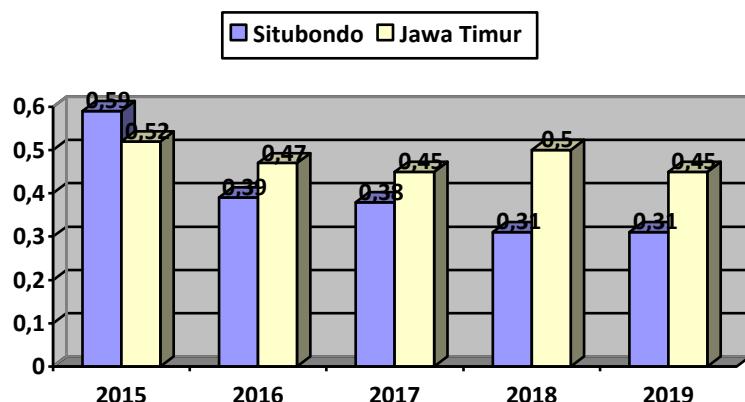
2.1.2.1.3.1 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan sebuah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 2.8: Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2015-2019
 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2019

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Situbondo menurun secara signifikan dari tahun 2016-2019. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Provinsi Jawa Timur yang Kedalaman Kemiskinannya meningkat dari tahun 2017 ketahun 2018. Tahun 2017 sebesar 1,87 kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 1,95. Peningkatan Kedalaman kemiskinan mengindikasikan hal yang negative karena hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Untuk Kabupaten Situbondo penurunan persentase mengindikasikan hal yang positif dan harus tetap dijaga konsistensi penurunannya.



Gambar 2.9: Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2015-2019

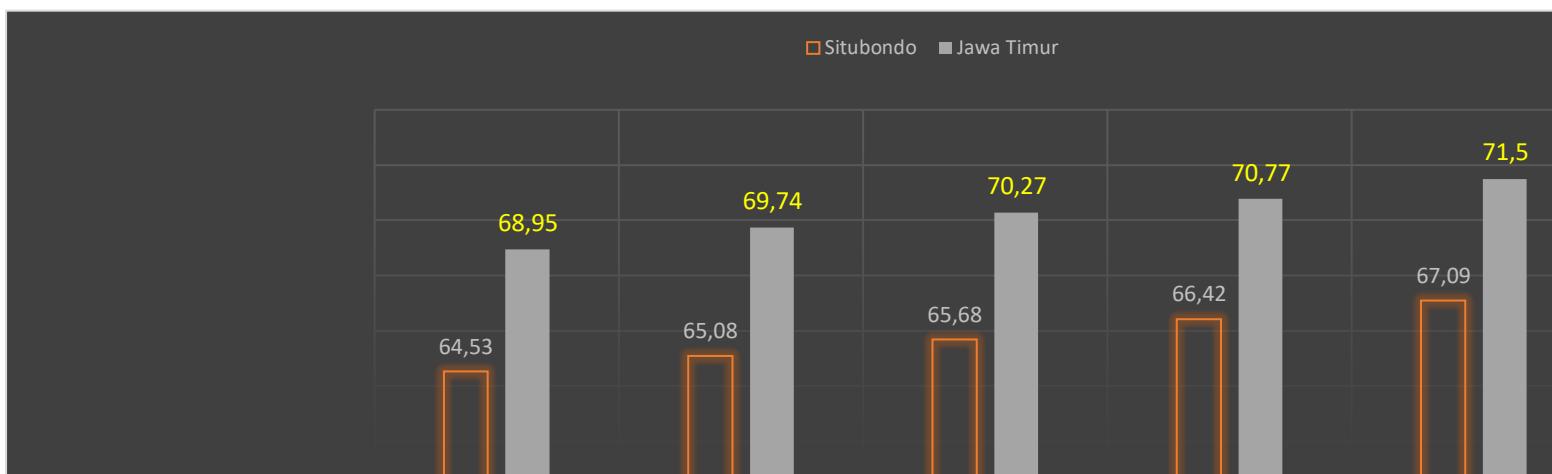
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur 2019

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa untuk keparahan kemiskinan Kabupaten Situbondo menurun secara signifikan dari tahun 2016-2019. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi di tahun 2017 (0,45) menuju 2018 (0,50) sebesar 0,05. Peningkatan Keparahan kemiskinan mengindikasikan hal

yang negative karena hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk Kabupaten Situbondo penurunan persentase mengindikasikan hal yang positif dan harus tetap dijaga konsistensi penurunannya.

2.1.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo:

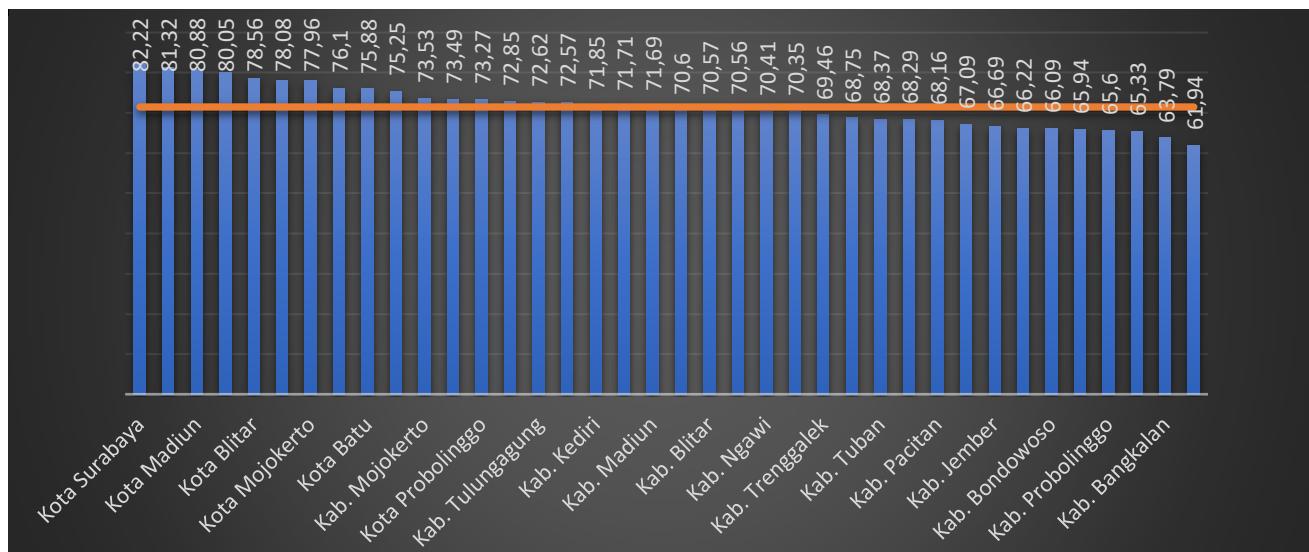


Gambar 2.10 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, angka IPM Kabupaten Situbondo selalu berada dibawah angka IPM Provinsi Jawa Timur. IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 sebesar 65,08. Di tahun berikutnya, yaitu 2017 naik menjadi 65,68. Selanjutnya secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya di tahun 2019 IPM mencapai 67,09 yang merupakan capaian tertinggi Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meningkatnya nilai IPM Kabupaten Situbondo menandakan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya beli, dan semakin

baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk. Pada Kabupaten Situbondo, meskipun angka IPM terus meningkat dalam 4 tahun terahir namun tetap berada di status “SEDANG” dengan rentang 61-70. Posisi IPM Kabupaten Situbondo tahun 2019 berada pada nomor 9 dengan angka IPM terendah di Provinsi Jawa Timur, posisi ini berada di bawah Kabupaten Pacitan dan di atas Kabupaten Jember dan untuk lebih jelas dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



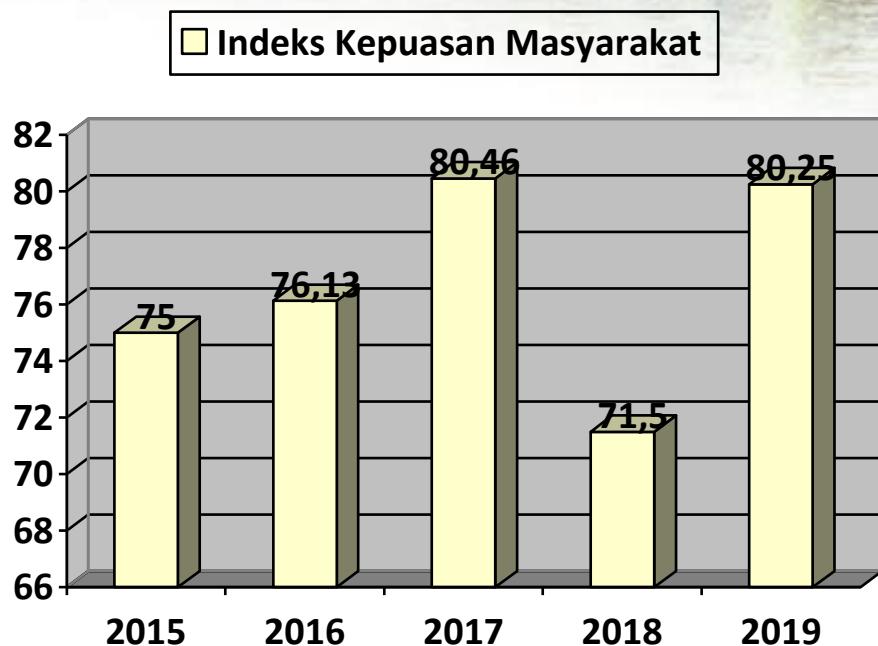
Gambar 2.11: IPM Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

2.1.2.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya





Gambar 2.12: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019

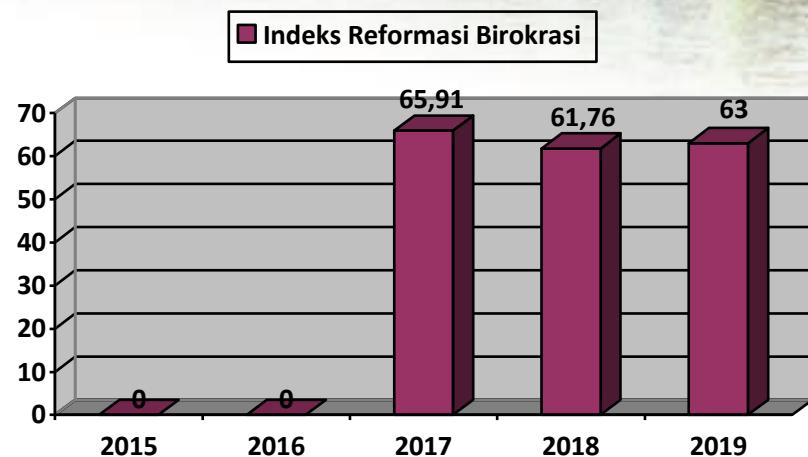
Sumber: LKpj Kabupaten Situbondo

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bersama bahwa Indeks Kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. 75 sebagai nilai rata rata IKM dari beberapa Perangkat Daerah di tahun 2015, lalu meningkat di tahun 2016 menjadi 76,13 dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 80,46. Pada tahun 2018 nilai IKM mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 71,5 namun hal ini memacu semangat birokrasi dalam meningkatkan pelayanannya sehingga nilai IKM menjadi 80,25 di tahun 2019.

2.1.2.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Gambar 2.13 : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

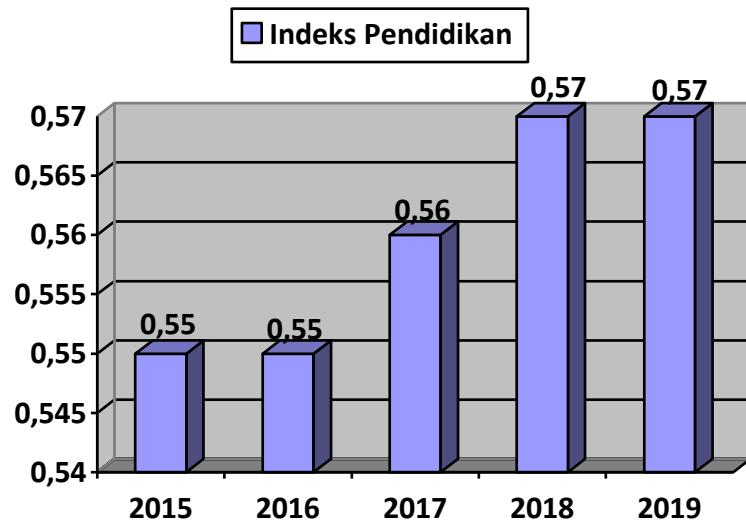
Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Indeks Reformasi Birokrasi mulai menjadi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo pada Perubahan RPJMD Tahun 2017, sehingga data tahun 2015 sampai tahun 2016 masih belum ada data.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan hasil pembangunan bidang Pendidikan yang di bentuk oleh Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah.

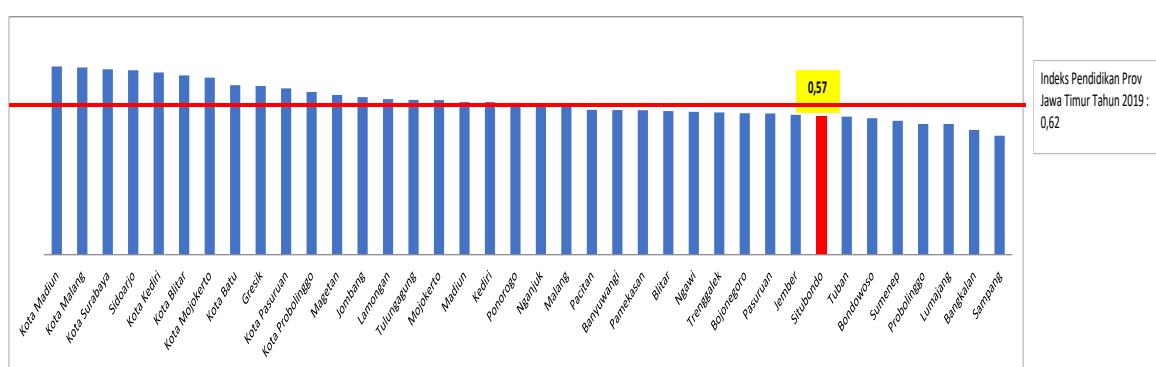


Gambar 2.14: Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo ada pada posisi 0,55, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2017 menjadi 0,56 dan kembali menjadi 0,57 di tahun 2018 dan 2019. Indeks Pendidikan dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Dari Kategori Indeks Pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa Pembangunan bidang Pendidikan masih berada di kategori rendah yang harus di tingkatkan lebih baik lagi.

Indeks pendidikan di bentuk oleh Angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur, Indeks Pendidikan tertinggi adalah Kota Madiun sebesar 0,77 dan terendah adalah Kabupaten Sampang sebesar 0,49.

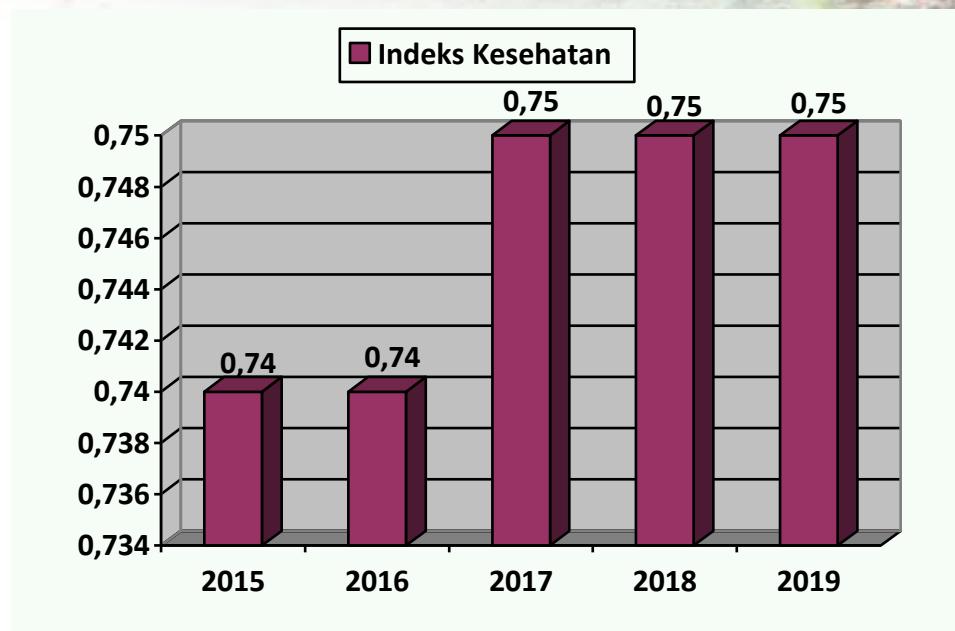


Gambar 2. 15 : Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

2.1.2.2.2 Indeks Kesehatan

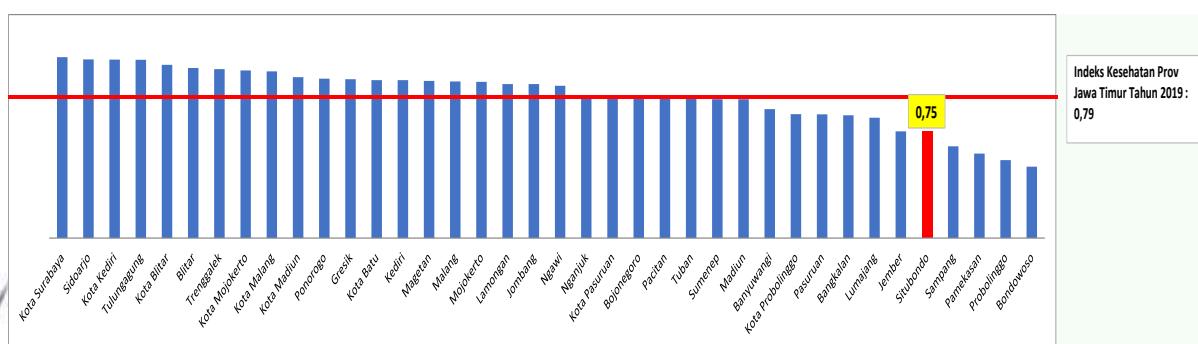
Indeks Kesehatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar BPS, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun. Indeks kesehatan tidak bisa lepas dari nilai **angka harapan hidup** yang pada tahun 2019 terealisasi sebesar 68,97 .



Gambar 2.16 : Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Apabila dilihat dari Indeks Kesehatan tahun 2019 dan dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kabupaten Situbondo berada pada posisi 34 dari 38 kabupaten/kota, dengan indeks kesehatan sebesar 0,75. Sedangkan indeks kesehatan tertinggi adalah kota Surabaya dengan indeks kesehatan 0,83, dan terendah adalah Kabupaten Bondowoso 0,72.

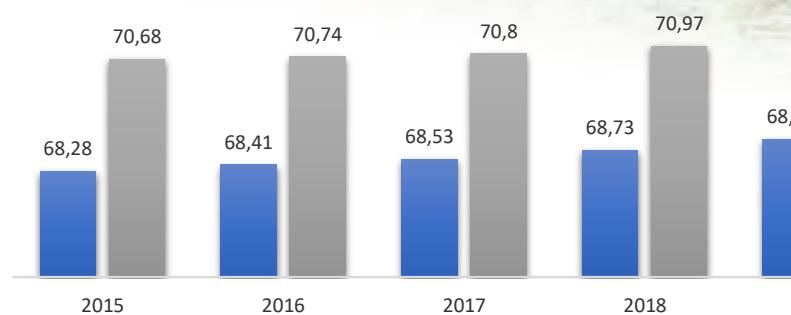


Gambar 2.17 : Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

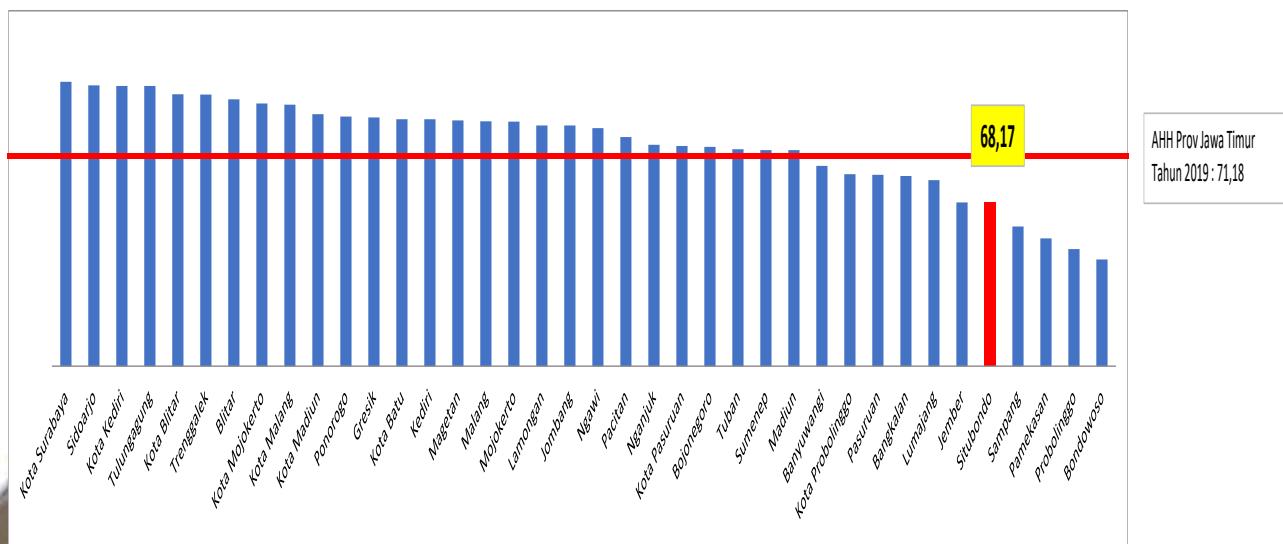
Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia dari dimensi kesehatan dan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Kesehatan. Berikut Gambar AHH Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan AHH Jawa Timur, dan AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2.18: Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

Angka harapan hidup (AHH) juga dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Angka harapan hidup yang dimaksud adalah usia maksimal rata-rata yang dicapai oleh penduduk Kabupaten Situbondo. Angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2017 nilai AHH masing-masing sebesar 68,41 dan 68,53. Pada tahun 2018 hingga 2019 secara berturut-turut sebesar 68,73 dan 68,97.



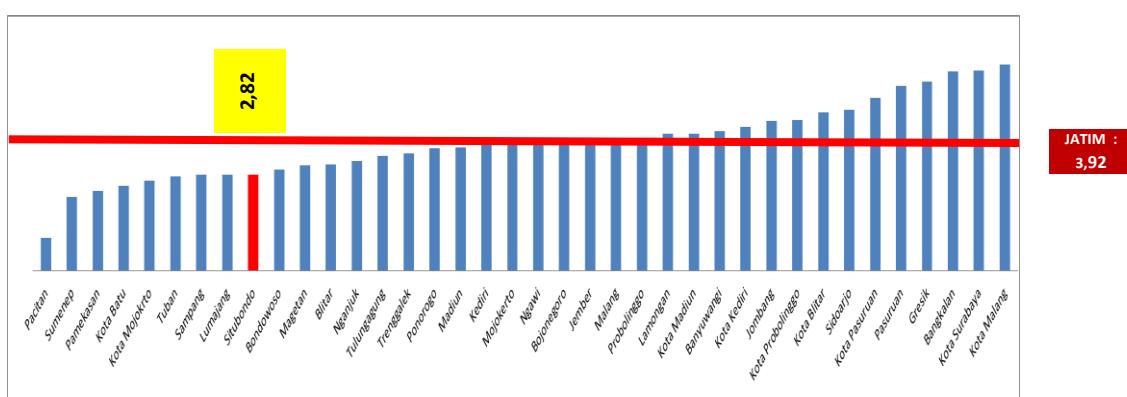
Gambar 2. 19 :Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

Dari gambar di atas tampak, bahwa AHH Kabupaten Situbondo masih berada di peringkat 34 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun sejak tahun 2016 rata-rata AHH Kabupaten Situbondo tiap tahun meningkat 0,29%, namun AHH Kabupaten Situbondo masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun terakhir, dan memerlukan perhatian khusus dengan program prioritas pembangunan yang dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

2.1.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

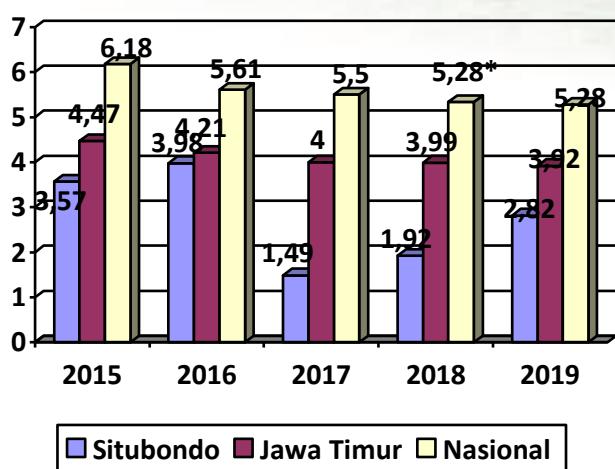
BPS menyatakan bahwa dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018 -Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,50 persenpoin), Industri Pengolahan (0,24 persenpoin), dan Perdagangan (0,20 persenpoin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (1,46 persenpoin), Jasa Keuangan (0,06 persenpoin), dan Pertambangan (0,04 persenpoin). Sedangkan untuk pekerja formal yaitu mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan yang menjadi buruh/karyawan/pegawai. Terdapat sejumlah 56,02 juta orang (44,28 persen) pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal (mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar) ada sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen). Berikut ini merupakan grafik persentase TPT Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2. 20 :Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber : Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Situbondo masih berada di bawah rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Tahun 2019 Persentase TPT Kabupaten yakni 2,82% dan rata-rata provinsi sebesar 3,92%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Persentase TPT dengan angka tertinggi di Tahun 2019 yakni Kota Malang sebesar 6,04%.



Gambar 2.21: Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Nasional 2020

Keterangan : * Agustus 2019

TPT Situbondo sebesar 2,82%, terdiri dari TPT laki-laki sebesar 3,71% dan TPT perempuan sebesar 1,59%, atau jumlah pengangguran terbuka total sebanyak 11.148 orang, terdiri dari laki-laki 8.507 orang dan perempuan 2.641 orang.

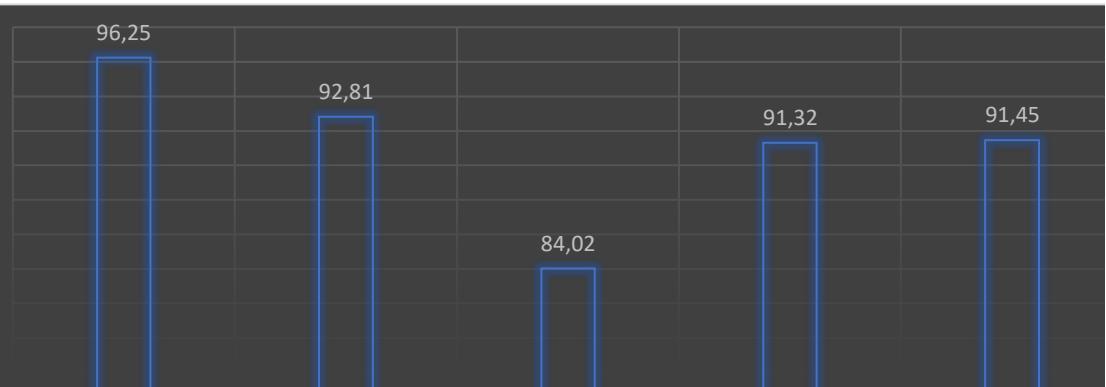
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Urusan pendidikan menjadi prioritas pertama dalam strategi pembangunan daerah.

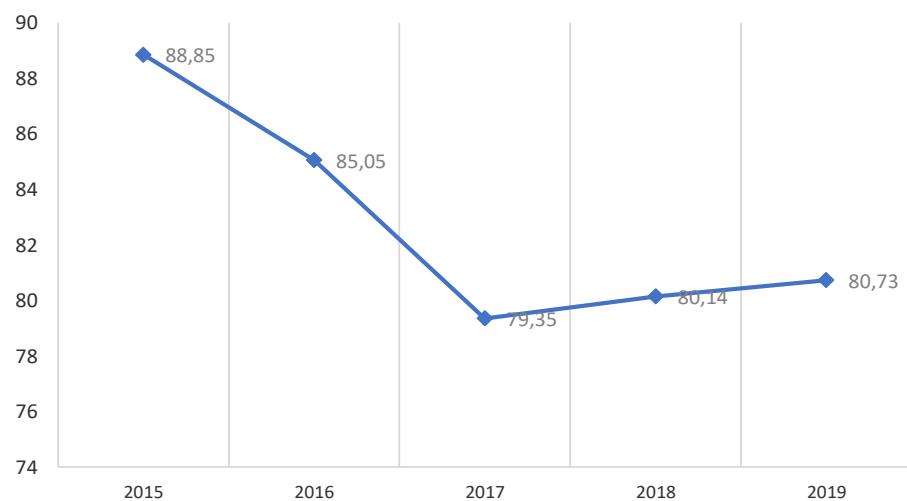
2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni



Gambar 2. 22 : Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APM berarti menandakan banyak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. APM Kabupaten Situbondo pada jenjang SD/MI dalam 4 tahun terakhir ini mempunyai trend yang fluktuatif. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI 2016 sebesar 92,81%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84,02%, angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 91,32% dan meningkat kembali menjadi 91,45% di tahun 2019. APM Kabupaten Situbondo pada jenjang SD/MI masih jauh dari angka ideal 100%, perlu perhatian serius guna meningkatkan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI.



Gambar 2. 23: Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs juga menunjukkan trend yang fluktuatif. Terjadi penurunan drastic dari tahun 2016 ketahun 2017 menjadi 79,35%. Angka tersebut berhasil mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,79% menjadi 80,14% dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 0,59% menjadi 80,73%. Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MTs Kabupaten Situbondo dalam 4 tahun terahir masih belum mampu menyentuh angka 90%.

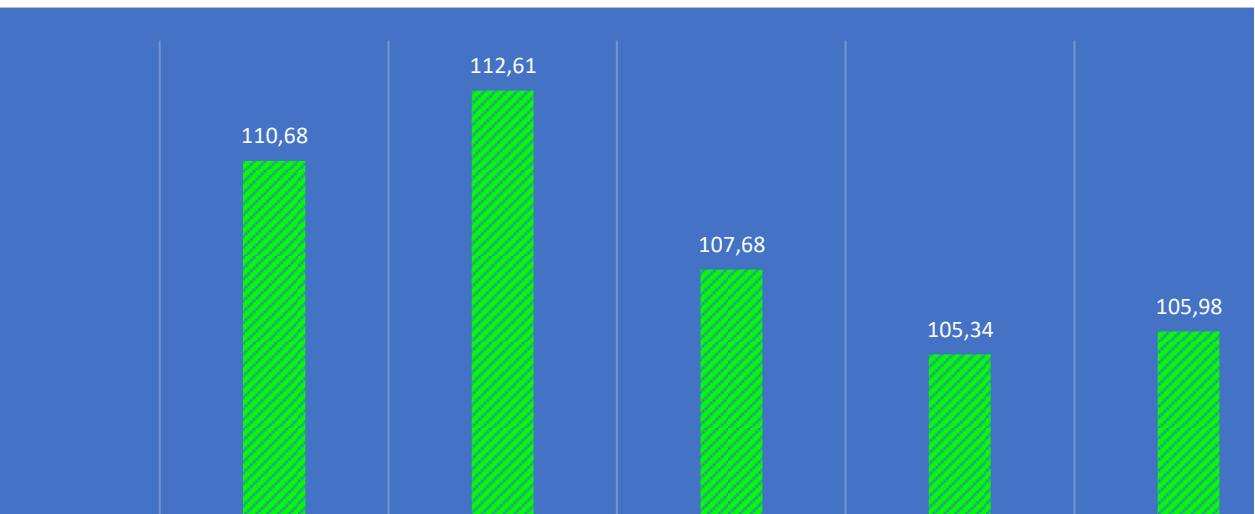
2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar



Gambar 2. 24: Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

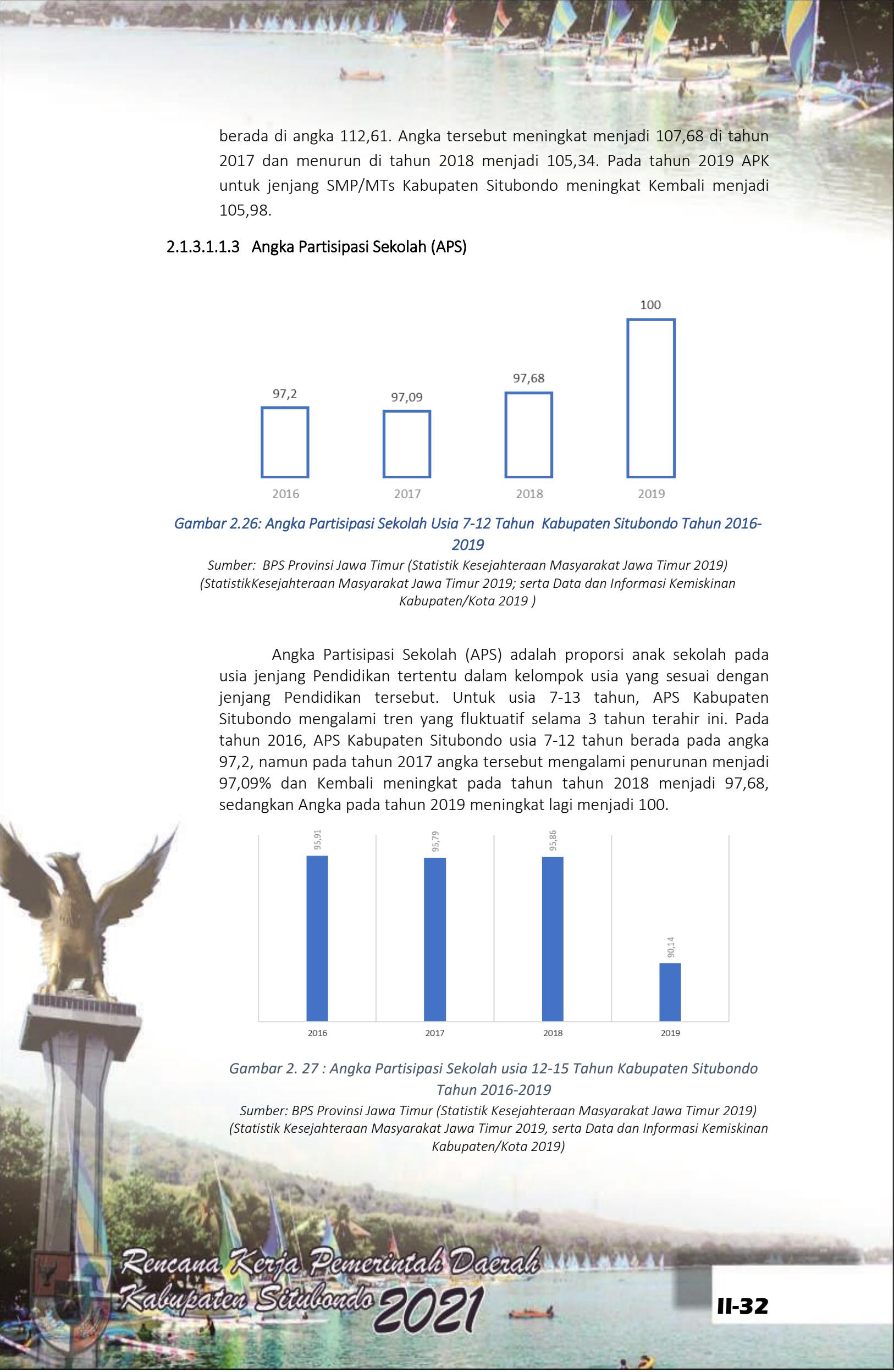
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang Pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang Pendidikan tersebut. Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami peningkatan selama 3 tahun terahir. Pada jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2016 APK sebesar 99,91%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,36% lalu angka tersebut naik menjadi 102,63% pada tahun 2018 dan mencapai 103,02% pada tahun 2019.



Gambar 2. 25: Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Situbondo juga mengalami trend yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, APK untuk jenjang SMP/MTs Kabupaten Situbondo



berada di angka 112,61. Angka tersebut meningkat menjadi 107,68 di tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi 105,34. Pada tahun 2019 APK untuk jenjang SMP/MTs Kabupaten Situbondo meningkat kembali menjadi 105,98.

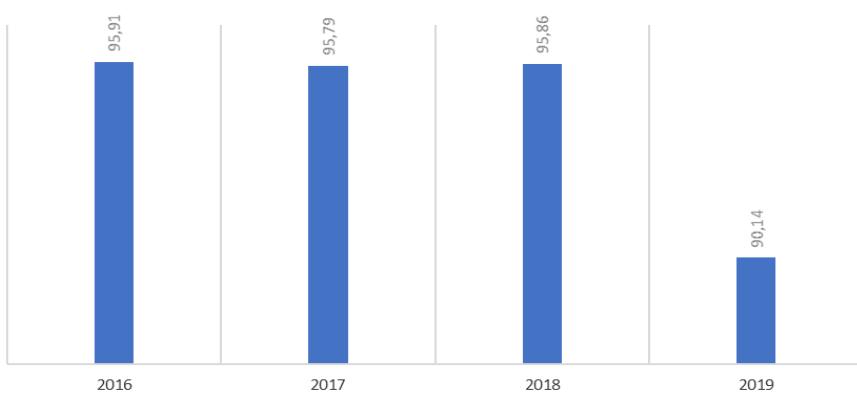
2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Gambar 2.26: Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Statistik Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur 2019) (Statistik Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur 2019; serta Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang Pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. Untuk usia 7-13 tahun, APS Kabupaten Situbondo mengalami tren yang fluktuatif selama 3 tahun terahir ini. Pada tahun 2016, APS Kabupaten Situbondo usia 7-12 tahun berada pada angka 97,2, namun pada tahun 2017 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 97,09% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 97,68, sedangkan Angka pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 100.

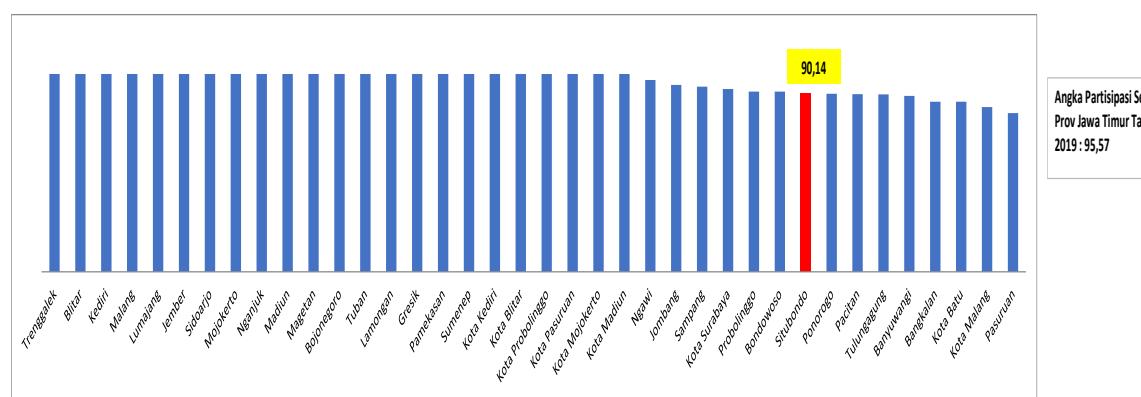


Gambar 2. 27 : Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Statistik Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur 2019) (Statistik Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur 2019, serta Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019)

APS untuk usia 12-15 tahun Kabupaten Situbondo dalam 3 tahun terahir ini juga mengalami tren yang fluktuatif. Dimana angka terbesar berada pada tahun 2016 yaitu 95,91% dan angka terendah berada pada tahun 2017 dengan 95,579%. Pada tahun 2016, APS Kabupaten Situbondo untuk usia 12-15 tahun berada pada angka 95,91%, turun menjadi 95,79% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 95,86% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 90,14%. Dalam tiga tahun terakhir, APS untuk usia 12-15 tahun Kabupaten Situbondo juga masih jauh dari angka ideal 100%.

Sementara apabila dibandingkan dengan APS untuk usia 12-15 tahun pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo berada di posisi 30, dan posisi paling terakhir adalah Kabupaten Pasuruan dengan angka APS 80,19%.



Gambar 2.28: Angka Partisipasi Sekolah usia 12-15 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019

2.1.3.1.1.4 Angka Kelulusan

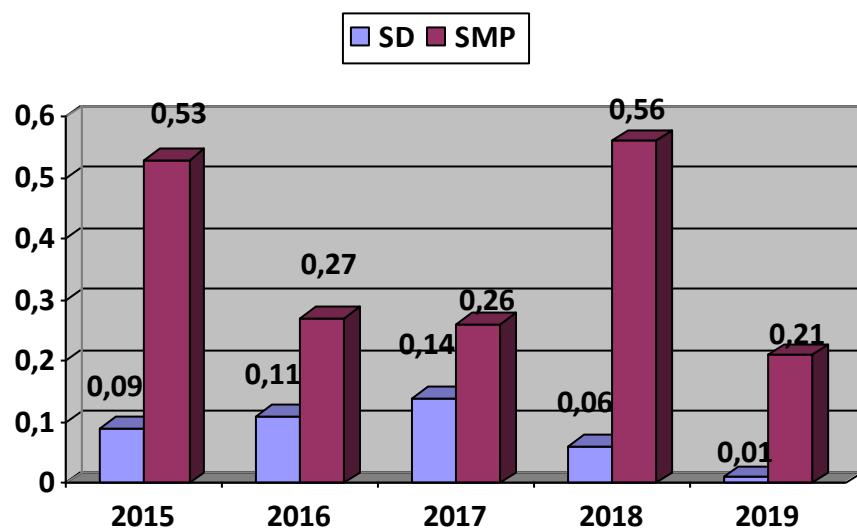


Gambar 2. 39: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Angka kelulusan sekolah adalah angka persentase siswa yang telah berhasil lulus pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI presentase kelulusan siswa Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 tercatat sebesar 100%. Ini menandakan bahwa setiap siswa SD/MI berhasil lulus 100% tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 angka kelulusan sebesar 99,94% dan mulai tahun 2017-2019 angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs berhasil memperoleh angka yang sempurna yaitu 100%.

2.1.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah



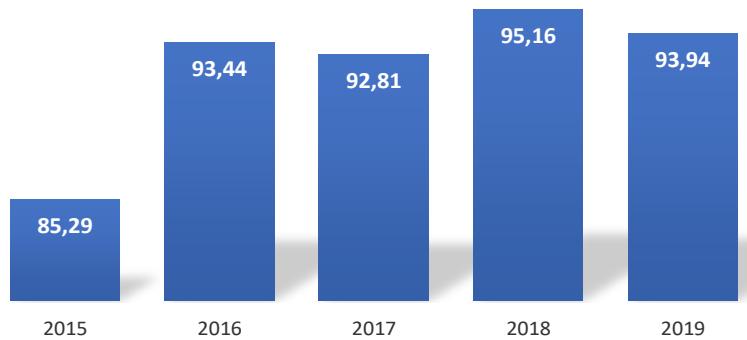
Gambar 2. 30: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Angka Putus Sekolah adalah angka (jumlah siswa) putus sekolah per 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah tahun 2016 sebesar 0,11%. Pada tahun 2017 angka tersebut naik menjadi 0,14 siswa SD/MI yang putus sekolah, angka putus sekolah jenjang SD/MI berhasil menurun di tahun 2019 menjadi 0,01. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,27%, angka tersebut turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,26% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,21% pada tahun 2019.

2.1.3.1.1.6 Angka Melek Huruf

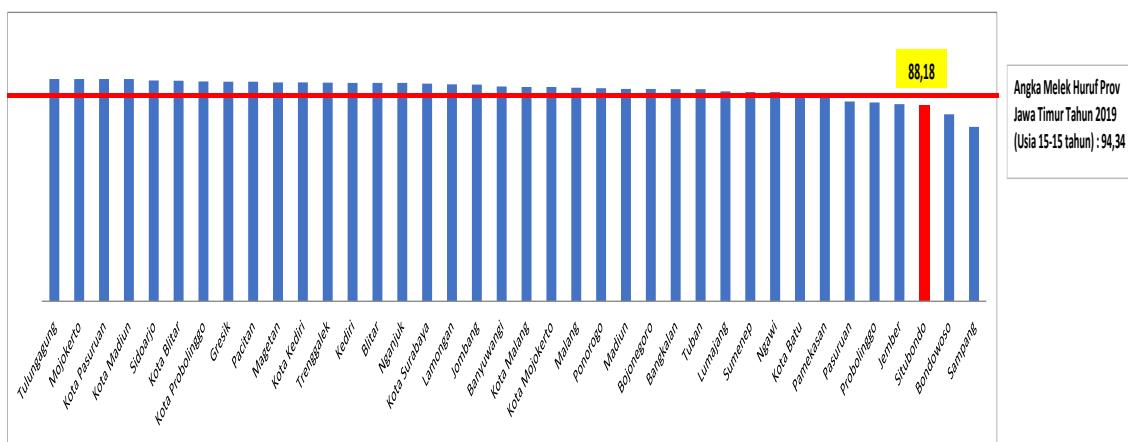
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Berikut merupakan Gambar Angka Melek Huruf di Kabupaten Situbondo tahun 2016-2019:



Gambar 2.31: Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: RKPD Kabupaten Situbondo 2020 dan LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Kabupaten Situbondo memiliki angka melek huruf yang fluktuatif selama 5 tahun terahir. Pada tahun 2015, angka melek huruf Kabupaten Situbondo berada di angka 85,29, lalu pada tahun 2016, angka melek huruf Kabupaten Situbondo berada di angka 93,44 kemudian turun menjadi 92,81 di tahun 2017. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 95,16 lalu menurun kembali di tahun 2019 menjadi 93,94.

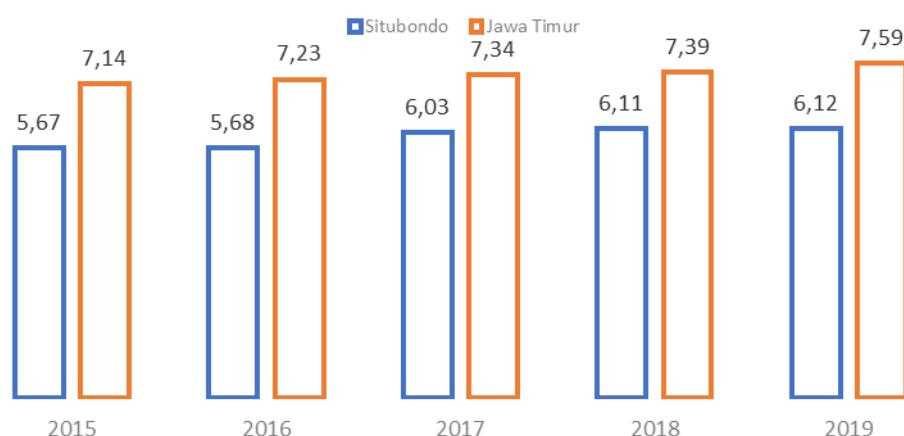


Gambar 2. 32 : Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 55 Tahun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS 2019.

2.1.3.1.1.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

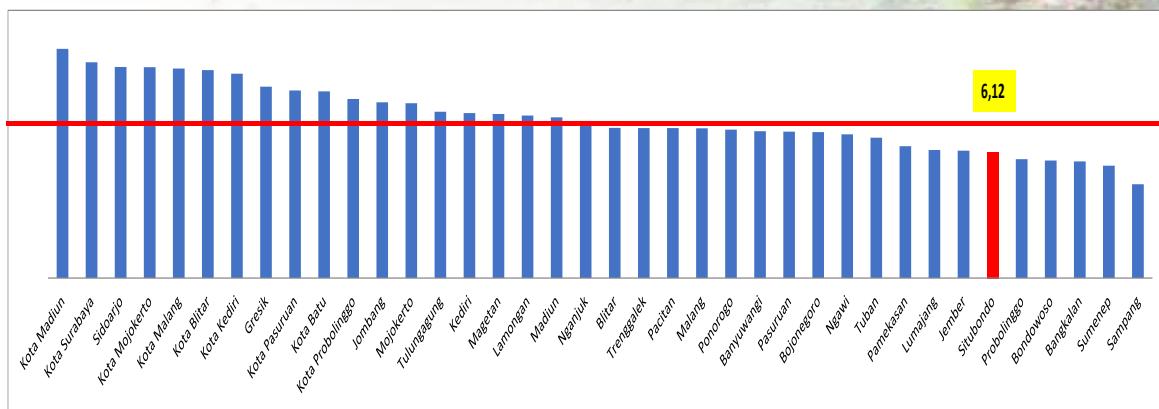
Sebagai salah satu Indikator yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Berikut merupakan Gambar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo di bandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur pada tahun 2016-2019:



Gambar 2.33: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

Angka Rata-Rata Lama Sekolah siswa (Mean Years of Schooling-MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 juga menggambarkan tren yang positif, namun masih tergolong rendah. Pada tahun 2015 Angka Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo sebesar 5,67, tahun 2016 nilai Angka Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo sebesar 5,68, pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,35 menjadi 6,03, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 6,11 dan pada tahun 2019 nilai MYS berada pada angka 6,12. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir.



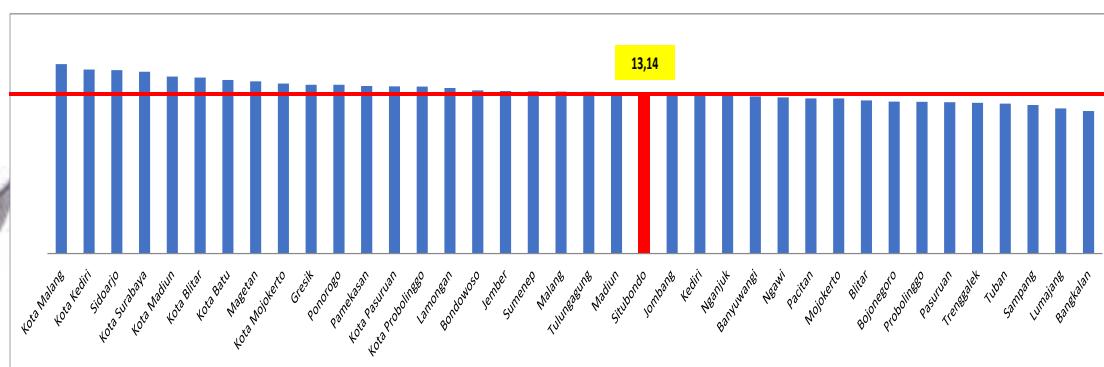
Gambar 2. 34 :Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

2.1.3.1.1.8 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah peduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Situbondo yaitu 13,14. Angka ini menjadi peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan lamanya peluang penduduk yang bersekolah sampai saat ini yaitu sampai usia 13 tahun. Dan angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah Provinsi Jawa Timur yaitu 13,16 menunjukkan capaian kinerja Pemerintah sudah berada di jalurnya sehingga angka capaiannya hampir sama dengan capaian Provinsi Jawa Timur.

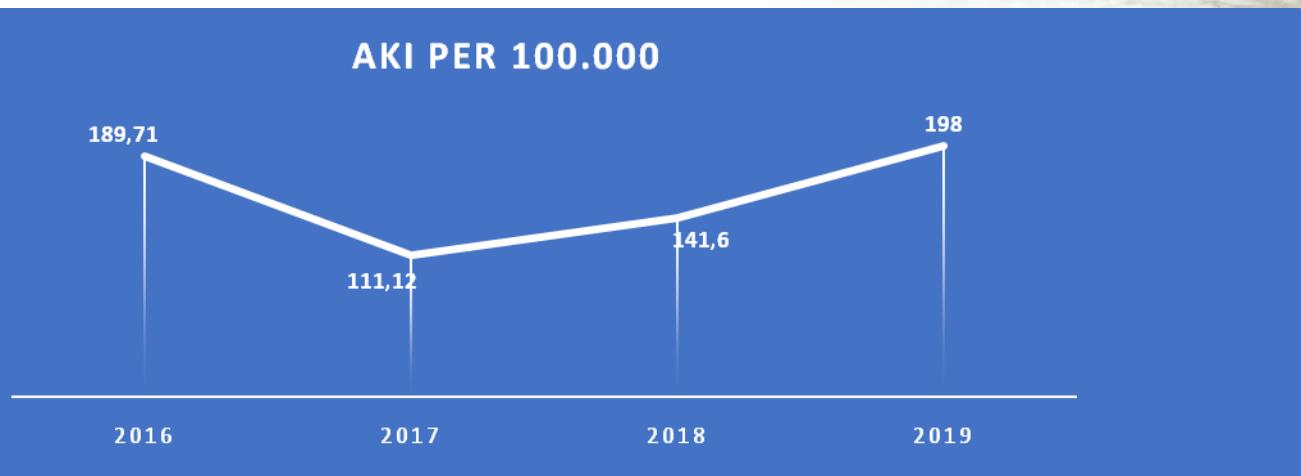


Gambar 2. 35 :Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS dan BPS Republik Indonesia

2.1.3.1.2 Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Angka Kematian Ibu



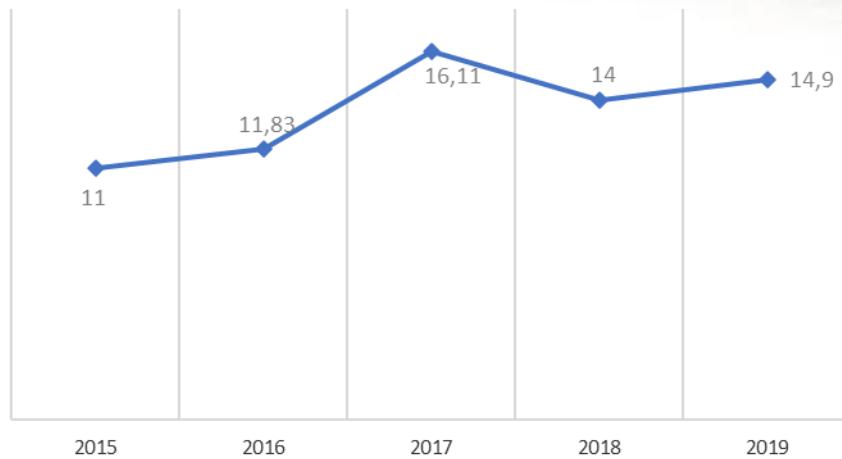
Gambar 2. 36: Angka Kematian Ibu Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Situbondo 2018, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dampak Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di samping Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lainnya seperti kecelakaan, per 100.000 kelahiran hidup.

AKI di Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir dan tergolong tinggi. Pada tahun 2016 AKI Kabupaten Situbondo berada pada angka 189,71 dan turun menjadi 111,12 di tahun 2017. Setelah itu AKI Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan pada tahun hingga tahun 2019. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Situbondo tahun 2019 mengalami peningkatan 56,4 poin dari Kematian ibu sebesar 141,6/ 100.000 KH kelahiran di tahun 2018 dibandingkan tahun 2019 sebesar 198/ 100.000 KH.

2.1.3.1.2.2 Angka kematian Bayi



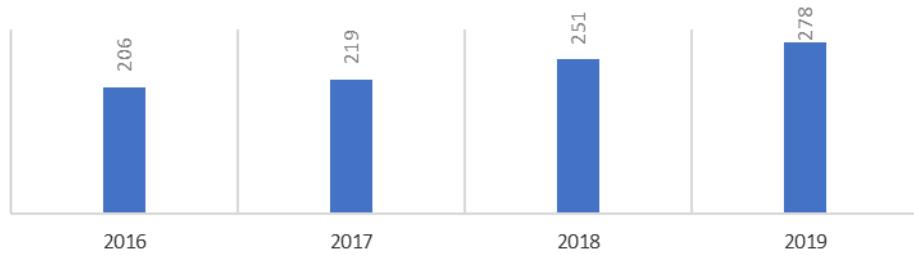
Gambar 2.37: Angka Kematian Bayi Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Situbondo 2018, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 2019

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya.

AKB Kabupaten Situbondo cenderung fluktuatif selama 4 tahun terahir ini. Terjadi peningkatan sebesar 4,28% di tahun 2017 menjadi 16,11 bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 11,83%. Angka tersebut menurun menjadi 14% dan meningkat 0,9% di tahun 2019 menjadi 14,9%.

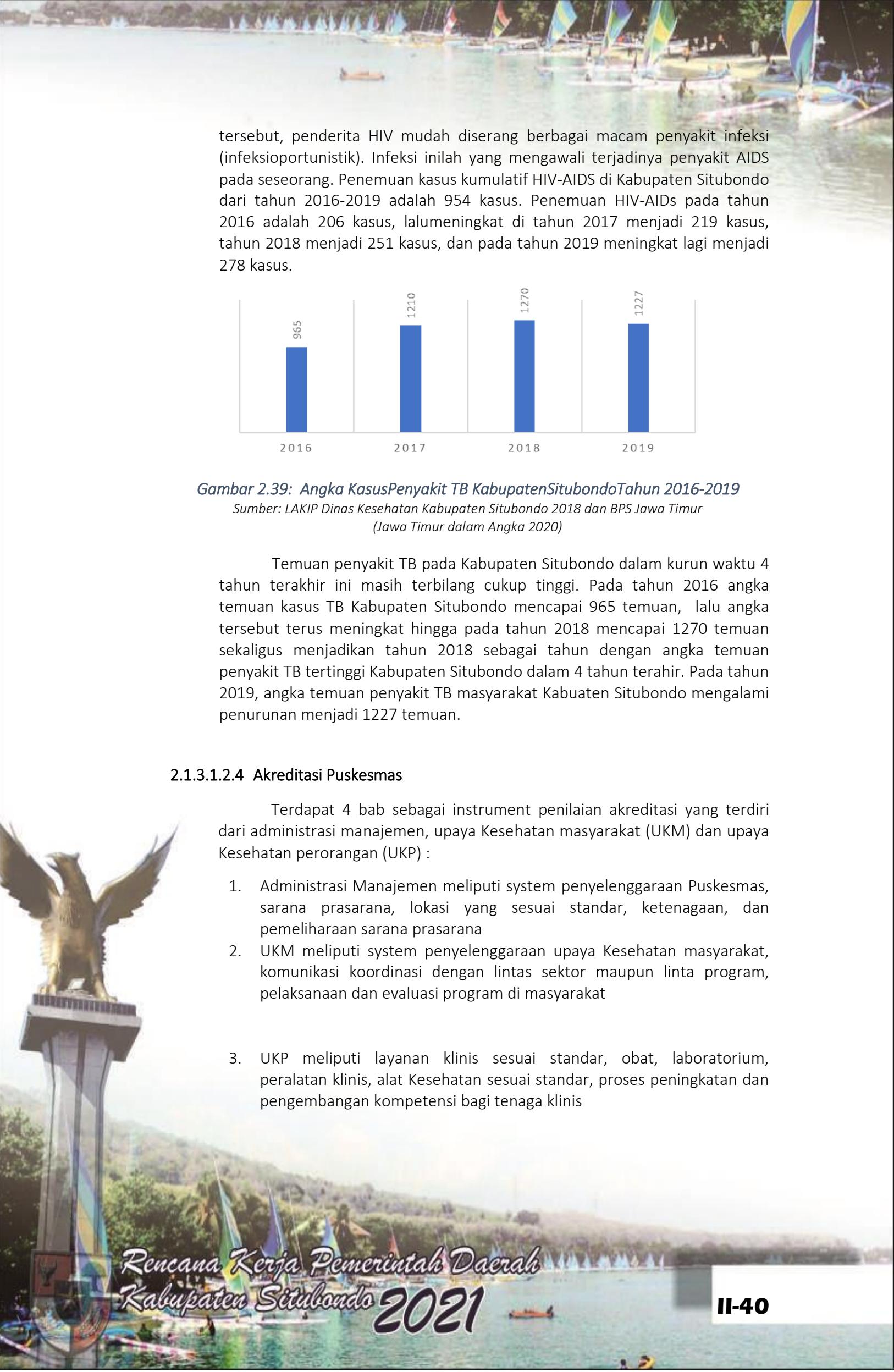
2.1.3.1.2.3 Penyakit Menular



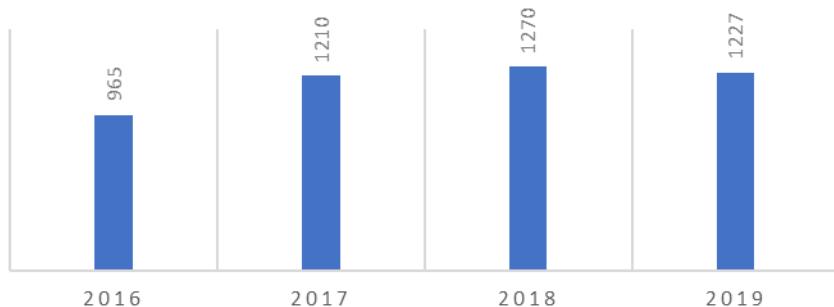
Gambar 2. 38: Angka Kasus HIV-AIDs Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018 dan BPS Jawa Timur (Jawa Timur dalam Angka 2020)

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Akibat penurunan daya tahan tubuh



tersebut, penderita HIV mudah diserang berbagai macam penyakit infeksi (infeksiopportunistik). Infeksi inilah yang mengawali terjadinya penyakit AIDS pada seseorang. Penemuan kasus kumulatif HIV-AIDS di Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 adalah 954 kasus. Penemuan HIV-AIDS pada tahun 2016 adalah 206 kasus, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 219 kasus, tahun 2018 menjadi 251 kasus, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 278 kasus.



Gambar 2.39: Angka KasusPenyakit TB KabupatenSitubondoTahun 2016-2019

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018 dan BPS Jawa Timur (Jawa Timur dalam Angka 2020)

Temuan penyakit TB pada Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2016 angka temuan kasus TB Kabupaten Situbondo mencapai 965 temuan, lalu angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai 1270 temuan sekaligus menjadikan tahun 2018 sebagai tahun dengan angka temuan penyakit TB tertinggi Kabupaten Situbondo dalam 4 tahun terahir. Pada tahun 2019, angka temuan penyakit TB masyarakat Kabupaten Situbondo mengalami penurunan menjadi 1227 temuan.

2.1.3.1.2.4 Akreditasi Puskesmas

Terdapat 4 bab sebagai instrumen penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya Kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya Kesehatan perorangan (UKP) :

1. Administrasi Manajemen meliputi system penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan, dan pemeliharaan sarana prasarana
2. UKM meliputi system penyelenggaraan upaya Kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat
3. UKP meliputi layanan klinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat Kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis

4. Mutu merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan puskesmas baik di masyarakat maupun klinik perorangan secara berkesinambungan.

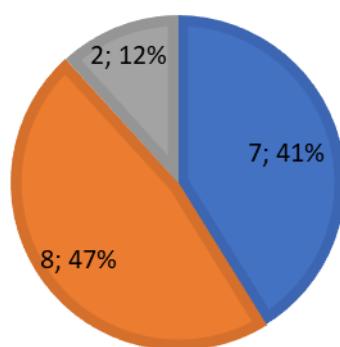
Tabel 2. 12: Klasifikasi Kelulusan Akreditasi

Paripurna	Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%
Utama	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan UKP dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%
Madya	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%
Dasar	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%
Tidak Terakreditasi	Apabila system pengelolaan puskesmas, ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

Sebanyak 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo, 7 Puskesmas telah terakreditasi Utama, 8 Puskesmas terakreditasi Madya, dan 2 Puskesmas terakreditasi Dasar.

■ Utama ■ Madya ■ Dasar



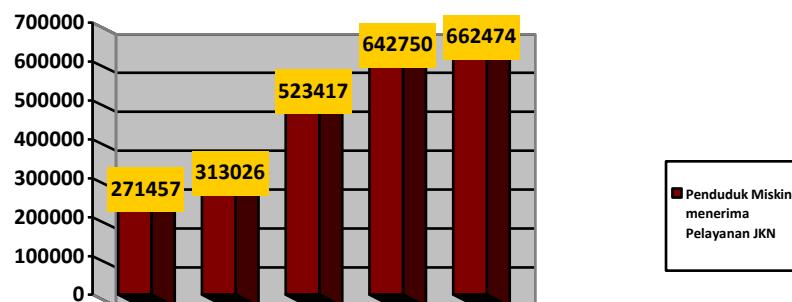
Gambar 2. 40: Akreditasi Puskesmas Kabupaten Situbondo 2019

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2020

Puskesmas yang memiliki status “Utama” meliputi : puskesmas Banyuglulur, puskesmas Besuki, puskesmas Mlandingan, puskesmas Situbondo, puskesmas Arjasa, puskesmas Asembagus, dan puskesmas Jangkar. Puskesmas yang memiliki status “Madya” antara lain :puskesmas Jatibanteng, puskesmas Sumbermalang, puskesmas Bungatan, puskesmas Kendit, puskesmas Panarukan, puskesmas Panji, puskesmas Mangaran, dan puskesmas Kapongan. Sedangkan puskesmas yang masih memiliki status “Dasar” yaitu puskesmas Banyuputih dan puskesmas Suboh.

2.1.3.1.2.5 Persentase penduduk miskin yang terlayani JKN

Seluruh penduduk miskin yang mengajukan dan menerima pelayanan kesehatan melalui JKN semakin meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 271.457 jiwa, tahun 2016 sebesar 313.026 jiwa, tahun 2017 sebesar 523.417 jiwa, tahun 2018 sebesar 642.750 jiwa dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 662.474 jiwa.



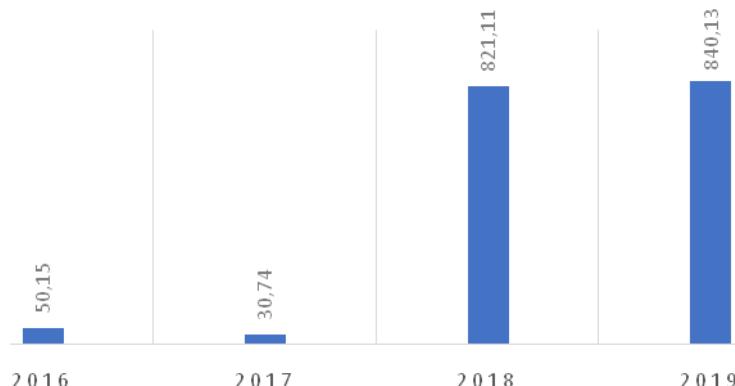
Gambar 2.41: Persentase Masyarakat Miskin terlayani JKN Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2019

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.1.3.1.3.1 Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik



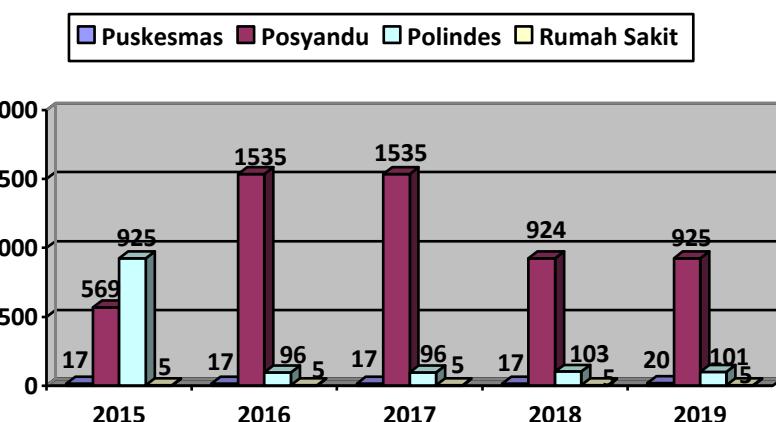
Gambar 2.42: Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik Tahun 2016-2019

Sumber: Data diolah dari LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019

Jumlah kondisi jalan yang baik di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 berdasarkan data LKPJ pada tahun 2016-2019 direalisasikan 50,15 km dari targetnya sepanjang 25 km, maka capaiannya sebesar 49,85%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dilihat dari

realisasinya sebesar 30,74 km dengan target sebesar 8,5 km dan capaiannya sebesar 27,65%. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila berdasarkan realisasinya sepanjang 821,11 km dengan target sepanjang 9,39 km dan capaiannya adalah 1,14%. Sementara pada tahun 2019 realisasinya sepanjang 840, 13 km dengan target sepanjang 19,02 km dan capaiannya adalah 2,26%.

2.1.3.1.3.2 Ketersediaan Sarana Kesehatan

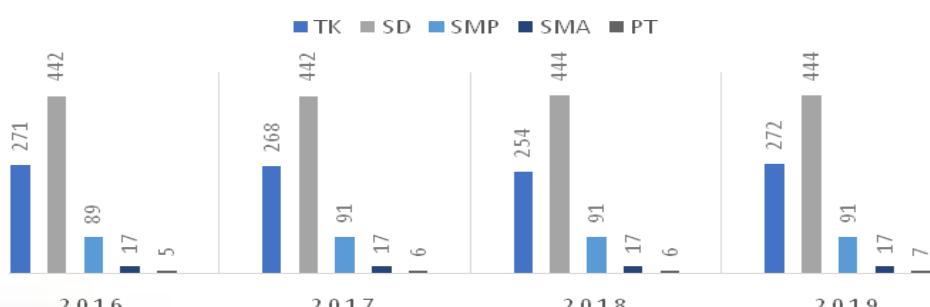


Gambar 2.43: Ketersediaan Sarana Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Sarana Kesehatan terbanyak pada Kabupaten Situbondo adalah Posyandu, di tahun 2015 berjumlah 569 kemudian meningkat signifikan menjadi 1535 di tahun 2016 dan 2017 kemudian turun lagi di tahun 2018 menjadi 924 dan 925 di tahun 2019. Untuk Puskesmas dari tahun 2015 sampai 2018 berjumlah 17 kemudian bertambah di tahun 2019 menjadi 20 puskesmas. Selanjutnya polindes dengan jumlah 925 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 96 lalu meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 103 dan kembali turun di tahun 2019 menjadi 101. Untuk Terakhir, rumah sakit yang jumlahnya tetap dari tahun 2015-2019 yang berjumlah 5 Rumah Sakit.

2.1.3.1.3.3 Ketersediaan Sarana Pendidikan



Gambar 2.44: Ketersediaan Sarana Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Jumlah sarana Pendidikan tertinggi adalah Sekolah Dasar dengan jumlah 442 pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian meningkat menjadi 444 jumlah sekolah dasar pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, diikuti dengan jumlah Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 271 pada tahun 2016, menurun menjadi 268 TK pada tahun 2015, dan semakin menurun pada tahun 2018 dengan jumlah 254. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 272 unit TK. Jumlah SMP pada tahun 2016 sebanyak 89 sekolah dan mengalami peningkatan menjadi 91 unit SMP hingga tahun 2019. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tetap sejumlah 17 sekolah SMA. Serta perguruan tinggi yang memiliki jumlah 5 PT pada tahun 2016, meningkat menjadi 6 PT pada tahun 2017 dan 2018 dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 7 sekolah PT.

2.1.3.1.3.4 Kondisi Saluran Irigasi



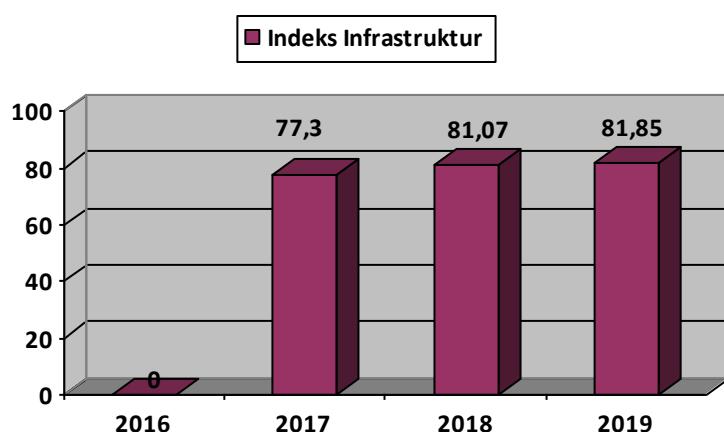
Gambar 2. 45: Presentase Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019
Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Pada tahun 2016 indeks kondisi jaringan irigasi sebesar 55,38% kemudian, tahun 2017 sebesar 50,66%. Pada Tahun 2018 Indeks Kondisi Jaringan Irigasi meningkat tercatat sebesar 52.78%. Untuk tahun 2019 target Indeks Kondisi Jaringan Irigasi adalah sebesar 54.17% dan berhasil terealisasi sebesar 54.28% dengan capaian panjang jaringan irigasi 14.37 km sehingga sampai dengan saat ini panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 631.111 km dari panjang total keseluruhan saluran jaringan irigasi kabupaten 1.134.523 km. Terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi pengukuran Indeks Kondisi Jaringan Irigasi.yaitu:

- Prasarana Fisik dimana 232 Jaringan irigasi dilihat kondisi/tingkat kerusakannya;
- Produktivitas (padi) dimana dari 232 lokasi jaringan irigasi yang mempunyai potensi sebagai produktivitas padi;
- Sarana Penujang dimana dari 232 lokasi jaringan irigasi yang memiliki sarana penunjang seperti saranaoperasi dan pemeliharaan

- Organisasi Personalia untuk membantu kepala dinas dalam hal pengelolaan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten;
- Dokumentasi dalam setiap lokasi diperlukan data dan peta Daerah irigasi yang merupakan petunjuk dan informasi mengenai jaringan irigasi;
- P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan air irigasi diperlukan peran serta masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yaitu HIPPA.

2.1.3.1.3.5 Indeks Infrastruktur

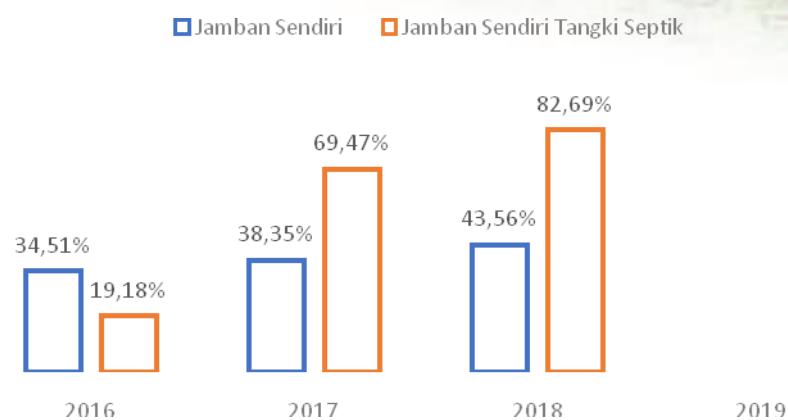


*Gambar 2. 46: Presentase Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo
Tahun 2016-2019*

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks infrastruktur di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 indeks infratruktur sebesar 77,3 kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 81,07 dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 81,85. Oleh karena itu diperlukan adanya konsistensi agar indeks infratruktur di Kabupaten Situbondo ini terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



Gambar 2. 47: Ketersediaan Sarana MCK Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Ketersediaan MCK di Kabupaten Situbondo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik dilihat dari jumlah jamban sendiri maupun jamban sendiri dengan tangka septik. Berdasarkan data diatas maka jumlah jamban sendiri pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 34,51% meningkat pada tahun 2017 sebesar 38,35% dan pada tahun 2018 sebanyak 43,56%. Begitu pula dengan jamban sendiri dengan tangka septik pada tahun 2016 terealisasi sebesar 19,18% meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi 69,47% dan pada tahun 2018 sebesar 82,69%. Adapun data pada tahun 2019 belum tersedia.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tenram, kondusif sesuai dengan pengertian dari tantribum itu sendiri. Di Kabupaten Situbondo urusan Ketenteraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 organisasi perangkat daerah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 indikator sasaran dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indek Demokrasi Indonesia	%	82	72,86	88,85
2	Persentase Potensi Konflik Terkait Poleksosbud yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo 2019

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo melaksanakan 3 program pembangunan sebagaimana dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2. 14 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisa si	Capaia n Kinerja
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	4,5	3,6	80,00
2	Rasio Linmas	%	0,08	0,07	87,50
3	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai SOP	%	90	100	111,11

Sumber: Satpol PP 2019

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo melaksanakan 3 program pembangunan sebagaimana dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2. 15 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Prosentase desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	%	0.12	0.12	100,00
2	Responetime/daya tanggap bencana		8 jam	8 jam	100,00
3	Prosentase pemulihan kembali wilayah terdampak bencana	%	100	100	100,00

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019

2.1.3.1.6 Sosial

2.1.3.1.5.1 Presentase Penurunan PMKS

Pemantauan perkembangan jumlah PMKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator sosial ekonomi. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsionalnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Perkembangan PMKS di Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui grafik penurunan PMKS dalam bentuk persentase sebagai berikut:



Gambar 2.48: Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Sosial 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penurunan PMKS di Kabupaten Situbondo meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Tahun 2016 persentase penurunan PMKS berada di angka 0,52% kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 1,7%, tahun 2018 (3,56%) dan tahun 2019 (11,7%). Peningkatan paling banyak yakni dari tahun 2018 menuju tahun 2019 yakni mengalami peningkatan sebesar 7,51%. Peningkatan penurunan PMKS secara signifikan di setiap tahunnya mengindikasikan hal yang positif karena semakin meningkatnya angka penurunan PMKS maka akan bertambah pula angka masyarakat yang berstatus sejahtera. Untuk lebih lengkapnya mengenai PMKS di Kabupaten Situbondo maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.16: Data PMKS Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS Kabupaten	50.111	49.848	49.000	47.255
2	Target PMKS yang Ditangani	313	960	2025	5680
3	Realisasi PMKS yang ditangani	263	848	1.745	5.229
4	Sisa Jumlah PMKS Kabupaten	49.848	49.000	47.255	42.026
5	Jumlah Penduduk	673.282	676.703	679.993	679.993
6	% PMKS dari Jumlah Penduduk	7,44%	7,37%	7,2%	6,95%

Sumber: Dinas Sosial 2020

Tabel diatas menjabarkan mengenai data PMKS di Kabupaten Situbondo diantaranya yakni: Jumlah PMKS Kabupaten Situbondo, Target PMKS yang ditangani, Realisasi PMKS yang di tangani, Sisa Jumlah PMKS Kabupaten Situbondo, Jumlah Keseluruhan Penduduk Situbondo dan yang terakhir Persentase PMKS dari Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo.

2.1.3.2 *Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar*

2.1.3.2.1 *Tenaga Kerja*

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi maka perlu adanya upaya perluasan lapangan kerja. Untuk melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja.

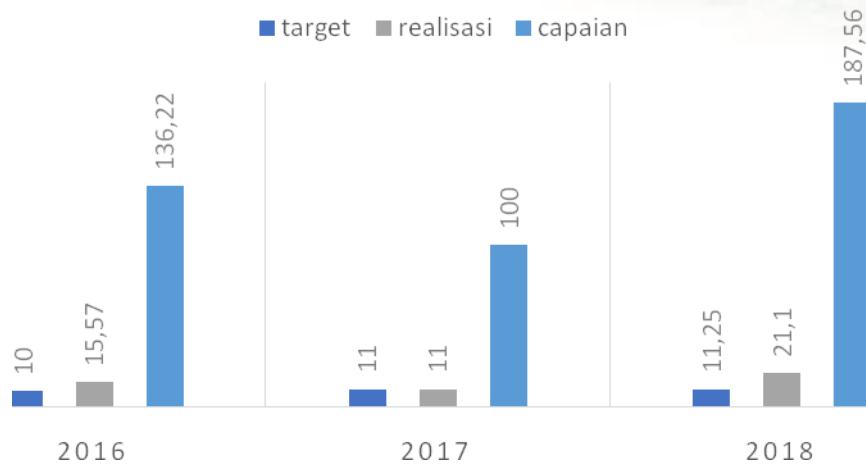
Apabila dilihat dari sisi TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019 Situbondo sebesar 72,20% , terdiri dari TPAK Laki-laki sebesar 86,82% dan TPAK Perempuan sebesar 58,57%, atau jumlah yang bekerja total sebanyak 383.888 orang, terdiri dari laki-laki 229.132 orang dan perempuan 165.904 orang. TPAK tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, sebesar 0,46%.

Dari sisi status pekerjaan utama, dengan status pekerjaan berusaha sendiri sebanyak 57.475 orang, status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 79.287 orang, status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 12.400 orang, status pekerjaan buruh/karyawan /pegawai sebanyak 12.400 orang, status pekerjaan pekerja bebas sebanyak 77.819 orang, dan status pekerjaan pekerja keluarga sebanyak 49.008 orang.

Lapangan pekerjaan utama yang masih mendominasi adalah pertanian sebesar 43%, dilanjutkan Jasa 40% dan manufaktur 17%. Sedangkan upah minimum regional Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar Rp. 1.913.321,73, naik sebesar 18% dari tahun 2018 dengan upah minimum regional sebesar Rp. 1.616.904,00.

Jumlah pencari kerja terdaftar Kabupaten Situbondo menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2019, SD sebanyak 14 orang, SMP 27 orang, SMA 464 orang, Diploma I/II/III/Akademi 97 orang, dan Universitas 415 orang, dengan total jumlah pencari kerja sebanyak 1.017

orang. Dan apabila dilihat dari sisi jenis kelamin, dari 1.017 orang tersebut 495 diantaranya adalah laki-laki, dan 522 adalah perempuan.



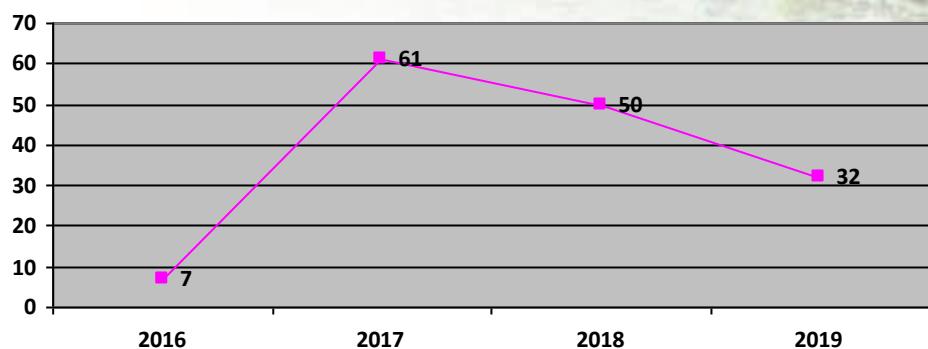
Gambar 2. 49: Persentase Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2018

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo 2019

Pada tahun 2016 target persentase ketersediaan lapangan pekerjaan yakni 10% kemudian terealisasi sebesar 15,57%, untuk capaianya menempati angka 136,22%. Sedangkan untuk tahun 2017 targetnya yakni 11% dan terealisasi sebesar 11% yang menandakan bahwa capaian berada pada angka 100%. Tahun 2018 target persentase ketersediaan lapangan pekerjaan yakni 11,25% dan terealisasi sebesar 21,1% dan capaian sebesar 187,56%. Berdasarkan persentase ketersediaan lapangan kerja dari tahun 2016-2018 mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 menunjukkan hal yang positif karena semakin meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan maka akan mengurangi persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlu adanya konsistensi peningkatan dalam hal tersebut.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Sasaran program adalah perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan pidana kekerasan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan sosialisasi serta advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang mendukung yaitu: Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, orientasi UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta relawan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hasilnya adalah terpecahkannya dan terselesaikannya beberapa permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



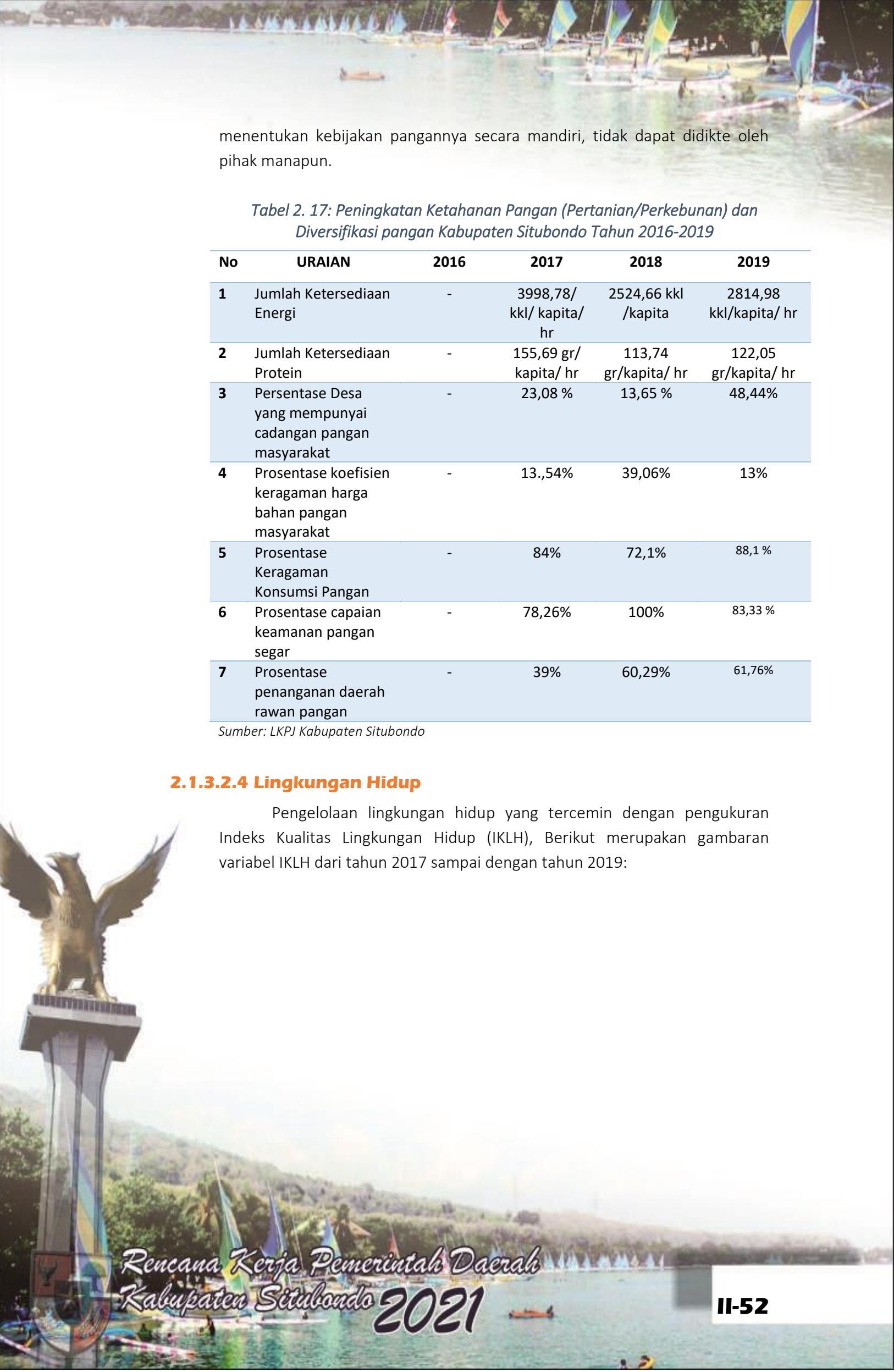
Gambar 2. 50: Realisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2017-2020

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil ditangani oleh Kabupaten Situbondo cukup fluktuatif, ini dibuktikan dengan data berdasarkan BPS yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 realisasinya adalah 7 kasus yang dapat ditangani dari jumlah laporan sebanyak 15 kasus. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 61 kasus dari jumlah laporan sebanyak 76 kasus. Pada tahun 2018 realisasi kasus sebanyak 50 dari jumlah laporan 52 kasus dan pada tahun 2019 Kabupaten Situbondo merealisasikan sebanyak 32 kasus

2.1.3.2.3 Pangan

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, pengertian ketahanan pangan yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana peraturan tersebut merupakan dimensi baru terhadap pengaturan mengenai pangan yang mengintroduksi asas-asas yang baru yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal ini berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. masyarakat sampai tingkat perorangan, negara mempunyai kebebasan untuk



menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun.

Tabel 2. 17: Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

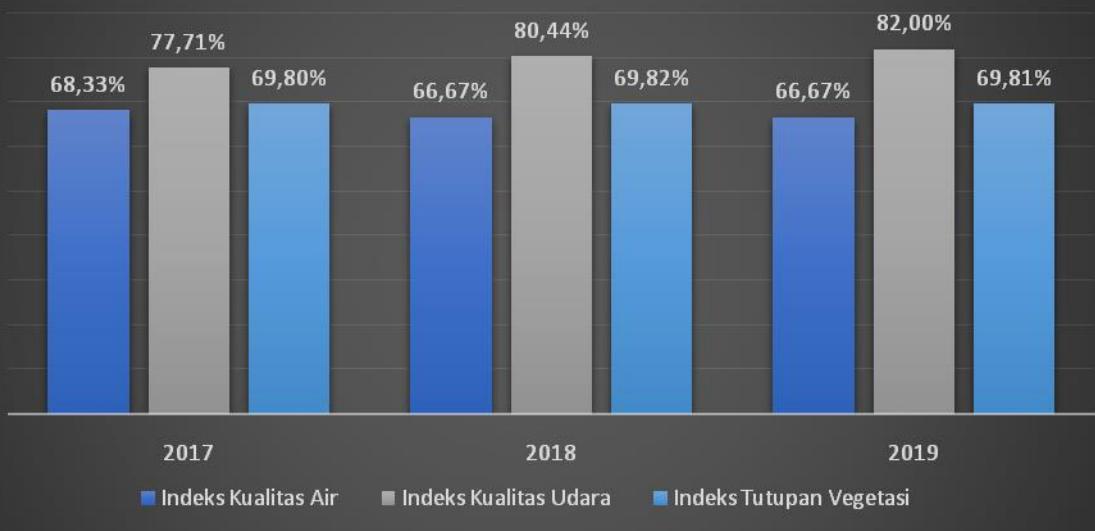
No	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ketersediaan Energi	-	3998,78/ kkl/ kapita/ hr	2524,66 kkl /kapita	2814,98 kkl/kapita/ hr
2	Jumlah Ketersediaan Protein	-	155,69 gr/ kapita/ hr	113,74 gr/kapita/ hr	122,05 gr/kapita/ hr
3	Persentase Desa yang mempunyai cadangan pangan masyarakat	-	23,08 %	13,65 %	48,44%
4	Prosentase koefisien keragaman harga bahan pangan masyarakat	-	13.,54%	39,06%	13%
5	Prosentase Keragaman Konsumsi Pangan	-	84%	72,1%	88,1 %
6	Prosentase capaian keamanan pangan segar	-	78,26%	100%	83,33 %
7	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	-	39%	60,29%	61,76%

Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup



Pengelolaan lingkungan hidup yang tercemin dengan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Berikut merupakan gambaran variabel IKLH dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:



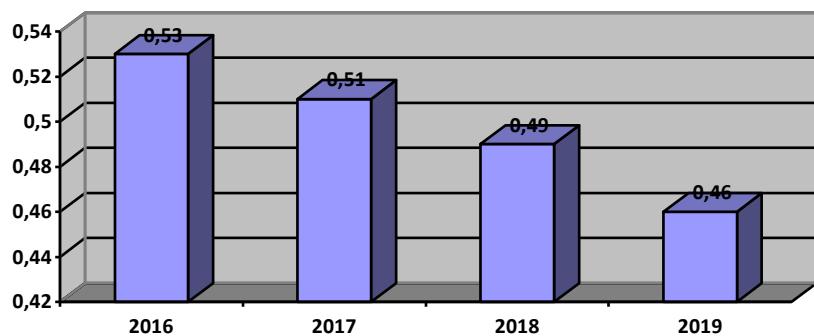
Gambar 2. 4: indeks kualitas air, udara, dan tutupan vegetasi

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo 2018-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 yaitu 72,5. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari tiga penilaian. Indeks kualitas lingkungan hidup meliputi penilaian kualitas air, udara dan tutupan vegetasi. Indeks kualitas air menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu menjadi 66,7, sedangkan kualitas udara meningkat menjadi 82, indeks tutupan vegetasi terpantau fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

2.1.3.2.5 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.5.1 Pertumbuhan Penduduk

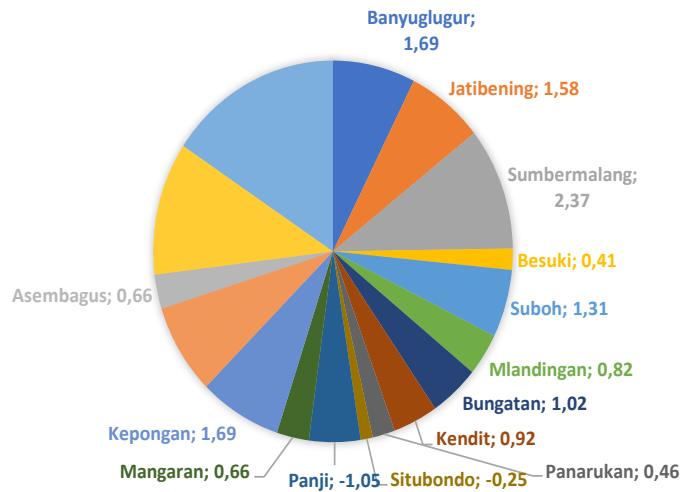


Gambar 2. 5:Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan. Laju pertumbuhan tahun 2016 sebesar 0,53 ,tahun 2017 sebesar 0,51, tahun 2018 sebesar 0,49, dan tahun 2019 turun menjadi 0,46. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penduduk telah menunjukkan keberhasilan.

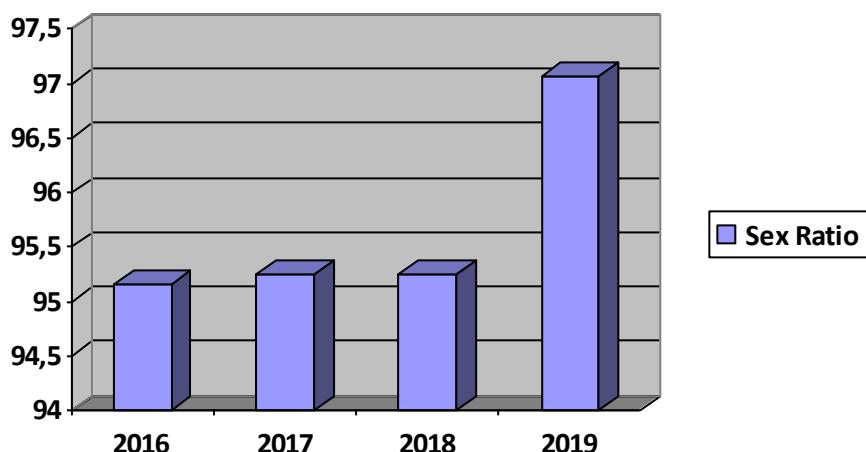


Gambar 2.53: Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk kecamatan pada Kabupaten Situbondo menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tercepat adalah Kecamatan Jangkar sebesar 2,57. Laju pertumbuhan terlambat adalah Kecamatan Banyuputih sebesar -3,57. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan di Kabupaten Situbondo rata-rata sedang.

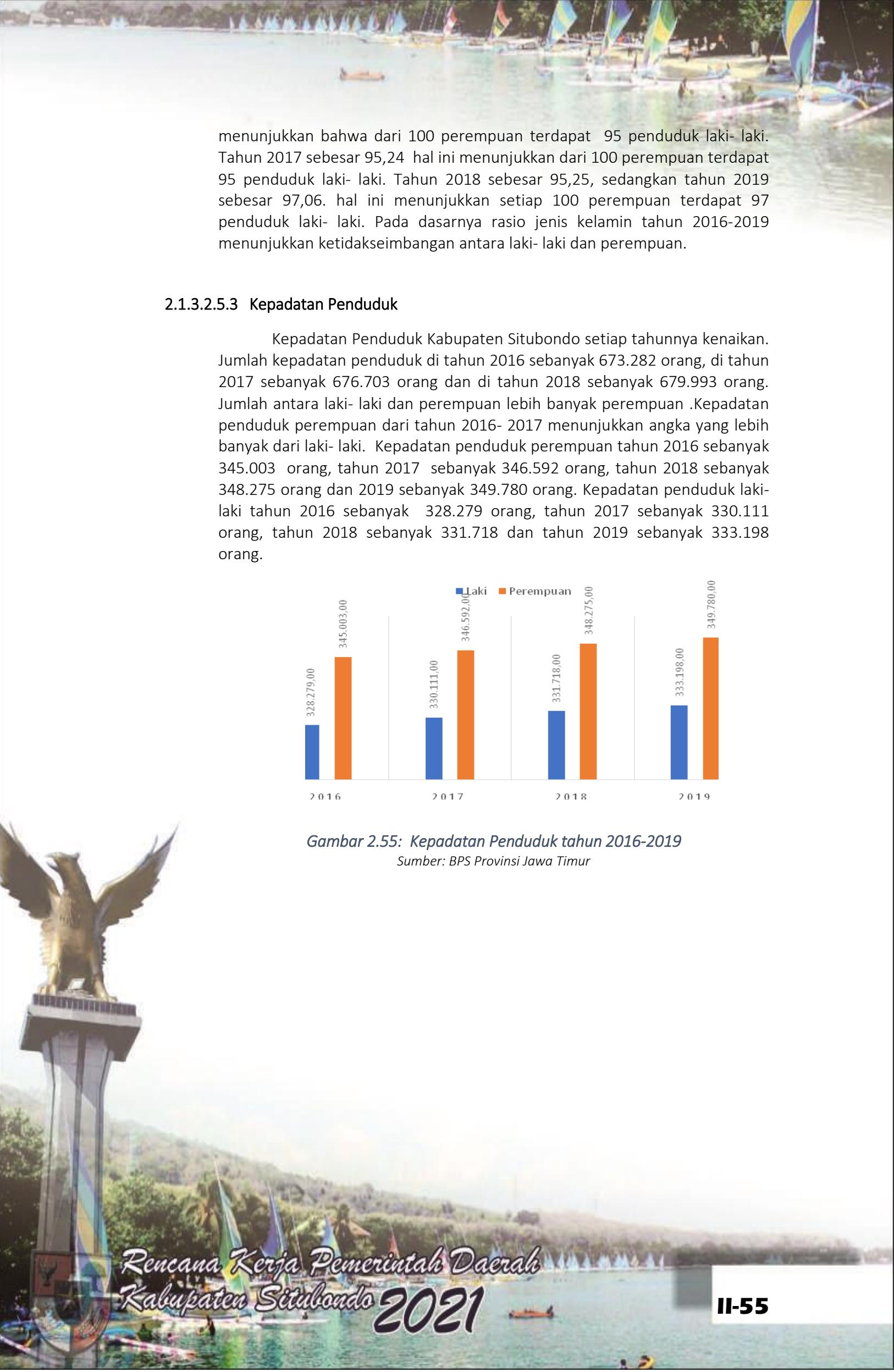
2.1.3.2.5.2 Sex Ratio



Gambar 2.54: Rasio Jenis Kelamin tahun 2016-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio jenis kelamin Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2018 menunjukkan kenaikan. Seks rasio di tahun 2016 sebesar 95,15 yang



menunjukkan bahwa dari 100 perempuan terdapat 95 penduduk laki- laki. Tahun 2017 sebesar 95,24 hal ini menunjukkan dari 100 perempuan terdapat 95 penduduk laki- laki. Tahun 2018 sebesar 95,25, sedangkan tahun 2019 sebesar 97,06. hal ini menunjukkan setiap 100 perempuan terdapat 97 penduduk laki- laki. Pada dasarnya rasio jenis kelamin tahun 2016-2019 menunjukkan ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan.

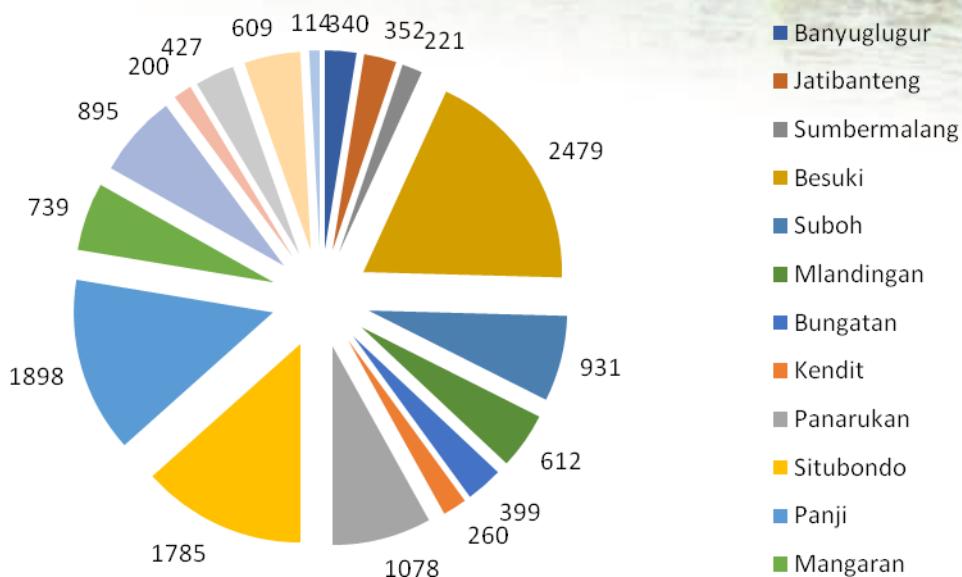
2.1.3.2.5.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo setiap tahunnya kenaikan. Jumlah kepadatan penduduk di tahun 2016 sebanyak 673.282 orang, di tahun 2017 sebanyak 676.703 orang dan di tahun 2018 sebanyak 679.993 orang. Jumlah antara laki- laki dan perempuan lebih banyak perempuan .Kepadatan penduduk perempuan dari tahun 2016- 2017 menunjukkan angka yang lebih banyak dari laki- laki. Kepadatan penduduk perempuan tahun 2016 sebanyak 345.003 orang, tahun 2017 sebanyak 346.592 orang, tahun 2018 sebanyak 348.275 orang dan 2019 sebanyak 349.780 orang. Kepadatan penduduk laki- laki tahun 2016 sebanyak 328.279 orang, tahun 2017 sebanyak 330.111 orang, tahun 2018 sebanyak 331.718 dan tahun 2019 sebanyak 333.198 orang.



Gambar 2.55: Kepadatan Penduduk tahun 2016-2019

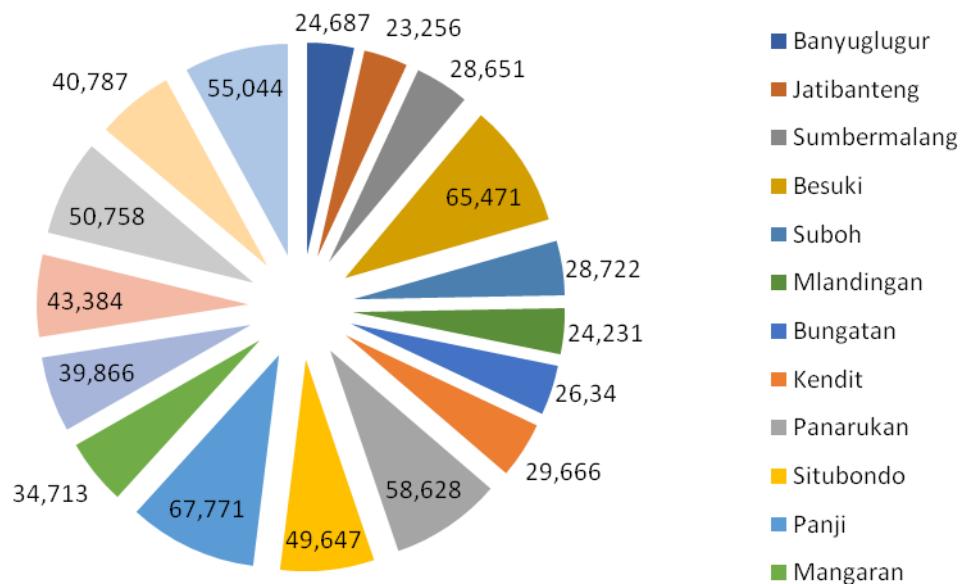
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.56: Kepadatan Penduduk

Sumber :Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Kepadatan Penduduk pada Kecamatan Kabupaten Situbondo tahun 2019 menggambarkan jumlah kepadatan penduduk terbesar pada kecamatan Besuki sebesar 2.479 orang. Kepadatan penduduk terkecil ada pada Kecamatan Banyuputih. Kepadatan penduduk pada kecamatan di Kabupaten Situbondo memiliki jumlah yang bervariasi salah satu faktor yang bisa menyebabkan karena faktor luas wilayah.



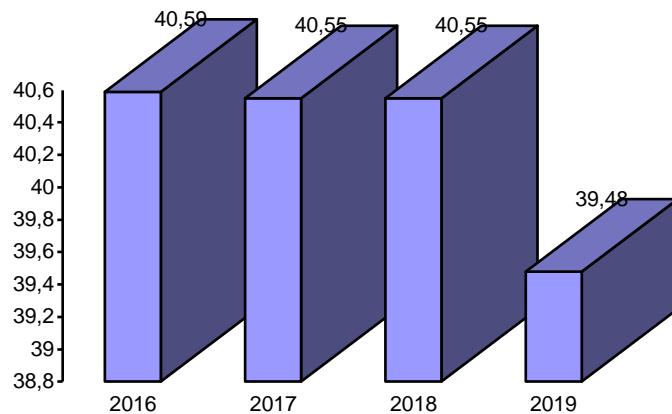
Gambar 2.57: Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Kepadatan penduduk kabupaten Situbondo tahun 2019, disetiap kecamatan menunjukkan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan

Panji sebanyak 67.771 orang dan yang terkecil adalah Kecamatan Jatibanteng sebanyak 23.256 orang. Hal ini menunjukkan perlu kerjasama yang lebih baik untuk melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk

2.1.3.2.5.4 Ratio Ketergantungan



Gambar 2.58: Angka Beban Ketergantungan tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Beban ketergantungan Kabupaten Situbondo dari tahun 2016- 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Angka ketergantungan di tahun 2016 sebesar 40.594, tahun 2017 turun menjadi sebesar 40,551 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 40.553. beban ketergantungan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 39.48. Hal ini menunjukkan kemandirian Kabupaten Situbondo sudah mengalami kenaikan, diperlukan upaya yang baik untuk menukseskan program kemandirian.

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Hal tersebut yang membuat desa memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial asyarakata, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial dan politik.

Berikut merupakan gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 2.18 : Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa Maju	12 Desa	15 Desa	n/a	29 Desa

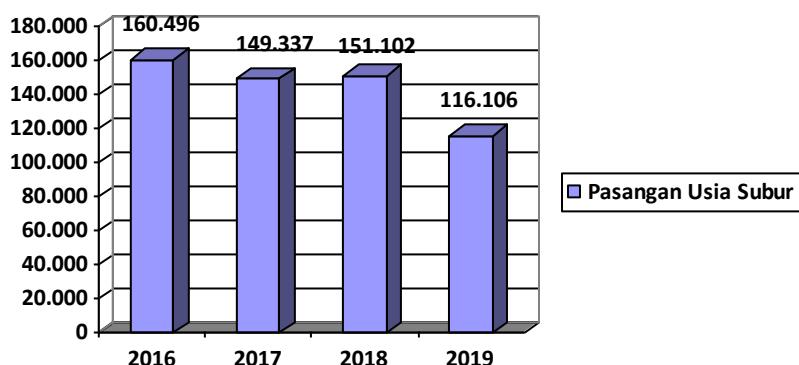
Sumber : RKPD Tahun 2020 dan LKPJ Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir (2016 - 2019) Jumlah Desa Maju di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan dari 12 desa pada tahun 2016 menjadi 29 desa pada 2019.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.7.1 Pasangan Usia Subur

Dalam rangka mengatur kelahiran/kehamilan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, telah dilaksanakan pemasangan alat kontrasepsi KB kepada pasangan usia subur (PUS), baik itu kepada suami maupun kepada istri (salah satu dalam keluarga) secara umum pasangan usia subur (PUS) telah ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program KB artinya telah menjadi Akseptor KB Aktif tanpa adanya paksaan dari pihak lain.



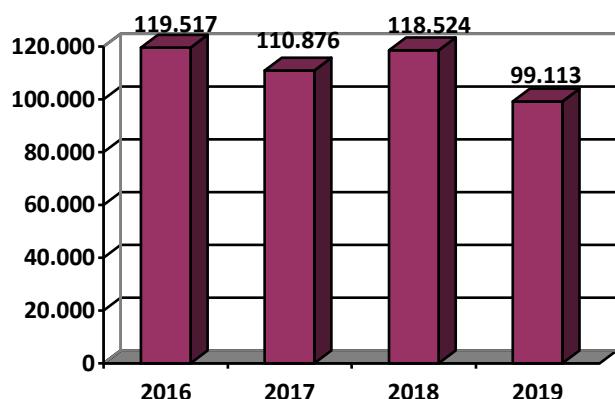
Gambar 2. 6: Jumlah Pasangan Usia Subur tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah pasangan usia subur Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif. Pasangan usia subur tahun 2016 sebanyak 160.496 orang. Jumlah pasangan usia subur tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebanyak 149.337 orang. Pasangan usia subur di tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 151.102 orang, dan tahun 2019 turun menjadi 116.106. Tahun 2016-2019 menunjukkan jumlah usia subur terbanyak di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk di tahun 2019, dengan ditandainya jumlah pasangan usia subur yang turun sebesar 23% dari tahun 2018.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Peserta KB Aktif

Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.



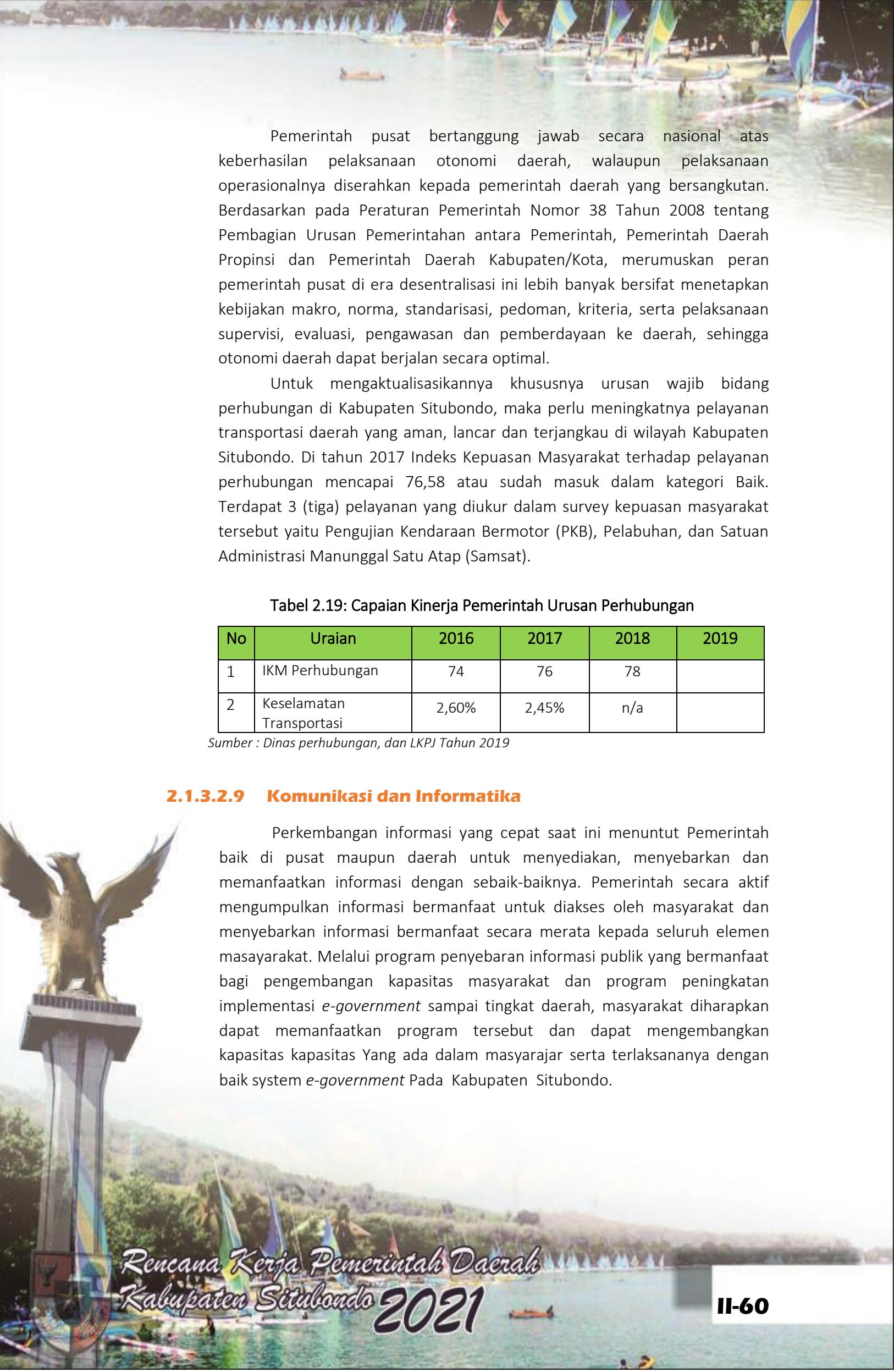
Gambar 2.60: Jumlah Peserta KB aktif tahun 2016-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah Peserta KB aktif Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Jumlah peserta KB tahun 2016 sebanyak 119.517 orang, tahun 2017 sebanyak 110.876 orang, tahun 2018 sebanyak 118.524 orang, dan tahun 2019 sebanyak 99.113 orang. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah tinggi, yang akan berdampak pada berkurangnya kepadatan penduduk, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggarannya. Meningkatnya kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.



Pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengaktualisasikannya khususnya urusan wajib bidang perhubungan di Kabupaten Situbondo, maka perlu meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau di wilayah Kabupaten Situbondo. Di tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan mencapai 76,58 atau sudah masuk dalam kategori Baik. Terdapat 3 (tiga) pelayanan yang diukur dalam survey kepuasan masyarakat tersebut yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Pelabuhan, dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Tabel 2.19: Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	IKM Perhubungan	74	76	78	
2	Keselamatan Transportasi	2,60%	2,45%	n/a	

Sumber : Dinas perhubungan, dan LKPJ Tahun 2019

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika



Perkembangan informasi yang cepat saat ini menuntut Pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menyediakan, menyebarkan dan memanfaatkan informasi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat dan program peningkatan implementasi *e-government* sampai tingkat daerah, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dan dapat mengembangkan kapasitas kapasitas Yang ada dalam masyarakat serta terlaksananya dengan baik system *e-government* Pada Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.20: Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase aplikasi dan jaringan OPD dan Pemdes yang terintegrasi	%	70	65	92,86
2	Persentase OPD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	79	75,24	95,24

Sumber : LKPJ Tahun 2019

2.1.3.2.10 Koperasi dan usaha kecil menengah

Sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan kompetitif usaha-usaha mikro dari segi jumlah maupun kapasitas usaha mikro dengan menggali potensi yang dimiliki untuk dikelola secara optimal.

Pembinaan dan pengembangan Koperasi di Kabupaten Situbondo diarahkan agar gerakan Koperasi lebih meningkat peranannya, melalui konsolidasi semua aspek yang ada agar Usaha Mikro dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu berkiprah secara mandiri, mempunyai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian di daerah sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro mengarah pada kegiatan ekonomi berskala mikro dan kecil dan harus mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari anggota maupun dari pihak ketiga. Untuk itu Koperasi dan Usaha Mikro harus sehat dari sisi kelembagaan, organisasi, manajemen, serta usahanya. Untuk mendorong dan mempercepat perkembangannya diperlukan cara-cara pengelolaan yang tepat, khususnya melalui kegiatan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Adapun jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 2.21: Jumlah UMKM Kabupaten Situbondo Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah umkm	Persentase
1	Kab. Jember	647.416	6,62%
2	Kab. Malang	600.054	6,13%
3	Kab. Banyuwangi	480.687	4,91%
4	Kab. Sumenep	401.210	4,10%
5	Kota Surabaya	385.054	3,94%
6	Kab. Kediri	380.056	3,89%
7	Kab. Bojonegoro	376.316	3,85%
8	Kab. Blitar	373.447	3,82%
9	Kab. Pasuruan	362.230	3,70%

No	Kabupaten	Jumlah umkm	Percentase
10	Kab. Probolinggo	333.453	3,41%
11	Kab. Tuban	319.477	3,27%
12	Kab. Lamongan	312.376	3,19%
13	Kab. Jombang	299.273	3,06%
14	Kab. Tulungagung	288.371	2,95%
15	Kab. Nganjuk	288.119	2,95%
16	Kab. Lumajang	287.778	2,94%
17	Kab. Ponorogo	283.967	2,90%
18	Kab. Bondowoso	271.793	2,78%
19	Kab. Ngawi	253.870	2,60%
20	Kab. Bangkalan	248.664	2,54%
21	Kab. Sidoarjo	248.306	2,54%
22	Kab. Pamekasan	247.269	2,53%
23	Kab. Trenggalek	246.614	2,52%
24	Kab. Sampang	229.644	2,35%
25	Kab. Gresik	225.242	2,30%
26	Kab. Situbondo	217.042	2,22%
27	Kab. Mojokerto	216.518	2,21%
28	Kab. Pacitan	212.197	2,17%
29	Kab. Madiun	191.880	1,96%
30	Kab. Magetan	181.760	1,86%
31	Kota Malang	117.840	1,20%
32	Kota Kediri	45.629	0,47%
33	Kota Batu	44.963	0,46%
34	Kota Probolinggo	43.478	0,44%
35	Kota Madiun	36.555	0,37%
36	Kota Pasuruan	35.596	0,36%
37	Kota Blitar	29.123	0,30%
38	Kota Mojokerto	18.995	0,19%
	JAWA TIMUR	9.782.262	100,00%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur

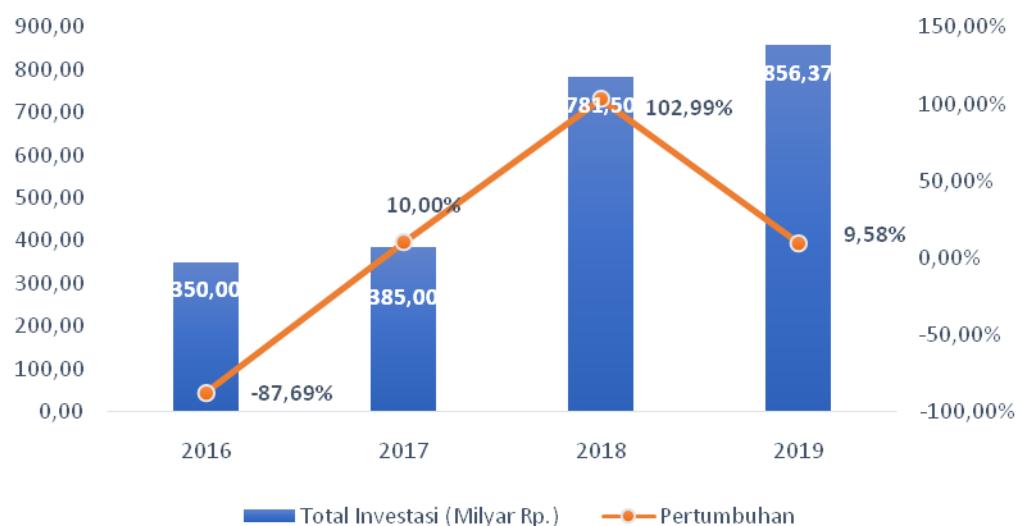
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM dengan peringkat 26 terbanyak dimana secara persentase **Kabupaten Situbondo memiliki jumlah UMKM sebanyak 2,22%** dari total jumlah UMKM di Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.

Adapun existing koperasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kabupaten dan Kota berdasarkan data Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia tahun 2019 adalah Koperasi aktif (NIK) di Kabupaten Situbondo sebanyak 375 koperasi, Koperasi aktif (sertifikat NIK) sebanyak 286 koperasi atau 76,27% lebih baik jika dibandingkan dengan

koperasi aktif (NIK) di 38 Kabupaten/Kota di Timur sebesar 21.757 koperasi, koperasi aktif (sertifikat NIK) sebesar 12.089 koperasi atau 55,56%.

2.1.3.2.11 Penanaman modal

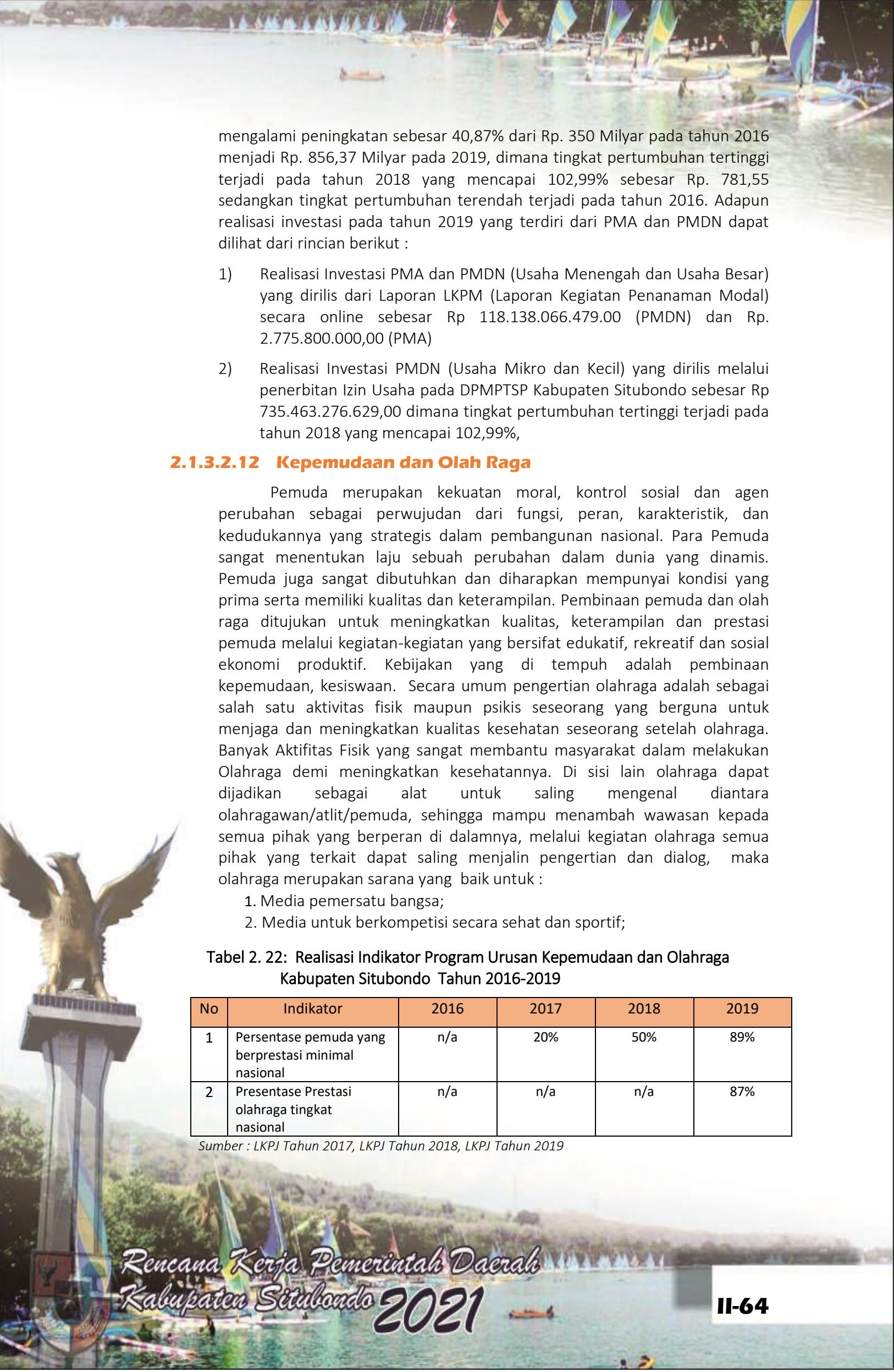
Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan permasalahan penanaman modal telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan arah pengembangan kebijakan Penanaman Modal di Indonesia. Adapun perbandingan nilai investasi dengan pertumbuhan investasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2. 61: Perkembangan Total Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2019

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Situbondo, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir (2016 - 2019) total investasi di Kabupaten Situbondo terus



mengalami peningkatan sebesar 40,87% dari Rp. 350 Miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 856,37 Miliar pada 2019, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 102,99% sebesar Rp. 781,55 sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016. Adapun realisasi investasi pada tahun 2019 yang terdiri dari PMA dan PMDN dapat dilihat dari rincian berikut :

- 1) Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Usaha Menengah dan Usaha Besar) yang dirilis dari Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara online sebesar Rp 118.138.066.479,00 (PMDN) dan Rp. 2.775.800.000,00 (PMA)
- 2) Realisasi Investasi PMDN (Usaha Mikro dan Kecil) yang dirilis melalui penerbitan Izin Usaha pada DPMPTSP Kabupaten Situbondo sebesar Rp 735.463.276.629,00 dimana tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 102,99%,

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

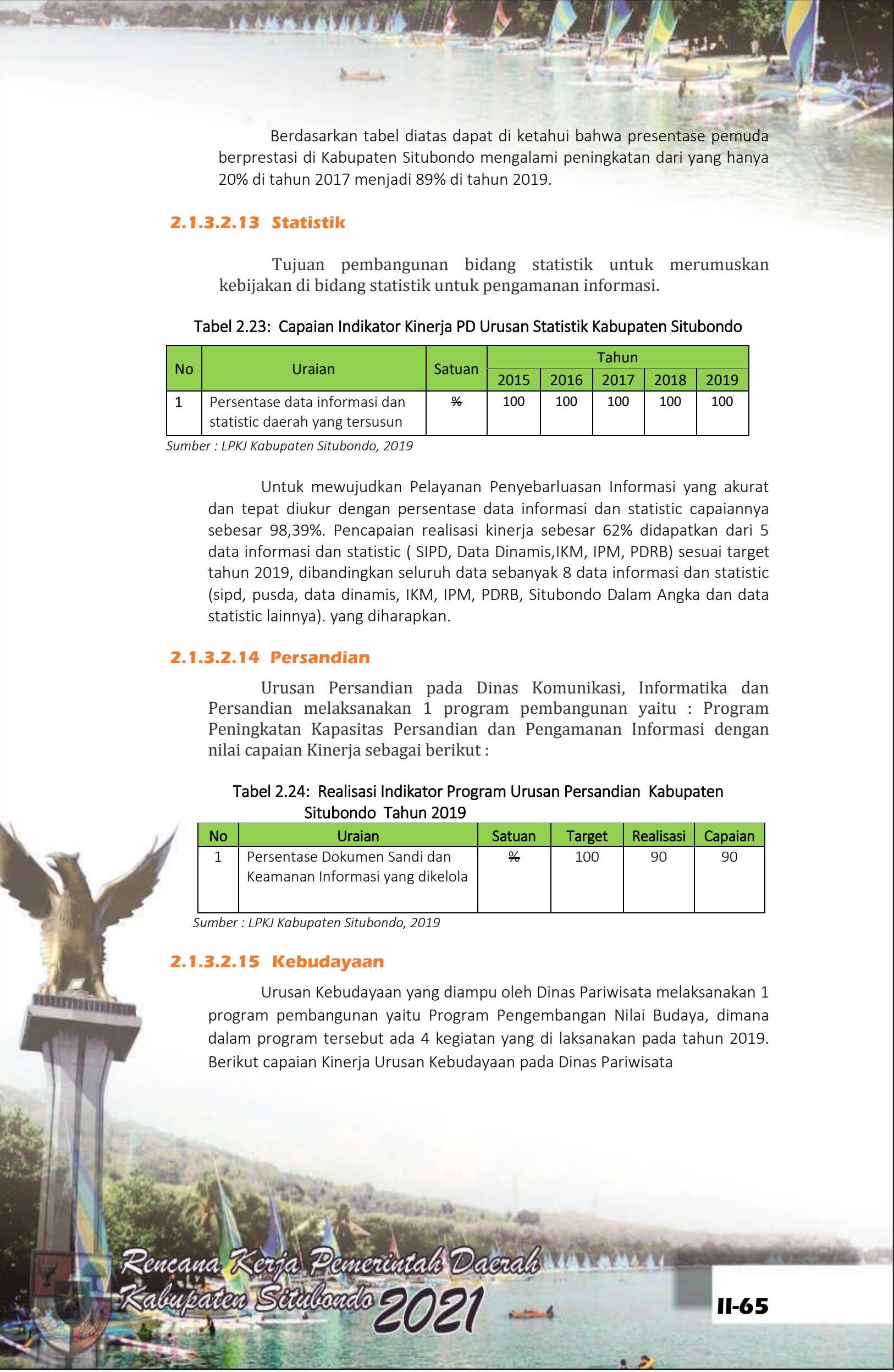
Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Para Pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan dalam dunia yang dinamis. Pemuda juga sangat dibutuhkan dan diharapkan mempunyai kondisi yang prima serta memiliki kualitas dan keterampilan. Pembinaan pemuda dan olah raga ditujukan untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan prestasi pemuda melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, rekreatif dan sosial ekonomi produktif. Kebijakan yang di tempuh adalah pembinaan kepemudaan, kesiswaan. Secara umum pengertian olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga. Banyak Aktifitas Fisik yang sangat membantu masyarakat dalam melakukan Olahraga demi meningkatkan kesehatannya. Di sisi lain olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk saling mengenal diantara olahragawan/atlit/pemuda, sehingga mampu menambah wawasan kepada semua pihak yang berperan di dalamnya, melalui kegiatan olahraga semua pihak yang terkait dapat saling menjalin pengertian dan dialog, maka olahraga merupakan sarana yang baik untuk :

1. Media pemersatu bangsa;
2. Media untuk berkompetisi secara sehat dan sportif;

Tabel 2. 22: Realisasi Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pemuda yang berprestasi minimal nasional	n/a	20%	50%	89%
2	Presentase Prestasi olahraga tingkat nasional	n/a	n/a	n/a	87%

Sumber : LKPJ Tahun 2017, LKPJ Tahun 2018, LKPJ Tahun 2019



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pemuda berprestasi di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan dari yang hanya 20% di tahun 2017 menjadi 89% di tahun 2019.

2.1.3.2.13 Statistik

Tujuan pembangunan bidang statistik untuk merumuskan kebijakan di bidang statistik untuk pengamanan informasi.

Tabel 2.23: Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase data informasi dan statistic daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

Untuk mewujudkan Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang akurat dan tepat diukur dengan persentase data informasi dan statistic capaianya sebesar 98,39%. Pencapaian realisasi kinerja sebesar 62% didapatkan dari 5 data informasi dan statistic (SIPD, Data Dinamis, IKM, IPM, PDRB) sesuai target tahun 2019, dibandingkan seluruh data sebanyak 8 data informasi dan statistic (sipd, pusda, data dinamis, IKM, IPM, PDRB, Situbondo Dalam Angka dan data statistic lainnya). yang diharapkan.

2.1.3.2.14 Persandian

Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan 1 program pembangunan yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi dengan nilai capaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.24: Realisasi Indikator Program Urusan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola	%	100	90	90

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pariwisata melaksanakan 1 program pembangunan yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, dimana dalam program tersebut ada 4 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Berikut capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata

Tabel 2. 25: Realisasi Capaian Program Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah lembaga seni dan budaya lokal yang di catat tingkat kabupaten	Lembaga	156	156	100%

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar sistem pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adanya perpustakaan pada setiap daerah dianggap penting karena dapat menunjang berbagai aspek untuk sarana pembelajaran. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26: Realisasi Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	11	11,75	107%

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

2.1.3.2.17 Kearsipan

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip. Arsip juga dapat diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

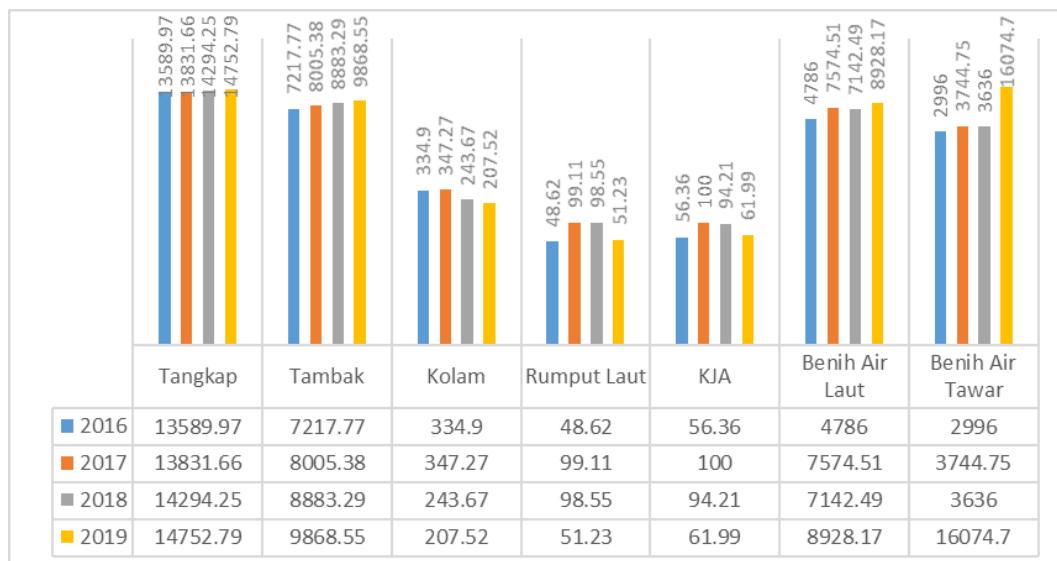
Tabel 2.27: Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Instansi yg Menerapkan Tata Kelola Kearsipan Sesuai dengan Pedoman	%	81	81,25	100.31%

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

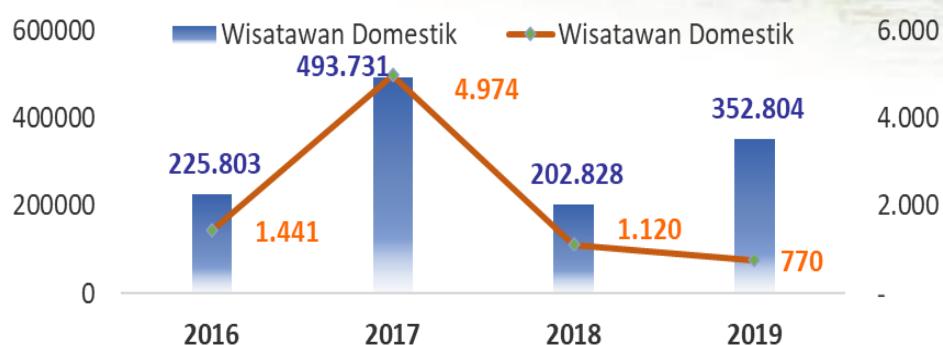


Gambar 2.62: Grafik Produksi Perikanan 2016-2019 (Ton)

Sumber: RKPD 2019, Kab. Situbondo dalam angka 2017, 2018, 2019 dan LKPJ 2019

Gambar grafik tersebut merupakan produksi perikanan di kabupaten situbondo periode tahun 2016 hingga tahun 2019, dapat kita cermati bersama bahwasannya terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap tiap tahunnya, sektor produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah tahun dengan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 14.295 Ton dari yang sebelumnya 13.831 ton pada tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada hasil produksi perikanan tambak dengan tren peningkatan tiap tahunnya dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana meningkat menjadi 8.882,9 ton dari yang sebelumnya sejumlah 8.005,3 ton pada tahun 2017. Sementara produksi perikanan kolam mengalami penurunan hingga taun 2018 yaitu sejumlah 243,68 ton dari yang sebelumnya sejumlah 347,27 ton pada tahun 2017.

2.1.3.3.2 Pariwisata

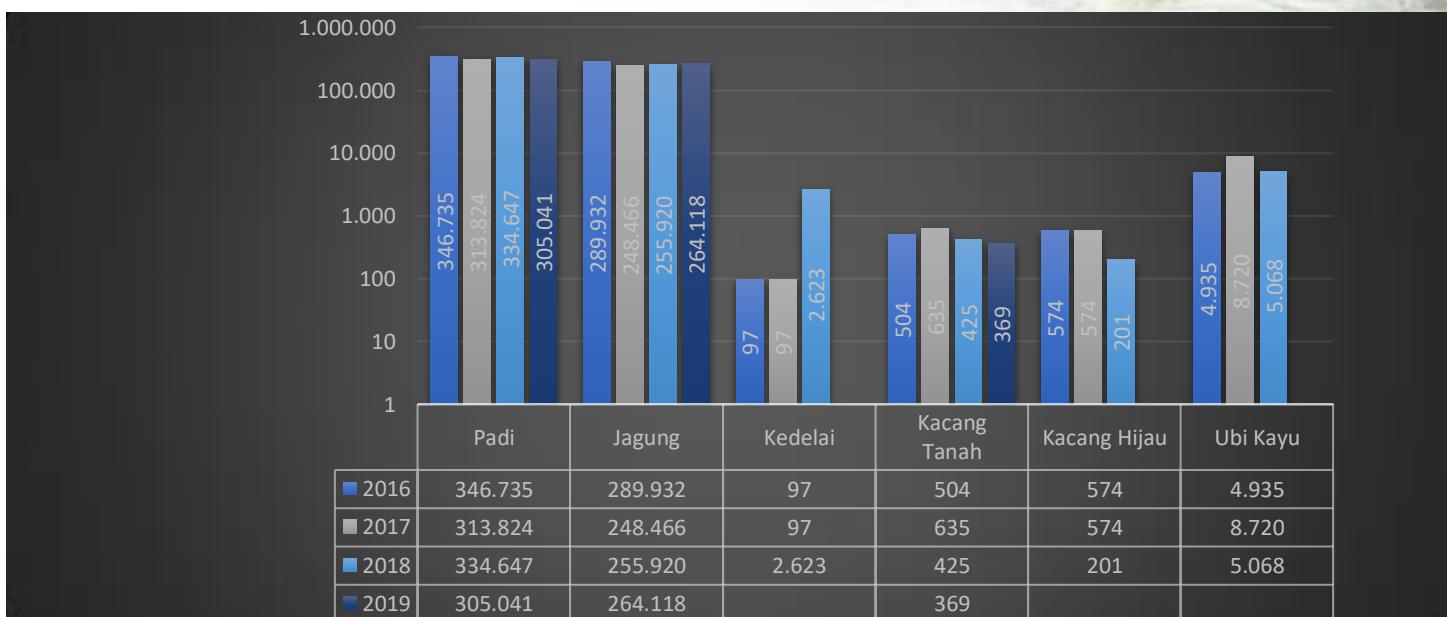


Gambar 2. 63: Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara 2016-2019

Sumber: Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo 2020

Berikut merupakan grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, berdasarkan data tersebut terlihat kecenderungan jumlah data kunjungan sangat fluktuatif, baik pada wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara menunjukkan pola peningkatan dan penurunan jumlah yang sama pada tahun tertentu. Tahun dengan kunjungan wisatawan terbanyak yaitu terjadi pada tahun 2017 yaitu sejumlah 493.731 orang wisatawan domestik dan 4.974 orang wisatawan manca negara. Pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, pada tahun 2016 tercatat sejumlah 225.803 wisatawan domestik dan 1.441 wisatawan manca negara yang berkunjung ke Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada tahun 2018 tercatat sejumlah 202.828 orang wisatawan domestik dan 1.120 wisatawan manca negara, meskipun demikian pada tahun 2019 jumlah wisatawan mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan terutama wisatawan domestic yaitu sejumlah 352.804, berbanding terbalik dengan wisatawan manca negara dimana pada tahun 2019 merupakan tahun dengan kunjungan wisatawan manca negara paling sedikit yang hanya berjumlah 770 orang wisatawan.

2.1.3.3.3 Pertanian



Gambar 2. 64: Grafik Produksi Pertanian 2016-2019 (Ton)

Sumber: RKPD 2019, Kab. Situbondo dalam angka 2017, 2018, 2019 dan LKPJ 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi padi tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 9,51% dari tahun 2016, yaitu pada tahun 2017 jumlah produksi padi hanya sebesar 313.824 Ton. Meskipun demikian di tahun selanjutnya 2018 produksi padi mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2019 produksi padi Kembali mengalami penurunan sebesar 8,84% dari tahun 2018 yang mana sebelumnya berjumlah 334.647 turun menjadi 305.041 pada tahun 2019. Kemudian Produksi jagung di tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 248.466 ton. Produksi pertanian yang mengalami kenaikan pada tahun 2017 adalah kacang tanah dan ubi kayu yakni sebanyak 635 ton dan 8.720 ton. Produksi pertanian kacang hijau mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 201 ton dari sebelumnya sejumlah 574 ton pada tahun 2016 & 2017, hal yang berbeda terjadi dengan produksi pertanian kedelai dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu menjadi 2.623 ton dari yang sebelumnya hanya berkisar 97 ton pada tahun 2016 hingga tahun 2017.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan pilihan perdagangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Yaitu “Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Pembangunan”. Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.

Urusan perdagangan menjadi salah satu urusan prioritas karena urusan perdagangan berkaitan dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah.



Gambar 2. 65: Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2017-2019

Sumber: diolah dari Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

Dari data diatas menunjukkan adanya penurunan nilai ekspor tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai ekspor mengalami peningkatan yang cukup baik, dari Rp. 1.053.391.274.047 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.197.384.567.015 pada tahun 2019. Berikut data perdagangan luar dan dalam negeri kabupaten Situbondo:



Gambar 2.66: Data perdagangan luar dan dalam negeri kabupaten Situbondo

Sumber: diolah dari Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

Data perdagangan menunjukkan bahwa penurunan nilai perdagangan terjadi pada perdagangan luar negri, dimana tahun 2019 menurun menjadi Rp. 1077.917.956.087 dari sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp. 1.198.922.195.115. Namun sektor perdagangan dalam negeri justru mengalami lonjakan dari Rp. 1.537.528.000 pada tahun 2018 menjadi Rp.

627.546.213.611 pada tahun 2019. Dalam kondisi ini perdagangan dalam negeri harus dioptimalkan untuk mencapai kinerja maksimal.

Peningkatan effisiensi perdagangan dalam negeri bertujuan untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi standart eksport dan menghasilkan produk yang memenuhi standart perdagangan antar pulau.

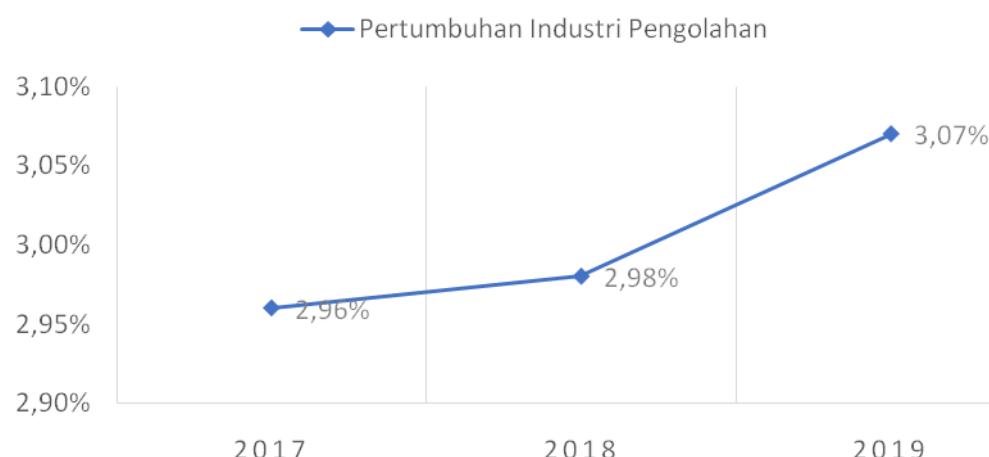
Era digitalisasi membawa dampak perubahan pola bekerja pada sektor perdagangan dan pengembangan SDM dalam persaingan usaha. Pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring menjadikan banyak model usaha. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi menyeluruh dalam pemanfaataan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Peningkatan pembangunan perindustrian diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil, promosi serta peningkatan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi di bidang industri di Kabupaten Situbondo, memiliki peranan yang berarti sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sektor industri sangat tergantung pada sumberdaya yang tersedia, karakteristik wilayah dan mampu dioptimalkan penggunaannya serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:



Gambar 2.67: Pertumbuhan Industri Pengolahan Kabupaten Situbondo
Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Situbondo, Tahun 2017



Gambar 2.68: Peningkatan Produksi Industri Pengolahan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Situbondo, Tahun 2019

Data menunjukkan adanya peningkatan pembangunan sektor industri pengolahan dimana dari tahun 2017 hingga 2019, Pertumbuhan Industri Pengolahan maupun Peningkatan Produksi Industri Pengolahan Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Peningkatan ini berkontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor industry pengolahan yang meningkat menjadi 9,35% di tahun 2019, dimana pada tahun 2018 sebesar 8.25%.

Pengembangan industri kecil dan menengah yaitu mengembangkan jenis dan mutu produk serta diversifikasi produk olahan IKM yang berkembang menjadi beberapa produk baru sehingga menyebabkan persentase peningkatan produk olahan industry dapat meningkat.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Urusan Transmigrasi yang diampu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 1 Program Pembangunan pada Tahun 2019 yaitu Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 28: Realisasi Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase calon transmigrasi yang dilatih	%	100	100	100%

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.1.3.4.1 Perencanaan

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) untuk periode satu tahun. Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dengan capaian sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

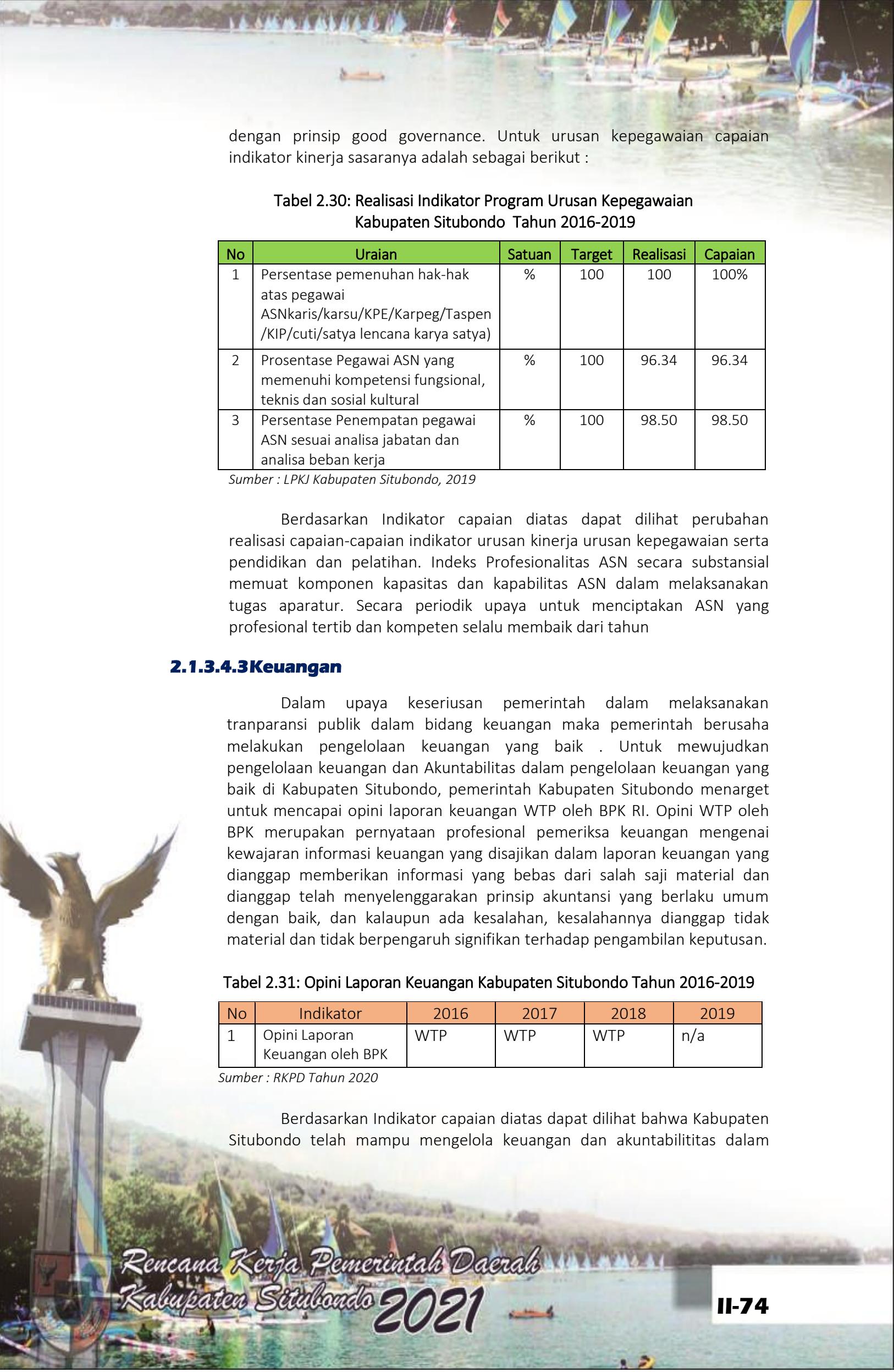
Tabel 2.29: Realisasi Indikator Program Urusan Perencanaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %	n/a	n/a	n/a	100%
2	Presentase Program RKP tahun berkenaan	n/a	n/a	n/a	100%
3	Presentase Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	n/a	n/a	n/a	100%

Sumber: LKPJ Tahun 2017, LKPJ Tahun 2018, dan LKPJ Tahun 2019

2.1.3.4.2 Kepegawaian

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan



dengan prinsip good governance. Untuk urusan kepegawaian capaian indikator kinerja sasarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30: Realisasi Indikator Program Urusan Kepegawaian Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan hak-hak atas pegawai ASNkaris/karsu/KPE/Karpeg/Taspen /KIP/cuti/satya lencana karya satya)	%	100	100	100%
2	Prosentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi fungsional, teknis dan sosial kultural	%	100	96.34	96.34
3	Persentase Penempatan pegawai ASN sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja	%	100	98.50	98.50

Sumber : LPKJ Kabupaten Situbondo, 2019

Berdasarkan Indikator capaian diatas dapat dilihat perubahan realisasi capaian-indikator urusan kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Indeks Profesionalitas ASN secara substansial memuat komponen kapasitas dan kapabilitas ASN dalam melaksanakan tugas aparatur. Secara periodik upaya untuk menciptakan ASN yang profesional tertib dan kompeten selalu membaik dari tahun

2.1.3.4.3 Keuangan



Dalam upaya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan transparansi publik dalam bidang keuangan maka pemerintah berusaha melakukan pengelolaan keuangan yang baik . Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang baik di Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Situbondo menarget untuk mencapai opini laporan keuangan WTP oleh BPK RI. Opini WTP oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.31: Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	n/a

Sumber : RKPD Tahun 2020

Berdasarkan Indikator capaian diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Situbondo telah mampu mengelola keuangan dan akuntabilitas dalam



pengelolaan keuangannya sehingga mencapai Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 Tahun berturut - turut. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dalam dan terus dipertahankan hingga waktu yang akan datang

2.1.3.4.4 Pengawasan

Inspektorat diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik kepada Bupati Situbondo melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah capaian indikator sasaran dari urusan pengawasan :

Tabel 2.32: Realisasi Indikator Program Urusan Pengawasan Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	%	n/a	60,38	82,61	47,62	72,91
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	89,22	70,87	64,37	91,06	75,41
3	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	75,73	100
4	Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%	n/a	92,45	100	100	100

Sumber: LKPJ Tahun 2017, LKPJ Tahun 2018, dan LKPJ Tahun 2019

2.1.3.4.5 Sekretariat Daerah



Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat Daerah dari Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33: Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	CC	B	BB	A

Sumber : RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo. Secara rinci data PDRB Kabupaten Situbondo dapat dilihat dalam tabel berikut:

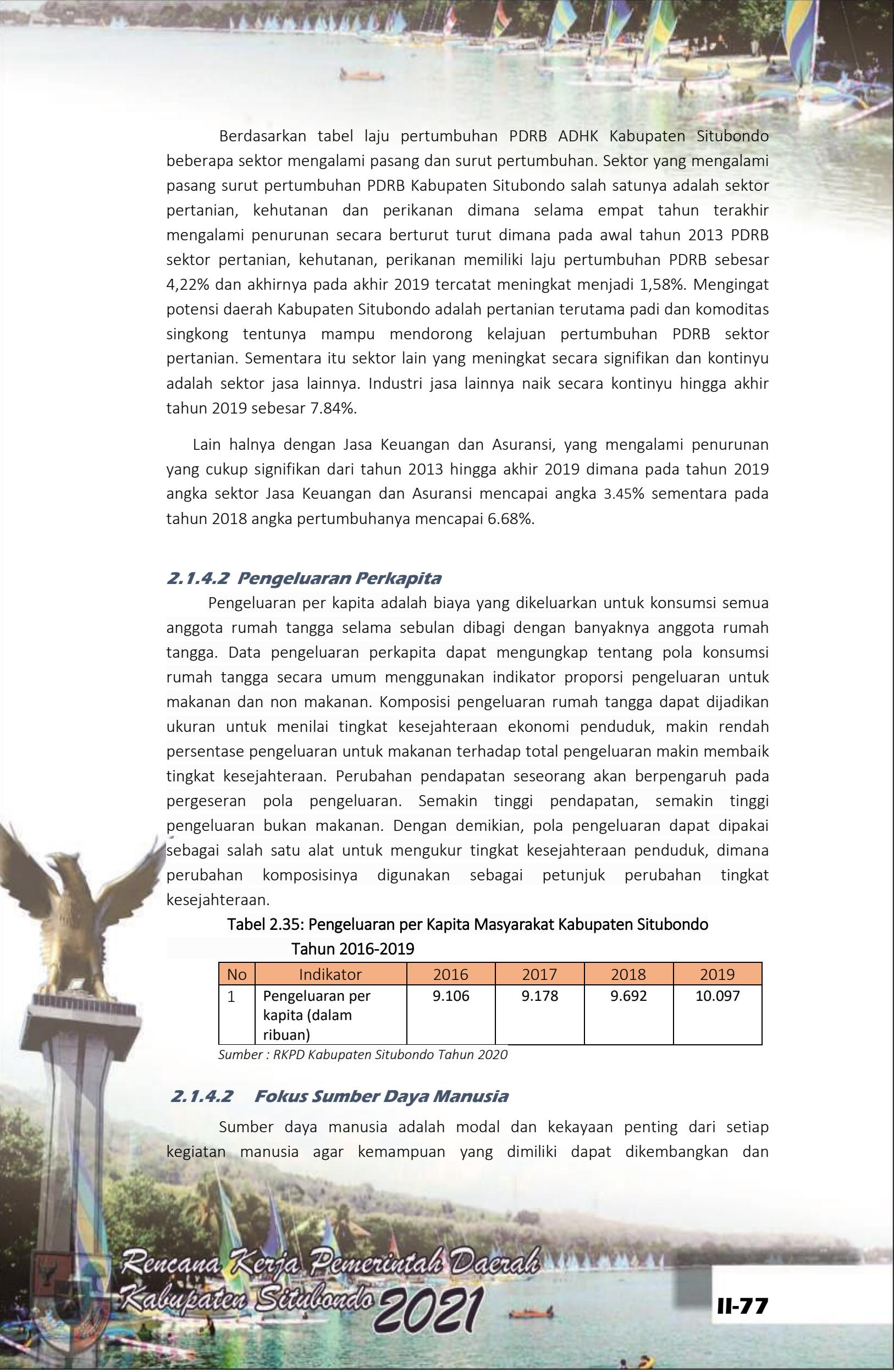
Tabel 2. 34: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Situbondo

Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	2,64	0,95	0,40	1,58
2. Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,33	6,16	3,83	2,12
3. Industri Pengolahan	7,77	7,	8,23	10,35	9,35
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2,20	3,24	4,33	3,03	3,66
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,25	2,21	4,62	4,19	4,28
6. Konstruksi	-0,80	3,16	6,46	5,71	5,65
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,35	6,78	7,79	7,91	7,09
8. Transportasi dan Pergudangan	7,39	6,85	7,49	9,16	7,52
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,53	8,78	9,02	8,37	7,42
10. Informasi dan Komunikasi	6,5	7,2	7,04	7,37	7,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,61	8,06	6,6	6,68	3,45
12. Real Estate	8,04	8,66	6,43	6,35	6,28
13. Jasa Perusahaan	6,70	6,62	6,74	7,97	6,46
14. Administrasi Pemerintahan,	2,76	3,46	3,16	3,89	3,20
15. Jasa Pendidikan	7,93	6,66	4,83	6,56	6,98
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,48	2,45	4,83	5,29	4,79
17. Jasa Lainnya	5,33	4,87	5,15	6,71	7,84
PDRB Kabupaten Situbondo	4,86	5,00	5,07	5,47	5,45

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020



Berdasarkan tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo beberapa sektor mengalami pasang dan surut pertumbuhan. Sektor yang mengalami pasang surut pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana selama empat tahun terakhir mengalami penurunan secara berturut turut dimana pada awal tahun 2013 PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan memiliki laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,22% dan akhirnya pada akhir 2019 tercatat meningkat menjadi 1,58%. Mengingat potensi daerah Kabupaten Situbondo adalah pertanian terutama padi dan komoditas singkong tentunya mampu mendorong kelajuan pertumbuhan PDRB sektor pertanian. Sementara itu sektor lain yang meningkat secara signifikan dan kontinyu adalah sektor jasa lainnya. Industri jasa lainnya naik secara kontinyu hingga akhir tahun 2019 sebesar 7,84%.

Lain halnya dengan Jasa Keuangan dan Asuransi, yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga akhir 2019 dimana pada tahun 2019 angka sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai angka 3.45% sementara pada tahun 2018 angka pertumbuhannya mencapai 6.68%.

2.1.4.2 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran perkapita dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.35: Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo

Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)	9.106	9.178	9.692	10.097

Sumber : RKPDA Kabupaten Situbondo Tahun 2020

2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan

dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.2.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

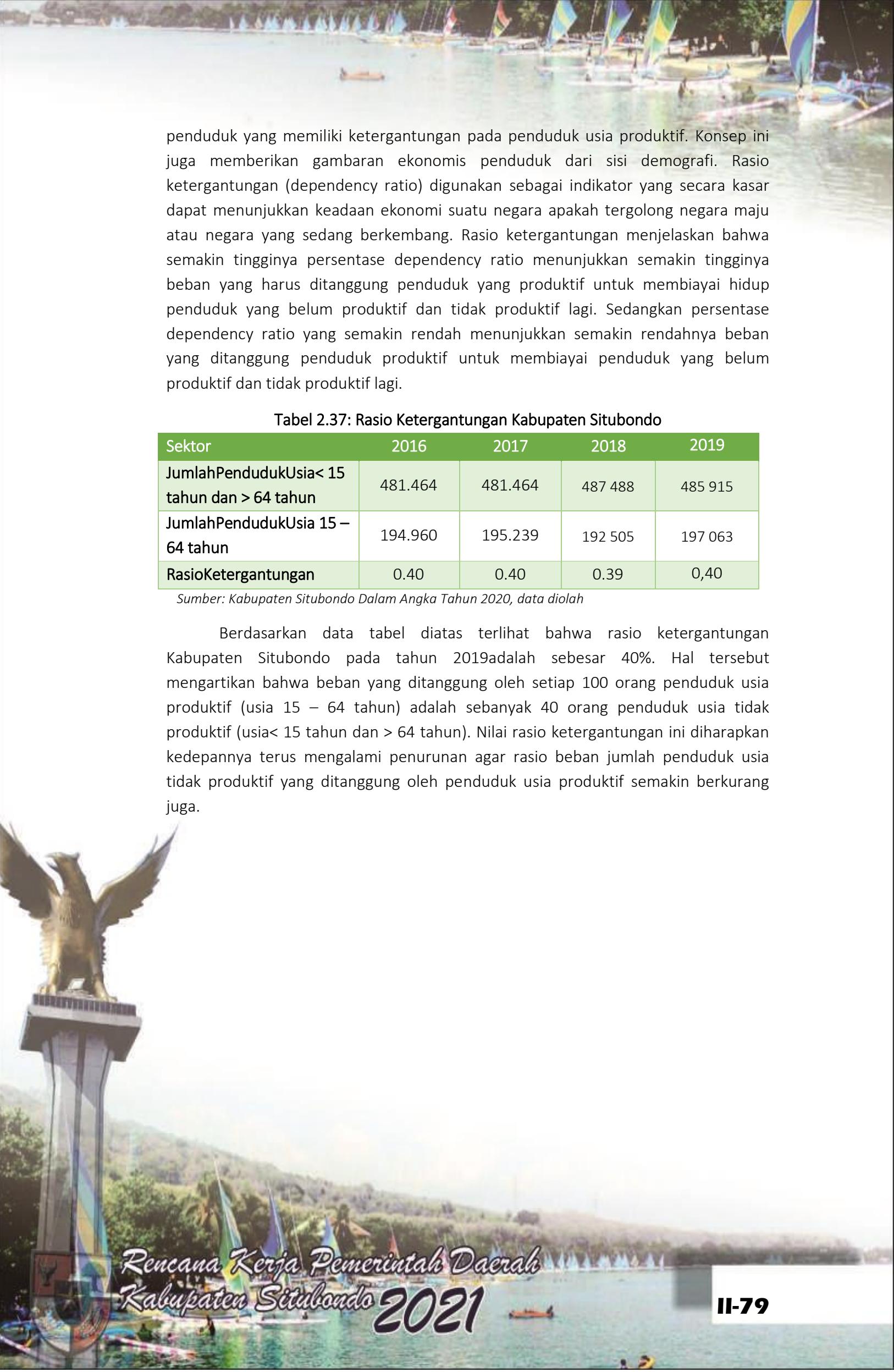
Tabel 2.36 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tahun	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Diploma	S1	S2	S3
2013	-	39,712	260,326	89,416	96,251	5,071	17,963	809	41
2014	-	45,080	262,423	90,701	98,127	5,267	18,747	829	49
2015	-	48,191	261,438	91,160	98,932	5,378	19,593	898	53
2016	225,897	47,333	218,725	78,045	84,801	4,803	17,782	854	58
2017	216,819	51,018	219,056	80,023	88,501	5,110	19,769	912	72

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2020

2.1.4.2.2 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (ratio ketergantungan) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah



penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.37: Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo

Sektor	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun dan > 64 tahun	481.464	481.464	487 488	485 915
Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	194.960	195.239	192 505	197 063
Rasio Ketergantungan	0.40	0.40	0.39	0,40

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah sebesar 40%. Hal tersebut mengartikan bahwa beban yang ditanggung oleh setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) adalah sebanyak 40 orang penduduk usia tidak produktif (usia < 15 tahun dan > 64 tahun). Nilai rasio ketergantungan ini diharapkan kedepannya terus mengalami penurunan agar rasio beban jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang juga.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja Pembangunan Daerah/ Kinerja instansi, utamanya dalam mencapai tujuan Pembangunan. Setiap Daerah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan dibalik pembuatan indikator kinerja utama adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian program pembangunan daerah baik pada tahun berjalan maupun akhir periode pembangunan. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Situbondo berjumlah 5 indikator. Yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Kemiskinan, dan Indeks Gini Ratio. Indikator IKU secara umum dibahas sebagai berikut:

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sesuai dengan peningkatan komponen pembentuk IPM dan diikuti oleh peningkatan IPM, namun capaian IPM masih dibawah target yang ditentukan. Hal ini terlihat pada tahun 2016 dengan target 66,06 terealisasi 65,08. Tahun 2017 target 76,16 dan terealisasi 65,68 sedangkan untuk tahun 2018 target 68,28 terealisasinya besar 66,42 dan pada tahun 2019 targetnya adalah 69,42 dan pyoreksirealisasinya adalah 67,09. Berikut merupakan perkembangan IPM Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.69: IPM Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

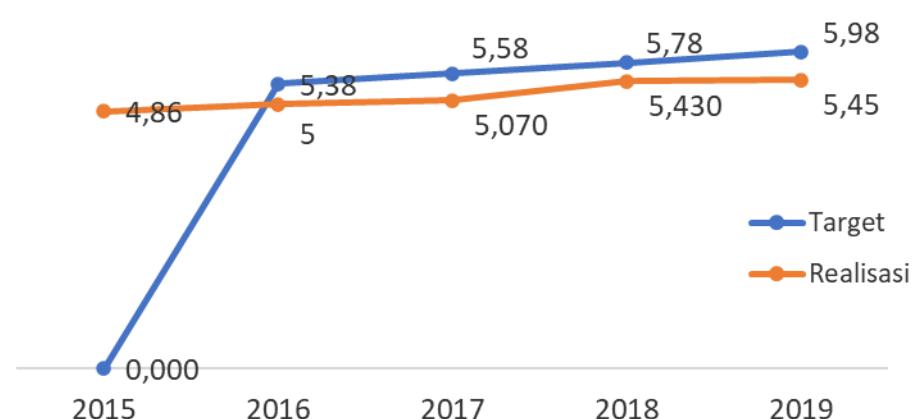
Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020,

Berdasarkan data diatas maka, IPM Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya walaupun angka realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditentukan.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengelola potensi daerah menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat setempat. Indikator kinerja keberhasilan pemerintah daerah mengelola sumber ekonomi daerah adalah dengan melihat tinggi atau rendahnya laju pertumbuhan ekonomi.

Indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo dari tahun 2016 hingga tahun 2019 masih belum memenuhi target dan pada tahun 2019 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Berikut merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo



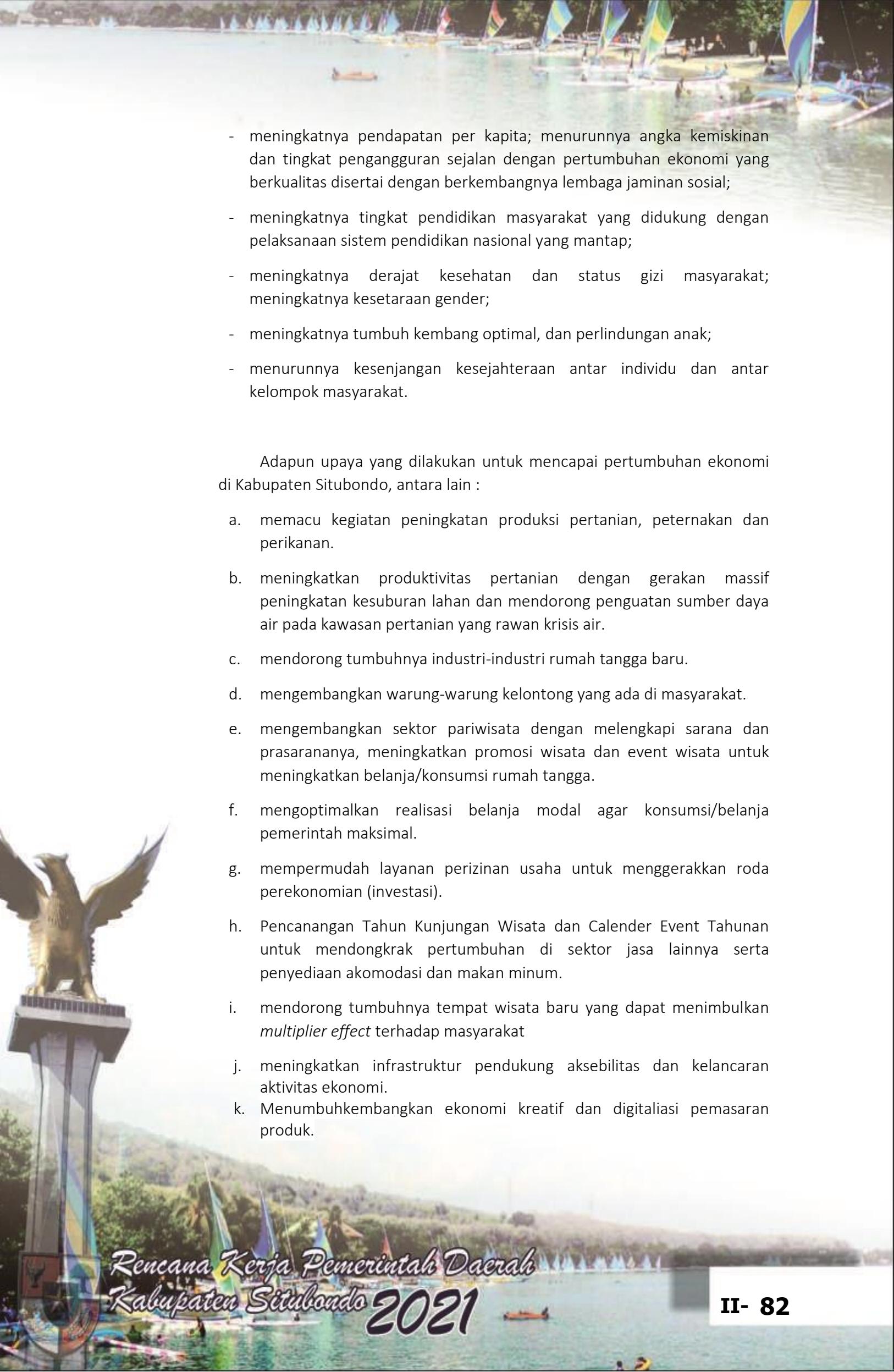
Gambar 2.70: Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Belum terpenuhinya realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari tahun 2016 memiliki target 5,38 namun terealisasi 5,0 sedangkan pada tahun 2017 targetnya adalah 5,58 terealisasi 5,070 dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,78 namun terealisasi sebesar 5,47. Tahun 2019 menurun sebesar 5,45 dan masih belum memenuhi target sebesar 5,98.

Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah meningkatnya investasi daerah, menjaga tingkat kosumsi, meningkatkan belanja pemerintah, serta menjaga kondisi ekspor dan impor. Selain itu pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksebilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Situbondo ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain:

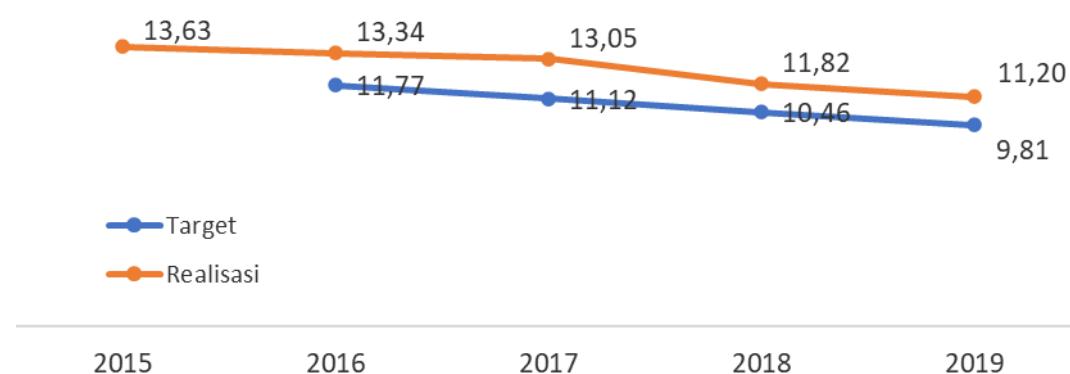
- 
- meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;
 - meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap;
 - meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender;
 - meningkatnya tumbuh kembang optimal, dan perlindungan anak;
 - menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu dan antar kelompok masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo, antara lain :

- a. memacu kegiatan peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
- b. meningkatkan produktivitas pertanian dengan gerakan massif peningkatan kesuburan lahan dan mendorong penguatan sumber daya air pada kawasan pertanian yang rawan krisis air.
- c. mendorong tumbuhnya industri-industri rumah tangga baru.
- d. mengembangkan warung-warung kelontong yang ada di masyarakat.
- e. mengembangkan sektor pariwisata dengan melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan promosi wisata dan event wisata untuk meningkatkan belanja/konsumsi rumah tangga.
- f. mengoptimalkan realisasi belanja modal agar konsumsi/belanja pemerintah maksimal.
- g. mempermudah layanan perizinan usaha untuk menggerakkan roda perekonomian (investasi).
- h. Pencanangan Tahun Kunjungan Wisata dan Calender Event Tahunan untuk mendongkrak pertumbuhan di sektor jasa lainnya serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
- i. mendorong tumbuhnya tempat wisata baru yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap masyarakat
- j. meningkatkan infrastruktur pendukung aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi.
- k. Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan digitalisasi pemasaran produk.

2.2.1.3 Presentase Kemiskinan

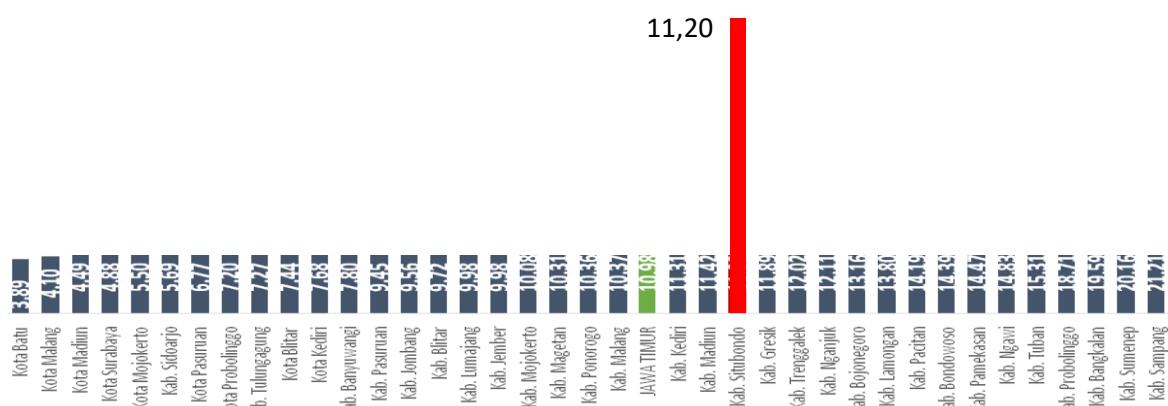
Kemiskinan di Kabupaten Situbondo menjadi isu yang harus diselesaikan pada tahun 2021, mengingat capaian selalu dibawah target. Berikut ini adalah kondisi Presentase Kemiskinan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.71: Presentase Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Presentase Kemiskinan Kabupaten Situbondo yang setiap tahunnya selalu dibawah target ini terlihat dari tahun 2016 dimana targetnya 11,77 namun angka kemiskinan masih di presentase 13,34 demikian juga terjadi pada tahun 2017 targetnya 11,12 namun presentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo adalah 13,03. selanjutnya pada tahun 2018 target sebesar 10,46 namun realisasi masih 11,82 sedangkan pada tahun 2019 targetnya 9,81 terealisasi sebesar 11,20. Berikut ini adalah perbandingan presentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo dengan daerah lainnya di Jawa Timur:



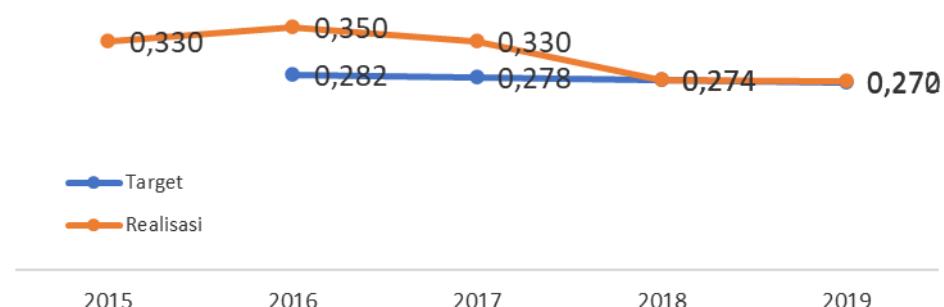
Gambar 2.72: Presentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Timur 2018

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Presentase kemiskinan Kabupaten Situbondo masih berada dibawah presentase kemiskinan di Jawa Tiumur hal ini terlihat berdasarkan gambar diatas Presentase kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2018 berada pada angka 11,82 sedangkan Jawa Timur memiliki ipresentase 10,98.

2.2.1.4 Indeks Gini Ratio

Indeks gini ratio ini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk dalam suatu wilayah. Berikut ini adalah indeks gini ratio di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.73: Indeks Gini Ratio Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2020

Indeks gini ratio Kabupaten Situbondo berhasil memenuhi target pada tahun 2018 dengan target 0,272 dan berhasil terealisasi sebesar 0,272. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2016 tergetnya adalah 0,282 namun terealisasi 0,350 dan pada tahun 2017 memiliki target sebesar 0,278 terealisasi sebesar 0,330. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan 0,270 terealisasi sebesar 0,272.

2.2.2. Gap Expectations Indikator Kinerja Utama (IKU)

Gap Expectation merupakan gambaran realisasi kinerja tahun berjalan terhadap target akhir periode pembangunan, dimana analisis ini menggambarkan bagaimana suatu indikator pembangunan dapat tercapai di akhir periode masa pembangunan.

Tabel 2.38: Gap Expectations Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Realisasi					Target		
		2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,08	65,68	66,42	67,09	68,28	69,42	70,58	71,76
2	Persentase Kemiskinan	13,34	13,05	11,82	11,22	10,46	9,81	9,16	8,5
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,07	5,78*	5,45	5,78	5,98	6,18	6,38
4	Indeks Gini Ratio	0,35	0,33	0,274*	0,272	0,274	0,27	0,266	0,262
5	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	65,91	68,41*	0%	68,41	70,91	73,41	75,91

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2020



Gambar 2.74: Gap Expectation Capaian 2019 terhadap Target 2021

Gambar diatas menunjukkan adanya 5 indikator IKU yang terdiri dari indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, presentase kemiskinan dan indeks gini ratio. Indeks Reformasi Birokrasi dari yang ditargetkan 75,91 pada tahun 2021 tercapai 0% pada tahun 2019 sehingga gap pada angka 100%. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 ditargetkan sebesar 71,76 terealisasi 67,09 pada tahun 2019 dengan Gap Expectation 6,51%. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 6,38 pada tahun 2021 sudah terealisasi 5,54 pada tahun 2019 dengan Gap 14,58 %.Indikator Presentase Kemiskinan tahun 2021 ditergetkan 8,5 terealisasi 11,22 pada tahun 2019 dengan Gap 24,24% dan indikator kelima adalah Indeks Gini ratio pada tahun 2021 ditergetkan 0,262 terealisasi 0,272 pada tahun 2019 dengan Gap 3,68%.

2.2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

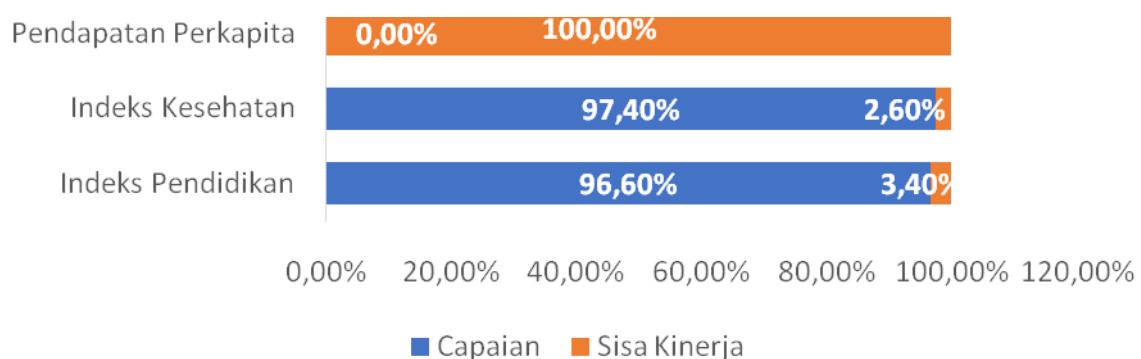
Sebagaimana IKU, Indikator kinerja Daerah atau IKD adalah ukuran atau indikator kinerja Pembangunan Daerah/ Kinerja instansi, utamanya dalam mencapai sasaran Pembangunan. Setiap Daerah wajib merumuskan indikator kinerja Daerah, dan menjadikannya sebagai prioritas. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian program pembangunan daerah baik pada tahun berjalan maupun akhir periode pembangunan.

2.2.3.1 Indikator Kinerja Daerah Misi 1

Indikator Kinerja Daerah pada misi 1 di Kabupaten Situbondo memiliki 3 indikator sasaran yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan ,dan perdapatan perkapita.

Tabel 2.39: Indikator Kinerja Misi 1

Sasaran		Indikator Sasaran	Realisasi					Target	
			2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
S 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.55	0.56	n/a	0,57	0.58	0.59	0.6
S 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0.75	0.75	n/a	0,75	0.76	0.77	0.77
S 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan PerKapita	n/a	n/a	n/a	20,22	n/a	n/a	n/a



Gambar 2. 75: Gap Expectation realisasi 2017 dengan target 2021

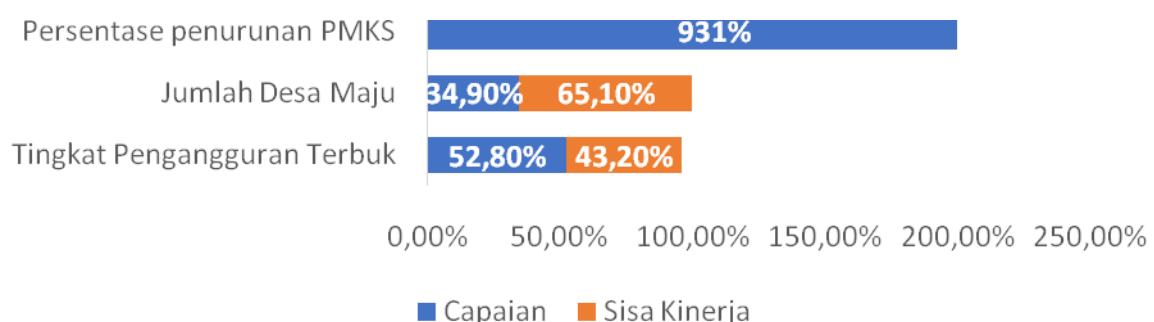
Berdasarkantabelindikatorkinerjadaerahmisi 1 dan gambar Gap Expectation realisasi 2017 dengan target 2021 makamariketigaindikator Kinerja Daerah Misi 1 Kabupaten Situbondo belumterdapatindikator yang memenuhi target tahun 2019, namunsecaraumumhampirmemenuhi target tahun 2021. Hal initerlihatdariindikatorpendapatanperkapita pada tahun 2021 memiliki target 0% terealisasi 0% pada tahun 2017 dengan Gap 100%. Sedangkanindekskesehatan pada tahun 2021 memiliki target sebesar 0,77 terealisasi 0,75 pada tahun 2017 dengan Gap 2,60%, dan indeks pendidikan pada tahun 2021 memiliki target sebesar 0,6 terealisasi sebesar 0,56 pada tahun 2017 dengan Gap 3,40%.

2.2.3.2 Indikator Kinerja Daerah Misi 2

Indikator Kinerja Daerah pada misi 2 di Kabupaten Situbondo memiliki 3 indikator sasaran yaitu tingkat pengangguran terbuka, jumlah desa maju, dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.40: Indikator Kinerja Daerah Misi 2

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
S 4	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.43	1.49	1.92	2,82	2.06	1.82	1.49
S 5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Maju	12	15	31	29	46	64	83
S 6	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Percentase Penurunan PMKS	0.52	1.70	3.56	10,43	1.04	1.08	1.12



Gambar 2.76: Gap Expectation realisasi 2018 dengan target 2021

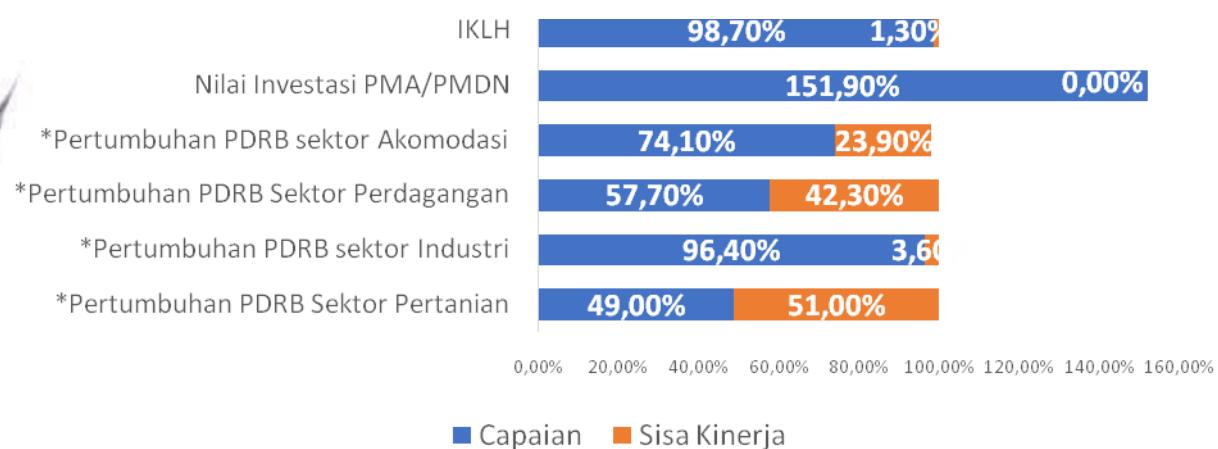
Berdasarkan tabel indikator kinerja daerah misi 2 dan gambar Gap Expectation realisasi 2018 Kabupaten Situbondo dengan target 2021 maka dari ketiga indikator Kinerja Daerah Misi 2 Kabupaten Situbondo terdapat satu indikator yang sudah memenuhi target tahun 2019 sekaligus 2021 yaitu Tingkat Penurunan PMKS dengan target 1,12 pada tahun 2021 dan target 2019 sebesar 1,04 sehingga Gap sebesar 931%. Sedangkan 2 indikator lain masih belum memenuhi target tahun 2019 dan masih jauh dari target tahun 2021. Kedua indikator ini adalah pertama jumlah desa maju dengan target 83 pada tahun 2021 terealisasi 31 pada tahun 2018 dengan Gap 65,10% dan indikator kedua adalah tingkat pengangguran terbuka memiliki target 1,49 pada tahun 2021 terealisasi 1,92 pada tahun 2018 dengan Gap 43,20%.

2.2.3.3 Indikator Kinerja Daerah Misi 3

Indikator Kinerja Daerah pada misi 3 di Kabupaten Situbondo memiliki 6 indikator sasaran yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi, Nilai Investasi PMA PMDN, dan IKLH.

Tabel 2.41: Indikator Kinerja Daerah Misi 3

Sasaran		Indikator Sasaran	Realisasi				Target		
			2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
S 7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	2.64	0.95	n/a	1,58	3.02	3.12	3.22
		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	7.89	8.25	n/a	9,35	8.97	9.34	9.7
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan Eceran	8.47	9.45	n/a	7,09	10.8 6	11.57	12.28
		Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi	8.78	9.02	n/a	7,42	9.51	9.76	10.01
S 8	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi PMA PMDN	350	385	781.5	856, 37	465. 85	512.4 35	563.6
S 9	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	IKLH	71.9	71.73	72.06	72,5 3	72.5	73	73.5



Gambar 2.77: Gap Expectation realisasi 2019 dengan target 2021

Berdasarkan tabel indikator kinerja daerah misi 3 dan gambar Gap Expectation realisasi 2019 Kabupaten Situbondo dengan target 2021 dari 6 indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo terdapat satu indikator yang

sudah memenuhi target tahun 2019 sebesar 465,85 sekaligus target tahun 2021 sebesar 563,6 yaitu investasi daerah dengan Gap sebesar 139%. Sedangkan indikator lain masih belum memenuhi target tahun 2019. Indikator IKLH memiliki target pada tahun 2021 sebesar 73,5 terealisasi 72,53 pada tahun 2019 dengan Gap 1,30%. Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi memiliki target 10,01 pada tahun 2021 terealisasi 7,42 pada tahun 2019 dengan Gap 23,90%.

Ketiga indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memiliki target 12,28 pada tahun 2021 terealisasi 7,09 pada tahun 2019 dengan Gap 42,30%. Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri memiliki target 9,7 pada tahun 2021 terealisasi 9,35 pada tahun 2019 dengan Gap 3,60% dan terakhir adalah indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian memiliki target 3,22 pada tahun 2021 terealisasi 1,58 pada tahun 2019 dengan Gap 51,00% .

Hubungannya dengan produktivitas, suatu daerah dikatakan sebagai daerah yang memiliki produktivitas tinggi jika daerah tersebut memiliki PDRB (baik ADHK maupun ADHB) yang tinggi sebagai hasil dari kegiatan ekonomi suatu daerah. Tinggi atau tidaknya angka PDRB diukur dari nilai-nilai dari tahun sebelumnya.

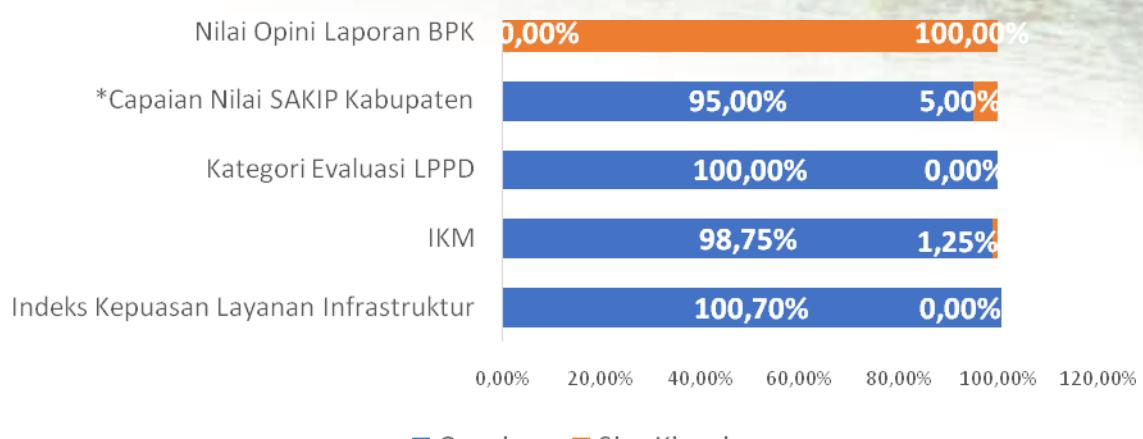
Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.

2.2.3.4 Indikator Kinerja Daerah Misi 4

Indikator Kinerja Daerah pada misi 4 di Kabupaten Situbondo memiliki 5 indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur, IKM, Kategori Evaluasi LPPD, Capaian Nilai SAKIP Kabupaten, dan Nilai Opini Laporan BPK.

Tabel 2.42: Indikator Kinerja Daerah Misi 4

Sasaran		Indikator Sasaran	Realisasi					Target		
			2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
S 10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	77.3	81.07	81.58	79	80	81	
		IKM	76.13	80.46	71.5	80,25	78	80	81.26	
S 11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kategori Evaluasi LPPD	sangat tinggi							
		Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	CC (42.84)	B (57.12)	n/a	A (81.5)	BB (71.4)	A (85.68)	A (85.68)	
S 12	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset	Nilai Opini Laporan BPK	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP	WTP	



Gambar 2.78: Gap Expectation realisasi 2019 dengan target 2021

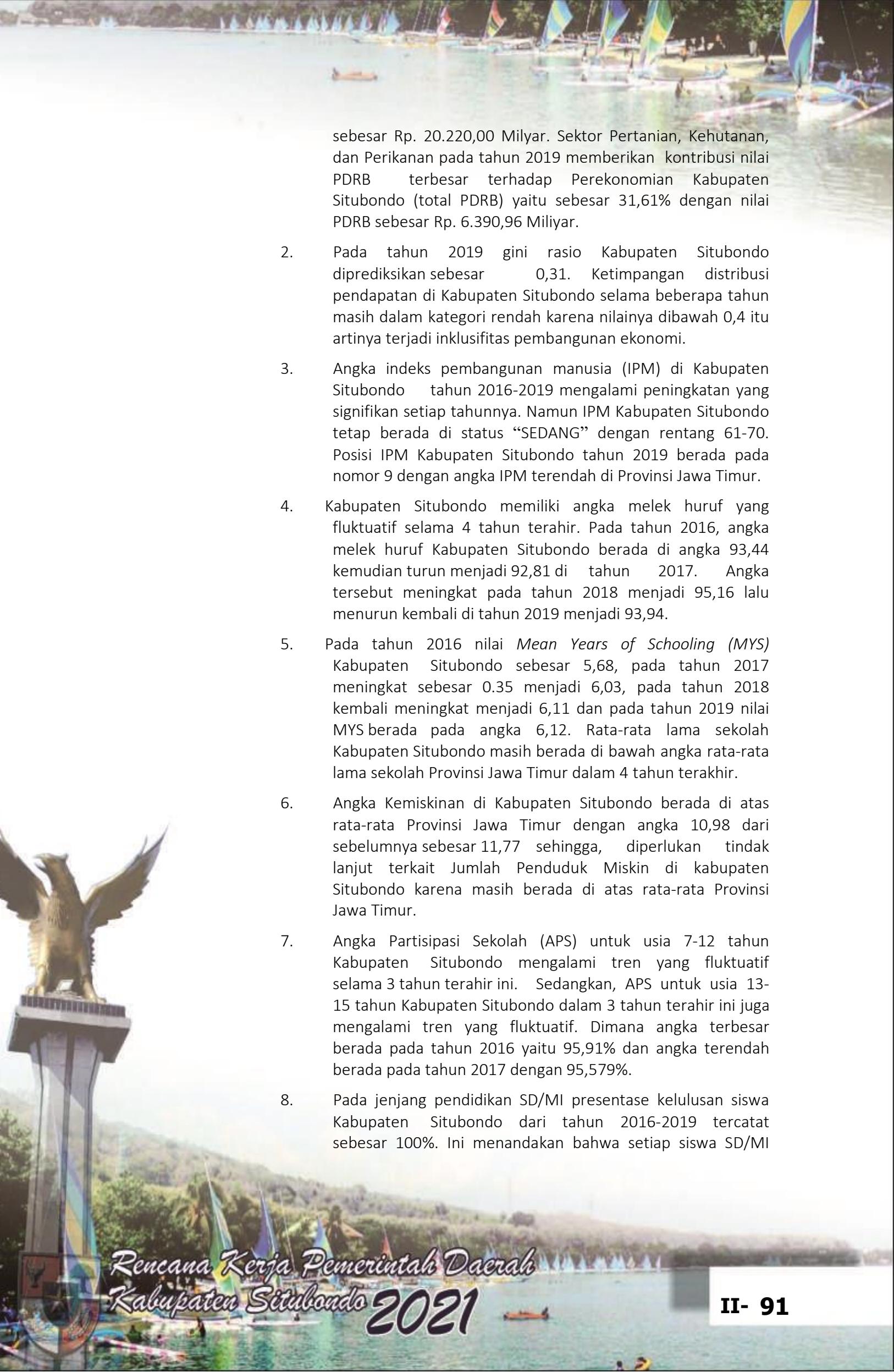
Berdasarkan tabel indikator kinerja daerah misi 4 dan gambar Gap Expectation realisasi 2019 Kabupaten Situbondo dengan target 2021 dari 5 indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo sudah 4 indikator yang sudah memenuhi target tahun 2019 IKLI sebesar 79, IKM sebesar 78, Kategori Evaluasi LPPD dengan target sangat tinggi dan Nilai Sakip sebesar BB (71,4). Sedangkan untuk indikator Nilai Opini BPK masih belum memiliki data kinerja. 1 indikator yaitu IKLI telah memenuhi target tahun 2021 sebesar 81 terelaisasi 81,58 pada tahun 2019 dengan Gap 100,70%, sedangkan 4 lainnya hampir mendekati target tahun 2021.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

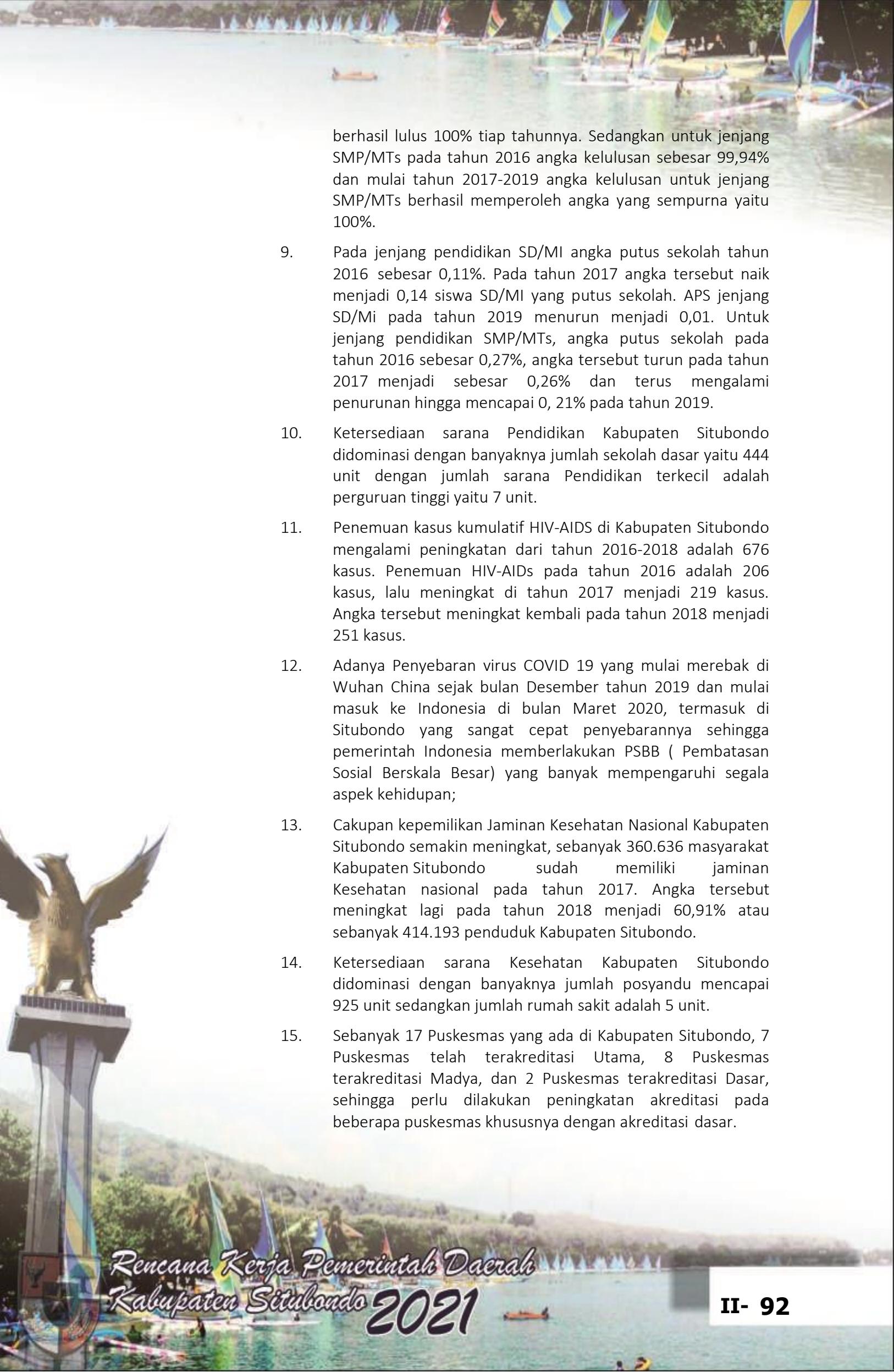
Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ADHK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebesar 1.960,73 Miliar sehingga tercatat pada tahun 2019 ADHK sebesar Rp. 13.601,49 Miliar. Hal ini serupa dengan pertumbuhan ADHB pada 4 tahun terakhir yang turut mengalami peningkatan sebesar 3.939,24 Miliar, sehingga pada tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan ADHK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebesar 1.960,73 Miliar sehingga tercatat pada tahun 2019 ADHK sebesar Rp. 13.601,49 Miliar. Hal ini serupa dengan pertumbuhan ADHB pada 4 tahun terakhir yang turut mengalami peningkatan sebesar 3.939,24 Miliar, sehingga pada tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Situbondo tercatat



sebesar Rp. 20.220,00 Milyar. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2019 memberikan kontribusi nilai PDRB terbesar terhadap Perekonomian Kabupaten Situbondo (total PDRB) yaitu sebesar 31,61% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 6.390,96 Miliyar.

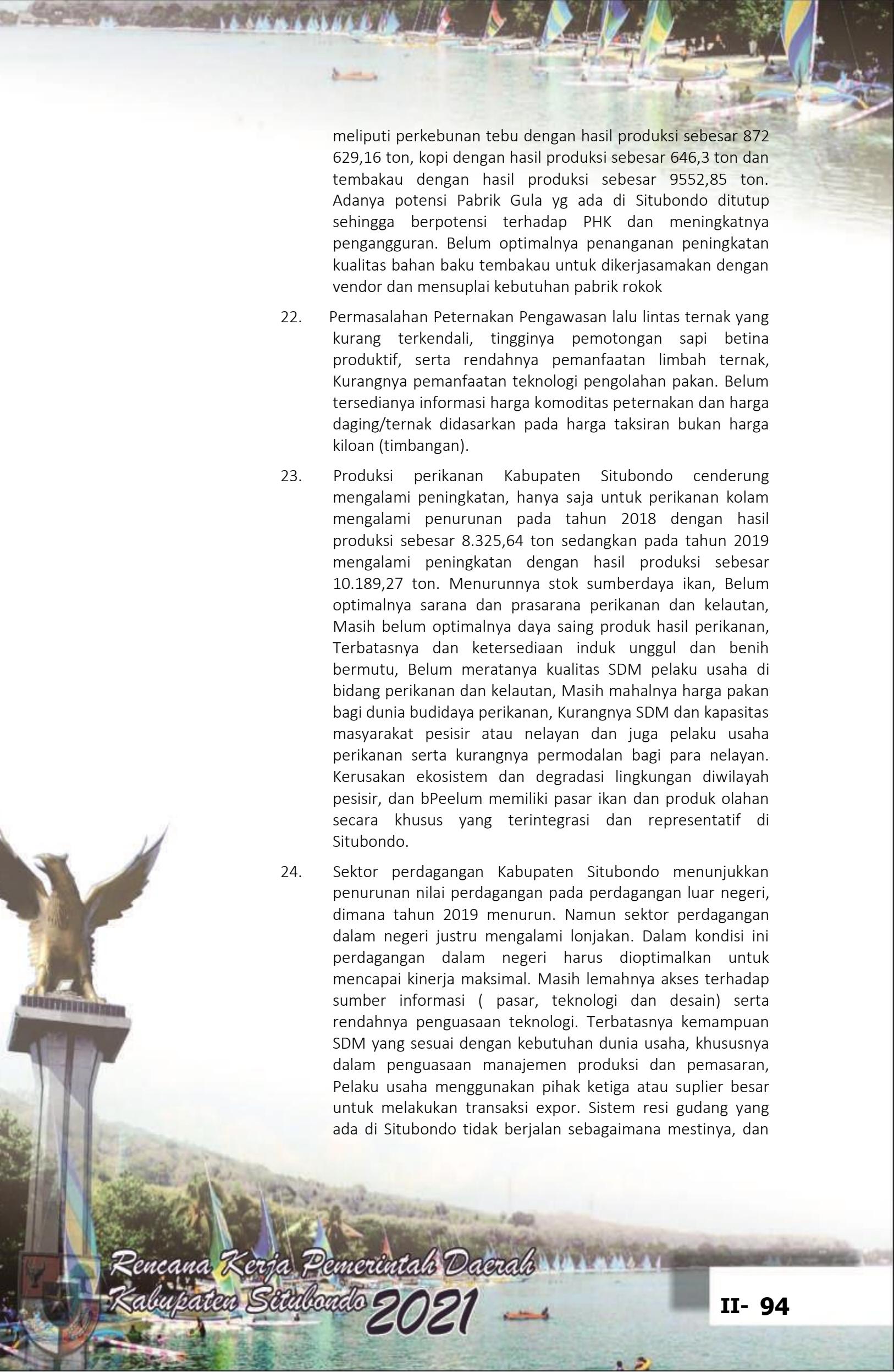
2. Pada tahun 2019 gini rasio Kabupaten Situbondo diprediksi sebesar 0,31. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 itu artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi.
3. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Situbondo tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Situbondo tetap berada di status “SEDANG” dengan rentang 61-70. Posisi IPM Kabupaten Situbondo tahun 2019 berada pada nomor 9 dengan angka IPM terendah di Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten Situbondo memiliki angka melek huruf yang fluktuatif selama 4 tahun terahir. Pada tahun 2016, angka melek huruf Kabupaten Situbondo berada di angka 93,44 kemudian turun menjadi 92,81 di tahun 2017. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 95,16 lalu menurun kembali di tahun 2019 menjadi 93,94.
5. Pada tahun 2016 nilai *Mean Years of Schooling* (MYS) Kabupaten Situbondo sebesar 5,68, pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,35 menjadi 6,03, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 6,11 dan pada tahun 2019 nilai MYS berada pada angka 6,12. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir.
6. Angka Kemiskinan di Kabupaten Situbondo berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dengan angka 10,98 dari sebelumnya sebesar 11,77 sehingga, diperlukan tindak lanjut terkait Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Situbondo karena masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.
7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun Kabupaten Situbondo mengalami tren yang fluktuatif selama 3 tahun terahir ini. Sedangkan, APS untuk usia 13-15 tahun Kabupaten Situbondo dalam 3 tahun terahir ini juga mengalami tren yang fluktuatif. Dimana angka terbesar berada pada tahun 2016 yaitu 95,91% dan angka terendah berada pada tahun 2017 dengan 95,579%.
8. Pada jenjang pendidikan SD/MI presentase kelulusan siswa Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2019 tercatat sebesar 100%. Ini menandakan bahwa setiap siswa SD/MI



berhasil lulus 100% tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 angka kelulusan sebesar 99,94% dan mulai tahun 2017-2019 angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs berhasil memperoleh angka yang sempurna yaitu 100%.

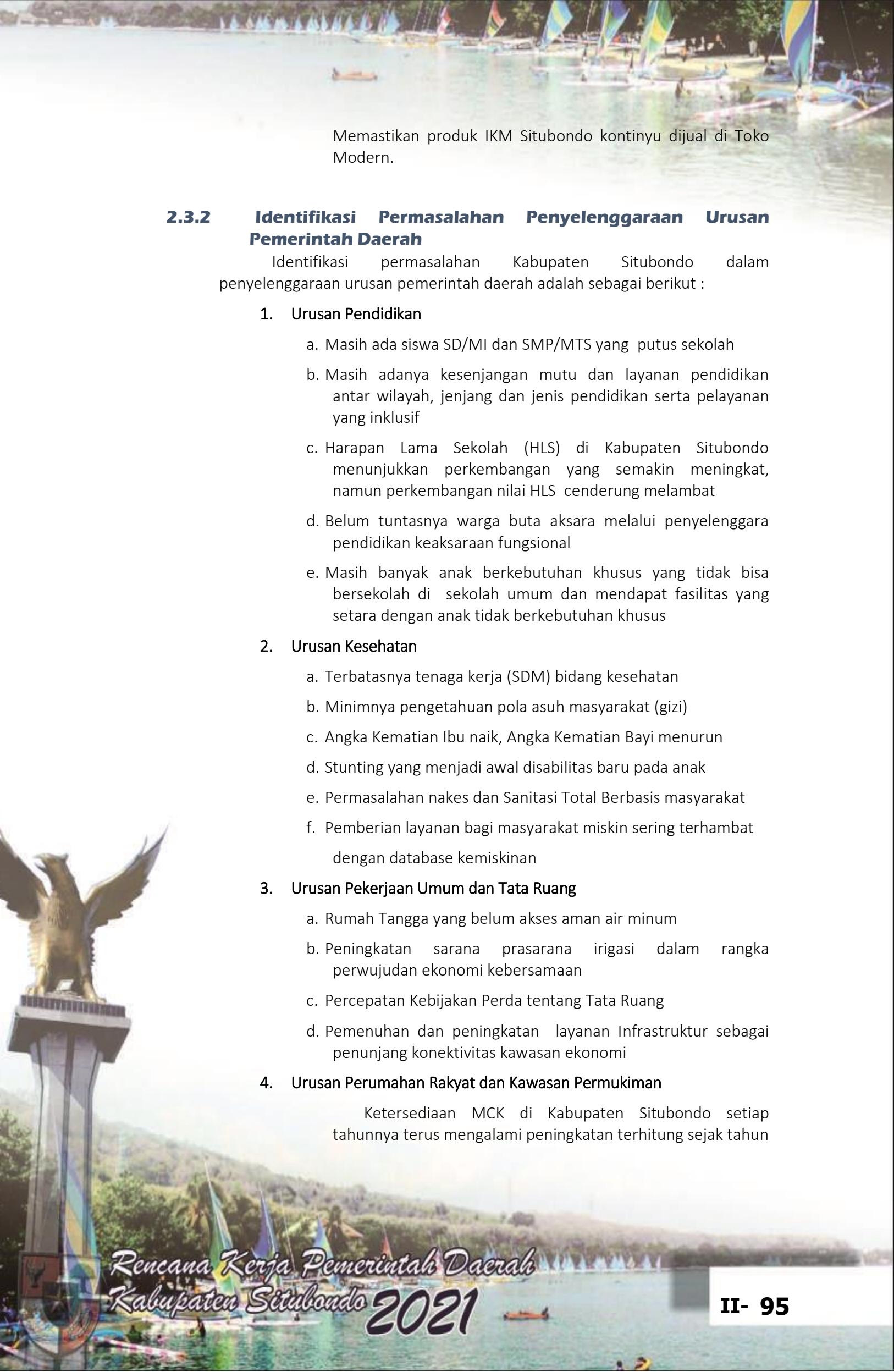
9. Pada jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah tahun 2016 sebesar 0,11%. Pada tahun 2017 angka tersebut naik menjadi 0,14 siswa SD/MI yang putus sekolah. APS jenjang SD/Mi pada tahun 2019 menurun menjadi 0,01. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,27%, angka tersebut turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,26% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,21% pada tahun 2019.
10. Ketersediaan sarana Pendidikan Kabupaten Situbondo didominasi dengan banyaknya jumlah sekolah dasar yaitu 444 unit dengan jumlah sarana Pendidikan terkecil adalah perguruan tinggi yaitu 7 unit.
11. Penemuan kasus kumulatif HIV-AIDS di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 adalah 676 kasus. Penemuan HIV-AIDS pada tahun 2016 adalah 206 kasus, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 219 kasus. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 251 kasus.
12. Adanya Penyebaran virus COVID 19 yang mulai merebak di Wuhan China sejak bulan Desember tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, termasuk di Situbondo yang sangat cepat penyebarannya sehingga pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang banyak mempengaruhi segala aspek kehidupan;
13. Cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Situbondo semakin meningkat, sebanyak 360.636 masyarakat Kabupaten Situbondo sudah memiliki jaminan Kesehatan nasional pada tahun 2017. Angka tersebut meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 60,91% atau sebanyak 414.193 penduduk Kabupaten Situbondo.
14. Ketersediaan sarana Kesehatan Kabupaten Situbondo didominasi dengan banyaknya jumlah posyandu mencapai 925 unit sedangkan jumlah rumah sakit adalah 5 unit.
15. Sebanyak 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo, 7 Puskesmas telah terakreditasi Utama, 8 Puskesmas terakreditasi Madya, dan 2 Puskesmas terakreditasi Dasar, sehingga perlu dilakukan peningkatan akreditasi pada beberapa puskesmas khususnya dengan akreditasi dasar.

- 
16. Kondisi jalan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 sepanjang 821,11 Km dari tahun sebelumnya hanya 30,74 Km.
17. Indeks infrastruktur di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Oleh karena itu diperlukan adanya konsistensi agar indeks infratruktur di Kabupaten Situbondo ini terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 yaitu 72,5 meliputi penilaian kualitas air, udara dan tutupan vegetasi. Indeks kualitas air menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu menjadi 66,7, sedangkan kualitas udara meningkat menjadi 82, indeks tutupan vegetasi terpantau fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
19. Grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan jumlah data kunjungan sangat fluktuatif, baik pada wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.
20. Produksi pertanian Kabupaten Situbondo menunjukkan angka yang fluktuatif seperti hasil pertanian padi yang pada tahun 2018 sebesar 311.409 ton, sedangkan pada tahun 2019 justru mengalami penurunan produksi padi yang dihasilkan sebesar 305.041 ton. Adanya penurunan tingkat kesuburan tanah (PH tinggi) sebagai akibat penggunaan pupuk kimia, pestisida yang berlebihan (termasuk supramin) sehingga berpengaruh pada produktivitas tanaman, Adaptif terhadap era 4.0 dengan Smart Farming. Pada musim kemarau sering terjadi kekeringan pada daerah-daerah tertentu karena keberadaan topografi Situbondo berada pada posisi hilir dari DAS Sampean, sehingga kekurangan air irigasi, yang demikian diperlukan sebuah terobosan diantaranya perlunya pembangunan Embung, sumur pompa dalam yang mudah dan dapat dikelola oleh petani. Harga produk pertanian pertanian relatif berfluktuatif terutama pada saat panen raya. Alih fungsi lahan pertanian belum dapat sepenuhnya dilakukan tanpa Perbup LP2B, Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur atau lahan kritis atau tandus.. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu dan harga) yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani (RDKK).
21. Produksi tanaman perkebunan Kabupaten Situbondo tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang



meliputi perkebunan tebu dengan hasil produksi sebesar 872 629,16 ton, kopi dengan hasil produksi sebesar 646,3 ton dan tembakau dengan hasil produksi sebesar 9552,85 ton. Adanya potensi Pabrik Gula yg ada di Situbondo ditutup sehingga berpotensi terhadap PHK dan meningkatnya pengangguran. Belum optimalnya penanganan peningkatan kualitas bahan baku tembakau untuk dikerjasamakan dengan vendor dan mensuplai kebutuhan pabrik rokok

22. Permasalahan Peternakan Pengawasan lalu lintas ternak yang kurang terkendali, tingginya pemotongan sapi betina produktif, serta rendahnya pemanfaatan limbah ternak, Kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan. Belum tersedianya informasi harga komoditas peternakan dan harga daging/ternak didasarkan pada harga taksiran bukan harga kiloan (timbangan).
23. Produksi perikanan Kabupaten Situbondo cenderung mengalami peningkatan, hanya saja untuk perikanan kolam mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan hasil produksi sebesar 8.325,64 ton sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan hasil produksi sebesar 10.189,27 ton. Menurunnya stok sumberdaya ikan, Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, Masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan, Terbatasnya dan ketersediaan induk unggul dan benih bermutu, Belum meratanya kualitas SDM pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan, Masih mahalnya harga pakan bagi dunia budidaya perikanan, Kurangnya SDM dan kapasitas masyarakat pesisir atau nelayan dan juga pelaku usaha perikanan serta kurangnya permodalan bagi para nelayan. Kerusakan ekosistem dan degradasi lingkungan diwilayah pesisir, dan belum memiliki pasar ikan dan produk olahan secara khusus yang terintegrasi dan representatif di Situbondo.
24. Sektor perdagangan Kabupaten Situbondo menunjukkan penurunan nilai perdagangan pada perdagangan luar negeri, dimana tahun 2019 menurun. Namun sektor perdagangan dalam negeri justru mengalami lonjakan. Dalam kondisi ini perdagangan dalam negeri harus dioptimalkan untuk mencapai kinerja maksimal. Masih lemahnya akses terhadap sumber informasi (pasar, teknologi dan desain) serta rendahnya penguasaan teknologi. Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya dalam penguasaan manajemen produksi dan pemasaran, Pelaku usaha menggunakan pihak ketiga atau suplier besar untuk melakukan transaksi ekspor. Sistem resi gudang yang ada di Situbondo tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan



Memastikan produk IKM Situbondo kontinyu dijual di Toko Modern.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih ada siswa SD/MI dan SMP/MTS yang putus sekolah
- b. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis pendidikan serta pelayanan yang inklusif
- c. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Situbondo menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, namun perkembangan nilai HLS cenderung melambat
- d. Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional
- e. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa bersekolah di sekolah umum dan mendapat fasilitas yang setara dengan anak tidak berkebutuhan khusus

2. Urusan Kesehatan

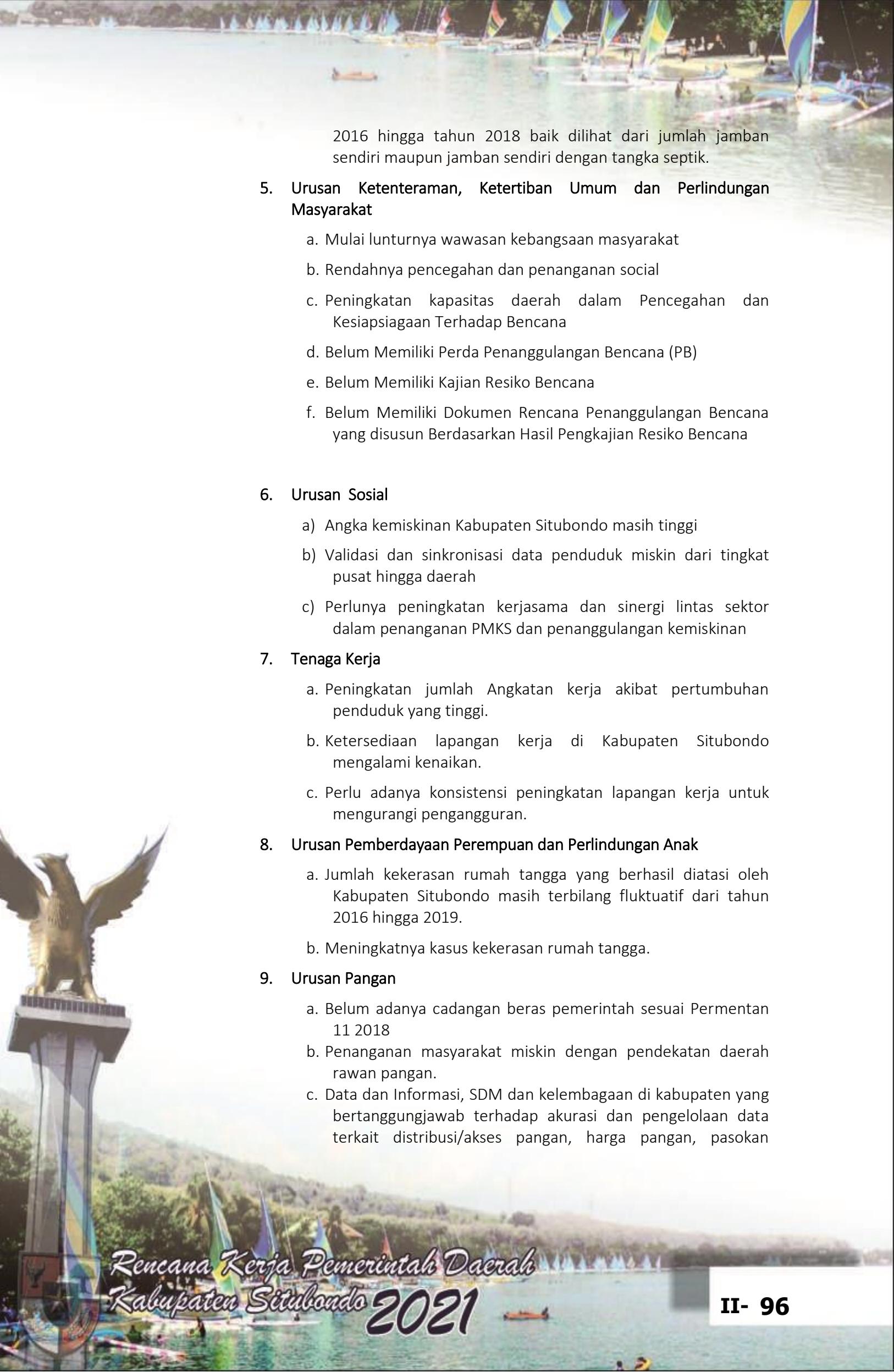
- a. Terbatasnya tenaga kerja (SDM) bidang kesehatan
- b. Minimnya pengetahuan pola asuh masyarakat (gizi)
- c. Angka Kematian Ibu naik, Angka Kematian Bayi menurun
- d. Stunting yang menjadi awal disabilitas baru pada anak
- e. Permasalahan nakes dan Sanitasi Total Berbasis masyarakat
- f. Pemberian layanan bagi masyarakat miskin sering terhambat dengan database kemiskinan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Rumah Tangga yang belum akses aman air minum
- b. Peningkatan sarana prasarana irigasi dalam rangka perwujudan ekonomi kebersamaan
- c. Percepatan Kebijakan Perda tentang Tata Ruang
- d. Pemenuhan dan peningkatan layanan Infrastruktur sebagai penunjang koneksi kawasan ekonomi

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan MCK di Kabupaten Situbondo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan terhitung sejak tahun



2016 hingga tahun 2018 baik dilihat dari jumlah jamban sendiri maupun jamban sendiri dengan tangka septik.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Mulai lunturnya wawasan kebangsaan masyarakat
- b. Rendahnya pencegahan dan penanganan social
- c. Peningkatan kapasitas daerah dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Belum Memiliki Perda Penanggulangan Bencana (PB)
- e. Belum Memiliki Kajian Resiko Bencana
- f. Belum Memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun Berdasarkan Hasil Pengkajian Resiko Bencana

6. Urusan Sosial

- a) Angka kemiskinan Kabupaten Situbondo masih tinggi
- b) Validasi dan sinkronisasi data penduduk miskin dari tingkat pusat hingga daerah
- c) Perlunya peningkatan kerjasama dan sinergi lintas sektor dalam penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan

7. Tenaga Kerja

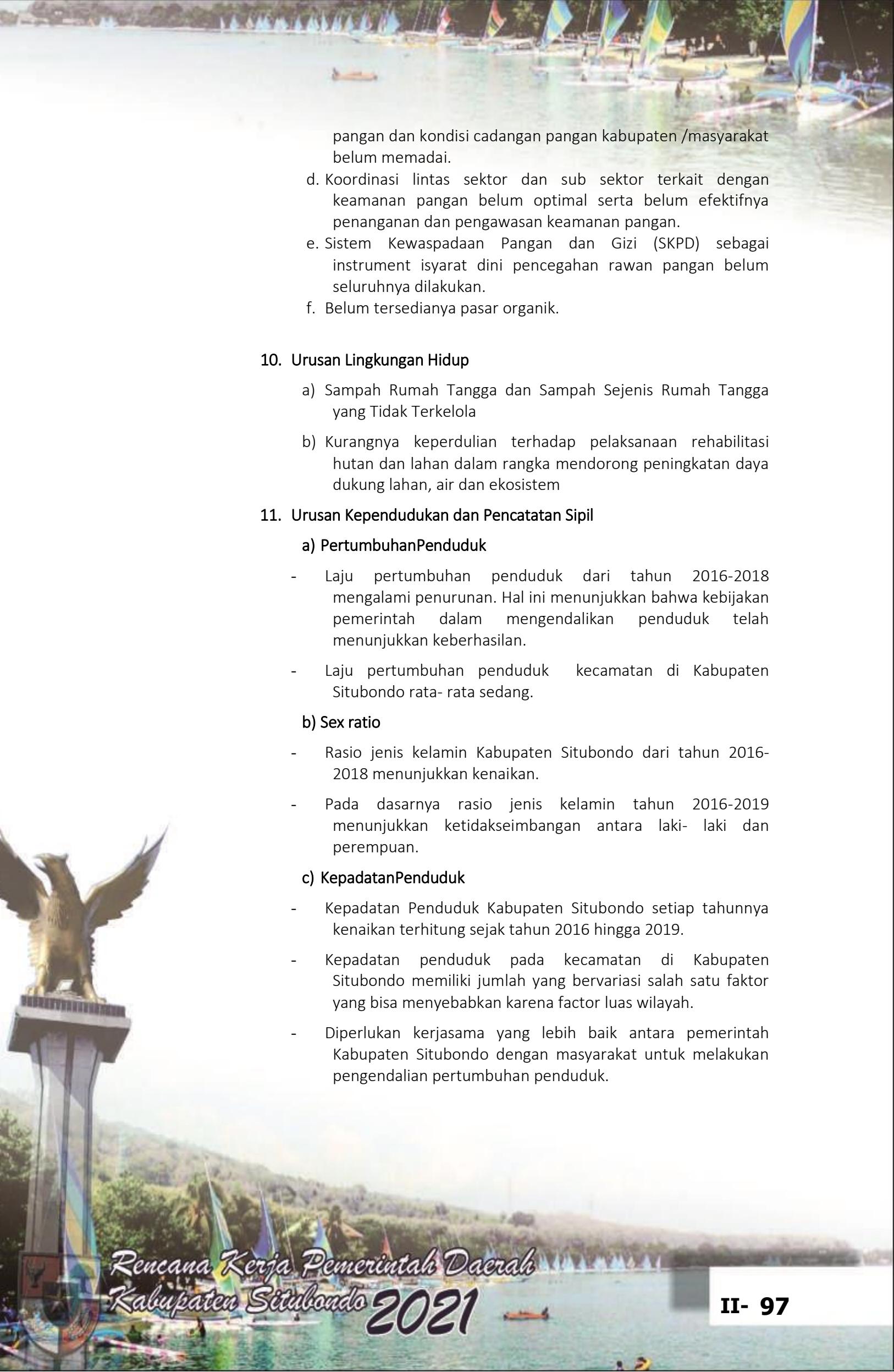
- a. Peningkatan jumlah Angkatan kerja akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- b. Ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan.
- c. Perlu adanya konsistensi peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Jumlah kekerasan rumah tangga yang berhasil diatasi oleh Kabupaten Situbondo masih terbilang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2019.
- b. Meningkatnya kasus kekerasan rumah tangga.

9. Urusan Pangan

- a. Belum adanya cadangan beras pemerintah sesuai Permentan 11 2018
- b. Penanganan masyarakat miskin dengan pendekatan daerah rawan pangan.
- c. Data dan Informasi, SDM dan kelembagaan di kabupaten yang bertanggungjawab terhadap akurasi dan pengelolaan data terkait distribusi/akses pangan, harga pangan, pasokan



pangan dan kondisi cadangan pangan kabupaten /masyarakat belum memadai.

- d. Koordinasi lintas sektor dan sub sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal serta belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan.
- e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) sebagai instrument isyarat dini pencegahan rawan pangan belum seluruhnya dilakukan.
- f. Belum tersedianya pasar organik.

10. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang Tidak Terkelola
- b) Kurangnya keperdulian terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air dan ekosistem

11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Pertumbuhan Penduduk

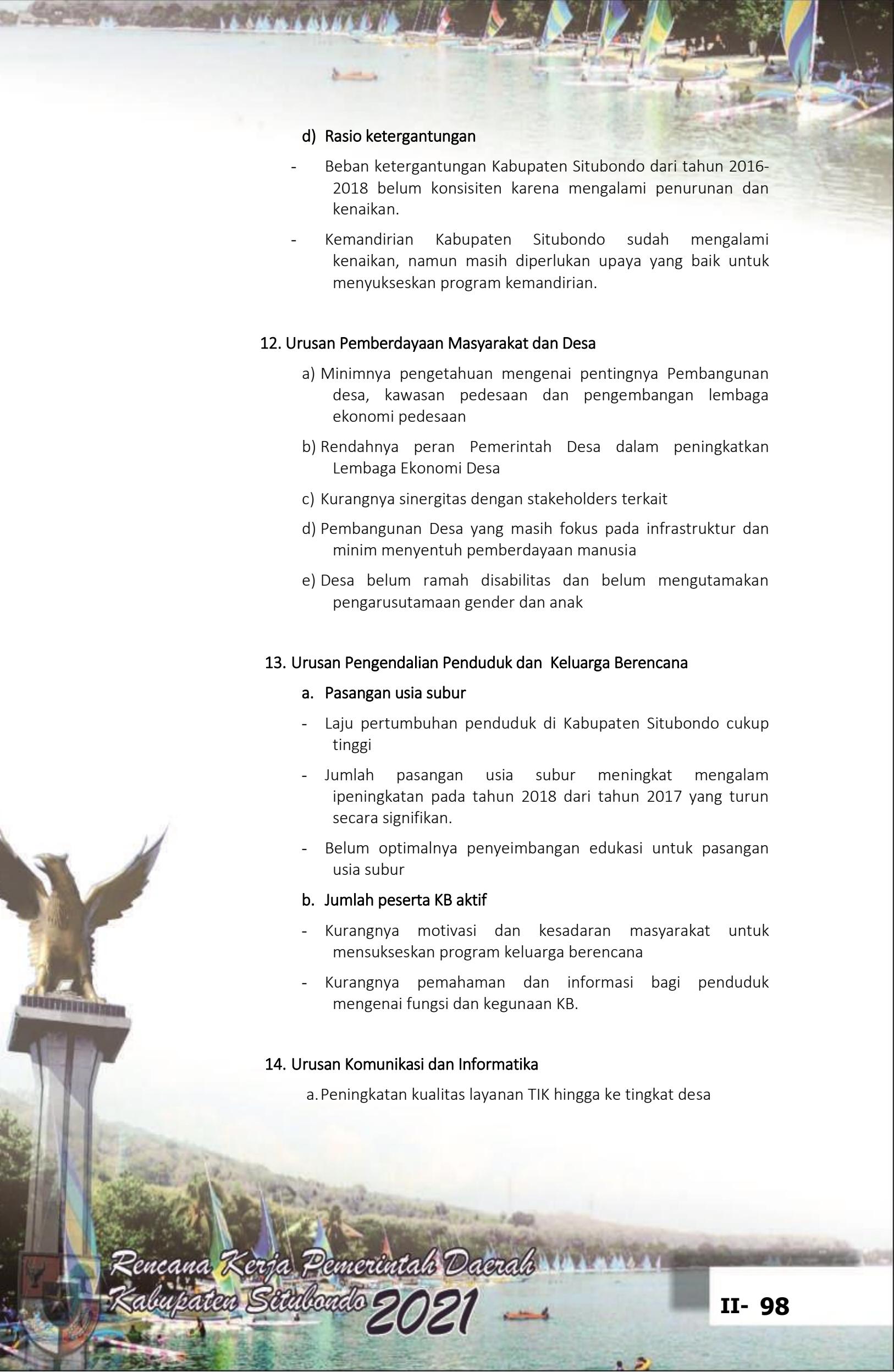
- Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penduduk telah menunjukkan keberhasilan.
- Laju pertumbuhan penduduk kecamatan di Kabupaten Situbondo rata- rata sedang.

b) Sex ratio

- Rasio jenis kelamin Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2018 menunjukkan kenaikan.
- Pada dasarnya rasio jenis kelamin tahun 2016-2019 menunjukkan ketidakseimbangan antara laki- laki dan perempuan.

c) Kepadatan Penduduk

- Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo setiap tahunnya kenaikan terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019.
- Kepadatan penduduk pada kecamatan di Kabupaten Situbondo memiliki jumlah yang bervariasi salah satu faktor yang bisa menyebabkan karena factor luas wilayah.
- Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah Kabupaten Situbondo dengan masyarakat untuk melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk.



d) **Rasio ketergantungan**

- Beban ketergantungan Kabupaten Situbondo dari tahun 2016-2018 belum konsisten karena mengalami penurunan dan kenaikan.
- Kemandirian Kabupaten Situbondo sudah mengalami kenaikan, namun masih diperlukan upaya yang baik untuk menyukseskan program kemandirian.

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Minimnya pengetahuan mengenai pentingnya Pembangunan desa, kawasan pedesaan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- b) Rendahnya peran Pemerintah Desa dalam peningkatkan Lembaga Ekonomi Desa
- c) Kurangnya sinergitas dengan stakeholders terkait
- d) Pembangunan Desa yang masih fokus pada infrastruktur dan minim menyentuh pemberdayaan manusia
- e) Desa belum ramah disabilitas dan belum mengutamakan pengarusutamaan gender dan anak

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. **Pasangan usia subur**

- Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Situbondo cukup tinggi
- Jumlah pasangan usia subur meningkat mengalami peningkatan pada tahun 2018 dari tahun 2017 yang turun secara signifikan.
- Belum optimalnya penyeimbangan edukasi untuk pasangan usia subur

b. **Jumlah peserta KB aktif**

- Kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program keluarga berencana
- Kurangnya pemahaman dan informasi bagi penduduk mengenai fungsi dan kegunaan KB.

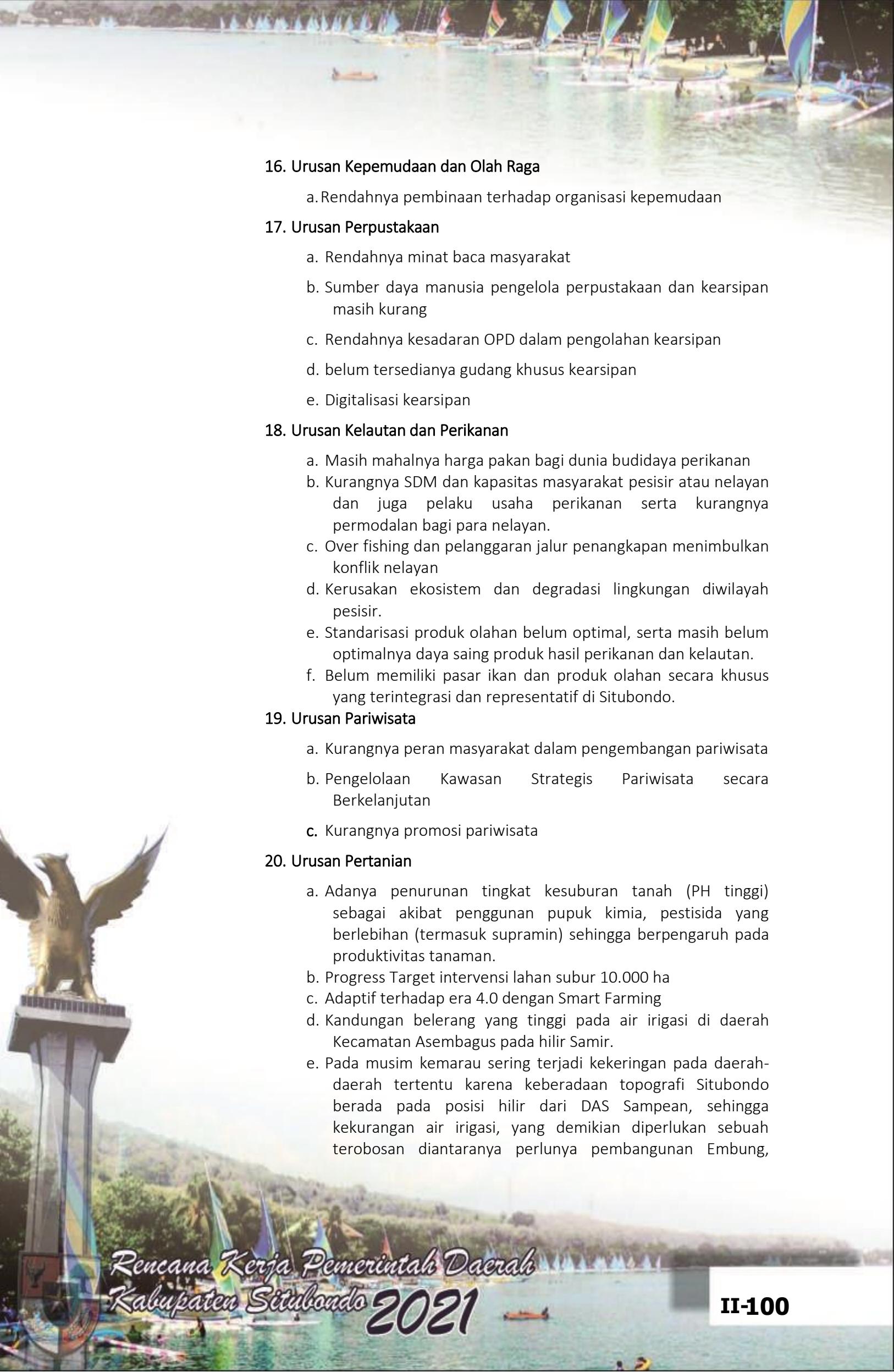
14. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Peningkatan kualitas layanan TIK hingga ke tingkat desa

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Masih minimnya jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo yang menempati peringkat 26 bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- b. Masih minimnya pengetahuan tentang perkoperasian
- c. Mengadakan revitalisasi dengan harapan agar menumbuhkan pemahaman bahwa koperasi bukan hanya sekedar Lembaga pemberi pinjaman tetapi juga dapat mensejahterakan anggotanya
- d. Mayoritas Usaha Mikro bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga Usaha Mikro sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
- e. Terbatasnya akses Usaha Mikro terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
- f. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
- g. Masih rendahnya kompetensi para pengelola koperasi dan Usaha Mikro
- h. Masih minimnya koperasi yang melaksanakan RAT, Aspek Manajemen dan Permodalan serta Aspek Usaha yang dijalankan oleh Koperasi masih rendah
- i. Masih banyak koperasi yang belum memiliki kriteria/aspek penilaian koperasi berkualitas dan menurunnya kualitas koperasi sehat yang ada di Kabupaten Situbondo
- j. Peluang tumbuhnya usaha mikro pada daerah exit tol dan kawasan destinasi wisata
- k. Stigma masyarakat tentang koperasi sebagai tempat pinjam uang dan rendahnya SDM Pengelola Koperasi Kurang adaptif terhadap era 4.0
- l. Belum berkembangnya pusat-pusat industri kecil, UMKM dan industri kreatif.
- m. Masih rendahnya insan kreatif yang memiliki jiwa kewirausahaan.

Jumlah UMKM didominasi oleh usaha mikro (dan saat ini menjadi urusan kewenangan kabupaten) dimana kemampuan yang ada sangat terbatas baik dari sisi SDM, kelembagaan, produksi, kualitas bahan baku, modal dan pemasaran).



16. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Rendahnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan

17. Urusan Perpustakaan

- a. Rendahnya minat baca masyarakat
- b. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan karsipan masih kurang
- c. Rendahnya kesadaran OPD dalam pengolahan karsipan
- d. belum tersedianya gudang khusus karsipan
- e. Digitalisasi karsipan

18. Urusan Kelautan dan Perikanan

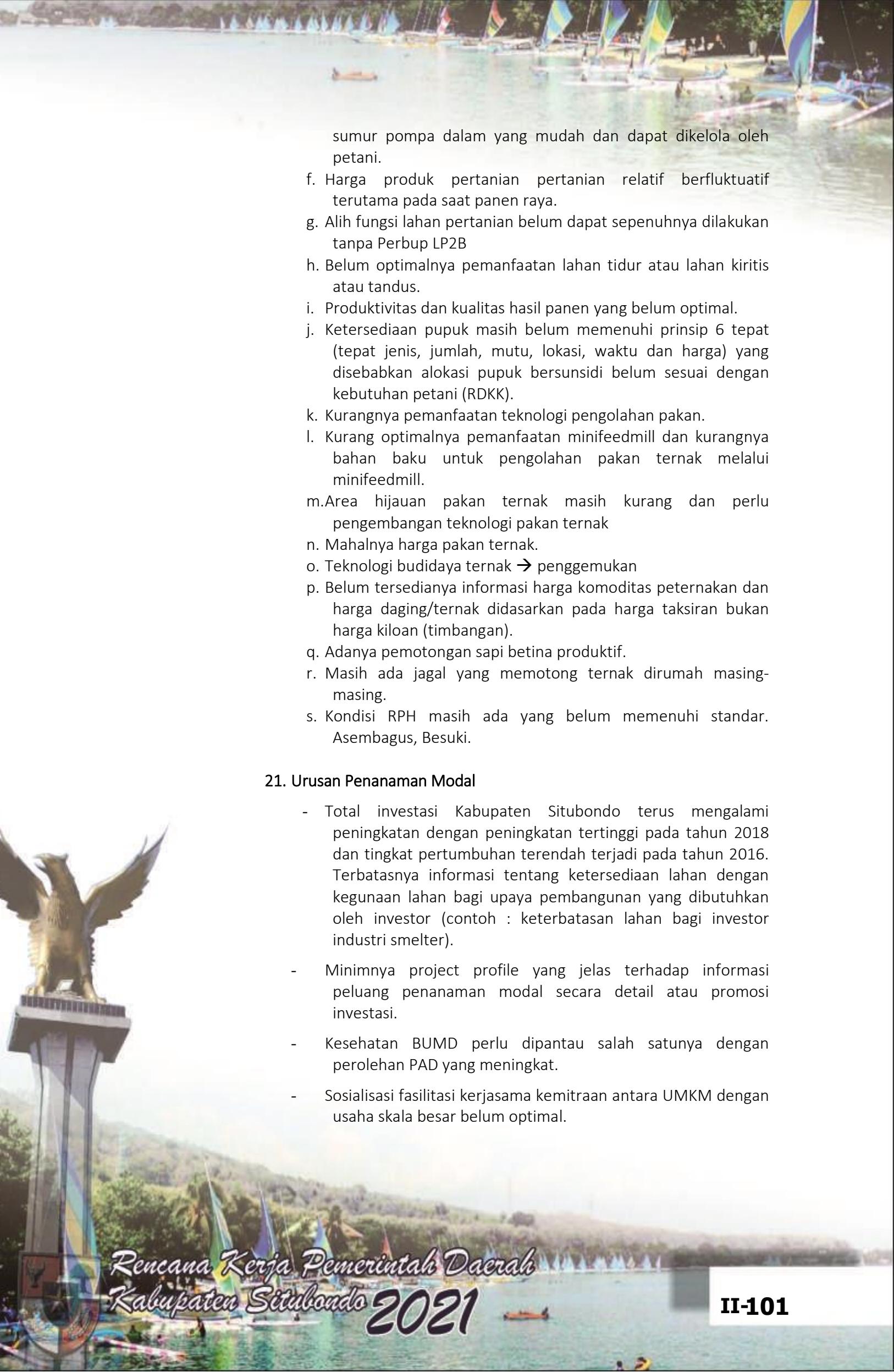
- a. Masih mahalnya harga pakan bagi dunia budidaya perikanan
- b. Kurangnya SDM dan kapasitas masyarakat pesisir atau nelayan dan juga pelaku usaha perikanan serta kurangnya permodalan bagi para nelayan.
- c. Over fishing dan pelanggaran jalur penangkapan menimbulkan konflik nelayan
- d. Kerusakan ekosistem dan degradasi lingkungan diwilayah pesisir.
- e. Standarisasi produk olahan belum optimal, serta masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan dan kelautan.
- f. Belum memiliki pasar ikan dan produk olahan secara khusus yang terintegrasi dan representatif di Situbondo.

19. Urusan Pariwisata

- a. Kurangnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata secara Berkelanjutan
- c. Kurangnya promosi pariwisata

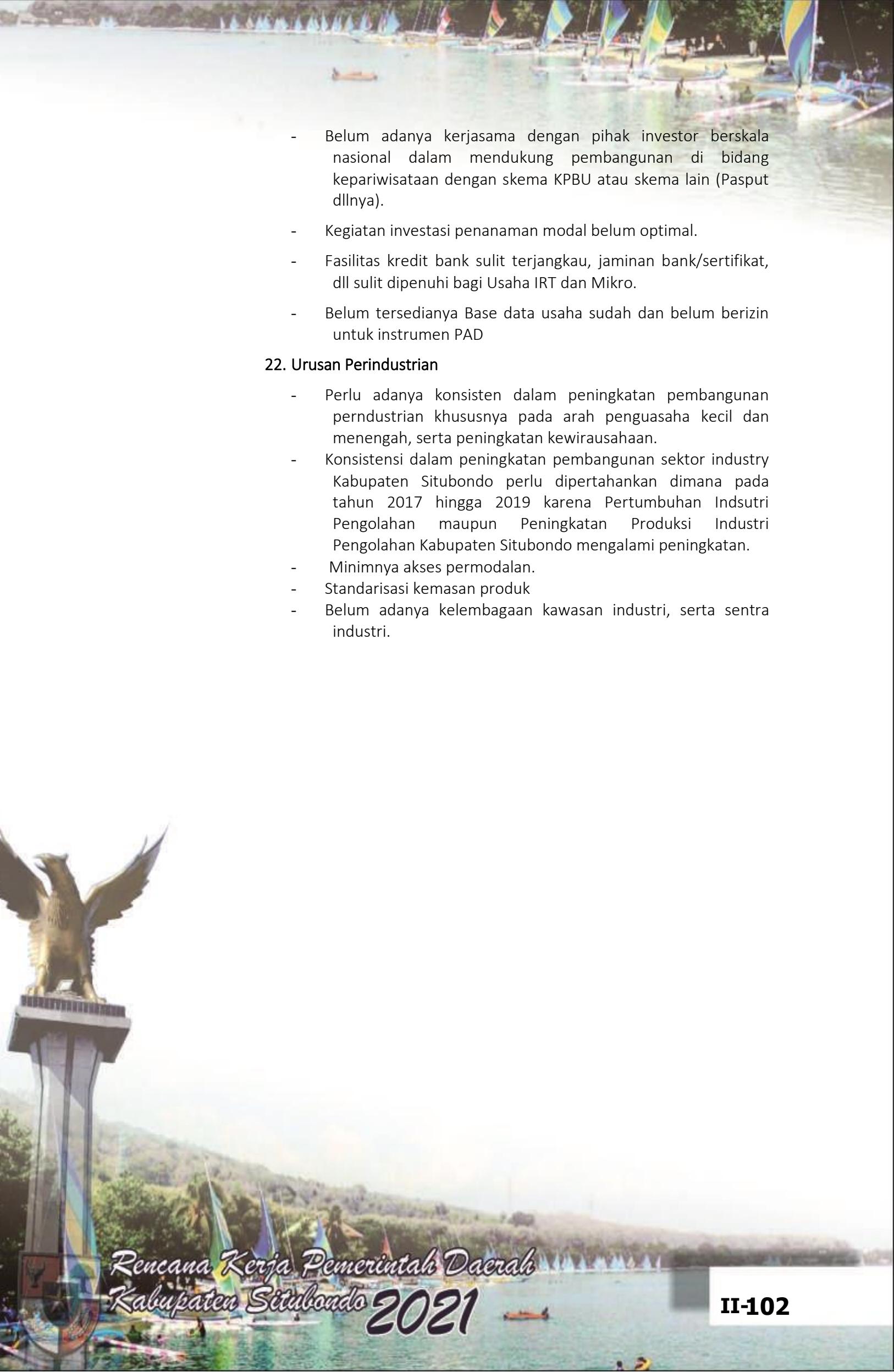
20. Urusan Pertanian

- a. Adanya penurunan tingkat kesuburan tanah (PH tinggi) sebagai akibat penggunaan pupuk kimia, pestisida yang berlebihan (termasuk supramin) sehingga berpengaruh pada produktivitas tanaman.
- b. Progress Target intervensi lahan subur 10.000 ha
- c. Adaptif terhadap era 4.0 dengan Smart Farming
- d. Kandungan belerang yang tinggi pada air irigasi di daerah Kecamatan Asembagus pada hilir Samir.
- e. Pada musim kemarau sering terjadi kekeringan pada daerah-daerah tertentu karena keberadaan topografi Situbondo berada pada posisi hilir dari DAS Sampean, sehingga kekurangan air irigasi, yang demikian diperlukan sebuah terobosan diantaranya perlunya pembangunan Embung,

- 
- sumur pompa dalam yang mudah dan dapat dikelola oleh petani.
- f. Harga produk pertanian pertanian relatif berfluktuatif terutama pada saat panen raya.
 - g. Alih fungsi lahan pertanian belum dapat sepenuhnya dilakukan tanpa Perbup LP2B
 - h. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur atau lahan kritis atau tandus.
 - i. Produktivitas dan kualitas hasil panen yang belum optimal.
 - j. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu dan harga) yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani (RDKK).
 - k. Kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan.
 - l. Kurang optimalnya pemanfaatan minifeedmill dan kurangnya bahan baku untuk pengolahan pakan ternak melalui minifeedmill.
 - m. Area hijauan pakan ternak masih kurang dan perlu pengembangan teknologi pakan ternak
 - n. Mahalnya harga pakan ternak.
 - o. Teknologi budidaya ternak → penggemukan
 - p. Belum tersedianya informasi harga komoditas peternakan dan harga daging/ternak didasarkan pada harga taksiran bukan harga kiloan (timbangan).
 - q. Adanya pemotongan sapi betina produktif.
 - r. Masih ada jagal yang memotong ternak dirumah masing-masing.
 - s. Kondisi RPH masih ada yang belum memenuhi standar. Asebagus, Besuki.

21. Urusan Penanaman Modal

- Total investasi Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2018 dan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016. Terbatasnya informasi tentang ketersediaan lahan dengan kegunaan lahan bagi upaya pembangunan yang dibutuhkan oleh investor (contoh : keterbatasan lahan bagi investor industri smelter).
- Minimnya project profile yang jelas terhadap informasi peluang penanaman modal secara detail atau promosi investasi.
- Kesehatan BUMD perlu dipantau salah satunya dengan perolehan PAD yang meningkat.
- Sosialisasi fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan usaha skala besar belum optimal.

- 
- Belum adanya kerjasama dengan pihak investor berskala nasional dalam mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan dengan skema KPBU atau skema lain (Pasput dllnya).
 - Kegiatan investasi penanaman modal belum optimal.
 - Fasilitas kredit bank sulit terjangkau, jaminan bank/sertifikat, dll sulit dipenuhi bagi Usaha IRT dan Mikro.
 - Belum tersedianya Base data usaha sudah dan belum berizin untuk instrumen PAD

22. Urusan Perindustrian

- Perlu adanya konsisten dalam peningkatan pembangunan perndustrian khususnya pada arah penguasa kecil dan menengah, serta peningkatan kewirausahaan.
- Konsistensi dalam peningkatan pembangunan sektor industry Kabupaten Situbondo perlu dipertahankan dimana pada tahun 2017 hingga 2019 karena Pertumbuhan Indsutri Pengolahan maupun Peningkatan Produksi Industri Pengolahan Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan.
- Minimnya akses permodalan.
- Standarisasi kemasan produk
- Belum adanya kelembagaan kawasan industri, serta sentra industri.

BAB III

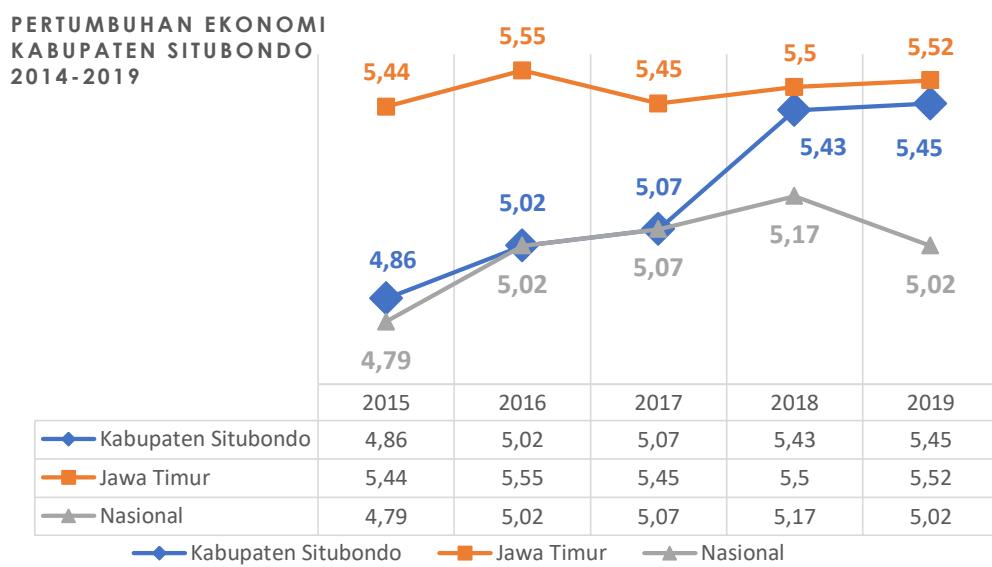
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Struktur Ekonomi Makro

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo selama periode 2015-2019 menunjukkan tren yang positif. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 menyentuh angka sebesar 5,07% pada tahun 2017 dan 5,43% pada tahun 2018. Namun angka pertumbuhan pada tahun 2019 melambat menjadi 5,45%.

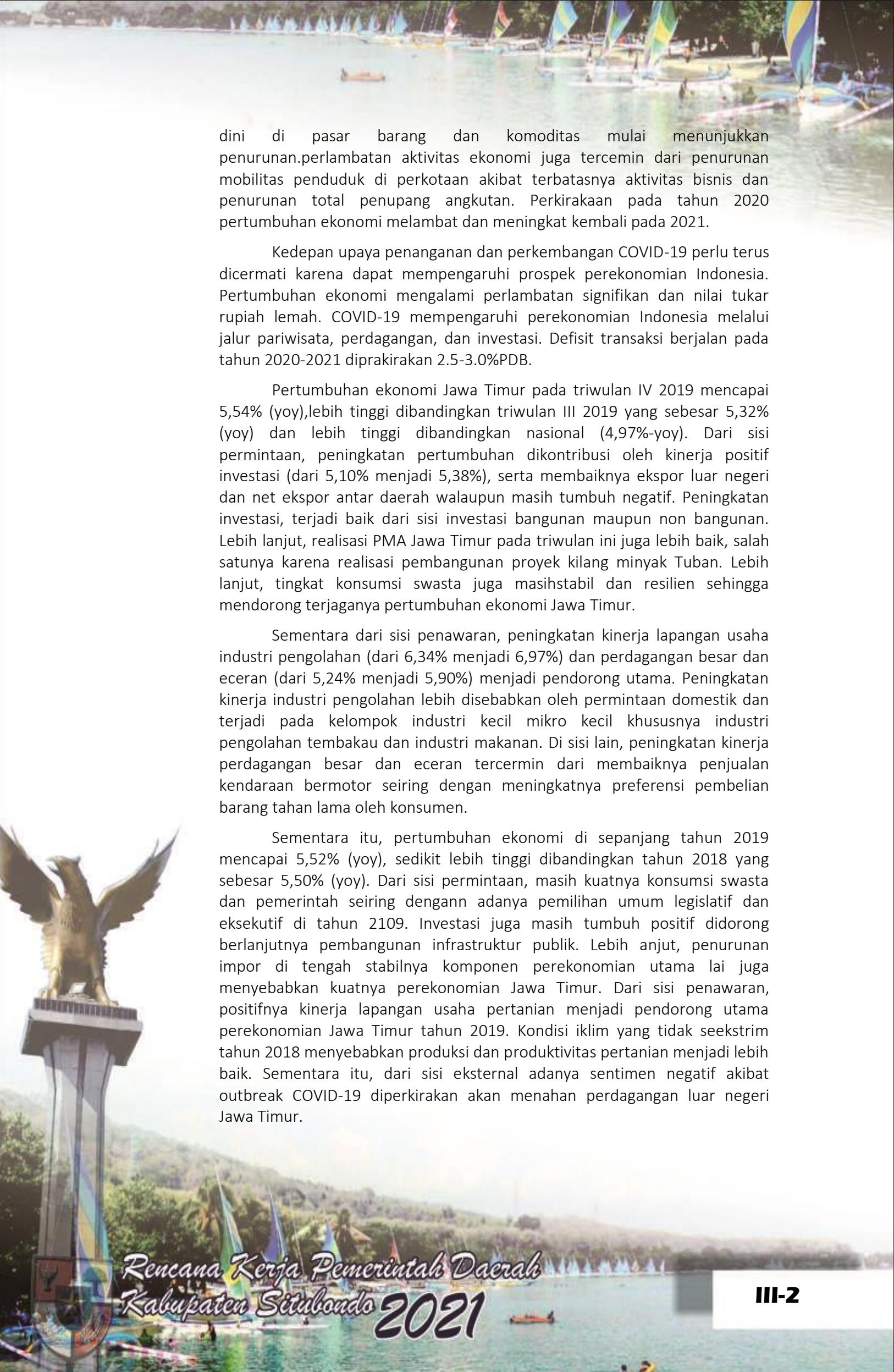


Gambar 3. 1: Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Situbondo Tahun 2015-2019

Sumber: LKPI 2014-2019 Kabupaten Situbondo, Laporan Nusantara BI 2015-2019, Laporan Regional BI 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Nasional tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi ekspor yang secara total belum kuat sejalan dengan dampak ekonomi dunia yang belum pulih. Perkembangan ini kemudian mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan investasi, khususnya investasi nonbangunan. Konsumsi lembaga Non-profit rumah tangga menurun seiring berakhirnya dampak pemilu 2019.

COVID -19 juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini memicu berkurangnya penempatan kepada aset keuangan dan komoditas yang di anggap aman. Penyebaran COVID-19 yang cepat tersebut diprakirakan berdampak langsung cukup besar kepada perekonomian dunia, sebelum membaik pada tahun 2021. Berbagai indikator



dini di pasar barang dan komoditas mulai menunjukkan penurunan. perlambatan aktivitas ekonomi juga tercemin dari penurunan mobilitas penduduk di perkotaan akibat terbatasnya aktivitas bisnis dan penurunan total penumpang angkutan. Perkirakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan meningkat kembali pada 2021.

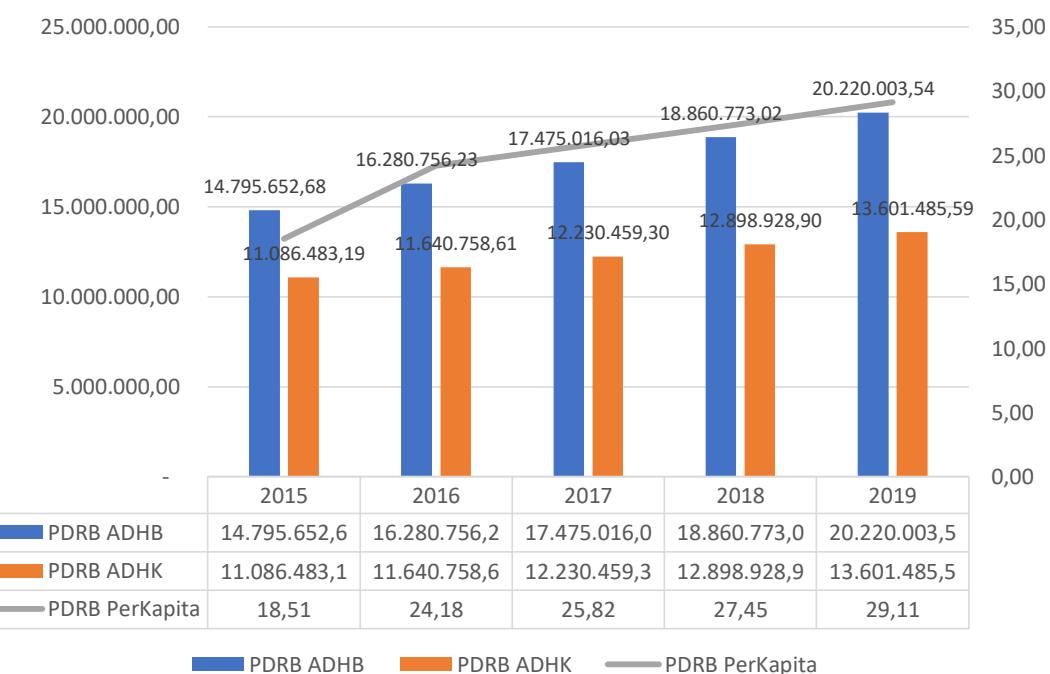
Kedepan upaya penanganan dan perkembangan COVID-19 perlu terus dicermati karena dapat mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan signifikan dan nilai tukar rupiah lemah. COVID-19 mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020-2021 diprakirakan 2.5-3.0%PDB.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2019 mencapai 5,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 yang sebesar 5,32% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional (4,97%-yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan dikontribusi oleh kinerja positif investasi (dari 5,10% menjadi 5,38%), serta membaiknya ekspor luar negeri dan net ekspor antar daerah walaupun masih tumbuh negatif. Peningkatan investasi, terjadi baik dari sisi investasi bangunan maupun non bangunan. Lebih lanjut, realisasi PMA Jawa Timur pada triwulan ini juga lebih baik, salah satunya karena realisasi pembangunan proyek kilang minyak Tuban. Lebih lanjut, tingkat konsumsi swasta juga masihstabil dan resilien sehingga mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Sementara dari sisi penawaran, peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan (dari 6,34% menjadi 6,97%) dan perdagangan besar dan eceran (dari 5,24% menjadi 5,90%) menjadi pendorong utama. Peningkatan kinerja industri pengolahan lebih disebabkan oleh permintaan domestik dan terjadi pada kelompok industri kecil mikro kecil khususnya industri pengolahan tembakau dan industri makanan. Di sisi lain, peningkatan kinerja perdagangan besar dan eceran tercermin dari membaiknya penjualan kendaraan bermotor seiring dengan meningkatnya preferensi pembelian barang tahan lama oleh konsumen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2019 mencapai 5,52% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,50% (yoy). Dari sisi permintaan, masih kuatnya konsumsi swasta dan pemerintah seiring dengan adanya pemilihan umum legislatif dan eksekutif di tahun 2019. Investasi juga masih tumbuh positif didorong berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik. Lebih anjut, penurunan impor di tengah stabilnya komponen perekonomian utama lai juga menyebabkan kuatnya perekonomian Jawa Timur. Dari sisi penawaran, positifnya kinerja lapangan usaha pertanian menjadi pendorong utama perekonomian Jawa Timur tahun 2019. Kondisi iklim yang tidak seekstrim tahun 2018 menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian menjadi lebih baik. Sementara itu, dari sisi eksternal adanya sentimen negatif akibat outbreak COVID-19 diperkirakan akan menahan perdagangan luar negeri Jawa Timur.

Sementara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp 14.795.652.680.000,-. Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Situbondo mencapai Rp 20.220.003.540.000,-. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB ADHK yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2015 sebesar Rp 11.086.483.190.000,- hingga tahun 2019 mencapai Rp 13.601.485.590.000,-. PDRB per Kapita juga menunjukkan hal yang sama. Pada tahun 2015 PDRB per kapita sebesar Rp 18,51 Juta sampai pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp 29,11 juta. Kondisi tersebut dapat dikatakan sangat baik, karena menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Situbondo.



Gambar 3. 2: Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo (Dalam Juta)

Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo 2019

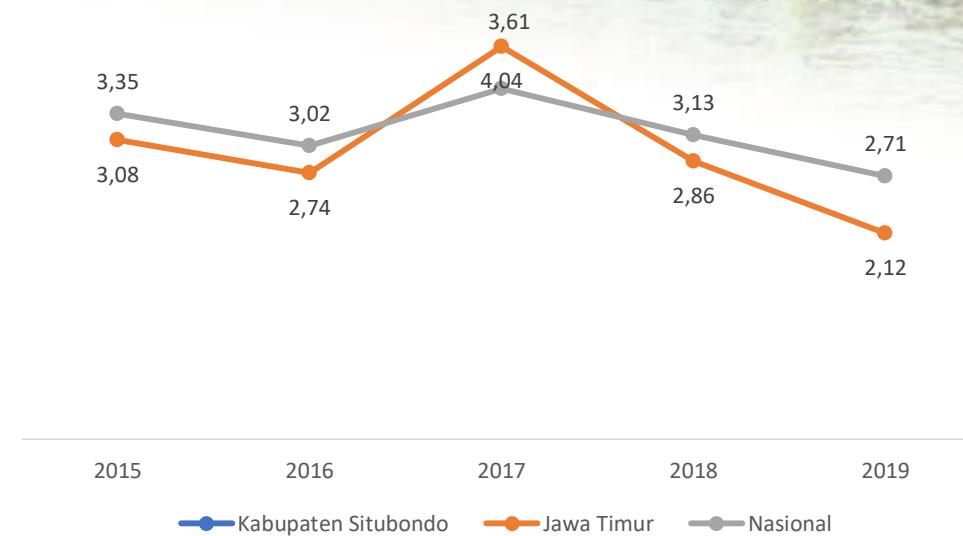
Sementara itu, Total PDRB ADHB Kabupaten Situbondo tahun 2019 sebesar Rp 20.220.003.540.000,-. PDRB ADHB Kabupaten Situbondo didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp 6.390.959.900.000. Namun, sektor yang memiliki kontribusi PDRB ADHB paling sedikit adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp 11.711.200.000. Pemerintah Kabupaten Situbondo agar meningkatkan sektor-sektor yang dapat mendukung PDRB, khususnya sektor dengan kontribusi yang masih sedikit.

Optimisme berubah karena COVID-19 diprakirakan akan menekan juga perekonomian Situbondo di tahun 2020 karena akan berdampak pada pariwisata, perdagangan dan investasi. Kedepan upaya penanggulangan COVID-19 perlu terus dicermati karena dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan dan harga komoditas.

B. Inflasi

Inflasi IHK nasional pada 2019 tercatat 2,72%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar 3,13%, didukung oleh penurunan inflasi di sebagian besar daerah. Berlanjutnya tren penurunan inflasi ini didukung oleh terjaganya inflasi inti seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar pada sasaran, di tengah tekanan eksternal terkait pergerakan harga emas global. Inflasi kelompok administered prices (AP) juga menurun di seluruh daerah sebagai dampak dari penurunan Tarif Batas Atas (TBA) angkutan udara, serta minimalnya kebijakan penyesuaian harga energi oleh pemerintah. Inflasi volatile food (VF) pada 2019 tetap terkendali meski di sejumlah daerah sempat mengalami peningkatan yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas hortikultura. Kenaikan harga hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, dipengaruhi oleh gangguan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Namun, berbagai langkah upaya kordinasi pengendalian inflasi daerah untuk meredam gejolak harga pangan dapat membawa inflasi VF tetap terkendali hingga akhir tahun.

Jawa Timur pada triwulan IV 2019 sebesar 2,12% (yoY), menurun dibandingkan triwulan III 2019 yang sebesar 2,45% (yoY). Penurunan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh kelompok Pengeluaran Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan, kelompok Bahan Makanan, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar. Perkembangan inflasi IHK Jawa Timur ke depan diprakirakan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $3,0\% \pm 1\%$. Hal ini sejalan dengan minimnya kenaikan tiket pesawat pada periode libur Natal dan Tahun Baru akibat penurunan Tarif Batas Atas (TBA) oleh Kementerian Perhubungan. Lebih lanjut, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat melalui TPID, dan forum-forum yang ada akan terus dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pengendalian harga memerlukan kerjasama dan harmonisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan yang telah diputuskan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan inflasi Jawa Timur tahun 2020 tetap terjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar $3,0\% \pm 1\%$.



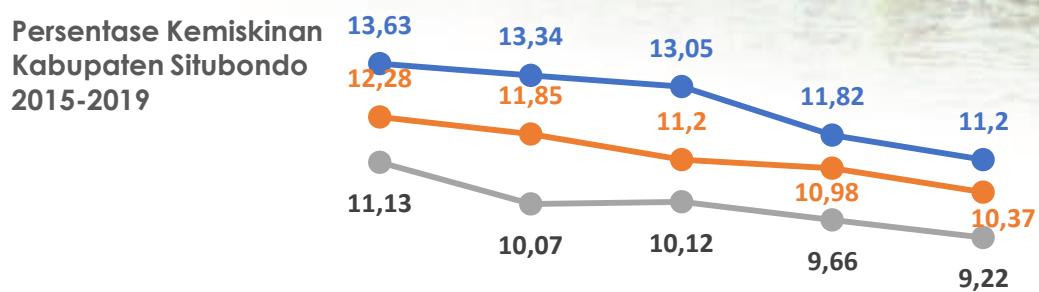
Gambar 3. 3: Inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Laporan Nusantara BI 2015-2019, Laporan Regional BI 2015-2019

Kabupaten Situbondo tidak memiliki catatan pasti tentang pergerakan situasi keuangan di daerahnya. Namun secara umum kebijakan moneter dan fiskal secara nasional berdampak kepada daerah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bila mana kita lihat pada grafik dibawah angka-angka inflasi yang tercipta atas sentimen perdagangan luar negeri, baik dari sisi ekspor-impor maupun sentimen supply and demand maka aktivitas keuangan yang terjadi di negara juga berdampak di daerah.

C. Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan secara nasional terjadi di hampir seluruh provinsi. Penurunan angka persentase penduduk miskin seluruh provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata melalui perbaikan akses konektivitas dan perluasan skema bansos. Melihat dari trend dan data nampaknya bahwa isu strategis yang menjadi upaya utama Kabupaten Situbondo adalah mengentaskan kemiskinan



*Gambar 3. 4: Kemiskinan Nasional, Jawa Timur dan Situbondo
Tahun 2014-2019*

Sumber: LKPJ 2014-2019, Laporan Nusantara BI 2015-2019, Laporan Regional BI 2015-2019

Kemiskinan di Jawa Timur menurun pada September 2019. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2019 sebesar 4.056 ribu jiwa atau 10,22% dari total penduduk Jawa Timur. Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2018 yang sebesar 4.112 ribu jiwa atau 10,85% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi ketiga dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dan lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional yang sebesar 9,22%. Meskipun lebih tinggi, namun penurunan penduduk miskin di Jawa Timur dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Jawa.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami trend yang semakin menurun yakni pada tahun 2015 mencapai angka 13,63%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 yang mencapai 11,2%. Kendati demikian, kondisi tersebut merupakan prestasi dalam kebijakan program pengentasan kemiskinan. Hal itu mencerminkan bahwa Kabupaten Situbondo telah berupaya untuk menekan angka kemiskinan demi kemakmuran rakyat. Namun, diharapkan pemerintah Kabupaten Situbondo lebih mampu lagi dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo agar jumlah penduduk miskin kabupaten juga semakin berkurang. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo mencapai 91.170 jiwa kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai 76.440 jiwa penduduk miskin.

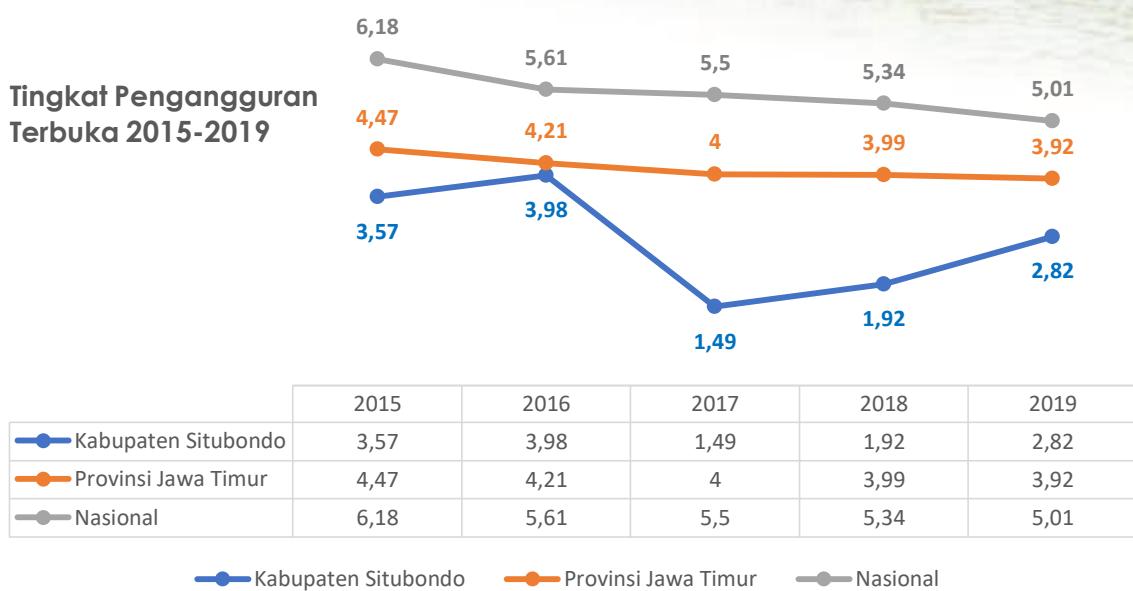


Gambar 3. 5: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tahun 2019

D. Pengangguran

Dibandingkan Februari 2019, kinerja ketenagakerjaan Jawa Timur pada Agustus 2019 sedikit menurun. Hal tersebut tercermin dari penurunan jumlah angkatan kerja (dari 21,59 juta orang pada Februari 2019 menjadi 21,50 juta orang pada Agustus 2019) yang diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 70,02% menjadi 69,45%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga sedikit meningkat dari 3,83% menjadi 3,92%. Penurunan tersebut karena telah berlalunya puncak penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (yang merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar) pada saat musim panen. Sementara itu Kabupaten Situbondo berhasil memposisikan diri lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional dengan prestasi angka TPT 2,82% di tahun 2019.



Gambar 3. 6: Tingkat Pengangguran Nasional, Jawa Timur dan Situbondo Tahun 2015-2019

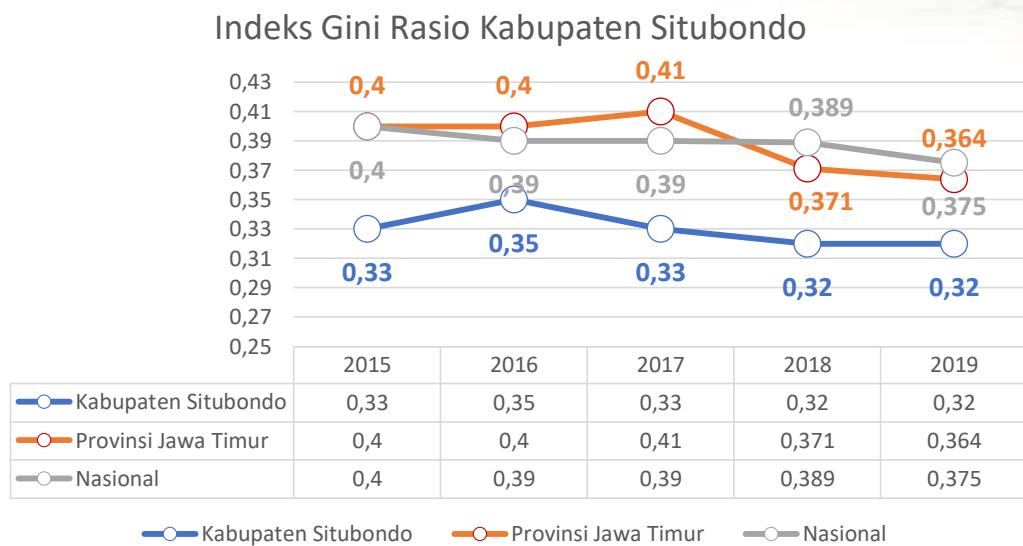
Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Data pada gambar 3.6 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami tren penurunan. Pada tahun 2016 jumlah TPT sebesar 4,15%. Angka tersebut kemudian mengalami perbaikan mulai di tahun 2015 hingga menuju tahun 2019 dengan menurunnya angka pengangguran sebesar 3,17% di tahun 2015 dan secara signifikan turun menjadi 1,49% di tahun 2017. Secara konsisten Kabupaten Situbondo menjaga angka pengangguran tetap rendah dengan kebijakan pelatihan kepada usia usia pra kerja seperti SMK dan pelatihan pembinaan wirausaha. Kondisi tersebut tentu saja sangat baik untuk perekonomian karena semakin sedikit pengangguran maka akan meningkatkan produktifitas suatu kabupaten/kota.

E. Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan sedikit penurunan menjadi 0,364 pada September 2019 dari 0,371 pada September 2018. Penurunan ketimpangan terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun demikian tingkat ketimpangan kemiskinan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Penurunan ketimpangan kemiskinan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jatim melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi

masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.



*Gambar 3. 7: Indeks Gini Nasional, Jawa Timur dan Situbondo
Tahun 2015-2019*

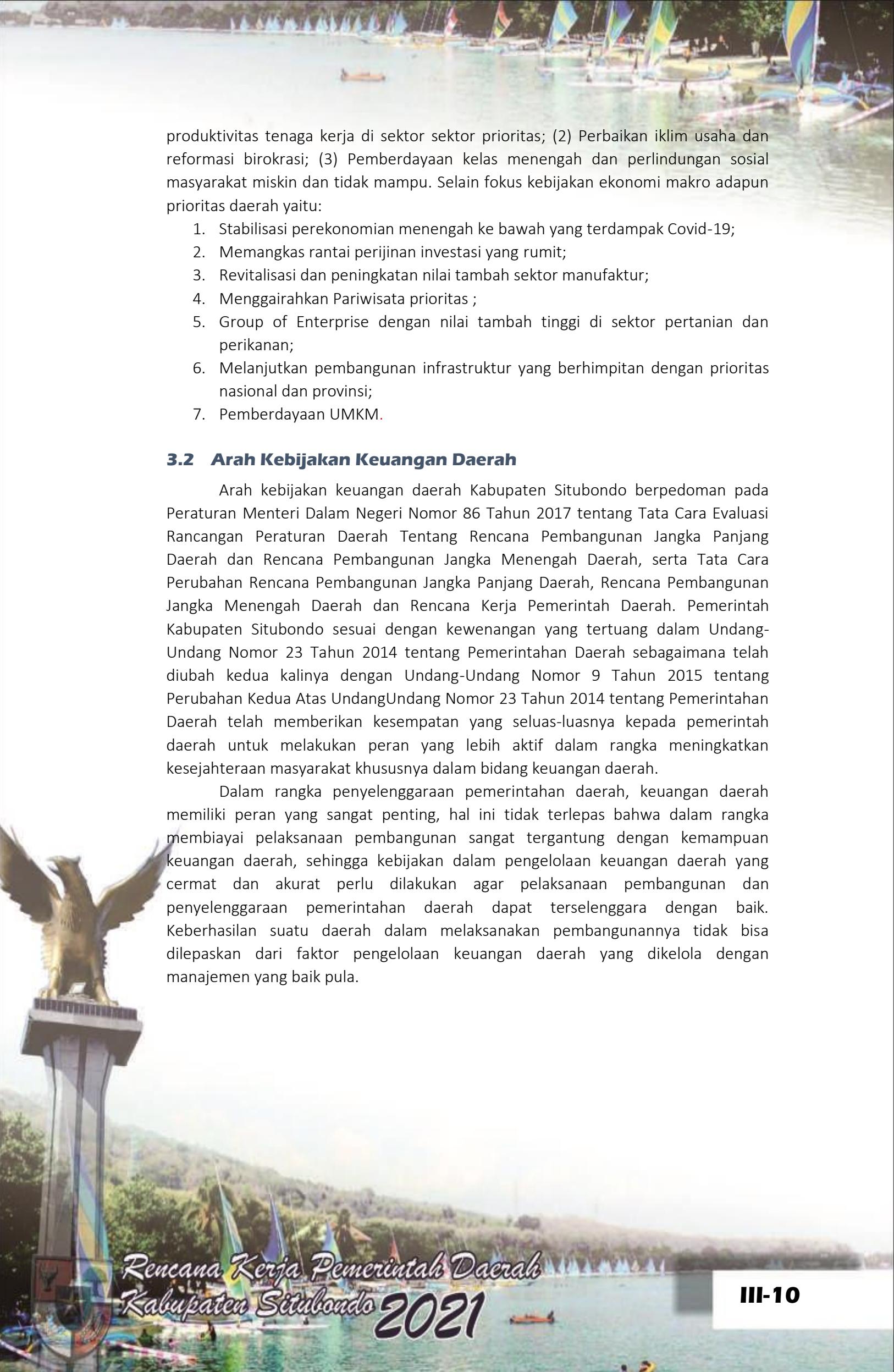
Sumber: LKPJ 2015-2019, Laporan Nusantara BI 2015-2019, Laporan Regional BI 2015-2019

Gini rasio Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi yang fluktuatif. Gini rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,274. Sedangkan Gini Rasio pada tahun 2019 diproyeksikan akan meningkat sebesar 0,31. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan dari suatu daerah semakin tinggi, sehingga perlu adanya pemerataan pendapatan yang efisien di Kabupaten Situbondo

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam rangka menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju Stabilitas Perekonomian. Strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD 2016-2021 serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam RKP Tahun 2021. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di Tahun 2021 dan 2022. Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya,

Kebijakan nasional dalam meningkatkan sektor Perekonomian di daerah Tahun 2021 dengan meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan bonus demografi. Kebijakan tersebut dengan fokus kebijakan secara nasional: (1) Memperkuat struktur dan meningkatkan



produktivitas tenaga kerja di sektor sektor prioritas; (2) Perbaikan iklim usaha dan reformasi birokrasi; (3) Pemberdayaan kelas menengah dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain fokus kebijakan ekonomi makro adapun prioritas daerah yaitu:

1. Stabilisasi perekonomian menengah ke bawah yang terdampak Covid-19;
2. Memangkas rantai perijinan investasi yang rumit;
3. Revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur;
4. Menggairahkan Pariwisata prioritas ;
5. Group of Enterprise dengan nilai tambah tinggi di sektor pertanian dan perikanan;
6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi;
7. Pemberdayaan UMKM.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Situbondo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah.



Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

3.2.1 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

A. Analisis Penghitungan Penerimaan Daerah

1. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1: Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	1,580,583,084,970.09	1,620,456,354,002.13	1,755,587,299,205.04	1,819,658,453,341.45	1,747,723,838,170.86	2.64
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173,836,184,925.09	228,523,663,374.13	187,287,219,449.41	204,727,875,621.05	197,096,431,255.86	4.75
1.1.1	Pajak Daerah	30,080,834,208.29	38,950,555,757.34	43,654,005,946.48	53,364,172,516.00	43,667,583,260.82	11.41
1.1.2	Retribusi Daerah	13,682,597,701.00	9,402,292,498.00	10,563,574,281.00	11,656,985,435.00	12,512,153,078.50	-0.31
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4,316,450,161.00	4,047,068,403.64	4,177,807,076.24	4,054,829,225.43	4,033,881,020.65	-1.62
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	125,756,302,854.80	176,123,746,715.15	128,891,832,145.69	135,651,888,444.62	136,882,813,895.89	4.85
1.2	Dana Perimbangan	1,171,851,135,392.00	1,091,000,194,656.00	1,227,769,851,587.00	1,224,410,192,664.00	1,227,190,697,500.00	1.40
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	74,028,875,610.00	70,312,040,008.00	118,074,249,542.00	99,778,212,434.00	79,784,359,500.00	6.84
1.2.2	Dana Alokasi Umum	821,084,393,000.00	806,660,581,000.00	806,660,581,000.00	831,861,637,000.00	840,715,067,000.00	0.61
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	276,737,866,782.00	214,027,573,648.00	303,035,021,045.00	292,770,343,230.00	306,691,271,000.00	5.07
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	234,895,764,653.00	300,932,495,972.00	340,530,228,168.63	390,520,385,056.40	323,436,709,415.00	9.69
1.3.1	Hibah	6,709,843,000.00	-	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	52,319,240,000.00	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78,067,243,653.00	101,312,838,972.00	96,768,038,006.00	115,700,411,131.00	87,915,343,415.00	5.21
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87,460,278,000.00	111,434,587,000.00	141,880,381,000.00	145,324,384,600.00	183,202,126,000.00	20.81
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	62,658,400,000.00	88,185,070,000.00	49,536,870,000.00	70,773,939,000.00	-	-15.05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019



Berdasarkan tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo mengalami fluktuatif pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2019, serta APBD tahun anggaran 2020, dapat dilihat bahwa secara umum pendapatan daerah Kabupaten Situbondo memiliki trend fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,64% setiap tahunnya. Pertumbuhan pendapatan terbesar dari pajak daerah dengan rata- rata pertumbuhan 11,41% mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya adalah pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah dengan pertumbuhan sebesar 4,85%. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

Pendapatan daerah juga berdasarkan dana perimbangan, dimana dana perimbangan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 1,40%. Dana perimbangan terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak/ dana bagi hasil bukan pajak, dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 6,84%. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum dengan rata- rata pertumbuhan 0,61% dan dana alokasi khusus dengan rata- rata pertumbuhan 5,07%.

Pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, juga berasal dari lain- lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri dari hibah, dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Jenis dana lain- lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata- rata pertumbuhan 9,69%. Lain- lain pendapatan daerah yang sah rata- rata pertumbuhan terbesar adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan rata- rata pertumbuhan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 20,81%.

Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah memiliki kontribusi yang besar. Pertumbuhan rata-rata anggaran terbesar ditunjang oleh Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya mencapai pertumbuhan rata-rata 9,69%. Lain- lain pendapatan yang sah terbesar dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 20,81%.

2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2021

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana

sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya. Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan analisis sumber pendapatan daerah dan analisis kinerja realisasi pendapatan daerah.

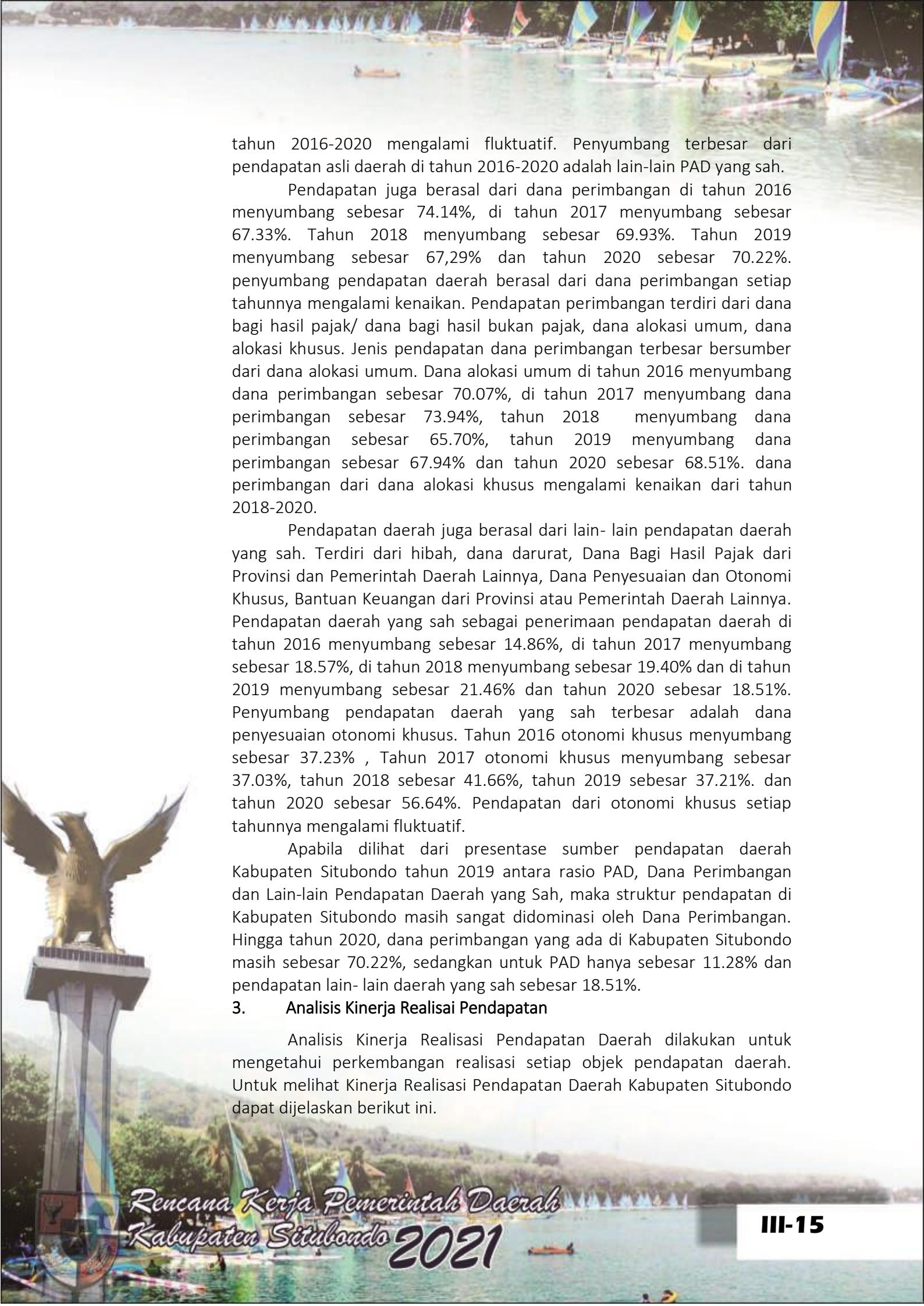
Analisis Sumber Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya. Untuk melihat Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 3. 2: Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11.00%	14.10%	10.67%	11.25%	11.28%
1.1.1	Pajak Daerah	17.30%	17.04%	23.31%	26.07%	22.16%
1.1.2	Retribusi Daerah	7.87%	4.11%	5.64%	5.69%	6.35%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.48%	1.77%	2.23%	1.98%	2.05%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	72.34%	77.07%	68.82%	66.26%	69.45%
1.2	Dana Perimbangan	74.14%	67.33%	69.93%	67.29%	70.22%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	6.32%	6.44%	9.62%	8.15%	6.50%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	70.07%	73.94%	65.70%	67.94%	68.51%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	23.62%	19.62%	24.68%	23.91%	24.99%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.86%	18.57%	19.40%	21.46%	18.51%
1.3.1	Hibah	2.86%	0.00%	15.37%	15.04%	16.18%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.23%	33.67%	28.42%	29.63%	27.18%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.23%	37.03%	41.66%	37.21%	56.64%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.67%	29.30%	14.55%	18.12%	0.00%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019

Pada tabel 3.2. persentase sumber pendapatan daerah Kabupaten Situbondo, menggambarkan pendapatan asli daerah di tahun 2016 menyumbang sebesar 11.00%, di tahun 2017 menyumbang sebesar 14.10%, di tahun 2018 menyumbang sebesar 10.67%, di tahun 2019 menyumbang sebesar 11,25% dan Tahun 2020 sebesar 11,28%. Pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah dari



tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah di tahun 2016-2020 adalah lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan juga berasal dari dana perimbangan di tahun 2016 menyumbang sebesar 74.14%, di tahun 2017 menyumbang sebesar 67.33%. Tahun 2018 menyumbang sebesar 69.93%. Tahun 2019 menyumbang sebesar 67.29% dan tahun 2020 sebesar 70.22%. penyumbang pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pendapatan perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/ dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jenis pendapatan dana perimbangan terbesar bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum di tahun 2016 menyumbang dana perimbangan sebesar 70.07%, di tahun 2017 menyumbang dana perimbangan sebesar 73.94%, tahun 2018 menyumbang dana perimbangan sebesar 65.70%, tahun 2019 menyumbang dana perimbangan sebesar 67.94% dan tahun 2020 sebesar 68.51%. dana perimbangan dari dana alokasi khusus mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020.

Pendapatan daerah juga berasal dari lain- lain pendapatan daerah yang sah. Terdiri dari hibah, dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan daerah yang sah sebagai penerimaan pendapatan daerah di tahun 2016 menyumbang sebesar 14.86%, di tahun 2017 menyumbang sebesar 18.57%, di tahun 2018 menyumbang sebesar 19.40% dan di tahun 2019 menyumbang sebesar 21.46% dan tahun 2020 sebesar 18.51%. Penyumbang pendapatan daerah yang sah terbesar adalah dana penyesuaian otonomi khusus. Tahun 2016 otonomi khusus menyumbang sebesar 37.23% , Tahun 2017 otonomi khusus menyumbang sebesar 37.03%, tahun 2018 sebesar 41.66%, tahun 2019 sebesar 37.21%. dan tahun 2020 sebesar 56.64%. Pendapatan dari otonomi khusus setiap tahunnya mengalami fluktuatif.

Apabila dilihat dari presentase sumber pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2019 antara rasio PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka struktur pendapatan di Kabupaten Situbondo masih sangat didominasi oleh Dana Perimbangan. Hingga tahun 2020, dana perimbangan yang ada di Kabupaten Situbondo masih sebesar 70.22%, sedangkan untuk PAD hanya sebesar 11.28% dan pendapatan lain- lain daerah yang sah sebesar 18.51%.

3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan

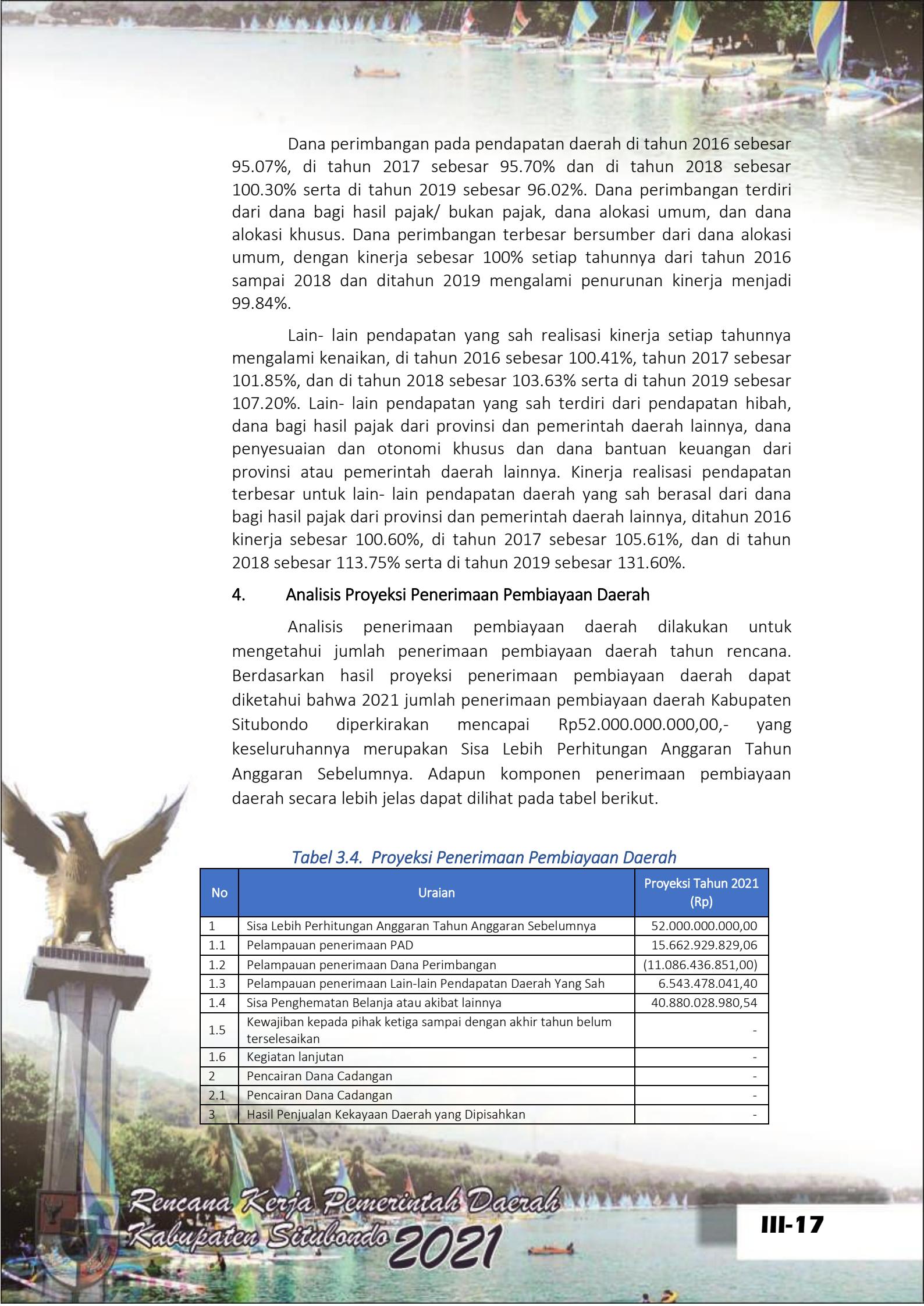
Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah. Untuk melihat Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 3. 3: *Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo*

No	Uraian	Kinerja			
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	PENDAPATAN	97.18%	98.35%	101.43%	99.51%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	108.71%	107.73%	105.05%	108.28%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	112.55%	116.80%	113.93%	122.73%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	101.86%	102.62%	85.24%	94.24%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	100.00%	82.14%	98.04%	100.52%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	108.95%	106.94%	104.53%	105.01%
1.2	Dana Perimbangan	95.07%	95.70%	100.30%	96.02%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	94.93%	81.49%	102.78%	73.96%
1.2.2	Dana alokasi umum	100.00%	100.00%	100.00%	99.84%
1.2.3	Dana alokasi khusus	82.98%	86.62%	93.43%	95.35%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.41%	101.85%	103.63%	107.20%
1.3.1	Pendapatan Hibah	107.80%	0.00%	100.58%	97.93%
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	100.60%	105.61%	113.75%	131.60%
1.3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	100.00%	100.00%	100.00%	99.78%
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	100.00%	100.09%	100.00%	100.00%

Apabila dilihat dari tabel 3.3. kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 dapat diperoleh kinerja realisasi pendapatan sebesar 99.51% dengan kinerja pendapatan asli daerah sebesar 108.28%, kinerja perimbangan 96.02% dan kinerja lain- lain pendapatan yang sah sebesar 107.20%.

Kinerja pendapatan terdiri dari kinerja pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah kinerja tahun 2016 menunjukkan angka 108.71%, tahun 2017 sebesar 107.73% dan di tahun 2018 sebesar 105.05%, serta di tahun 2019 sebesar 108.28%. Kinerja pendapatan setiap tahunnya mengalami fluktuatif dengan kinerja terbesar di tahun 2016. Kinerja terbesar pendapatan asli daerah pajak daerah terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah, di tahun 2016 sebesar 112.55%, di tahun 2017 sebesar 116.80%, dan di tahun 2018 sebesar 113.93% serta di tahun 2019 sebesar 122.73%.



Dana perimbangan pada pendapatan daerah di tahun 2016 sebesar 95.07%, di tahun 2017 sebesar 95.70% dan di tahun 2018 sebesar 100.30% serta di tahun 2019 sebesar 96.02%. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan terbesar bersumber dari dana alokasi umum, dengan kinerja sebesar 100% setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2018 dan ditahun 2019 mengalami penurunan kinerja menjadi 99.84%.

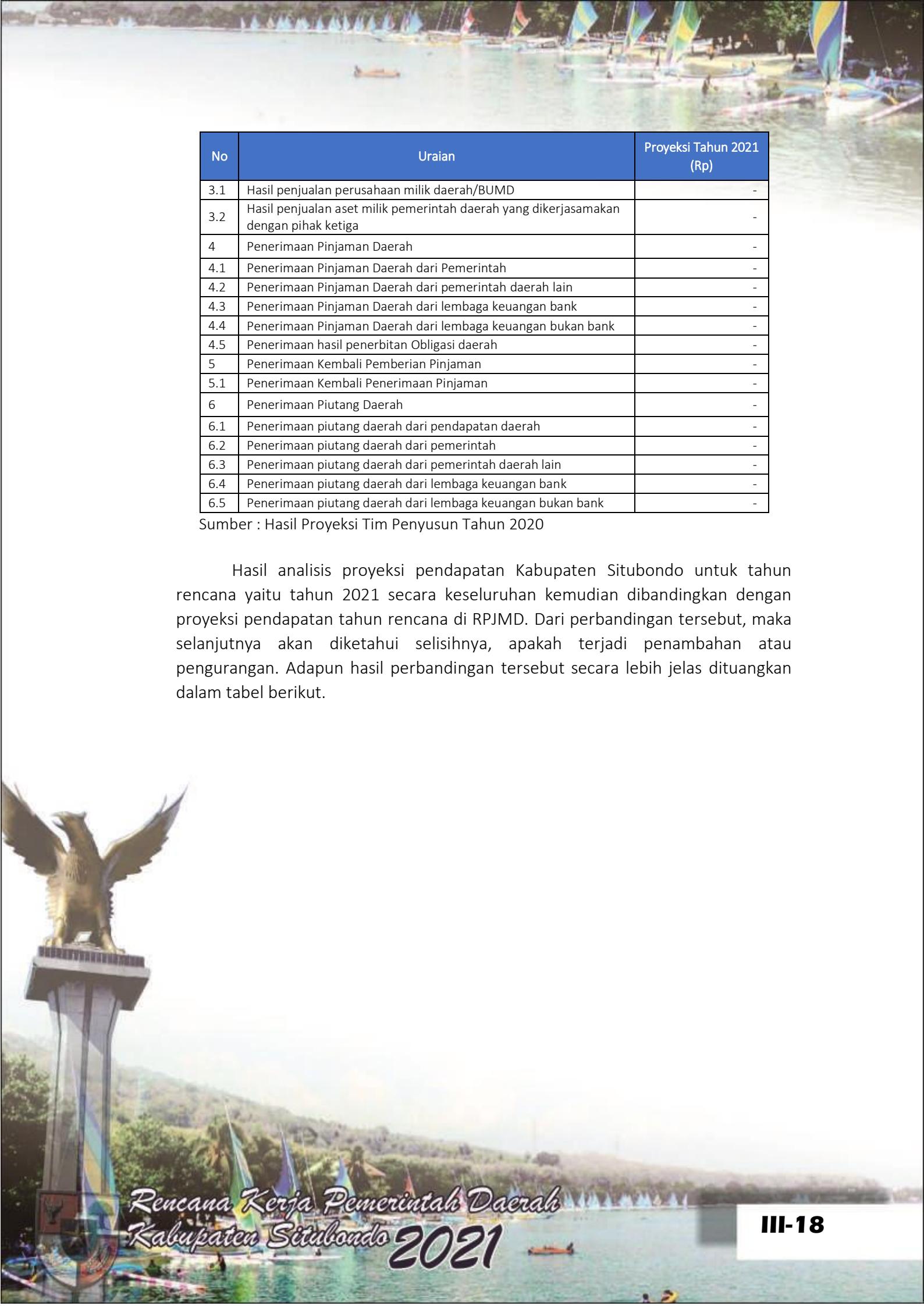
Lain- lain pendapatan yang sah realisasi kinerja setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tahun 2016 sebesar 100.41%, tahun 2017 sebesar 101.85%, dan di tahun 2018 sebesar 103.63% serta di tahun 2019 sebesar 107.20%. Lain- lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kinerja realisasi pendapatan terbesar untuk lain- lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, ditahun 2016 kinerja sebesar 100.60%, di tahun 2017 sebesar 105.61%, dan di tahun 2018 sebesar 113.75% serta di tahun 2019 sebesar 131.60%.

4. Analisis Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Analisis penerimaan pembiayaan daerah dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Berdasarkan hasil proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dapat diketahui bahwa 2021 jumlah penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo diperkirakan mencapai Rp52.000.000.000,00 yang keseluruhannya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun komponen penerimaan pembiayaan daerah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.000.000.000,00
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	15.662.929.829,06
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(11.086.436.851,00)
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.543.478.041,40
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	40.880.028.980,54
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-
1.6	Kegiatan lanjutan	-
2	Pencairan Dana Cadangan	-
2.1	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-



No	Uraian	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	-
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	-
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	-
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	-
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	-
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	-
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	-
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	-
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	-
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	-

Sumber : Hasil Proyeksi Tim Penyusun Tahun 2020

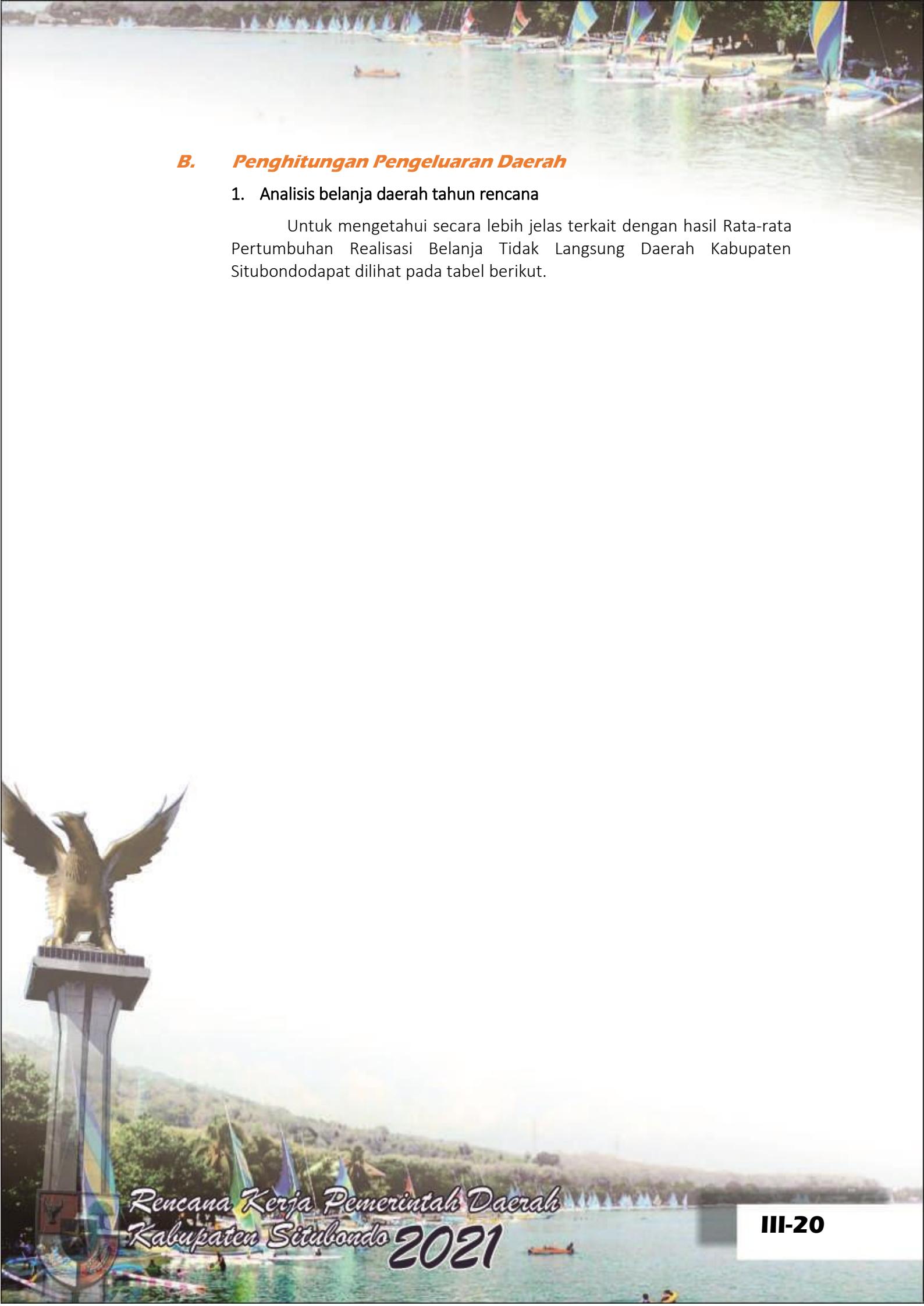
Hasil analisis proyeksi pendapatan Kabupaten Situbondo untuk tahun rencana yaitu tahun 2021 secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut, maka selanjutnya akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan atau pengurangan. Adapun hasil perbandingan tersebut secara lebih jelas dituangkan dalam tabel berikut.



Tabel 3. 5: Proyeksi / Target Penerimaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	Ket
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	PENDAPATAN	2.065.681.406.004,37	1,780,110,598,924,09	285.570.807.080,28	
1,1	Pendapatan Asli Daerah	192.118.576.086,23	208,369,099,041.29	(16.250.522.955,06)	
1.1.1	Pajak Daerah	38.355.648.972,90	43,908,447,057.75	(5.552.798.084,85)	
1.1.2	Retribusi Daerah	14.724.835.917,92	11,005,593,489.00	3.719.242.428,92	
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4.328.412.578,90	4,033,881,020.65	294.531.558,25	
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	134.709.678.616,51	149,421,177,473.89	(14.711.498.857,38)	
1,2	Dana Perimbangan	1.421.649.617.763,73	1,211,103,668,050,00	210.545.949.713,73	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	94.095.184.000,00	70,838,067,000,00	23.257.117.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	889.872.661.558,78	840,715,067,000,00	49.157.594.558,78	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	437.681.772.204,95	299,750,534,050,00	137.931.238.154,95	
1,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	451.913.212.154,41	360,637,831,832,80	91.275.380.321,61	
1.3.1	Hibah	52.042.446.988,00	52,319,240,000,00	(276.793.012,00)	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	98.476.286.514,52	74,507,866,262,80	23.968.420.251,72	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	152.789.656.477,89	177,468,590,000,00	(24.678.933.522,11)	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	148.604.822.174,00	56,342,135,570,00	92.262.686.604,00	
1.3.6	Total Pendapatan (a)	2.065.681.406.004,37	1,780,110,598,924,09	285.570.807.080,28	
2	Penerimaan Pembiayaan				
2.1	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
2.2	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
2.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
2.4	Pengembalian Utang	-	-	-	
2.5	Penerimaan Piutang	-	-	-	
	Jumlah (b)	-	-	-	
3	Proyeksi Silpa Riil				
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	50.000.000.000,00	52,000,000,000,00	(2.000.000.000,00)	
3.2	Dikurangi:				
3.3	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum tersesuaikan	-	-	-	
3.4	Kegiatan lanjutan	-	-	-	
	Jumlah (c)	50.000.000.000,00	52,000.000.000,00	-	
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)		2.115.681.406.004,37	1,832,110,598,924,09	283.570.807.080,28	

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun



B. Penghitungan Pengeluaran Daerah

1. Analisis belanja daerah tahun rencana

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Situbondo

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	BELANJA	1,661,059,125,306.87	1,611,319,203,889.22	1,730,464,593,001.47	1,821,889,974,701.86	1,841,944,419,453.34	2.70
2.1	Belanja Tidak Langsung	892,406,965,058.00	865,645,559,005.39	909,488,517,051.00	982,433,120,184.00	1,033,586,050,658.83	3.82
2.1.1	Belanja Pegawai	682,415,250,181.00	616,790,808,882.39	654,954,522,458.00	679,595,767,284.00	715,590,320,651.79	1.41
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	21,802,863,000.00	31,224,614,000.00	32,388,074,000.00	46,682,152,000.00	74,857,624,500.00	37.86
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	609,200,000.00	7,280,000,000.00	7,577,950,000.00	12,995,000,000.00	4,102,935,893.11	275.54
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2,298,245,000.00	2,506,981,000.00	2,928,470,000.00	5,448,896,000.00	5,425,994,613.93	27.89
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	184,011,655,893.00	207,518,974,893.00	210,068,095,493.00	237,700,414,900.00	231,609,175,000.00	6.15
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,269,750,984.00	324,180,230.00	1,571,405,100.00	10,890,000.00	2,000,000,000.00	
2.2	Belanja Langsung	768,652,160,248.87	745,673,644,883.83	820,976,075,950.47	839,456,854,517.86	808,358,368,794.51	1.41
2.2.1	Belanja Pegawai	64,674,913,944.00	79,553,679,248.00	77,497,270,131.00	88,839,381,656.00	102,400,067,172.00	12.58
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287,113,702,025.51	320,737,549,617.85	345,034,430,372.50	395,915,357,228.64	423,388,106,255.12	10.24
2.2.3	Belanja Modal	416,863,544,279.36	345,382,416,017.98	398,444,375,446.97	354,702,115,633.22	282,570,195,367.39	-8.27

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel 3.5 rata- rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah kabupaten Situbondo rata- rata pertumbuhan sebesar 2.70%. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah mengalami fluktuatif. Belanja tidak langsung dengan pertumbuhan terbesar adalah belanja hibah sebesar 37.86%. Belanja dengan pertumbuhan terendah adalah belanja pegawai sebesar 1.41%. belanja bunga dan belanja subsidi rata- rata pertumbuhan sebesar 0% karena tidak ada realisasinya setiap tahunnya.

Tabel 3.5 rata- rata pertumbuhan juga dijelaskan terkait belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rata- rata pertumbuhan sebesar 1.41%. Tren pertumbuhan belanja langsung mengalami fluktuatif. Rata- rata pertumbuhan belanja langsung terbesar berasal dari belanja pegawai, sebesar 12.58%, pertumbuhan terbesar kedua adalah belanja barang dan jasa sebesar 10.24%, rata- rata pertumbuhan terkecil adalah belanja modal sebesar -8.27%.

2. Analisis Proporsi Belanja

Belanja merupakan pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Belanja daerah meliputi belanja langsung dan tidak langsung, berikut proporsi belanja daerah,

Tabel 3. 7:Proporsi Belanja Daerah

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	BELANJA					
2.1	Belanja Tidak Langsung	53.73%	53.72%	52.56%	53.92%	56.11%
2.1.1	Belanja Pegawai	76.47%	71.25%	72.01%	69.17%	69.23%
2.1.2	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	2.44%	3.61%	3.56%	4.75%	7.24%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0.07%	0.84%	0.83%	1.32%	0.40%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0.26%	0.29%	0.32%	0.55%	0.52%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20.62%	23.97%	23.10%	24.20%	22.41%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.14%	0.04%	0.17%	0.00%	0.19%
2.2	Belanja Langsung	46.27%	46.28%	47.44%	46.08%	43.89%
2.2.1	Belanja Pegawai	8.41%	10.67%	9.44%	10.58%	12.67%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.35%	43.01%	42.03%	47.16%	52.38%
2.2.3	Belanja Modal	54.23%	46.32%	48.53%	42.25%	34.96%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaram Tahun 2016-2019, data diolah



Berdasarkan tabel 3.6 Proporsi belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung di tahun 2016 sebesar 53.73%, di tahun 2017 sebesar 53.72%, tahun 2018 sebesar 52.56%, tahun 2019 sebesar 53.92% dan tahun 2020 sebesar 56.11%. Rata-rata belanja tidak langsung menyumbang belanja daerah setengahnya dari total belanja. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja terbesar adalah belanja pegawai. Tahun 2016 proporsi belanja pegawai sebesar 76.47%, tahun 2017 sebesar 71.25%, tahun 2018 sebesar 72.01%, tahun 2019 sebesar 69.17% dan tahun 2020 sebesar 69.23%. Belanja yang tidak terealisasi adalah belanja subsidi dan belanja bunga.

Tabel 3.6 Proporsi belanja daerah juga menggambarkan proporsi belanja langsung. Belanja langsung memiliki proporsi di tahun 2016 sebesar 46.27%, tahun 2017 sebesar 46.28%, tahun 2018 sebesar 47.44%, tahun 2019 sebesar 46.08% dan tahun 2020 sebesar 43.89%. Belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Proporsi terbesar adalah belanja modal, setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Proporsi belanja modal tahun 2016 sebesar 54.23%, tahun 2017 sebesar 46.32%, tahun 2018 sebesar 48.53%, tahun 2019 sebesar 42.25% dan tahun 2020 sebesar 34.96%. Tabel 3.7 Proporsi belanja daerah menggambarkan antara belanja langsung dan tidak langsung, yang memiliki proporsi terbesar adalah belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung memiliki proporsi terbesar adalah belanja pegawai.

3. Analisis Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Berikut kebutuhan belanja dan pengeluaran pemberian Kabupaten Situbondo,

Tabel 3. 8: Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pemberian Daerah

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
A	Belanja Tidak Langsung	1,033,256,222,564.87	997,020,587,603,44	36.235.634.961,43
1	Belanja Pegawai	746,483,801,867.53	726.596.575.686,79	19.887.226.180,74
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	43,452,842,884.00	21.665.624.500,00	21.787.218.384,00
5	Belanja Bantuan Sosial	11,223,657,500.00	10.149.000.000,00	1.074.657.500,00
6	Belanja Bagi Hasil ke Pemdes	3,017,947,386.19	4.611.373.016,65	(1.593.425.630,46)
7	Belanja Bantuan Keuangan	227,077,972,927.15	228.998.014.400,00	(1.920.041.472,85)
8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
B	Pengeluaran Pemberian	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	TOTAL PENGELOUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	1,033,256,222,564.87	997,020,587,603,44	36.235.634.961,43

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Situbondo Tahun 2016-2021 dan Proyeksi

Tim Penyusun

Berdasarkan tabel 3.9 kebutuhan belanja dan pengeluaran pemberian daerah, diketahui proyeksi RPJMD tahun 2021 sebesar Rp 1,033,256,222,564.87., proyeksi RKPD tahun 2021 sebesar Rp 997,020,587,603.44, dan memiliki selisih Rp 36,235,634,961.43. Analisis proyeksi untuk RKPD tahun 2021 untuk belanja pegawai sebesar Rp 726,596,575,686.79, belanja hibah sebesar Rp 21,665,624,500.00, belanja bantuan sosial sebesar Rp 10,149,000,000.00, belanja bagi hasil sebesar Rp 4,611,373,016.65, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 228,998,014,400.00.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan



peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki tugas berat untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan mempergunakan segala potensi yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Situbondo menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut, maka peranan OPD terkait dalam pemungutan penerimaan daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Situbondo yang taat pada kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah Pusat melalui dana Perimbangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo bertekad menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyumbang dana yang utama untuk pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan daerah, yang didukung pendapatan dari sektor lain. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo selalu meningkatkan penerimaan PAD-nya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, dan mencari sumber-sumber Penerimaan Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

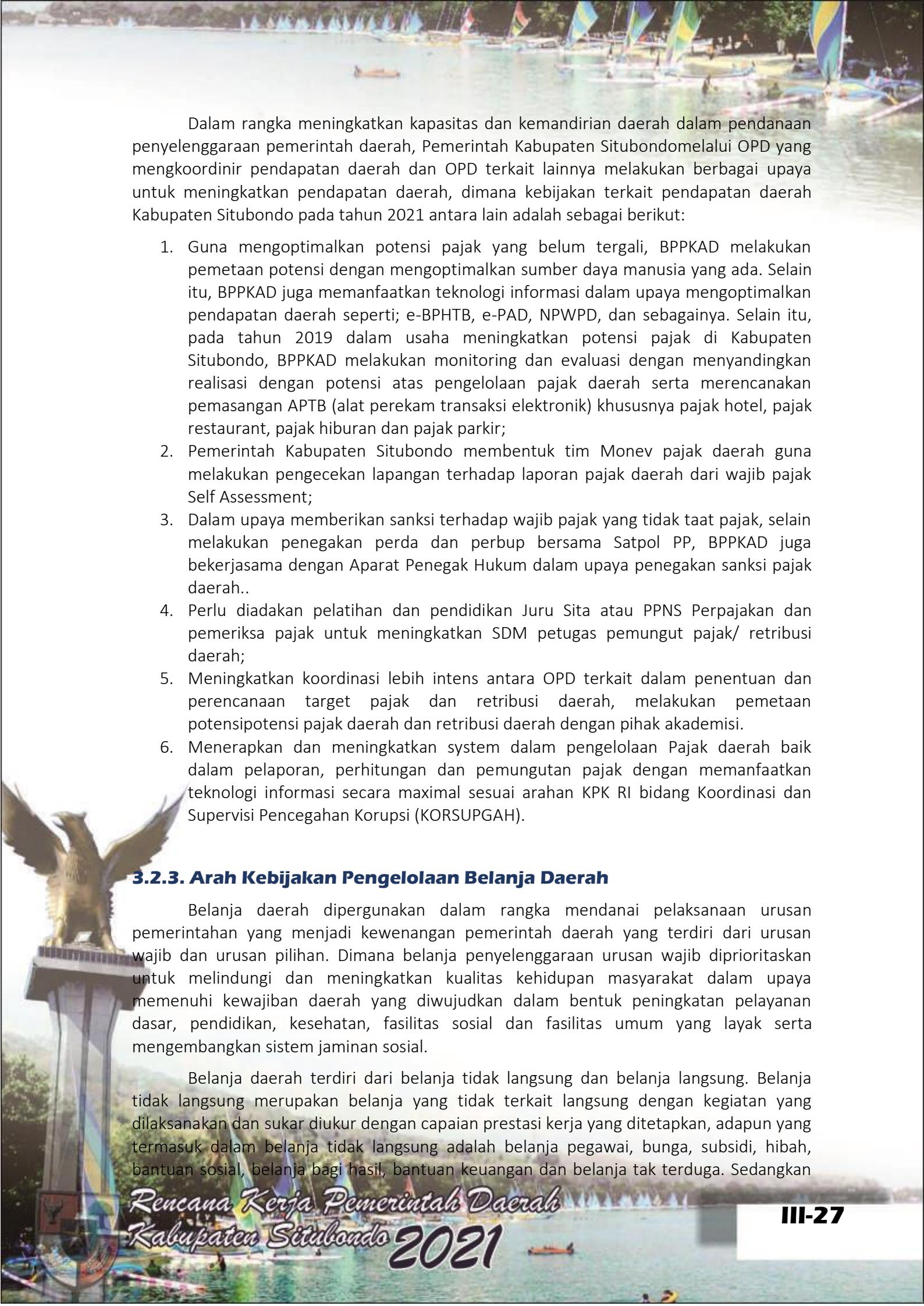
Untuk mengetahui komposisi realisasi maupun proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo secara lebih lengkap, berikut disajikan data terkait dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2015 hingga 2019 dan hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo untuk tahun 2021 hingga 2022.



Tabel 3. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2019, dan Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada Tahun 2021	Proyeksi/ Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN	1,580,583,084,970.09	1,620,456,354,002.13	1,755,587,299,205.04	1,819,658,453,341.45	1,747,723,838,170.86	1,780,110,598,924,09	1,946,363,049,411.73
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173,836,184,925.09	228,523,663,374.13	187,287,219,449.41	204,727,875,621.05	197,096,431,255.86	208,369,099,041.29	246,895,144,840.93
1.1.1	Pajak Daerah	30,080,834,208.29	38,950,555,757.34	43,654,005,946.48	53,364,172,516.00	43,667,583,260.82	43,908,447,057.75	65,459,812,029.06
1.1.2	Retribusi Daerah	13,682,597,701.00	9,402,292,498.00	10,563,574,281.00	11,656,985,435.00	12,512,153,078.50	11,005,593,489.00	12,353,754,504.80
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4,316,450,161.00	4,047,068,403.64	4,177,807,076.24	4,054,829,225.43	4,033,881,020.65	4,033,881,020.65	3,967,589,854.31
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	125,756,302,854.80	176,123,746,715.15	128,891,832,145.69	135,651,888,444.62	136,882,813,895.89	149,421,177,473.89	165,113,988,452.75
1.2	Dana Perimbangan	1,171,851,135,392.00	1,091,000,194,656.00	1,227,769,851,587.00	1,224,410,192,664.00	1,227,190,697,500.00	1,211,103,668,050,00	1,264,610,245,912.40
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	74,028,875,610.00	70,312,040,008.00	118,074,249,542.00	99,778,212,434.00	79,784,359,500.00	70,838,067,000,00	128,267,796,951.40
1.2.2	Dana Alokasi Umum	821,084,393,000.00	806,660,581,000.00	806,660,581,000.00	831,861,637,000.00	840,715,067,000.00	840,715,067,000,00	840,335,871,800.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	276,737,866,782.00	214,027,573,648.00	303,035,021,045.00	292,770,343,230.00	306,691,271,000.00	299,750,534,050,00	296,006,577,161.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	234,895,764,653.00	300,932,495,972.00	340,530,228,168.63	390,520,385,056.40	323,436,709,415.00	360,637,831,832,80	434,857,658,658.40
1.3.1	Hibah	6,709,843,000.00	-	52,344,939,162.63	58,721,650,325.40	52,319,240,000.00	52,319,240,000,00	58,721,650,325.40
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78,067,243,653.00	101,312,838,972.00	96,768,038,006.00	115,700,411,131.00	87,915,343,415.00	74,507,866,262,80	134,075,428,933.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87,460,278,000.00	111,434,587,000.00	141,880,381,000.00	145,324,384,600.00	183,202,126,000.00	177,468,590,000,00	182,771,308,200.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	62,658,400,000.00	88,185,070,000.00	49,536,870,000.00	70,773,939,000.00	-	56,342,135,570,00	59,289,271,200.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tim Penyusun



Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui OPD yang mengkoordinir pendapatan daerah dan OPD terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dimana kebijakan terkait pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

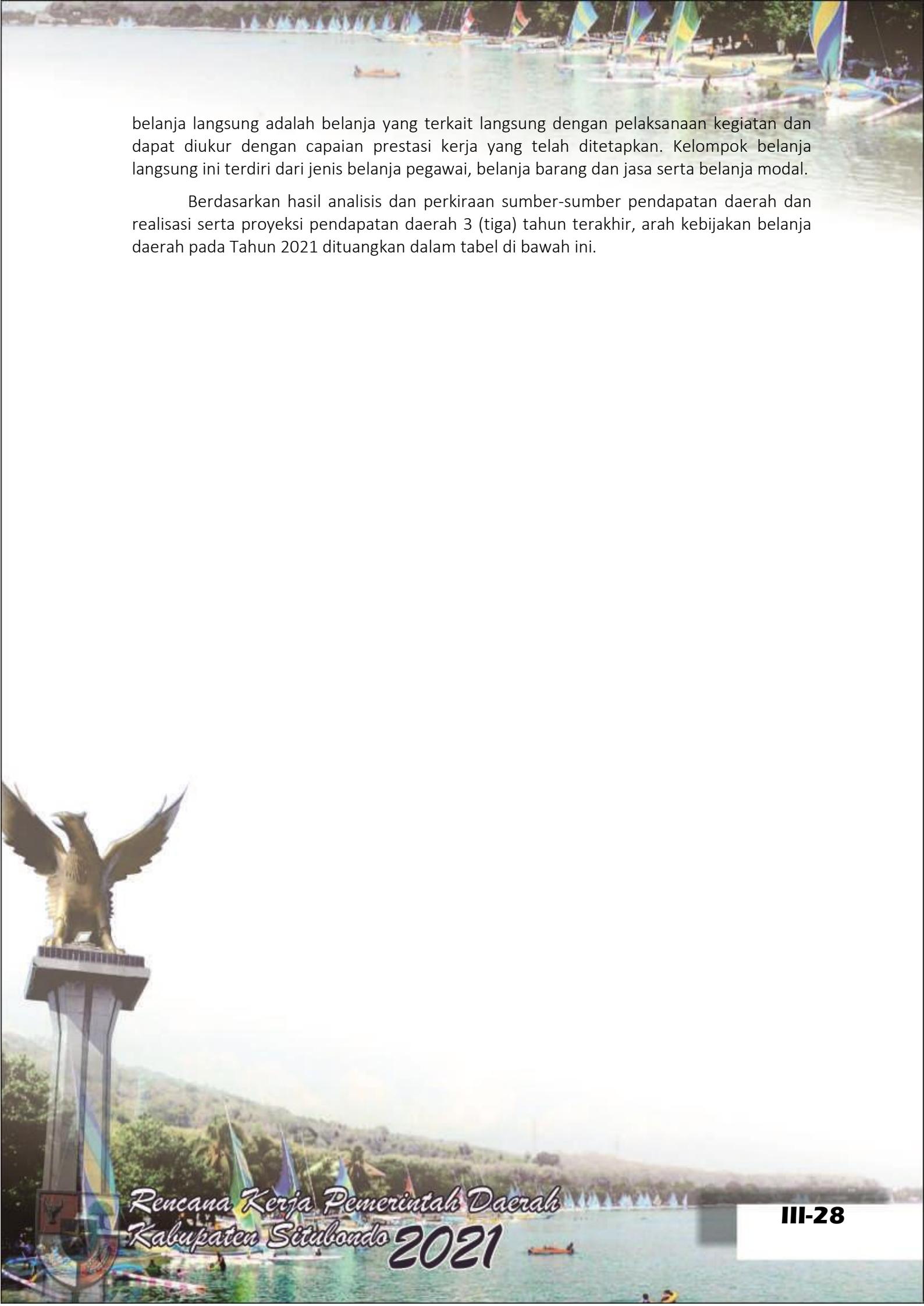
1. Guna mengoptimalkan potensi pajak yang belum tergali, BPPKAD melakukan pemetaan potensi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, BPPKAD juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah seperti; e-BPHTB, e-PAD, NPWP, dan sebagainya. Selain itu, pada tahun 2019 dalam usaha meningkatkan potensi pajak di Kabupaten Situbondo, BPPKAD melakukan monitoring dan evaluasi dengan menyandingkan realisasi dengan potensi atas pengelolaan pajak daerah serta merencanakan pemasangan APTB (alat perekam transaksi elektronik) khususnya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan dan pajak parkir;
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo membentuk tim Monev pajak daerah guna melakukan pengecekan lapangan terhadap laporan pajak daerah dari wajib pajak Self Assessment;
3. Dalam upaya memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak, selain melakukan penegakan perda dan perbup bersama Satpol PP, BPPKAD juga bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan sanksi pajak daerah..
4. Perlu diadakan pelatihan dan pendidikan Juru Sita atau PPNS Perpajakan dan pemeriksa pajak untuk meningkatkan SDM petugas pemungut pajak/ retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi lebih intens antara OPD terkait dalam penentuan dan perencanaan target pajak dan retribusi daerah, melakukan pemetaan potensipotensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan pihak akademisi.
6. Menerapkan dan meningkatkan system dalam pengelolaan Pajak daerah baik dalam pelaporan, perhitungan dan pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maximal sesuai arahan KPK RI bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH).

3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah



Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan



belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2019, dan Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2022

NO	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada Tahun 2021	Proyeksi/ Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	BELANJA	1,661,059,125,306.87	1,611,319,203,889.22	1,730,464,593,001.47	1,821,889,974,701.86	1,841,944,419,453.34	1.832.110.598.924,09	1,907,940,862,950.93
2.1	Belanja Tidak Langsung	892,406,965,058.00	865,645,559,005.39	909,488,517,051.00	982,433,120,184.00	1,033,586,050,658.83	997.020.587.603,44	990,249,386,628.68
2.1.1	Belanja Pegawai	682,415,250,181.00	616,790,808,882.39	654,954,522,458.00	679,595,767,284.00	715,590,320,651.79	726.596.575.686,79	667,300,373,848.68
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	21,802,863,000.00	31,224,614,000.00	32,388,074,000.00	46,682,152,000.00	74,857,624,500.00	21.665.624.500,00	43,553,534,120.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	609,200,000.00	7,280,000,000.00	7,577,950,000.00	12,995,000,000.00	4,102,935,893.11	10.149.000.000,00	15,400,646,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2,298,245,000.00	2,506,981,000.00	2,928,470,000.00	5,448,896,000.00	5,425,994,613.93	4.611.373.016,65	5,959,090,200.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	184,011,655,893.00	207,518,974,893.00	210,068,095,493.00	237,700,414,900.00	231,609,175,000.00	228.998.014.400,00	258,035,742,460.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,269,750,984.00	324,180,230.00	1,571,405,100.00	10,890,000.00	2,000,000,000.00	5.000.000.000,00	-
2.2	Belanja Langsung	768,652,160,248.87	745,673,644,883.83	820,976,075,950.47	839,456,854,517.86	808,358,368,794.51	835.090.011.320,65	917,691,476,322.25
2.2.1	Belanja Pegawai	64,674,913,944.00	79,553,679,248.00	77,497,270,131.00	88,839,381,656.00	102,400,067,172.00	105.786.340.013,31	105,236,301,331.80
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287,113,702,025.51	320,737,549,617.85	345,034,430,372.50	395,915,357,228.64	423,388,106,255.12	437.389.148.296,79	437,392,563,755.30
2.2.3	Belanja Modal	416,863,544,279.36	345,382,416,017.98	398,444,375,446.97	354,702,115,633.22	282,570,195,367.39	291.914.523.010,55	375,062,611,235.15

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tim Penyusun

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, maka perlu ditetapkan kebijakan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada tahun anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pemulihan sektor ekonomi yang terdampak akibat dari bencana COVID-19;
2. Memfokuskan anggaran untuk kebutuhan pemulihan ekonomi daerah;
3. Peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan, pemulihan kesehatan dampak COVID-19;
4. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.
5. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam pengalokasian anggaran
6. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas.
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
8. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa khususnya ADD, Pemerintah Kabupaten Situbondo menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya, kecuali DAK.
9. Belanja langsung dalam setiap tahunnya diupayakan mencapai komposisi di atas 40%.
10. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo, maka diupayakan belanja untuk pembangunan infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum.

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Apabila APBD diperkirakan surplus diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Sementara itu, jika APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 adalah Membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*.



Komposisi penerimaan pembiayaan Kabupaten Situbondodalam setiap tahunnya lebih banyak berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang berfluktuasi. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondopada tahun 2016 - 2019 proyeksi pada tahun 2021 dan 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3. 11: Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2019 dan Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2021 – 2022*

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada Tahun 2021	Proyeksi/ Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	191.407.241.040,98	111.174.015.473,73	119.948.905.863,19	145.116.726.615,76	94.220.581.282,48	52.000.000.000,00	50.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SilPA)	191,177,365,876.98	110,931,022,606.73	119,896,546,863.19	145,021,289,614.76	94,220,581,282.48	52,000,000,000.00	50,000,000,000.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	39,697,266.00	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	229,875,164.00	203,295,601.00	52,359,000.00	95,437,001.00	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Dana Talangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	178.097.50	173.017.45		-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	178,097.50	173,017.45		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tim Penyusun



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo 2021

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Situbondo yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran dalam RPJMD. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Situbondo.

Secara umum melihat rencana pembangunan 5 tahunan atau jangka menengah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021, berikut merupakan Visi Kabupaten Situbondo dalam periode tersebut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI, SERTA LEBIH BERIMAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”

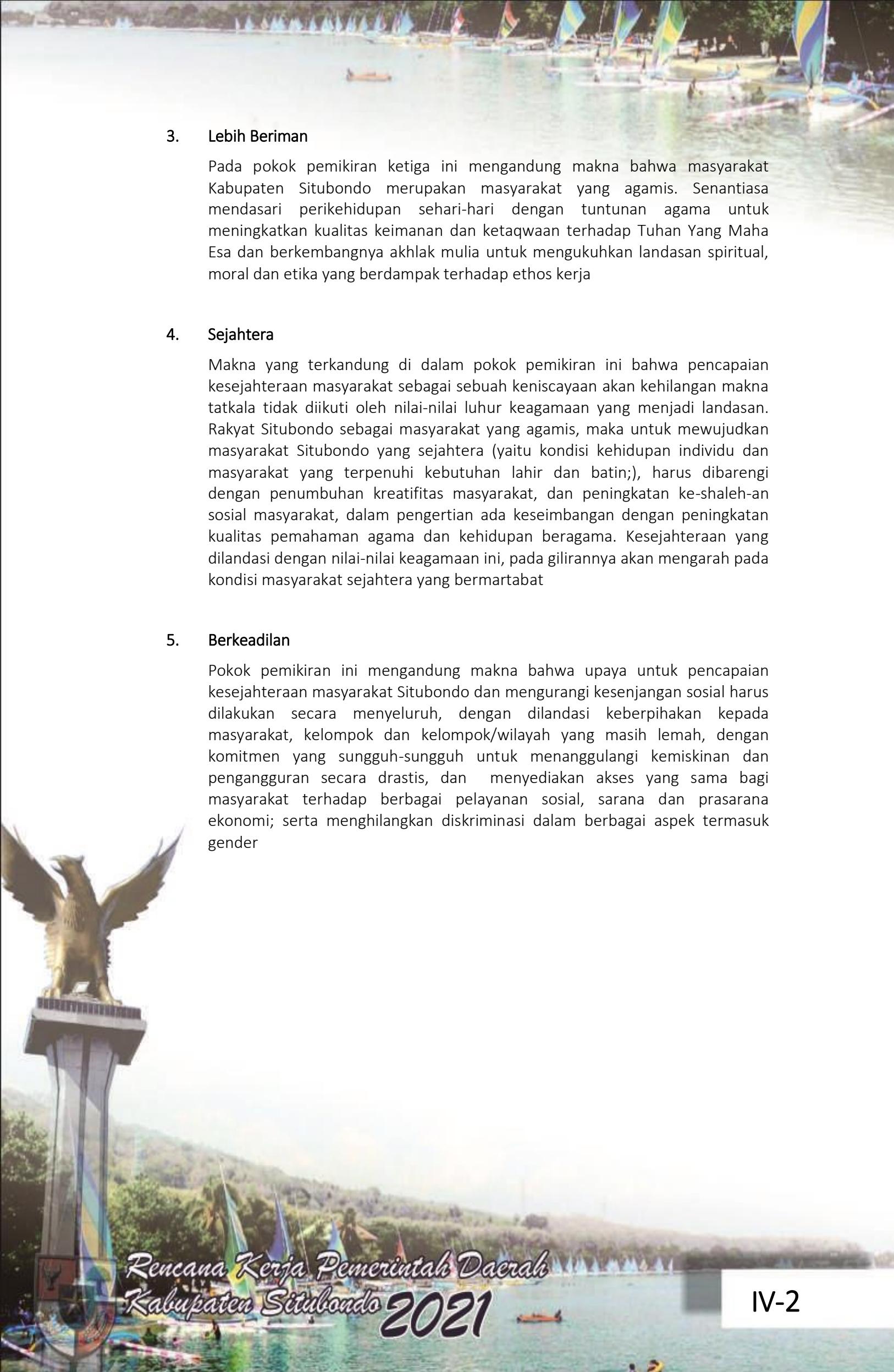
Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pokok-pokok penjelasan visi yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. Madani

Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi suatu masyarakat yang memiliki tujuan yang visioner dan positif dalam membangun dan menjalani kehidupan yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi dalam keragaman masyarakat

2. Mandiri

Kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi



3. Lebih Beriman

Pada pokok pemikiran ketiga ini mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja

4. Sejahtera

Makna yang terkandung di dalam pokok pemikiran ini bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan. Rakyat Situbondo sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera (yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;), harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dan peningkatan ke-shalehan sosial masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat

5. Berkeadilan

Pokok pemikiran ini mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Misi

1

Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan

Tujuan 1:

Meningkatkan Kualitas SDM

Misi

2

Tujuan 2:
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

{ Meningkatkan kualitas hidup
yang sejahtera dan berkeadilan

Misi

3

Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal

Tujuan 3:

Meningkatkan Perekonomian Daerah
dan Pemerataan hasil Pembangunan

Misi

4

Tujuan 4:
Meningkatkan Birokrasi Pemerintahan
yang bersih, akuntabel, dan efisien
serta pelayanan publik yang baik

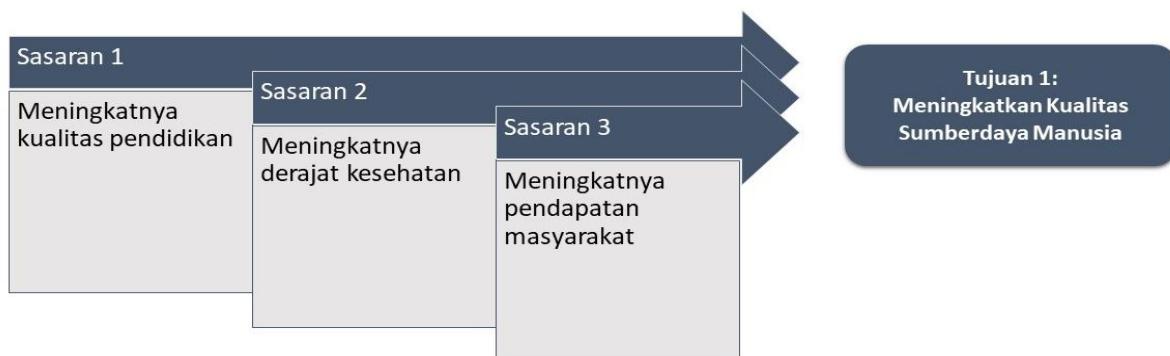
{ Meningkatkan tata kelola yang
baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan

Gambar 4. 1: Linieritas Misi dengan Tujuan Pembangunan

Gambaran 4.1 menunjukkan linieritas Misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Tujuan Pembangunan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021. Terdapat 4 misi dengan 1 tujuan pada masing-masing misi yang menunjukkan fokus pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menjalankan pembangunan selama periode 2016-2021. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021:

A. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

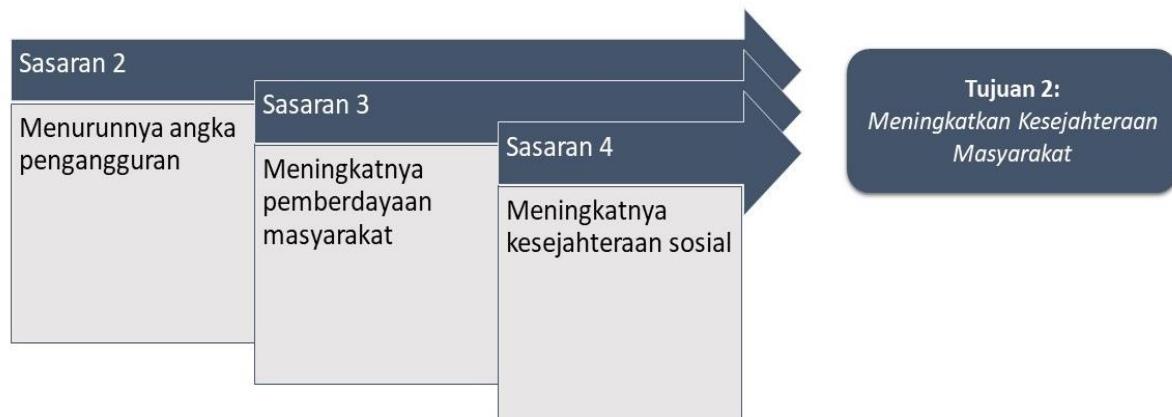
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama melalui upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Adapun sasaran pada tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai berikut:



Gambar 4. 2: Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

B. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

Pengentasan masyarakat dari kemiskinan menjadi prioritas utama melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Adapun sasaran pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:



Gambar 4. 3: sasaran pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Mewujudkan perekonomian Daerah dan Pemerataan Hasil Pembangunan

Peningkatan perekonomian yang stabil dan dinamis melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat yaitu hasil usaha masyarakat lokal yang mampu bersaing didalam negeri dan luar negeri. Adapun sasaran pada tujuan mewujudkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan sebagai berikut:



Gambar 4. 4: sasaran pada tujuan mewujudkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan

D. Meningkatkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien Serta Pelayanan Publik yang Baik

Peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa secara lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran pada tujuan meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik sebagai berikut:



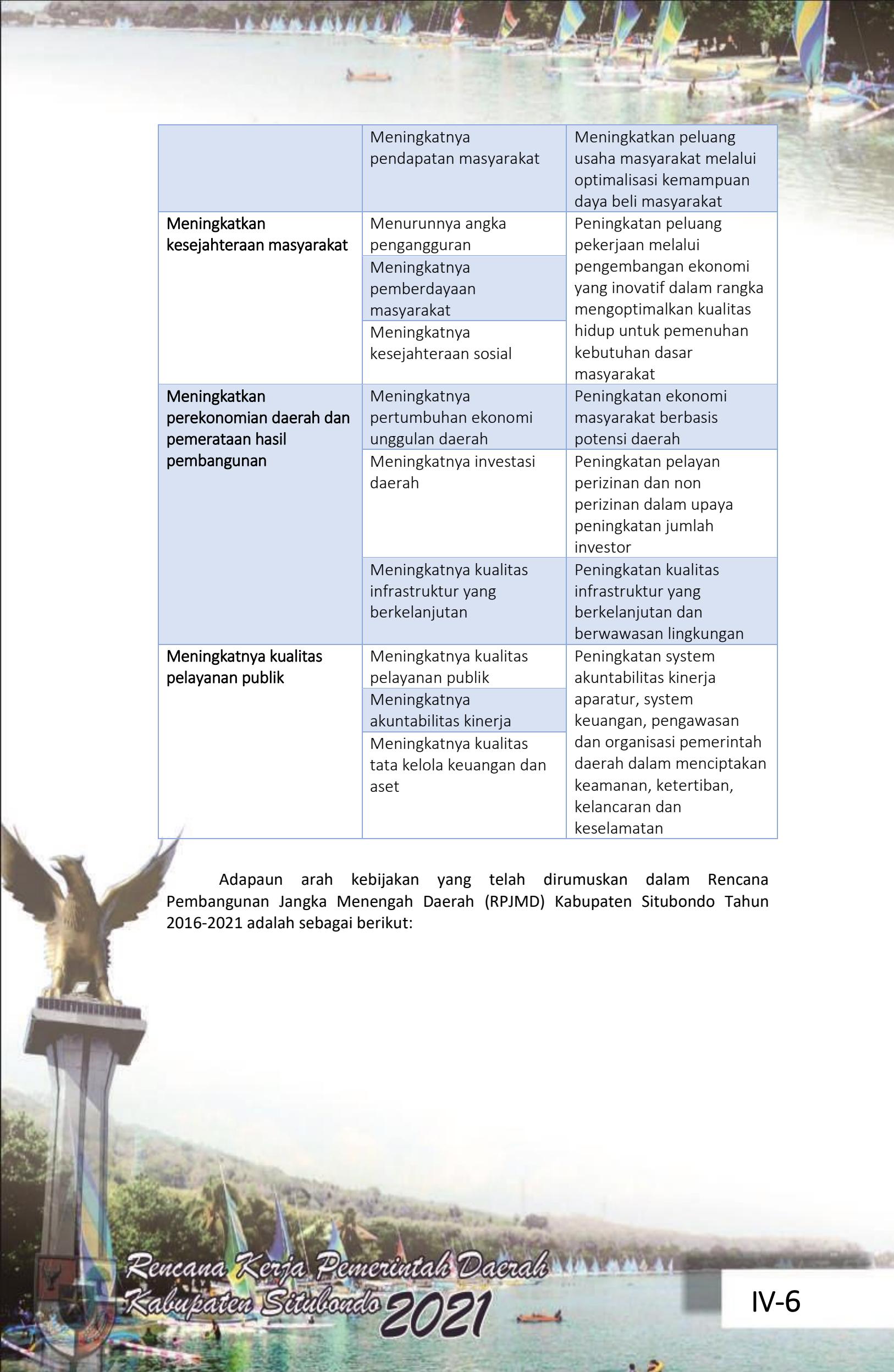
Gambar 4. 5: meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik

4.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 4 (Empat) misi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2016-2021 per masing-masing Misi, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1: Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan, sarana prasarna serta penguatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatkan mutu dan akses setiap bidang pelayanan kesehatan serta mengadvokasi program kependudukan



	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan peluang usaha masyarakat melalui optimalisasi kemampuan daya beli masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang pekerjaan melalui pengembangan ekonomi yang inovatif dalam rangka mengoptimalkan kualitas hidup untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	
Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan pelayan perizinan dan non perizinan dalam upaya peningkatan jumlah investor
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan system akuntabilitas kinerja aparatur, system keuangan, pengawasan dan organisasi pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset	

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

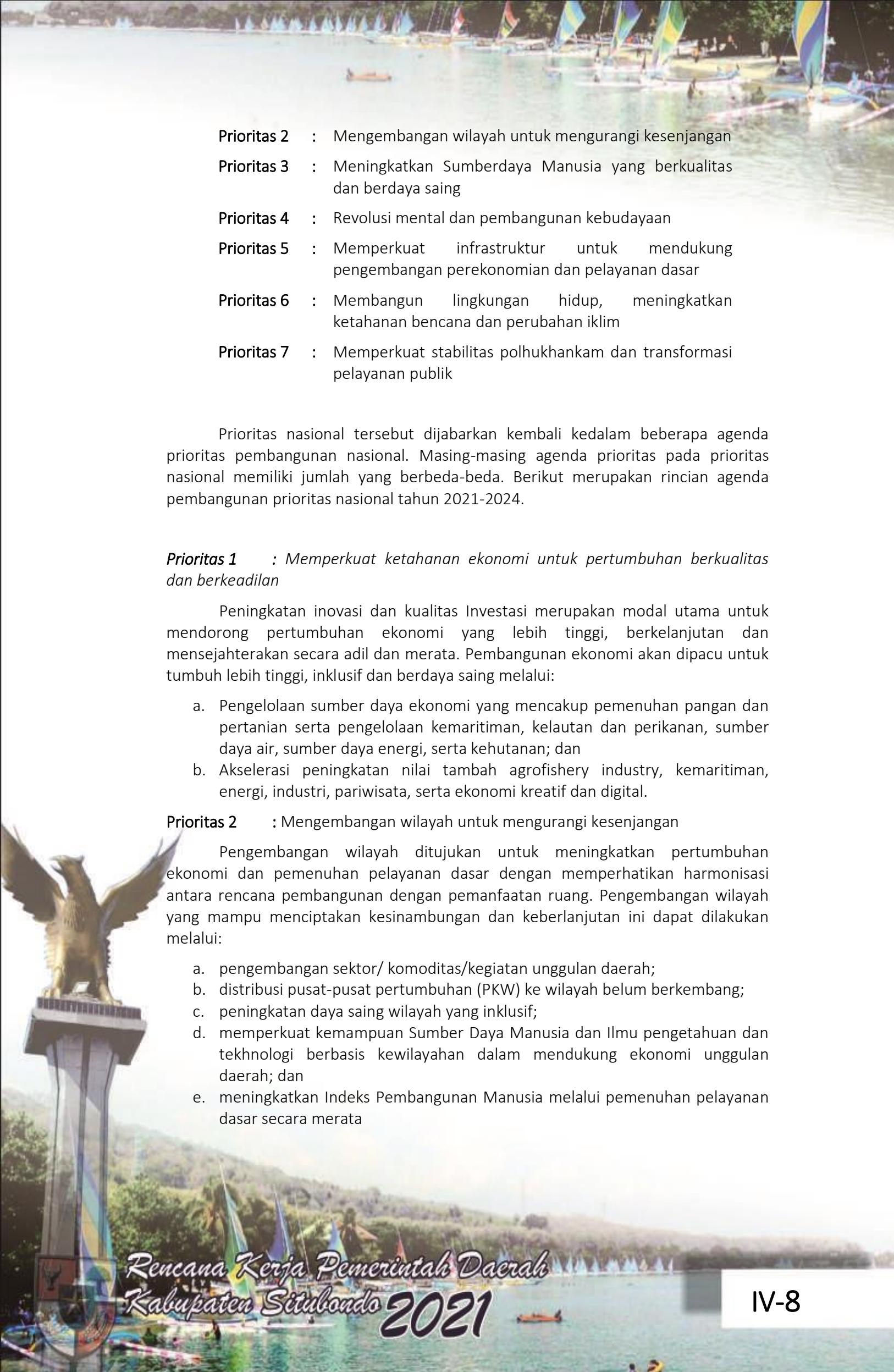
4.2.1. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Adapun secara umum arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021-2024 dituangkan kedalam beberapa Prioritas Nasional meliputi:

Prioritas 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

- 
- Prioritas 2** : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - Prioritas 3** : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - Prioritas 4** : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - Prioritas 5** : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan dasar
 - Prioritas 6** : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - Prioritas 7** : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas nasional tersebut dijabarkan kembali kedalam beberapa agenda prioritas pembangunan nasional. Masing-masing agenda prioritas pada prioritas nasional memiliki jumlah yang berbeda-beda. Berikut merupakan rincian agenda pembangunan prioritas nasional tahun 2021-2024.

Prioritas 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

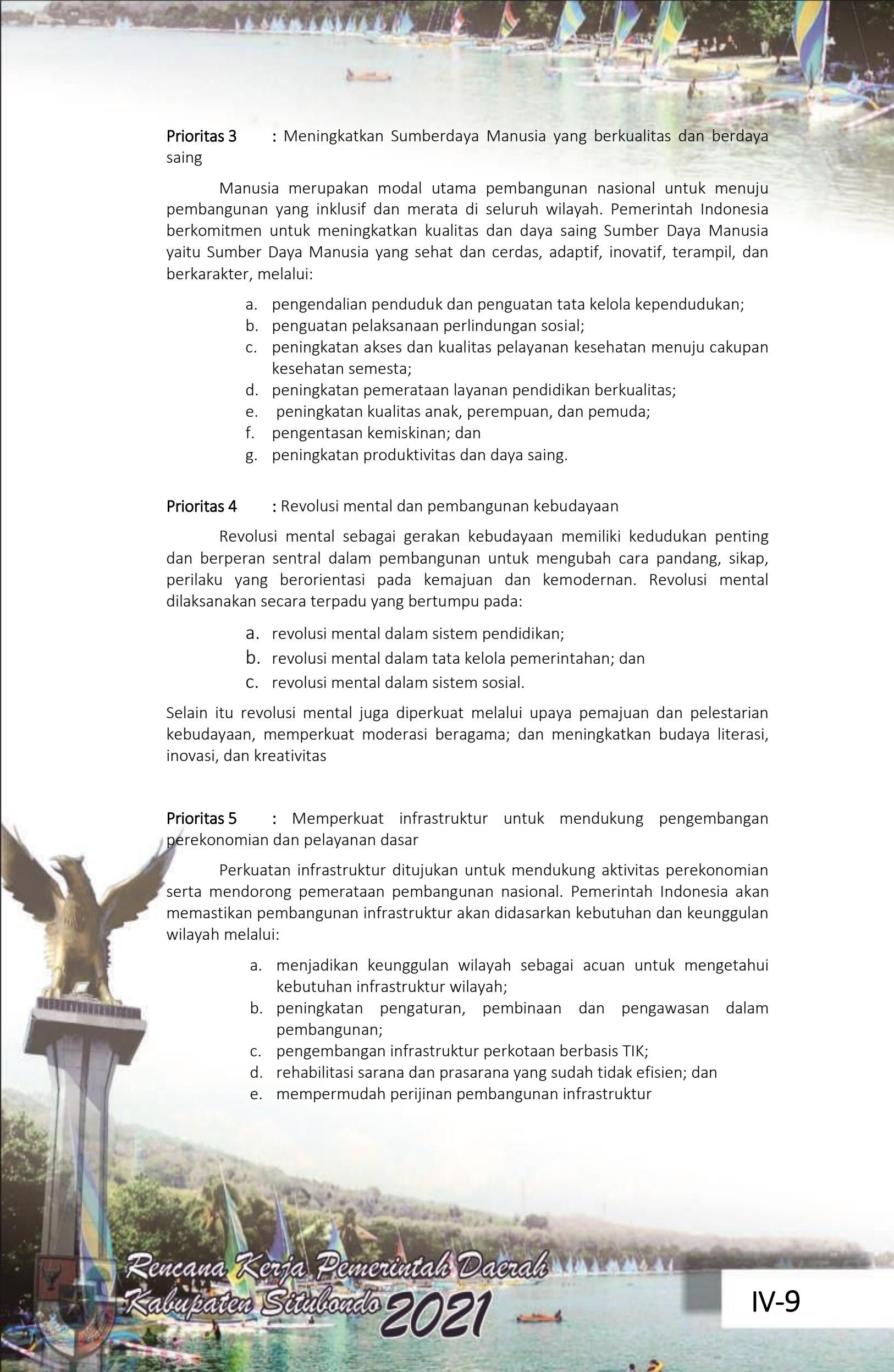
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Prioritas 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata



Prioritas 3 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Prioritas 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas



Prioritas 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur



Prioritas 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

Prioritas 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

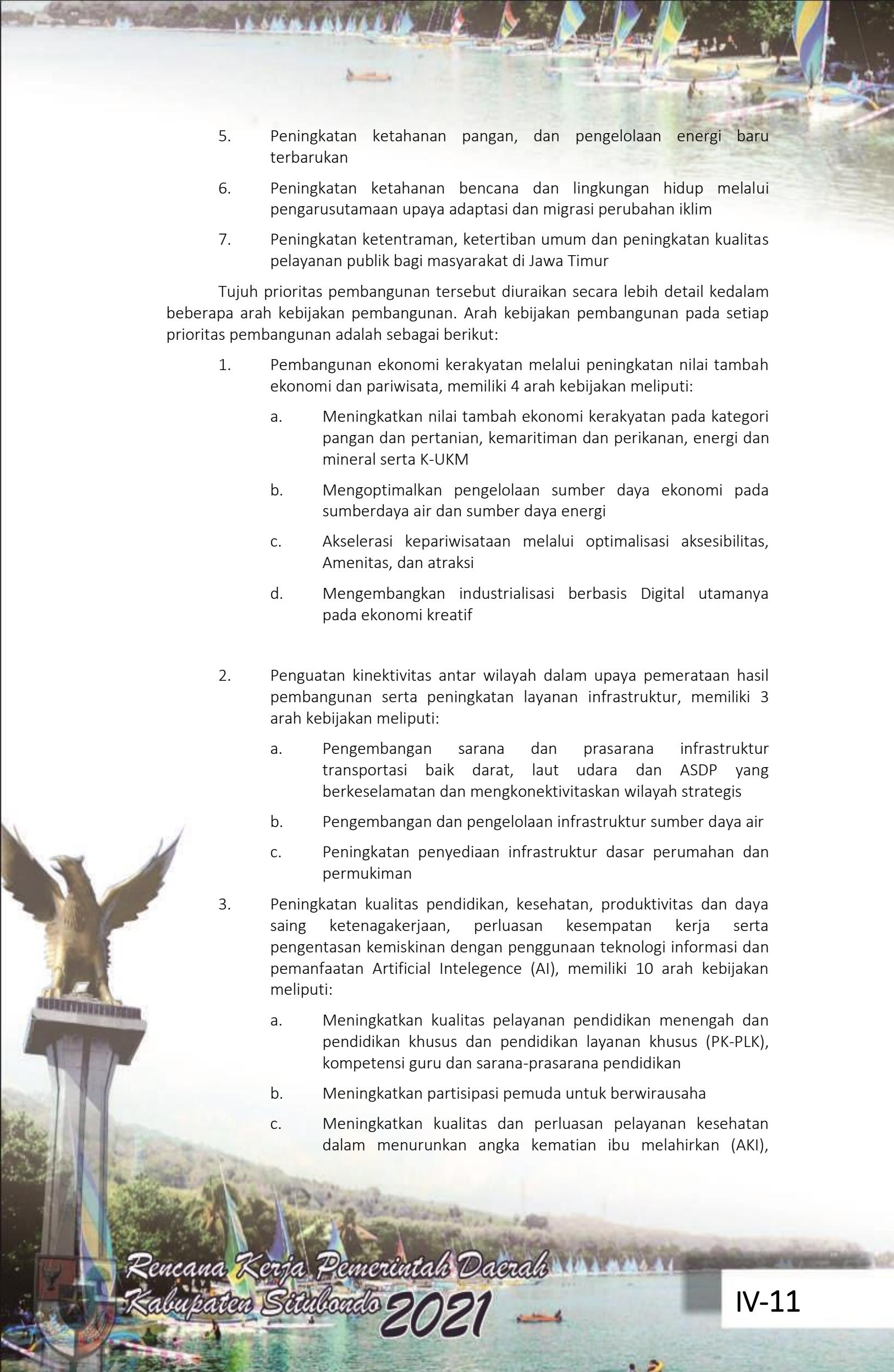
- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

4.2.2. Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



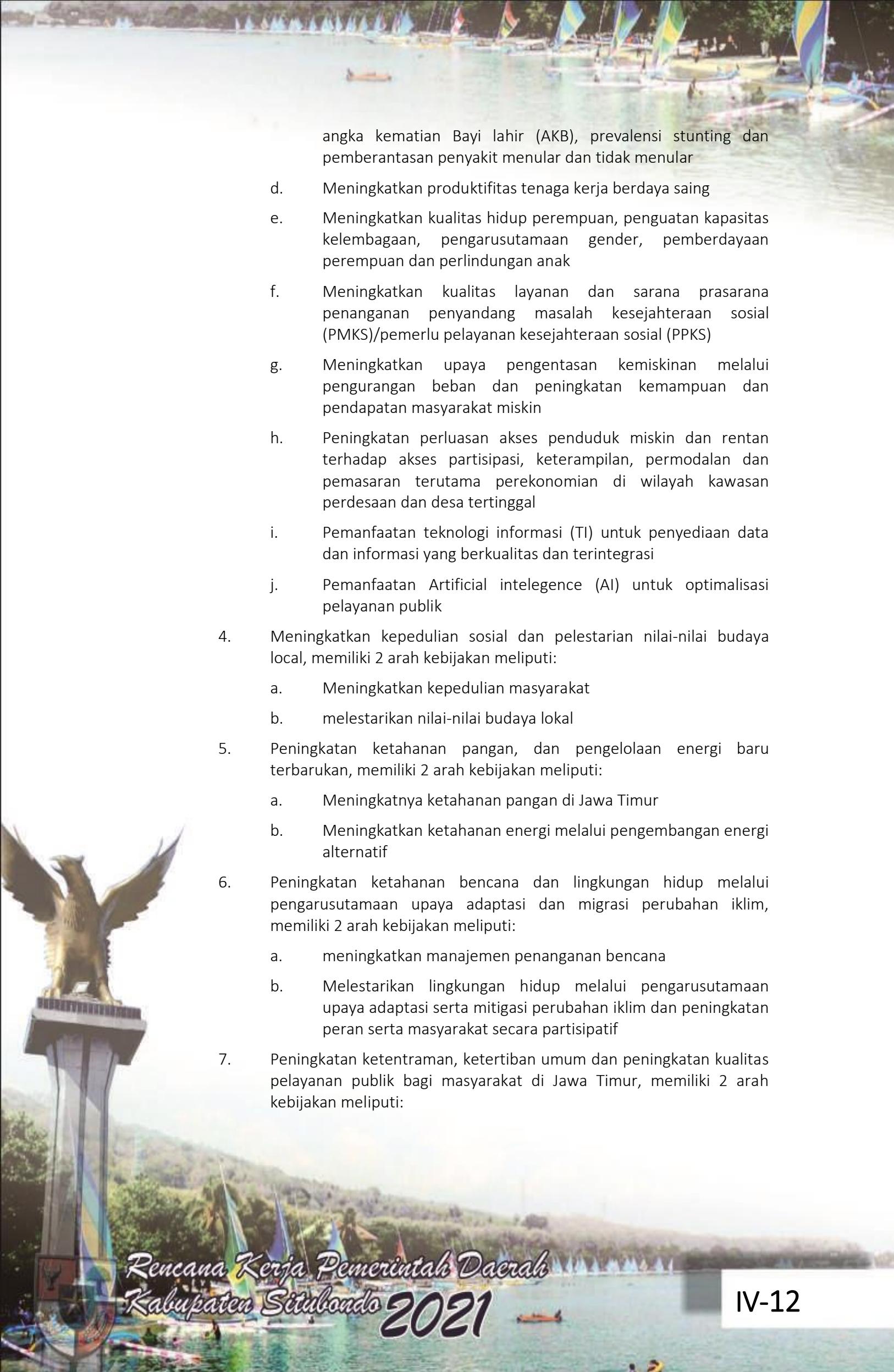
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tercermin dalam tematik pembangunan tahun 2021. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah “Meningkatkan industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas”. Tema Pembangunan tersebut diuraikan dalam 7 prioritas pembangunan meliputi:

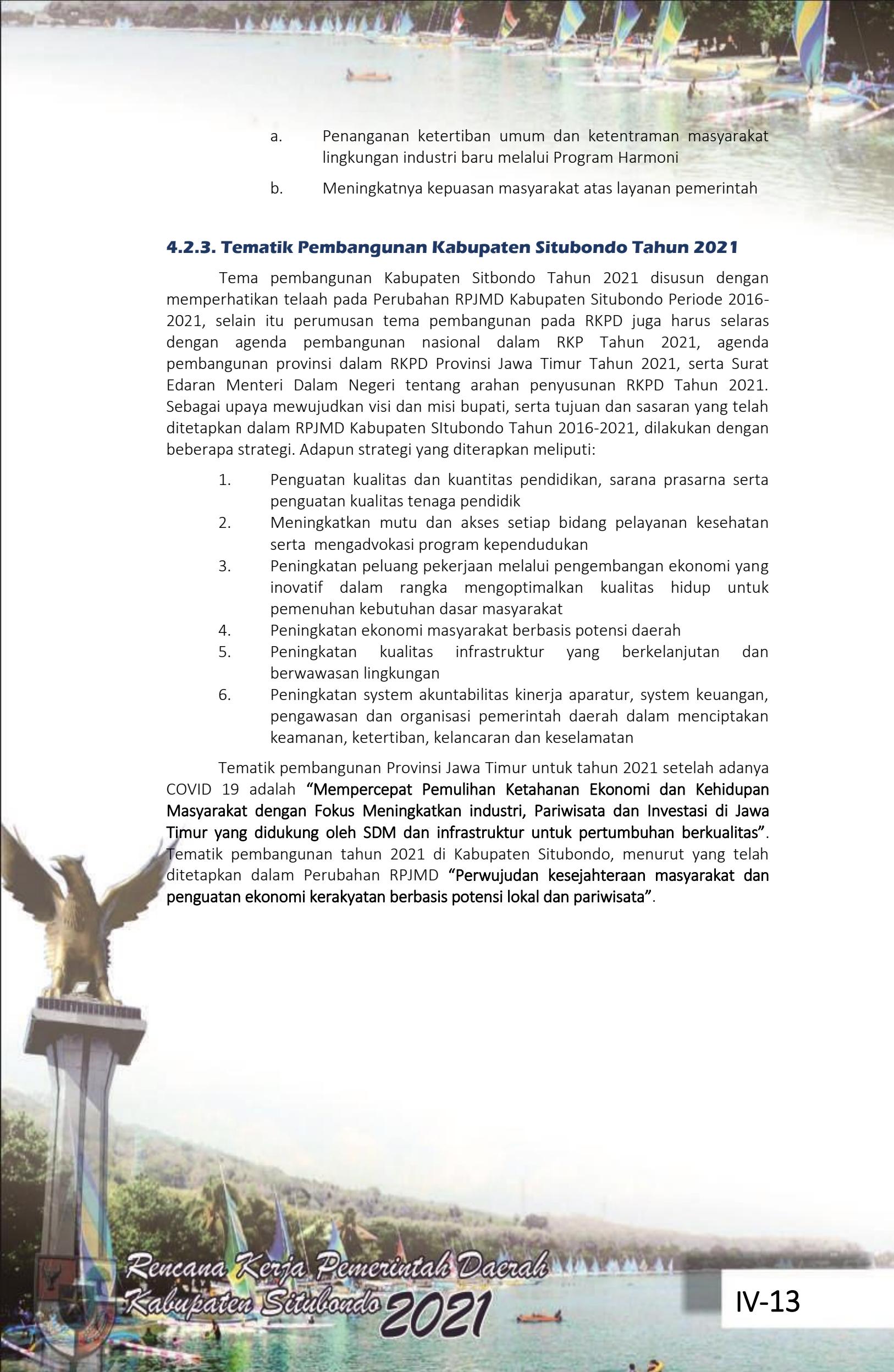
1. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

- 
5. Peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan
 6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan migrasi perubahan iklim
 7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

Tujuh prioritas pembangunan tersebut diuraikan secara lebih detail kedalam beberapa arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan pada setiap prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, memiliki 4 arah kebijakan meliputi:
 - a. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan pada kategori pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, energi dan mineral serta K-UKM
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sumberdaya air dan sumber daya energi
 - c. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas, Amenitas, dan atraksi
 - d. Mengembangkan industrialisasi berbasis Digital utamanya pada ekonomi kreatif
2. Penguatan koneksi antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur, memiliki 3 arah kebijakan meliputi:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi baik darat, laut udara dan ASDP yang berkeselamatan dan mengkonektivitaskan wilayah strategis
 - b. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air
 - c. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), memiliki 10 arah kebijakan meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK), kompetensi guru dan sarana-prasarana pendidikan
 - b. Meningkatkan partisipasi pemuda untuk berwirausaha
 - c. Meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI),

- 
- angka kematian Bayi lahir (AKB), prevalensi stunting dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
- d. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja berdaya saing
 - e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, penguatan kapasitas kelembagaan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - f. Meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
 - g. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengurangan beban dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
 - h. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap akses partisipasi, keterampilan, permodalan dan pemasaran terutama perekonomian di wilayah kawasan perdesaan dan desa tertinggal
 - i. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk penyediaan data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi
 - j. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk optimalisasi pelayanan publik
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local, memiliki 2 arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat
 - b. melestarikan nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan, memiliki 2 arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatnya ketahanan pangan di Jawa Timur
 - b. Meningkatkan ketahanan energi melalui pengembangan energi alternatif
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan migrasi perubahan iklim, memiliki 2 arah kebijakan meliputi:
- a. meningkatkan manajemen penanganan bencana
 - b. Melestarikan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dan peningkatan peran serta masyarakat secara partisipatif
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur, memiliki 2 arah kebijakan meliputi:

- 
- a. Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lingkungan industri baru melalui Program Harmoni
 - b. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah

4.2.3. Tematik Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Tema pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan telaah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Periode 2016-2021, selain itu perumusan tema pembangunan pada RKPD juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021, agenda pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang arahan penyusunan RKPD Tahun 2021. Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi bupati, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, dilakukan dengan beberapa strategi. Adapun strategi yang diterapkan meliputi:

- 1. Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan, sarana prasarna serta penguatan kualitas tenaga pendidik
- 2. Meningkatkan mutu dan akses setiap bidang pelayanan kesehatan serta mengadvokasi program kependudukan
- 3. Peningkatan peluang pekerjaan melalui pengembangan ekonomi yang inovatif dalam rangka mengoptimalkan kualitas hidup untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- 4. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
- 5. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 6. Peningkatan system akuntabilitas kinerja aparatur, system keuangan, pengawasan dan organisasi pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan

Tematik pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021 setelah adanya COVID 19 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Meningkatkan industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas”**. Tematik pembangunan tahun 2021 di Kabupaten Situbondo, menurut yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD **“Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pariwisata”**.



Gambar 4. 7: Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2021 dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Tema pembangunan Kabupaten Situbondo mengalami perubahan dari arah kebijakan yang telah ditentukan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Tematik pembangunan tahun 2021 Kabupaten Situbondo setelah menyesuaikan perubahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi Kebersamaan Berbasis Sektor Unggulan”**. Sehingga jika dilihat pada gambar 4.7 Tema Pembangunan Kabupaten Situbondo telah linier dengan tema pembangunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penyesuaian tema pembangunan tersebut dilakukan dikarenakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat isu-isu strategis pembangunan yang perlu diakomodir diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Belum konsistennya peningkatan pembangunan perindustrian khususnya pada arah pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan kewirausahaan
3. Belum optimalnya penyaluran atau penyerapan tenaga kerja lokal
4. Belum optimalnya perdagangan dalam negeri
5. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional
6. Adanya potensi resesi ekonomi sebagai imbas wabah virus corona
7. Menurunnya industri pariwisata sebagai imbas dari KLB wabah virus corona

8. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan sehingga angka kemiskinan masih tergolong tinggi
9. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah
10. Kurangnya daya saing SDM Kabupaten Situbondo
11. Masih kurangnya kapasitas pemerintahan dalam menyongsong era digital 4.0

Perubahan tematik pembangunan dilakukan selain mengakomodir isu-isu diatas, adalah dalam rangka mengakomodir agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang dimuat dalam tematik pembangunan serta prioritas pembangunan. Tema pembangunan Kabupaten Situbondo diterjemahkan dalam 4 prioritas pembangunan sebagai berikut:



Gambar 4. 8: Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Perumusan 4 prioritas pembangunan yang diturunkan dari tematik pembangunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 tidak terlepas dari isu strategis yang harus dituntaskan. Berikut merupakan linieritas isu strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021:

Tabel 4. 2: linieritas isu strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021
Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	
Belum konsistennya peningkatan pembangunan perndustrian khususnya pada arah pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan kewirausahaan	Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sector
Belum optimalnya penyaluran atau penyerapan tenaga kerja lokal	
Belum optimalnya perdagangan dalam negeri	
Melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional	Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi
Adanya potensi resesi ekonomi sebagai imbas wabah virus corona	
Menurunnya industri pariwisata sebagai imbas dari KLB wabah virus corona	
Belum optimalnya pengentasan kemiskinan sehingga angka kemiskinan masih tergolong tinggi	Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah	
Kurangnya daya saing SDM Kabupaten Situbondo	Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan
Masih kurangnya kapasitas pemerintahan dalam menyongsong era digital 4.0	

Perumusan 4 prioritas pembangunan yang diturunkan dari tematik pembangunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 tidak terlepas dari menjawab isu strategis yang harus dituntaskan ditahun tersebut. Berikut merupakan linieritas isu strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021:

Tabel 4.3: Linieritas prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo

Prioritas Nasional 2021	Prioritas Provinsi Jawa Timur 2021	Prioritas Kabupaten Situbondo 2021
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, dan Infrastruktur di Jawa Timur	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Kesehatan, Periwiata dan Ekonomi Kebersamaan Berbasis Sektor Unggulan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata	Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sector
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi
Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan dasar	Peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan	Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan migrasi perubahan iklim	
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan

Empat prioritas pembangunan tersebut diatas dilaksanakan melalui beberapa program intervensi pembangunan supaya lebih spesifik dan dapat lebih mudah dioperasionalkan atau diterjemahkan kedalam program pembangunan sesuai nomenklatur yang dapat bersifat lintas Perangkat Daerah. Berikut merupakan program intervensi pada setiap program prioritas pembangunan tahun 2021.

Tabel 4.4: Linieritas antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas RKPD Tahun 2021

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021	Program Prioritas
Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi		Penyediaan sarana prasarana penunjang ekonomi kebersamaan
Belum konsistennya peningkatan pembangunan perndustrian khususnya pada arah pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan kewirausahaan	Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sector	Gerakan masif SOP penyuburan lahan
Belum optimalnya penyaluran atau penyerapan tenaga kerja lokal		Penguatan pakan ternak dan pakan ikan mandiri
Belum optimalnya perdagangan dalam negeri		Segmentasi Ikan
Melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional		Serapan dan pemasaran KOBESSA
Adanya potensi resesi ekonomi sebagai imbas wabah virus corona		Optimalisasi pariwisata unggulan
Menurunnya industri pariwisata sebagai imbas dari KLB wabah virus corona		Penyiapan <i>Readiness criteria</i> Kawasan selingkar ijen
Belum optimalnya pengentasan kemiskinan sehingga angka kemiskinan masih tergolong tinggi		Optimalisasi jalur tol Kabupaten Situbondo
Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah	Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat	<p>Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan layanan pendidikan</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan kewenangan desa dalam APBDesa</p> <p>Penurunan angka <i>stunting</i>, AKI-AKB dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>Pemberikan bantuan penduduk miskin</p>

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021	Program Prioritas
Kurangnya daya saing SDM Kabupaten Situbondo	Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan	Pemanfaatan teknologi untuk penyederhanaan birokrasi melalui e- goverment
Masih kurangnya kapasitas pemerintahan dalam menyongsong era digital 4.0		Situbondo menuju ZI WBK/WBBM

Prioritas 1: Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan berbasis kolaboratif antar aktor dan sektor.

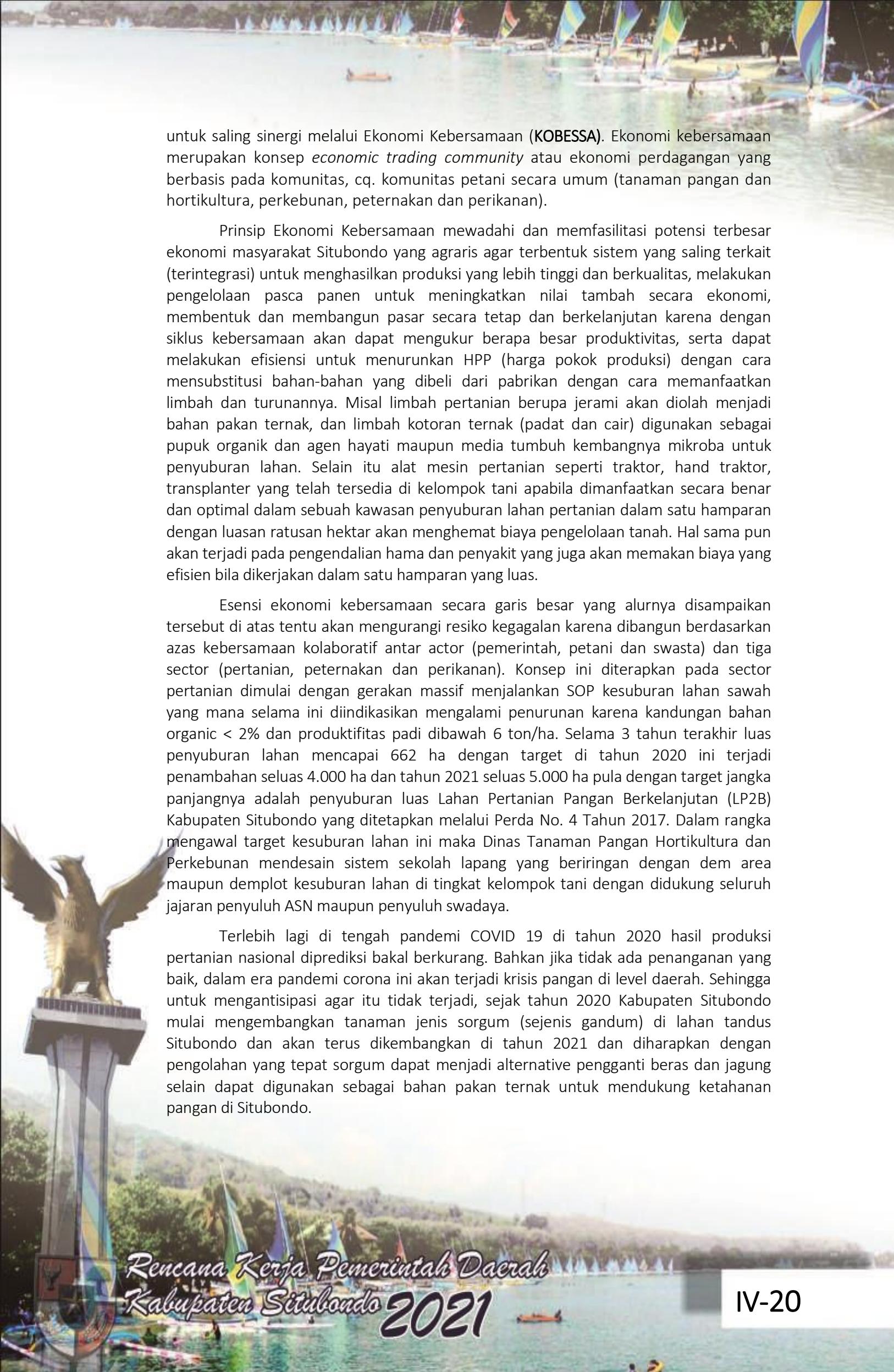
Intervensi Program pembangunan KOBESSA

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, perekonomian Kabupaten Situbondo bertumpu pada 3 sektor utama, yakni sektor pertanian, kehutanan & perikanan sebagai sektor terbesar dengan kontribusi 31,61%, sektor Industri Pengolahan sebagai sektor terbesar kedua dengan kontribusi 18,05% dan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor terbesar ketiga berkontribusi 16,21%. Ketiga sektor ini merupakan penyumbang nilai tambah terbesar dalam menyusun PDRB Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo harus memberikan perhatian yang serius dalam mengelola sumberdaya alam penopang perekonomian masyarakat Situbondo yang juga merupakan sumber mata pencaharian bagi 178.096 jiwa masyarakat Situbondo.

Dengan sawah seluas 34.062 ha dan panjang pantai ±150 km maka komoditas pertanian baik itu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan serta budidaya perikanan menjadi komoditas strategis untuk dioptimalkan pengelolaannya. Beberapa issue dan permasalahan sejak budidaya hingga panen dan pemasaran terus menerus diupayakan solusi dan intervensinya oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Potensi pertanian banyak ditopang oleh komoditas padi dan jagung yang mana produksi padi di tahun 2019 mencapai 305.041 ton dengan luas panen padi mencapai 19.333 ha /panen dan produktivitas 5,74 kw/ha. Selanjutnya potensi sapi potong dengan populasi 176.311 di tahun 2019 dan berkembang di tahun 2020 dengan kelahiran pedet sekitar 70.000 ekor/tahun menjadikan PDRB sub kategori peternakan berkontribusi sekitar 50% dari total sub kategori pertanian dengan tidak mengabaikan potensi 1 ekor sapi menghasilkan 12,5kg KOHE / hari, yang dapat diolah menjadi pupuk Organik dan Biogas (36jt KWH) yang dapat digunakan untuk mengembalikan kesuburan lahan sawah (bahan organik).

Selanjutnya meningkatnya produksi ikan budidaya di Kabupaten Situbondo khususnya Udang Vannamei yang pada tahun 2019 nilai produksi udang vannamei tambak dan kolam 8.815 ton senilai Rp 592 miliar disusul dengan bandeng, sidat dan lele dan ikan budidaya lainnya sekitar Rp 10 miliar dihasilkan dari ± 197 tambak di sepanjang pantai Situbondo. Untuk produksi benih Udang Vannamei skala perusahaan dan *hatchery* skala rumah tangga dengan total 43 *hatchery* menghasilkan sekitar 9 juta ekor dan kerapu 3 juta ekor dengan nilai sekitar Rp 420 miliar.

Dengan fakta ketiga lapangan usaha tersebut mendominasi mata pencaharian masyarakat Situbondo maka Pemerintah merangkai konsep kolaborasi 3 sektor tersebut



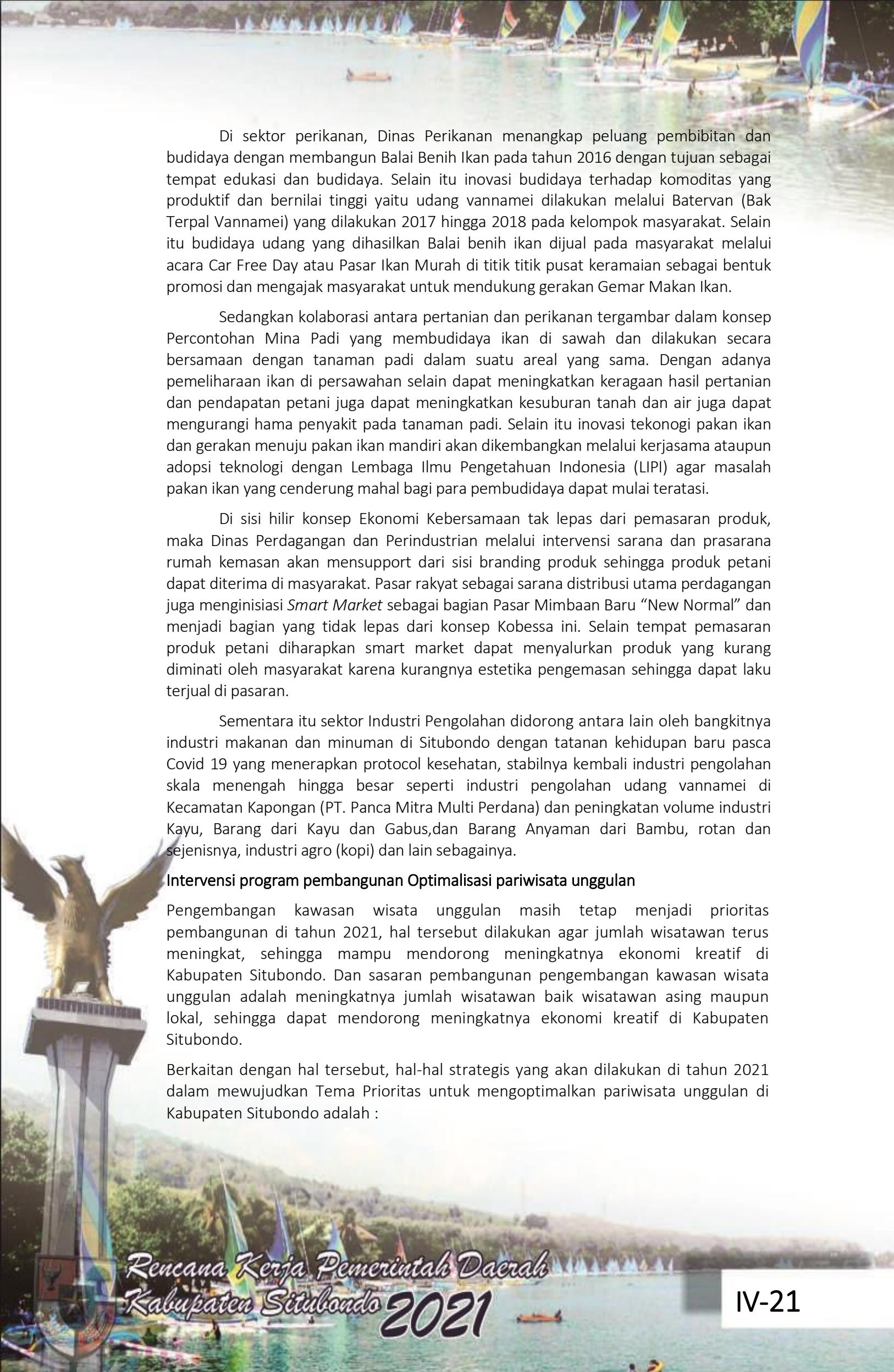
untuk saling sinergi melalui Ekonomi Kebersamaan (**KOBESSA**). Ekonomi kebersamaan merupakan konsep *economic trading community* atau ekonomi perdagangan yang berbasis pada komunitas, cq. komunitas petani secara umum (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan).

Prinsip Ekonomi Kebersamaan mewadahi dan memfasilitasi potensi terbesar ekonomi masyarakat Situbondo yang agraris agar terbentuk sistem yang saling terkait (terintegrasi) untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan berkualitas, melakukan pengelolaan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah secara ekonomi, membentuk dan membangun pasar secara tetap dan berkelanjutan karena dengan siklus kebersamaan akan dapat mengukur berapa besar produktivitas, serta dapat melakukan efisiensi untuk menurunkan HPP (harga pokok produksi) dengan cara mensubstitusi bahan-bahan yang dibeli dari pabrikan dengan cara memanfaatkan limbah dan turunannya. Misal limbah pertanian berupa jerami akan diolah menjadi bahan pakan ternak, dan limbah kotoran ternak (padat dan cair) digunakan sebagai pupuk organik dan agen hayati maupun media tumbuh kembangnya mikroba untuk penyuburan lahan. Selain itu alat mesin pertanian seperti traktor, hand traktor, transplanter yang telah tersedia di kelompok tani apabila dimanfaatkan secara benar dan optimal dalam sebuah kawasan penyuburan lahan pertanian dalam satu hamparan dengan luasan ratusan hektar akan menghemat biaya pengelolaan tanah. Hal sama pun akan terjadi pada pengendalian hama dan penyakit yang juga akan memakan biaya yang efisien bila dikerjakan dalam satu hamparan yang luas.

Esensi ekonomi kebersamaan secara garis besar yang alurnya disampaikan tersebut di atas tentu akan mengurangi resiko kegagalan karena dibangun berdasarkan azas kebersamaan kolaboratif antar actor (pemerintah, petani dan swasta) dan tiga sector (pertanian, peternakan dan perikanan). Konsep ini diterapkan pada sector pertanian dimulai dengan gerakan massif menjalankan SOP kesuburan lahan sawah yang mana selama ini diindikasikan mengalami penurunan karena kandungan bahan organic < 2% dan produktifitas padi dibawah 6 ton/ha. Selama 3 tahun terakhir luas penyuburan lahan mencapai 662 ha dengan target di tahun 2020 ini terjadi penambahan seluas 4.000 ha dan tahun 2021 seluas 5.000 ha pula dengan target jangka panjangnya adalah penyuburan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Situbondo yang ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2017. Dalam rangka mengawal target kesuburan lahan ini maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendesain sistem sekolah lapang yang beriringan dengan dem area maupun demplot kesuburan lahan di tingkat kelompok tani dengan didukung seluruh jajaran penyuluhan ASN maupun penyuluhan swadaya.



Terlebih lagi di tengah pandemi COVID 19 di tahun 2020 hasil produksi pertanian nasional diprediksi bakal berkurang. Bahkan jika tidak ada penanganan yang baik, dalam era pandemi corona ini akan terjadi krisis pangan di level daerah. Sehingga untuk mengantisipasi agar itu tidak terjadi, sejak tahun 2020 Kabupaten Situbondo mulai mengembangkan tanaman jenis sorgum (sejenis gandum) di lahan tandus Situbondo dan akan terus dikembangkan di tahun 2021 dan diharapkan dengan pengolahan yang tepat sorgum dapat menjadi alternative pengganti beras dan jagung selain dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak untuk mendukung ketahanan pangan di Situbondo.



Di sektor perikanan, Dinas Perikanan menangkap peluang pembibitan dan budidaya dengan membangun Balai Benih Ikan pada tahun 2016 dengan tujuan sebagai tempat edukasi dan budidaya. Selain itu inovasi budidaya terhadap komoditas yang produktif dan bernilai tinggi yaitu udang vannamei dilakukan melalui Batervan (Bak Terpal Vannamei) yang dilakukan 2017 hingga 2018 pada kelompok masyarakat. Selain itu budidaya udang yang dihasilkan Balai benih ikan dijual pada masyarakat melalui acara Car Free Day atau Pasar Ikan Murah di titik titik pusat keramaian sebagai bentuk promosi dan mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan Gemar Makan Ikan.

Sedangkan kolaborasi antara pertanian dan perikanan tergambar dalam konsep Percontohan Mina Padi yang membudidaya ikan di sawah dan dilakukan secara bersamaan dengan tanaman padi dalam suatu areal yang sama. Dengan adanya pemeliharaan ikan di persawahan selain dapat meningkatkan keragaan hasil pertanian dan pendapatan petani juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan air juga dapat mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Selain itu inovasi tekonogi pakan ikan dan gerakan menuju pakan ikan mandiri akan dikembangkan melalui kerjasama ataupun adopsi teknologi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) agar masalah pakan ikan yang cenderung mahal bagi para pembudidaya dapat mulai teratasi.

Di sisi hilir konsep Ekonomi Kebersamaan tak lepas dari pemasaran produk, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui intervensi sarana dan prasarana rumah kemasan akan mensupport dari sisi branding produk sehingga produk petani dapat diterima di masyarakat. Pasar rakyat sebagai sarana distribusi utama perdagangan juga menginisiasi *Smart Market* sebagai bagian Pasar Mimbaan Baru “New Normal” dan menjadi bagian yang tidak lepas dari konsep Kobessa ini. Selain tempat pemasaran produk petani diharapkan smart market dapat menyalurkan produk yang kurang diminati oleh masyarakat karena kurangnya estetika pengemasan sehingga dapat laku terjual di pasaran.

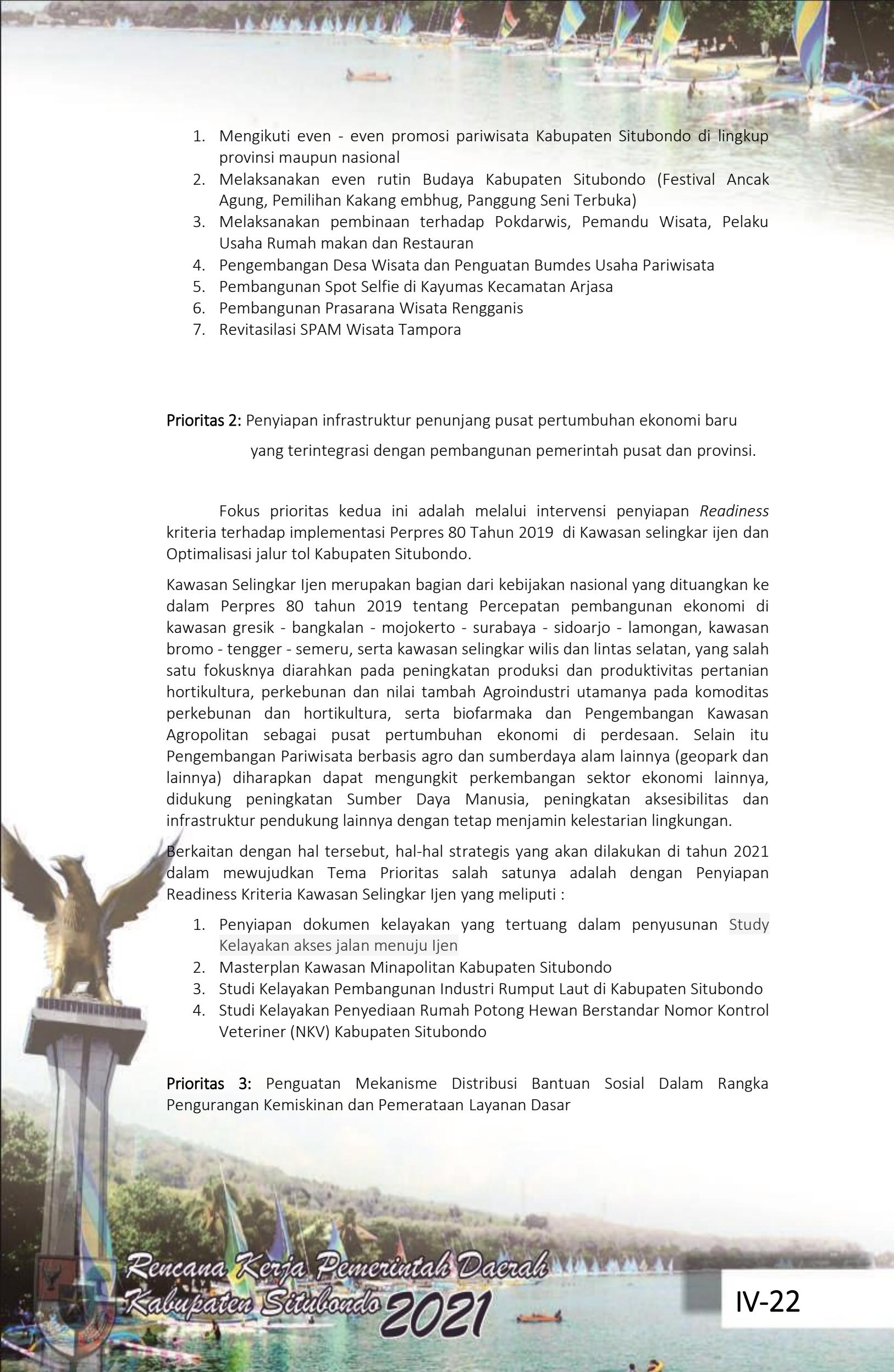
Sementara itu sektor Industri Pengolahan didorong antara lain oleh bangkitnya industri makanan dan minuman di Situbondo dengan tatanan kehidupan baru pasca Covid 19 yang menerapkan protocol kesehatan, stabilnya kembali industri pengolahan skala menengah hingga besar seperti industri pengolahan udang vannamei di Kecamatan Kapongan (PT. Panca Mitra Multi Perdana) dan peningkatan volume industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan dan sejenisnya, industri agro (kopi) dan lain sebagainya.

Intervensi program pembangunan Optimalisasi pariwisata unggulan



Pengembangan kawasan wisata unggulan masih tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021, hal tersebut dilakukan agar jumlah wisatawan terus meningkat, sehingga mampu mendorong meningkatnya ekonomi kreatif di Kabupaten Situbondo. Dan sasaran pembangunan pengembangan kawasan wisata unggulan adalah meningkatnya jumlah wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal, sehingga dapat mendorong meningkatnya ekonomi kreatif di Kabupaten Situbondo.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal strategis yang akan dilakukan di tahun 2021 dalam mewujudkan Tema Prioritas untuk mengoptimalkan pariwisata unggulan di Kabupaten Situbondo adalah :

- 
1. Mengikuti even - even promosi pariwisata Kabupaten Situbondo di lingkup provinsi maupun nasional
 2. Melaksanakan even rutin Budaya Kabupaten Situbondo (Festival Ancak Agung, Pemilihan Kakang embhug, Panggung Seni Terbuka)
 3. Melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis, Pemandu Wisata, Pelaku Usaha Rumah makan dan Restauran
 4. Pengembangan Desa Wisata dan Penguatan Bumdes Usaha Pariwisata
 5. Pembangunan Spot Selfie di Kayumas Kecamatan Arjasa
 6. Pembangunan Prasarana Wisata Rengganis
 7. Revitalisasi SPAM Wisata Tampora

Prioritas 2: Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.

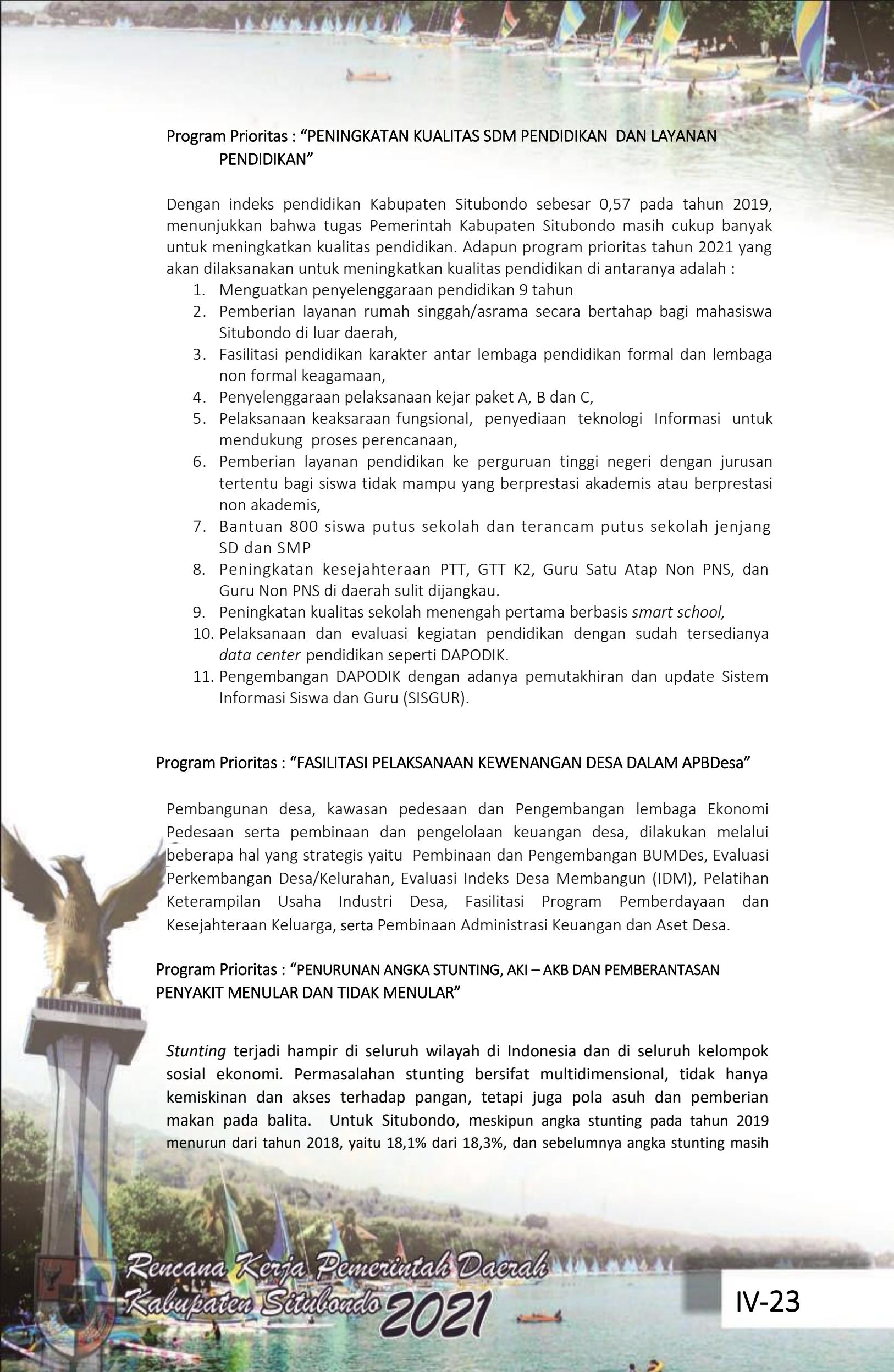
Fokus prioritas kedua ini adalah melalui intervensi penyiapan *Readiness* kriteria terhadap implementasi Perpres 80 Tahun 2019 di Kawasan selingkar ijen dan Optimalisasi jalur tol Kabupaten Situbondo.

Kawasan Selingkar Ijen merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dituangkan ke dalam Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan gresik - bangkalan - mojokerto - surabaya - sidoarjo - lamongan, kawasan bromo - tengger - semeru, serta kawasan selingkar wilis dan lintas selatan, yang salah satu fokusnya diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal strategis yang akan dilakukan di tahun 2021 dalam mewujudkan Tema Prioritas salah satunya adalah dengan Penyiapan *Readiness* Kriteria Kawasan Selingkar Ijen yang meliputi :

- 
1. Penyiapan dokumen kelayakan yang tertuang dalam penyusunan Study Kelayakan akses jalan menuju Ijen
 2. Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Situbondo
 3. Studi Kelayakan Pembangunan Industri Rumput Laut di Kabupaten Situbondo
 4. Studi Kelayakan Penyediaan Rumah Potong Hewan Berstandar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Kabupaten Situbondo

Prioritas 3: Penguatan Mekanisme Distribusi Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan dan Pemerataan Layanan Dasar



Program Prioritas : "PENINGKATAN KUALITAS SDM PENDIDIKAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN"

Dengan indeks pendidikan Kabupaten Situbondo sebesar 0,57 pada tahun 2019, menunjukkan bahwa tugas Pemerintah Kabupaten Situbondo masih cukup banyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun program prioritas tahun 2021 yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antaranya adalah :

1. Menguatkan penyelenggaraan pendidikan 9 tahun
2. Pemberian layanan rumah singgah/asrama secara bertahap bagi mahasiswa Situbondo di luar daerah,
3. Fasilitasi pendidikan karakter antar lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal keagamaan,
4. Penyelenggaraan pelaksanaan kejar paket A, B dan C,
5. Pelaksanaan keaksaraan fungsional, penyediaan teknologi Informasi untuk mendukung proses perencanaan,
6. Pemberian layanan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan tertentu bagi siswa tidak mampu yang berprestasi akademis atau berprestasi non akademis,
7. Bantuan 800 siswa putus sekolah dan terancam putus sekolah jenjang SD dan SMP
8. Peningkatan kesejahteraan PTT, GTT K2, Guru Satu Atap Non PNS, dan Guru Non PNS di daerah sulit dijangkau.
9. Peningkatan kualitas sekolah menengah pertama berbasis *smart school*,
10. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dengan sudah tersedianya *data center* pendidikan seperti DAPODIK.
11. Pengembangan DAPODIK dengan adanya pemutakhiran dan update Sistem Informasi Siswa dan Guru (SISGUR).

Program Prioritas : "FASILITASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM APBDesa"

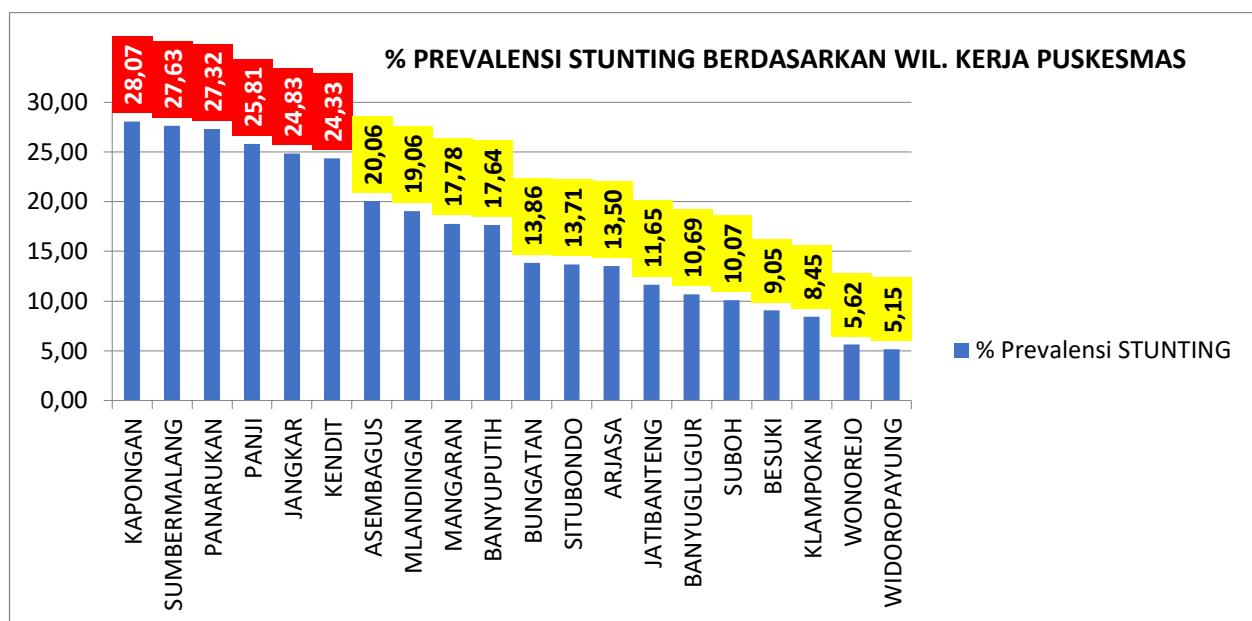


Pembangunan desa, kawasan pedesaan dan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan serta pembinaan dan pengelolaan keuangan desa, dilakukan melalui beberapa hal yang strategis yaitu Pembinaan dan Pengembangan BUMDes, Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, Evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM), Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Desa, Fasilitasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Desa.

Program Prioritas : "PENURUNAN ANGKA STUNTING, AKI – AKB DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR"

Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Permasalahan stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita. Untuk Situbondo, meskipun angka stunting pada tahun 2019 menurun dari tahun 2018, yaitu 18,1% dari 18,3%, dan sebelumnya angka stunting masih

cukup tinggi, yaitu tahun 2016 sebesar 23%, dan tahun 2017 sebesar 26%, menunjukkan bahwa stunting masih merupakan prioritas pembangunan di bidang kesehatan. Dari grafik dibawah dapat terlihat bahwa lokasi utama untuk prioritas tahun 2021 ada pada wilayah kerja Puskesmas Kapongan, Sumbermalang, Panarukan, Panji, Jangkar dan Kendit. Meskipun begitu wilayah yang lain tetap menjadi fokus perhatian penanganan stunting.



Gambar 4.9 : Prevalensi Stunting Berdasarkan Wilayah kerja PUSKESMAS

Rencana aksi penekanan intervensi pada 1000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan) untuk penurunan AKI, AKB DAN STUNTING pada tahun 2021 sesuai penerapan new normal :

1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak:
Peningkatan fasilitas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, ketersediaan rumah tunggu kelahiran, penguatan program 1000 HPK, antenatal care oleh tenaga kesehatan sesuai new normal
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan:
Penempatan dokter spesialis (obgin, anak, penyakit dalam, anestesi, bedah), ketersediaan Unit Transfusi Darah/Bank Darah RS, antenatal terpadu , persalinan, postnatal sesuai standar, pemantauan tumbuh kembang
3. Pemberdayaan Masyarakat:
Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak, Kelas ibu hamil dan ibu balita, Posyandu, pemanfaatan dana desa, peran PKK dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah)
4. Penguatan Tata Kelola:
Penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas, pelacakan-pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi, pemantauan implementasi regulasi

Kontribusi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga dalam penurunan AKI, AKB, Stunting, sangat berperan dalam pengendalian COVID 19 dan new normal, dan akan berdampak pada upaya mewujudkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), kabupaten sehat, pangan sehat, tempat fasilitas umum sehat, sekolah sehat, pasar sehat, dan pengelolaan limbah B3 yang lebih baik menghadapi perubahan iklim.

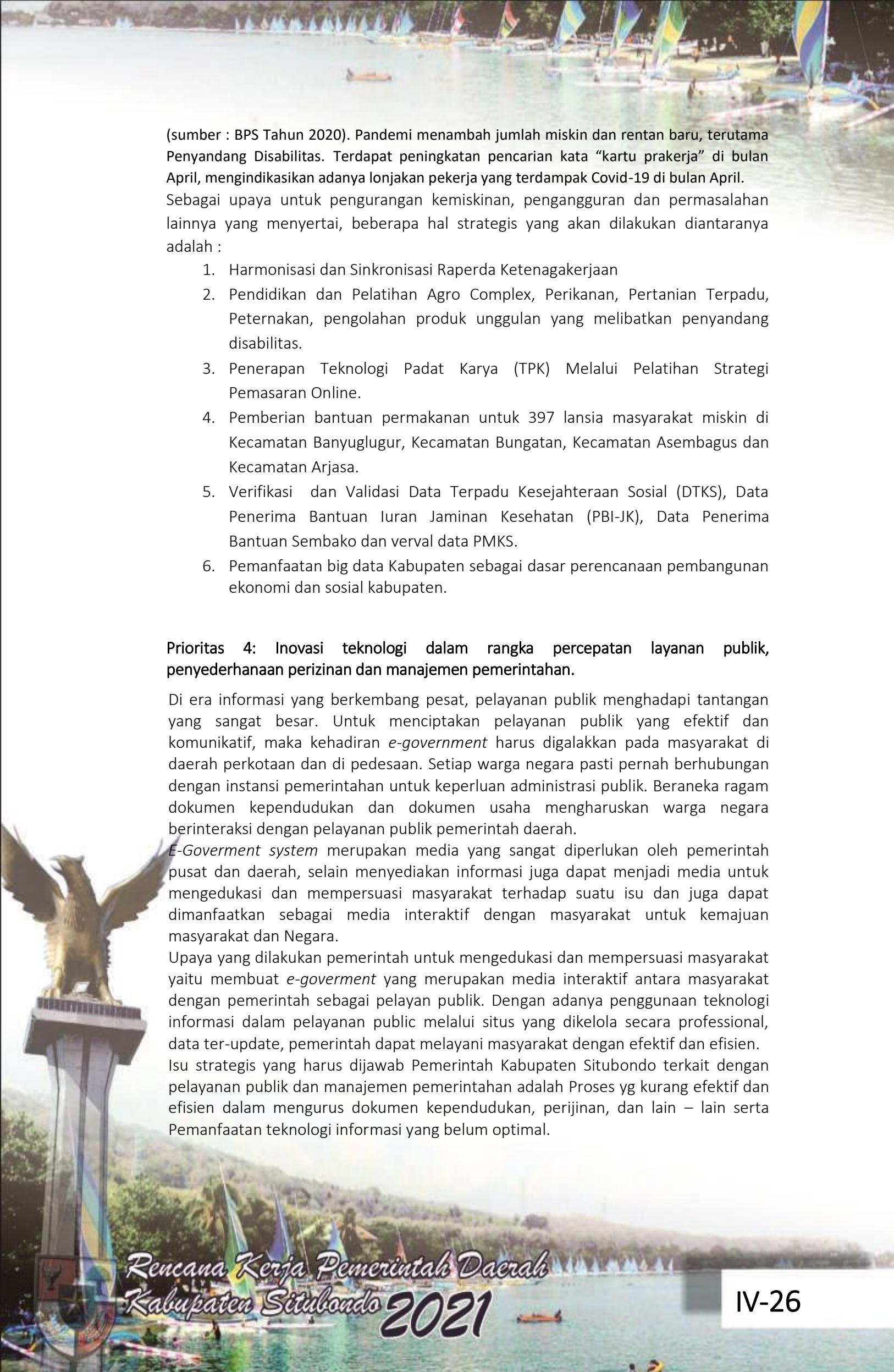
Program Prioritas : PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID, serta PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Sebagai upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular, serta peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada tahun 2021 dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Sistem Kewaspadaan Dini : diharapkan adanya Laporan KLB 1 x24 jam, Surveilans Berbasis masyarakat tercapai dan menurunnya Angka kecacatan dan kematian kasus KLB.
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dalam rangka pencegahan covid-19 : diharapkan adanya penemuan suspek TB sesuai target masing masing puskesmas
3. Peningkatan Imunitas Petugas dan Penderita TB terhadap covid-19 : diharapkan adanya Peningkatan Angka Kesembuhan Penderita TB, dan Peningkatan Kinerja Petugas Laboratorium TB.
4. Pemenuhan layanan TB : diharapkan adanya peningkatan Kinerja Petugas Laboratorium TB
5. Pengawasan pasien mangkir minum obat pencegahan covid-19 : diharapkan angka kesembuhan meningkat
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS, Hepatitis dan Infeksi Menular Seksual dalam rangka pencegahan covid-19 : diharapkan skrining kasus HIV AIDS, Hepatitis dan IMS bagi Ibu hamil dan kasus HIV AIDS bagi penderita TB.
7. Pemenuhan Masker N95 untuk petugas
8. Pemenuhan logistik APD dan Bahan Habis Pakai untuk pelaksanaan Mobile VCT : diharapkan sebagai upaya pencegahan Penularan Penyakit HIV AIDS bagi petugas.
9. Penanganan dan Pengendalian Penyakit Degeneratif , diharapkan :
 - a. Adanya hasil deteksi dini faktor risiko PTM pada usia produktif sesuai dengan target SPM bidang kesehatan.
 - b. Adanya penanganan pada penderita PTM sesuai standart.
 - c. Adanya peta penderita penyakit PTM di masyarakat, yang merupakan kelompok risiko tinggi terkait infeksi Covid 19

Program Prioritas : "PEMBERIAN BANTUAN PENDUDUK MISKIN"

Pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi para pekerja informal, termasuk Penyandang Disabilitas dan angkatan kerja perempuan, yang turun sebesar 0,94 persen poin pada periode Februari 2019-2020



(sumber : BPS Tahun 2020). Pandemi menambah jumlah miskin dan rentan baru, terutama Penyandang Disabilitas. Terdapat peningkatan pencarian kata “kartu prakerja” di bulan April, mengindikasikan adanya lonjakan pekerja yang terdampak Covid-19 di bulan April. Sebagai upaya untuk pengurangan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan lainnya yang menyertai, beberapa hal strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah :

1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda Ketenagakerjaan
2. Pendidikan dan Pelatihan Agro Complex, Perikanan, Pertanian Terpadu, Peternakan, pengolahan produk unggulan yang melibatkan penyandang disabilitas.
3. Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK) Melalui Pelatihan Strategi Pemasaran Online.
4. Pemberian bantuan permakanan untuk 397 lansia masyarakat miskin di Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Arjasa.
5. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Data Penerima Bantuan Sembako dan verval data PMKS.
6. Pemanfaatan big data Kabupaten sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial kabupaten.

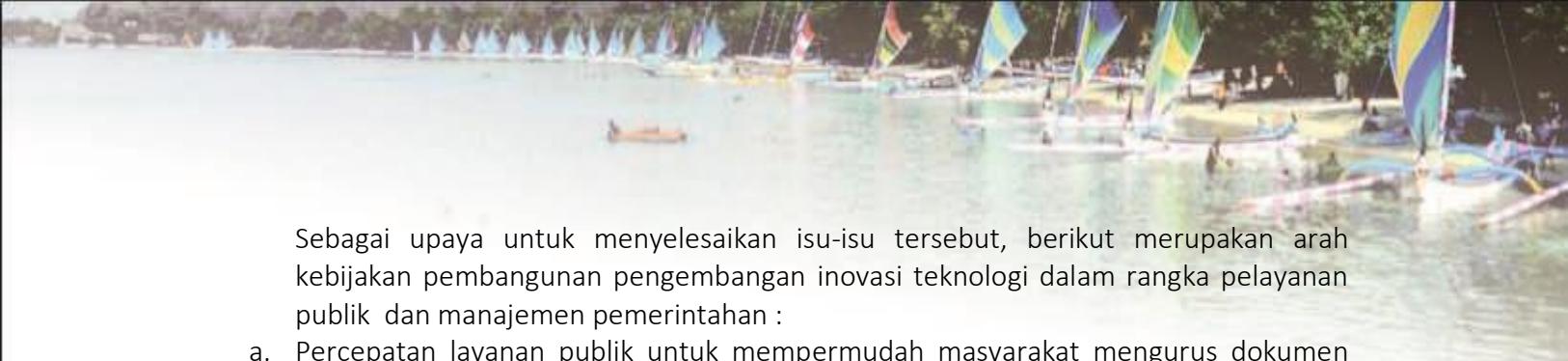
Prioritas 4: Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan.



Di era informasi yang berkembang pesat, pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar. Untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan komunikatif, maka kehadiran *e-government* harus digalakkan pada masyarakat di daerah perkotaan dan di pedesaan. Setiap warga negara pasti pernah berhubungan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Beraneka ragam dokumen kependudukan dan dokumen usaha mengharuskan warga negara berinteraksi dengan pelayanan publik pemerintah daerah.

E-Goverment system merupakan media yang sangat diperlukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain menyediakan informasi juga dapat menjadi media untuk mengedukasi dan mempersuasi masyarakat terhadap suatu isu dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media interaktif dengan masyarakat untuk kemajuan masyarakat dan Negara.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengedukasi dan mempersuasi masyarakat yaitu membuat *e-goverment* yang merupakan media interaktif antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public melalui situs yang dikelola secara profesional, data ter-update, pemerintah dapat melayani masyarakat dengan efektif dan efisien. Isu strategis yang harus dijawab Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan adalah Proses yg kurang efektif dan efisien dalam mengurus dokumen kependudukan, perijinan, dan lain – lain serta Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.



Sebagai upaya untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, berikut merupakan arah kebijakan pembangunan pengembangan inovasi teknologi dalam rangka pelayanan publik dan manajemen pemerintahan :

- a. Percepatan layanan publik untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan dengan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di setiap Kecamatan;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perijinan terpadu, pengoptimalan PAD, pengaduan masyarakat serta publikasi data pembangunan;
- c. Reformasi birokrasi Kabupaten Situbondo menuju Zona Integritas WBK / WBBM melalui *e-government*

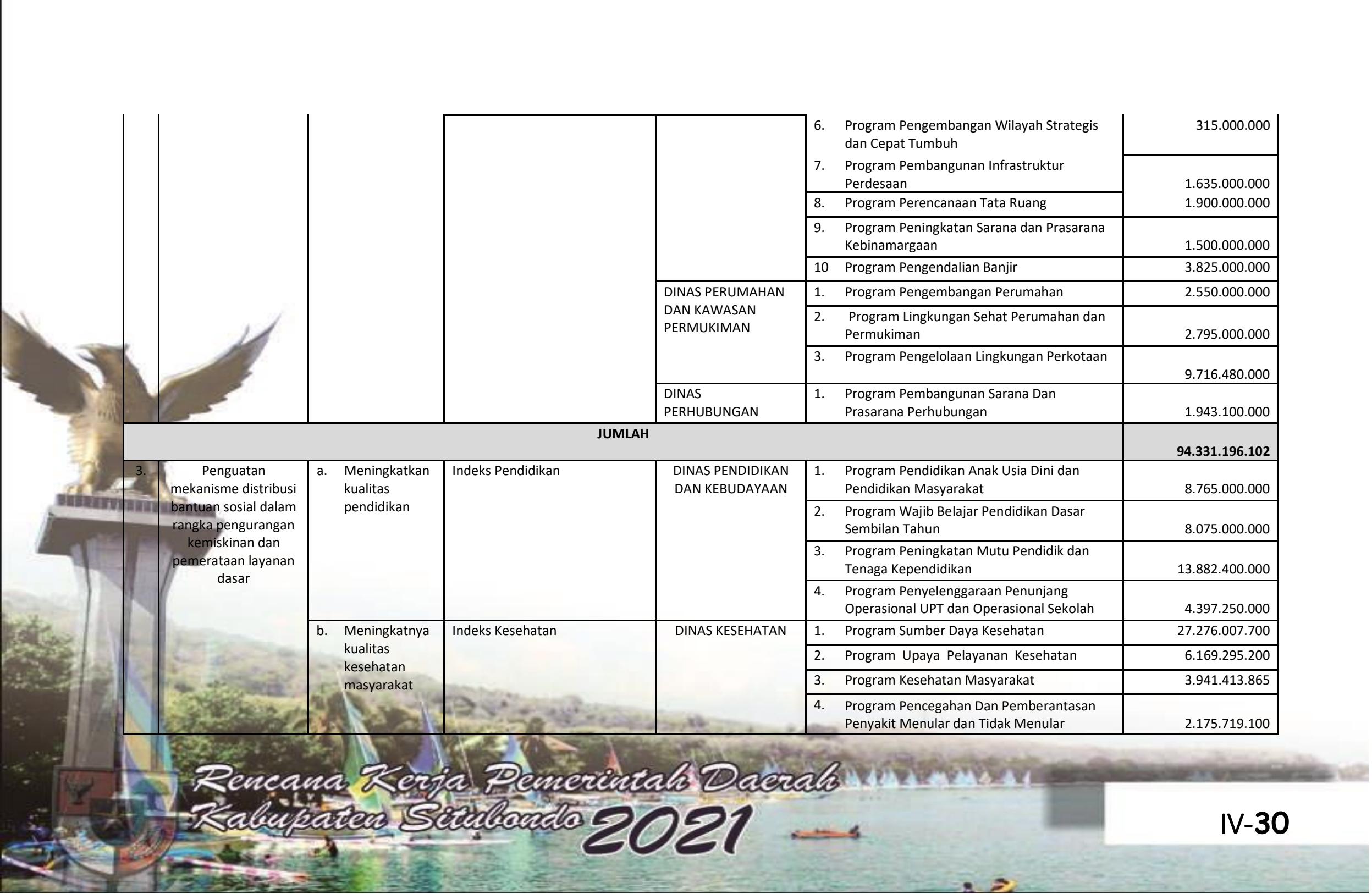
Berikut merupakan gambaran umum linieritas prioritas pembangunan kabupaten Situbondo Tahun 2021 dengan program perangkat daerah beserta anggaran tahun 2021



*TABEL 4.5 : linieritas prioritas pembangunan kabupaten Situbondo Tahun 2021
dengan program perangkat daerah beserta anggaran tahun 2021*

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RKPD 2021)
1	2	3	4	4	5	6
1	Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan berbasis kolaboratif antar aktor dan sektor	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	11.521.628.244
					2. Program Peningkatan Produksi Holtikultura	1.017.500.000
					3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	350.000.000
					4. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.490.000.000
					5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	6.325.493.219
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.947.903.400
					2. Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan	481.758.700
					3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	6.456.580.700
				DINAS PERIKANAN	1. Program pengembangan budidaya perikanan	5.060.000.000
					2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir	4.075.000.000
					3. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Serta Pengendalian Sumberdaya Perairan	986.000.000
			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	DINAS PERDAGANGAN DAN	1. Program Pengembangan Perindustrian	2.015.000.000
					2. Program Pembinaan Lingkungan Industri	60.000.000

			PERINDUSTRIAN	3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.140.000.000
		Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	DINAS PARIWISATA	1. Program Pengembangan dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	13.810.317.500
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2. Program Pengembangan Nilai Budaya	1.965.000.000
	b. Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	1. Program Pelayanan Perijinan Terpadu	385.000.000
				2. Program Peningkatan Iklim, Realisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi	550.000.000
				3. Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi, dan Mengintesifkan, Penanganan Pengaduan Masyarakat	221.783.500
				JUMLAH	59.858.965.263
2.	Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi	a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.182.500.000
					2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4.956.500.000
					3. Program Tata Lingkungan dan Akses Informasi Lingkungan Hidup 550.000.000
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 7.747.987.102
					2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8.149.250.000
					3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 16.847.465.000
					4. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 11.502.914.000
					5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 11.215.000.000



					6. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	315.000.000
					7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1.635.000.000
					8. Program Perencanaan Tata Ruang	1.900.000.000
					9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.500.000.000
					10. Program Pengendalian Banjir	3.825.000.000
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Program Pengembangan Perumahan	2.550.000.000
					2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	2.795.000.000
					3. Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	9.716.480.000
				DINAS PERHUBUNGAN	1. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	1.943.100.000
					JUMLAH	94.331.196.102
3.	Penguatan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pemerataan layanan dasar	a. Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	8.765.000.000
					2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	8.075.000.000
					3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.882.400.000
					4. Program Penyelenggaraan Penunjang Operasional UPT dan Operasional Sekolah	4.397.250.000
		b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	DINAS KESEHATAN	1. Program Sumber Daya Kesehatan	27.276.007.700
					2. Program Upaya Pelayanan Kesehatan	6.169.295.200
					3. Program Kesehatan Masyarakat	3.941.413.865
					4. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.175.719.100

					5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada UPT (Puskesmas, GFK dan Labkesda)	48.073.543.926
					6. Program Pelayanan Rumah Sakit	239.609.223.945
	c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Maju	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Program Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	895.250.000	
	d. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase penurunan PMKS	DINAS SOSIAL	2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	910.000.000	
				3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.160.302.861	
				1. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	930.000.000	
				2. Program Penguatan Kelembagaan Sosial	700.000.000	
				3. Program Perlindungan Jaminan Sosial	3.292.000.000	
				JUMLAH		370.252.406.597
4	Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	38.094.500
					2. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	214.327.300
					3. Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	555.138.900
					4. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	316.647.500
		b. Meningkatnya akuntabilitas	Kategori Evaluasi LPPD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.165.020.000
					2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	366.075.000
				SEKRETARIAT DAERAH	1. Program Pelaksanaan Pemerintahan dan Kerjasama Daerah	1.100.000.000

	kinerja	Capaian Nilai SAKIP	SEKRETARIAT DAERAH	1. Program Penguatan Reformasi Birokrasi	1.800.000.000
			BAPPEDA	1. Program Perencanaan Pembangunan daerah	1.990.602.500
		c. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset	BPPKAD	1. Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.494.544.750
			INSPEKTORAT	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	2.270.750.700
JUMLAH				11.311.201.150	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program Pembangunan Tahun 2021

Kerangka pendanaan RPJMD tahun rencana disesuaikan kembali dalam RKPD tahun 2021. Antara lain karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dalam RKPD tahun 2021 dengan RPJMD tahun rencana. Menjelang masa berakhirnya tahun rencana dalam RPJMD, berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa program yang perlu didorong pencapaiannya, sehingga alokasi anggarannya juga disesuaikan. Selain itu alokasi sumber dana dalam RKPD tahun 2021 ini tidak hanya memperhitungkan kemampuan dana APBD sebagaimana dalam RPJMD, tetapi sudah memperhitungkan dana dari APBN ataupun APBD Provinsi Sebagaimana terdapat pada lampiran Tabel Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 (Terlampir).

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo secara teknis dapat melihat 2 indikator di level *impact* yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator kinerja tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran. Baik IKU maupun IKD merupakan hasil akumulatif dari kinerja masing-masing perangkat daerah, baik di level *output* maupun *outcome*. Sehingga melalui IKU dan IKD keberhasilan pemerintah daerah dapat direpresentasikan melalui ketercapaian masing-masing kinerja tersebut. Sebagai upaya untuk mengawal tercapainya Visi Kabupaten Situbondo tahun 2021, maka penting kiranya target IKU maupun IKD dapat progresif khususnya di RKPD tahun 2021. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:



Tabel 6. 1:Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Situbondo

No.	Indikator	Capaian					Target
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,08	65,68	66,42	67,09	70,58	71,76
2	Persentase Kemiskinan	13,34	13,05	11,82	11,20	9,16	8,5
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,07	5,43	5,45	6,18	5,2
4	Indeks Gini Ratio	0,35	0,33	0,32	0,32	0,266	0,262
5	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	65,91	61,76	63,00	73,41	75,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Situbondo & LKpj Kab. Situbondo 2019

Sedangkan Berikut merupakan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo hingga tahun 2021 beserta realisasi kinerja tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 6. 2: Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Situbondo hingga tahun 2021

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	2016		2017		2018		2019		TARGET KINERJA (K)		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2020	2021 (*)		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>												
Pertumbuhan Ekonomi	5,38	5,00	5,58	5,07	5,78	5,43	5,98	5,45	6,18	5,2	6,38	
PDRB Perkapita	23,3	24,18	25,02	25,93	26,74	27,84	28,46	29,61	30,18	29,61	31,90	
Indeks Gini Ratio	0,282	0,35	0,278	0,33	0,274	0,32	0,270	0,32	0,266	0,262	0,262	
Persentase Penduduk Miskin	11,77	13,34	11,12	13,05	10,46	11,82	9,81	11,20	9,16	8,5	8,5	
Indeks Pembangunan Manusia	66,06	65,08	67,16	65,68	68,28	66,42	69,42	67,09	70,58	71,76	71,76	
Indeks Kepuasan Masyarakat	B (72)	B (76.13)	B (74)	B (80.46)	B (76)	71,5 (B)	B (78)	B (80,25)	B (80)	A (82)	A (81.26)	
Indeks Reformasi Birokrasi	-	n/a	-	65,91	68,41	61,76	70,91	63,00	73,41	65,48	75,91	
<i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>												
1. Pendidikan												
Indeks Pendidikan	-	0,55	-	0,56	0,57	0,57	0,58	0,57	0,59	0,58	0,6	
2. Kesehatan												
Indeks Kesehatan	-	0,75	-	0,75	0,76	0,75	0,76	0,75	0,77	0,73	0,77	
3. Ketenagakerjaan												
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32%	3,43%	3,17%	1,49%	2,31%	1,92%	2,06%	2,82%	1,82%	3,12%	1,49%	
ASPEK PELAYANAN UMUM												

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan											
1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	n/a	-	B (77,3)	B (78)	B (81,07)	B (79)	81,58	B (80)	B (81)	B (81)
2. Sosial											
Persentase Penurunan PMKS	-	0,52	-	1,70	0,99	3,56	1,04	11,00	1,08	1,12	1,12
Fokus Layanan Wajib Non Dasar											
3. Lingkungan Hidup											
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71	71,39	71,5	71,73	72	72,06	72,5	72,53	73	72,53	73,5
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
Jumlah Desa Maju	-	12 desa	-	15 desa	31 desa	31 desa	46 desa	29 desa	64 desa	80 desa	83 desa
5. Penanaman Modal											
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	350 M	-	385 M	423,5 M	781,5M	465,85 M	856,37 M	512,435 M	563,6785 M	563,6785 M
Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1. Pariwisata											
Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	-	8,78%	-	9,02%	9,27%	8,37%	9,51%	7,42%	9,76%	7,42%	10,01%
2. Pertanian											



Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	-	2,64%	-	0,95%	0,91%	0,40%	1,01%	1,58%	3,12%	3,22%	3,22%
3. Perdagangan											
Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	-	8,47%	-	9,45%	10,16%	7,91%	10,86%	7,09%	11,57%	7,5%	12,28%
4. Perindustrian											
Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	-	7,89%	-	8,25%	8,61%	10,35 %	8,97%	9,35%	9,34%	8,5%	9,70%
Fokus Layanan Urusan Penunjang											
1. Keuangan											
Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	n/a	WTP	WTP	WTP						
2. Sekretariat Daerah											
Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Sangat Tinggi										
Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	B	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	A	A
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
Otonomi daerah,											
Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)	-	9.106	-	9.178	9.452	9.692	9.689	10.097	9.927,56	10.097	10.165,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Situbondo & LKPJ Kab. Situbondo 2019

*) Angka target Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Tahun Anggaran 2021.

Dokumen RKPD Tahun 2021 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat kabupaten (Musrenbang Kabupaten) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021, dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO